

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH**  
KABUPATEN SIDOARJO Tahun 2021 - 2026



PEMERINTAH  
KABUPATEN SIDOARJO





**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286));  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
  21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
  30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
  31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 63);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
dan  
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sidoarjo untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
16. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
17. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan tercapainya tujuan.
18. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan :
  - a. Visi dan Misi, Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan
  - b. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan, dan Program Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan :
  - a. RPJMD Provinsi Jawa Timur;
  - b. RTRW; dan
  - c. RPJMD Kabupaten/ Kota sekitar.

## Pasal 3

- (1) Penetapan RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran.
- (2) Penetapan RPJMD mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten serta dengan kabupaten/kota yang berbatasan.

BAB III  
SISTEMATIKA RPJMD

## Pasal 4

- (1) Sistematika RPJMD meliputi:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
  - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
  - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;
  - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
  - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - i. BAB IX : Penutup.
- (2) Isi beserta uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

## Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
  - b. pelaksanaan RPJMD; dan
  - c. hasil RPJMD.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RPJMD sesuai kewenangan.

BAB V  
PERUBAHAN RPJMD

## Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.



- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan target kinerja tahunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penyusunan perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 7

- (1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati terpilih berikutnya.
- (3) Apabila terjadi perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, maka penanggung jawab Penyelenggaraan urusan Pemerintahan menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 26 Agustus 2021



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 1 SERI D

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 130-2/2021

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo untuk periode 5 tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan RPJMD ini sebagai penjabaran dari visi, program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikator indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJM Nasional, dan RTRW dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur. RPJMD digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen penyusunan dokumen penganggaran dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 109



# LAMPPIRAN



# Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>vii</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Bab I      Pendahuluan</b> .....	<b>I-1</b>
1.1      Latar Belakang .....	I-1
1.2      Dasar Hukum Penyusunan .....	I-3
1.3      Hubungan Antar Dokumen .....	I-11
1.3.1    Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 .....	I-11
1.3.2    Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025 .....	I-14
1.3.3    Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Jawa Timur Tahun 2019-2024 .....	I-23
1.3.4    Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dengan RTRWN Tahun 2020-2024 .....	I-25
1.3.5    Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 dengan RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 .....	I-27
1.3.6    Hubungan antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 .....	I-30
1.3.7    Keselarasan antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) .....	I-39
1.4      Maksud dan Tujuan .....	I-48
1.4.1    Maksud .....	I-48
1.4.2    Tujuan .....	I-48
1.5      Sistematika Penulisan .....	I-50



<b>BAB II</b>	<b>Gambaran Umum Kondisi Isi Daerah .....</b>	<b>II-1</b>
2.1	Aspek Geografi dan Demografi .....	II-1
2.1.1	Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....	II-1
2.1.2	Topografi .....	II-3
2.1.3	Geologi .....	II-4
2.1.4	Klimatologi .....	II-8
2.1.5	Hidrologi .....	II-11
2.1.6	Penggunaan Lahan .....	II-12
2.1.7	Potensi Pariwisata .....	II-13
2.1.8	Daerah Rawan Bencana .....	II-14
2.1.9	Kondisi Demografi .....	II-23
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-27
2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	II-27
2.2.1.1	Pertumbuhan Ekonomi .....	II-27
2.2.1.2	Laju Inflasi .....	II-29
2.2.1.3	PDRB Per Kapita .....	II-30
2.2.1.4	Persentase Penduduk Miskin .....	II-32
2.2.1.5	Indeks Gini .....	II-34
2.2.1.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	II-35
2.2.1.7	Tingkat Penagngguran Terbuka (TPT) .....	II-38
2.2.1.8	Indeks Kesalehan Sosial .....	II-39
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial .....	II-40
2.2.2.1	Pendidikan .....	II-40
2.2.2.3	Kesehatan .....	II-42
2.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga .....	II-42
2.3	Aspek Pelayanan Umum .....	II-45
2.3.1	Layanan Urusan Wajib Dasar .....	II-45
2.3.1.1	Pendidikan .....	II-45
2.3.1.2	Kesehatan .....	II-48
2.3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	II-59
2.3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman .....	II-67



2.3.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat .....	II-73
2.3.1.6	Sosial .....	II-75
2.3.2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar .....	II-81
2.3.2.1	Tenaga Kerja .....	II-81
2.3.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	II-84
2.3.2.3	Pangan .....	II-92
2.3.2.4	Lingkungan Hidup .....	II-96
2.3.2.5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	II-102
2.3.2.6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	II-103
2.3.2.7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	II-105
2.3.2.8	Perhubungan .....	II-106
2.3.2.9	Komunikasi dan Informatika .....	II-108
2.3.2.10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	II-109
2.3.2.11	Penanaman Modal .....	II-114
2.3.2.12	Kepemudaan dan Olahraga .....	II-115
2.3.2.13	Statistik .....	II-117
2.3.2.14	Kebudayaan .....	II-118
2.3.2.15	Perpustakaan .....	II-119
2.3.2.16	Kearsipan .....	II-119
2.3.3	Layanan Urusan Pilihan .....	II-125
2.3.3.1	Pertanian .....	II-125
2.3.3.2	Perdagangan .....	II-127
2.3.3.3	Perindustrian .....	II-127
2.3.3.4	Kelautan Perikanan .....	II-128
2.3.4	Layanan Penunjang Urusan .....	II-133
2.3.4.1	Perencanaan Pembangunan .....	II-133
2.3.4.2	Keuangan .....	II-135
2.3.4.3	Kepegawaian Serta Pendidika dan Pelatihan .....	II-137
2.3.4.4	Penelitian dan Pengembangan .....	II-138
2.3.4.5	Pengawasan .....	II-139
2.4	Aspek Daya Saing Daerah .....	II-142



2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-142
2.4.2	Fokus Sumber Daya Manusia .....	II-143
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi .....	II-144
<b>Bab III</b>	<b>Gambaran Keuangan Daerah .....</b>	<b>III-1</b>
3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	III-3
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD .....	III-4
3.1.1.1	Kinerja Realisasi Penerimaan Daerah .....	III-4
3.1.1.2	Kinerja Realisasi Pengeluaran Daerah .....	III-10
3.1.1.3	Kinerja Realisasi Pembiayaan Daerah .....	III-15
3.1.2	Neraca Daerah .....	III-18
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .....	III-29
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran .....	III-29
3.2.2	Analisis Pembiayaan .....	III-30
3.3	Kerangka Penadanaan .....	III-32
3.3.1	Proyeksi Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah .....	III-32
3.3.2	Perhitungan Kerangka Pendanaan .....	III-48
<b>Bab IV</b>	<b>Permasalahan dan Isu-isu Strategis .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1.	Permasalahan Pembangunan.....	IV-1
4.2.	Isu-Isu Strategis .....	IV-9
4.2.1.	Penelaahan Isu-Isu Strategis Internasional.....	IV-9
4.2.2	Isu Kebijakan Nasional .....	IV-17
4.2.3.	Isu Strategis Jawa Timur.....	IV-26
4.3.	Isu-Isu Strategis Kabupaten Sidoarjo.....	IV-32
<b>Bab V</b>	<b>Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....</b>	<b>V-1</b>
5.1.	Visi .....	V-2
5.2.	Misi .....	V-5
5.3.	Tujuan dan Sasaran .....	V-10





<b>Bab VI</b>	<b>Strategi, Arah Kebijakan dan program Pembangunan Daerah</b>	<b>VI-1</b>
	.....	<b>VI-1</b>
6.1.	Strategi Pembangunan .....	VI-I
6.1.1	Strategi Umum .....	VI-2
6.1.2	Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran .....	VI-5
6.2	Arah Kebijakan .....	VI-12
6.3	Program Pembangunan Daerah .....	VI-18
<b>Bab VII</b>	<b>Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah</b>	<b>VII-1</b>
	.....	<b>VII-1</b>
7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan .....	VII-1
7.2.	Program Perangkat Daerah .....	VII-4
<b>Bab VIII</b>	<b>Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>	<b>VIII-1</b>
<b>Bab IX</b>	<b>Penutup</b>	<b>IX-1</b>
	.....	<b>IX-1</b>
9.1	Pedoman Transisi .....	IX-1
9.2	Kaidah Pelaksanaan .....	IX-1



## Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Kebijakan RTRW Jawa Timur yang Terkait dengan Pengembangan Kabupaten Sidoarjo .....	I-28
Tabel 1.2.	Kebijakan RTRW Kabupaten Sidoarjo .....	I-31
Tabel 1.3.	Keselarasn Dokumen Perubahan RPJMD dengan Tujuan Pembangaunan Berkelanjutan (TPB) .....	I-40
Tabel 1.4.	Keselarasn Dokumen Perubahan RPJMD Dengan KLHS RPJMD .....	I-47
Tabel 2.1.	Jumlah Desa dan Kelurahan se Kecamatan Sidoarjo .....	II-2
Tabel 2.2.	Tinggi Rata-Rata dari Permukaan Laut Tiap Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo .....	II-3
Tabel 2.3.	Jenis Batuan Tiap Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo .....	II-5
Tabel 2.4.	Lapisan Tanah Tiap Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo .....	II-6
Tabel 2.5.	Statistik Geografi dan Iklim di Sidoarjo .....	II-8
Tabel 2.6.	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2020 .....	II-23
Tabel 2.7.	Jumlah Penduduk Pindah Datang/Keluar Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020 .....	II-24
Tabel 2.8.	Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin (%) Tahun 2020 .....	II-25
Tabel 2.9.	Penduduk Per Kecamatan Menurut Pendidikan Tahun 2020 .....	II-26
Tabel 2.10.	Kualitas Kelembagaan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo .....	II-48
Tabel 2.11.	Persentase Perkembangan kasus Stunting Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2020 .....	II-51
Tabel 2.12.	Lokus Prioritas Penanganan kasus Stunting Kabupaten Sidoarjo 2022 .....	II-51



Tabel 2.13.	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun 2020 .....	II-52
Tabel 2.14.	Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan Berdasarkan Desa/Kelurahan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 .....	II-53
Tabel 2.15.	Grand Design Pembangunan Puskesmas Kabupaten Sidoarjo .....	II-54
Tabel 2.16.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 .....	II-56
Tabel 2.17.	Cakupan Peserta Jaminan Kesehatan .....	II-57
Tabel 2.18.	Presentasi Capaian Fasilitasi Pertanahan dan Pengadaan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2020 .....	II-63
Tabel 2.19.	Presentasi Kecukupan Irigasi dan Luasan Genangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020 .....	II-64
Tabel 2.20.	Luas Area Genangan Tertangani Tahun 2016-2020 .....	II-65
Tabel 2.21.	Data Normalisasi Sungai Kabupaten Sidoarjo .....	II-66
Tabel 2.22.	Persentase Prasarana Sanitasi dan Air Bersih Tahun 2017-2020 .....	II-69
Tabel 2.23.	Lokasi Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 .....	II-71
Tabel 2.24.	Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Sidoarjo .....	II-74
Tabel 2.25.	Rasio Jumlah Anggota Linmas terhadap Jumlah RT dan Prosentase Poskamling yang Aktif .....	II-77
Tabel 2.26.	Rekap Data Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Pelanggar Protokol Kesehatan yang Bertempat di Gor Sidoarjo Tahun 2020 .....	II-78
Tabel 2.27.	Penduduk Usia Kerja Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2018-2020 .....	II-82
Tabel 2.28.	Persentase Produktivitas Tanaman Pangan dan Holtikultura Tahun 2019-2020 .....	II-93
Tabel 2.29.	Produksi Komoditas Pangan Hewani di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2020 .....	II-94



Tabel 2.30.	Capaian Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Tahun 2020 .....	II-102
Tabel 2.31.	Persentase Penduduk Ber-KTP Elektronik dan Ber-KK Kabupaten Sidoarjo 2016-2020 .....	II-103
Tabel 2.32.	Capaian TFR Kabupaten Sidoarjo 2016-2020 .....	II-106
Tabel 2.33.	Persentase Realisasi Keselamatan Angkutan Darat Tahun 2018-2020 .....	II-107
Tabel 2.34.	Pertumbuhan Koperasi Berkualitas dan Pertumbuhan Usaha Mikro Mandiri Tahun 2016-2020 .....	II-109
Tabel 2.35.	Daftar Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 .....	II-117
Tabel 2.36.	Jumlah Perpustakaan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2020 .....	II-121
Tabel 2.37.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah di Kabupaten Sidoarjo .....	II-121
Tabel 2.38.	Barometer Keberhasilan di Perpustakaan Kabupaten Sidoarjo .....	II-122
Tabel 2.39.	Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo 2016-2020 .....	II-123
Tabel 2.40.	Perkembangan Produksi Pertanian Tahun 2016-2020 .....	II-125
Tabel 2.41.	Produksi Perikanan Laut Tahun 2016-2020 .....	II-128
Tabel 2.42.	Produksi Perikanan Umum Daratan .....	II-129
Tabel 2.43.	Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar .....	II-130
Tabel 2.44.	Produksi Perikanan Budidaya Air Payau .....	II-131
Tabel 2.45.	Dokumen Perencanaan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2020 .....	II-134
Tabel 2.46.	Capaian Kinerja Urusan Keuangan 2018-2020 .....	II-136
Tabel 2.47.	Kinerja Pengawasan Tahun 2020 .....	II-139
Tabel 2.48.	Penilaian Evaluasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016– Triwulan II 2020 .....	II-140
Tabel 2.49.	Penilaian IPP, LPPD, dan IID Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016–Triwulan II 2020 .....	II-141



Tabel 2.50.	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo 2016-2020 .....	II-147
Tabel 3.1.	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo selama 5 Tahun Terakhir dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 .....	III-5
Tabel 3.2.	Komposisi Pendapatan Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2020 .....	III-7
Tabel 3.3.	Proporsi PAD Kabupaten Sidoarjo .....	III-8
Tabel 3.4.	Proporsi Dana Perimbangan Kabupaten Sidoarjo 2016-2020	III-9
Tabel 3.5.	Proporsi Lain-Lain pendapatan daerah yang sah kabupaten sidoarjo 2015-2020 .....	III-10
Tabel 3.6.	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2020 .....	III-12
Tabel 3.7.	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Periode 2015-2020 .....	III-15
Tabel 3.8.	Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2020 .....	III-17
Tabel 3.9.	Neraca Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2020	III-19
Tabel 3.10.	Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 .....	III-27
Tabel 3.11.	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Sidoarjo selama 2016-2020 .....	III-30
Tabel 3.12.	Analisis Realisasi Surplus (Defisit) Riil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama 2016-2020 .....	III-30
Tabel 3.13.	Komposisi Penutup Defisit Riil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama 2016-2020 .....	III-31
Tabel 3.14.	Realisasi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Sidoarjo selama 2016-2020 .....	III-32



Tabel 3.15.	Analisis Proyeksi Pendapatan, Penerimaan Pembiayaan, dan Penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama 2021-2026 .....	III-42
Tabel 3.16.	Rata-rata Pertumbuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama 2015-2020 .....	III-44
Tabel 3.17.	Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama 2021-2026	III-47
Tabel 3.18.	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama 2021-2026 .....	III-49
Tabel 3.19.	Rencana Penggunaan Kapasitas Fiskal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama 2021-2026 .....	III-51
Tabel 4.1.	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Urusan Pokok .....	IV-2
Tabel 5.1.	Pokok-pokok Visi Kabupaten Sidoarjo .....	V-3
Tabel 5.2.	Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 .....	V-6
Tabel 5.3.	Indikator Tujuan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 .....	V-14
Tabel 5.4.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 .....	V-16
Tabel 6.1.	Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran .....	VI-6
Tabel 6.2.	Keterkaitan Strategi Umum dan Arah Kebijakan Umum ....	VI-12
Tabel 6.3.	Keterkaitan Antara 17 Program Strategis Kepala Daerah .....	VI-21
Tabel 6.4.	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Sidoarjo .....	VI-27
Tabel 7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 .....	VII-3
Tabel 7.2.	Indikasi Rencana Program Proritas yang disertai Kebutuhan Penadanaan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 .....	VII-5
Tabel 8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten	



	Sidoarjo .....	VIII-1
Tabel 8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 .....	VIII-4



## Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Visi, Misi, Arah dan Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 .....	I-12
Gambar 1.2.	Strategi RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019- 2024 ....	I-24
Gambar 1.3.	Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 .....	I-25
Gambar 1.4.	Kebijakan Pola Ruang Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029	I-36
Gambar 1.5.	Kebijakan Pola Ruang Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029	I-39
Gambar 1.6.	Capaian TPB Kabupaten Sidoarjo .....	I-43
Gambar 2.1.	Peta Kabupaten Sidoarjo .....	II-1
Gambar 2.2.	Sesar Surabaya dan Sesar Waru Sidoarjo .....	II-7
Gambar 2.3.	Curah Hujan dan Suhu Udara Per Bulan Tahun 2020 .....	II-9
Gambar 2.4.	Penggunaan Lahan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 .....	II-12
Gambar 2.5.	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Sidoarjo .....	II-13
Gambar 2.6.	Jumlah Bencana Alam Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 ...	II-14
Gambar 2.7.	Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Kabupaten Sidoarjo .....	II-15
Gambar 2.8.	Persentase Penanganan Kasus Kebakaran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020 .....	II-16
Gambar 2.9.	Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Sidoarjo	II-17
Gambar 2.10.	Peta Lokasi Bencaa Lumpur Sidoarjo .....	II-18
Gambar 2.11.	Peta Area Terdampak Lumpur Sidoarjo .....	II-19
Gambar 2.12.	Sebaran Titik Penurunan Tanah .....	II-20
Gambar 2.13.	Peta Kumulatif Penurunan Tanah (cumulative land subsidence) Wilayah Desa Kedungbanteng dan Banjarsari	II-21
Gambar 2.14.	Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2020 .....	II-22
Gambar 2.15.	Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020 .	II-23





Gambar 2.16.	Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin (%) Tahun 2020 .....	II-26
Gambar 2.17.	Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020 .....	II-28
Gambar 2.18.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK dan PDRB ADHB menurut lapangan usaha kabupaten Sidoarjo tahun 2018-2020 .....	II-28
Gambar 2.19.	Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II-30
Gambar 2.20	Pendapatan Perkapita Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020 (juta/tahun) .....	II-31
Gambar 2.21.	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020 .....	II-32
Gambar 2.22.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II-33
Gambar 2.23.	Sebaran Penduduk Miskin Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Kecamatan tahun 2020 .....	II-33
Gambar 2.24.	Indeks Gini Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II-35
Gambar 2.25	Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020	II-36
Gambar 2.26.	AHH Kabupaten Sidoarjo dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 – 2020 .....	II-37
Gambar 2.27.	Perkembangan IPM Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016 – 2020 .....	II-37
Gambar 2.28.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016 – 2020 .....	II-38
Gambar 2.29.	APM Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020 .....	II-40
Gambar 2.30.	APK Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020 .....	II-41
Gambar 2.31.	AHH Kabupaten Sidoarjo dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 .....	II-42



Gambar 2.32.	Jumlah Prestasi Pemuda dan Olahraga di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional Tahun 2016-2020 .....	II-43
Gambar 2.33.	Jumlah Grup Kesenian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020 .....	II-44
Gambar 2.34.	Jumlah Murid, Guru dan Sekolah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 .....	II-45
Gambar 2.35.	Kualitas Guru Pendidik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 ...	II-46
Gambar 2.36.	Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan Kabupaten Sidoarjo .....	II-47
Gambar 2.37.	Klasifikasi Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri Kabupaten Sidoarjo (%) Tahun 2019-2020 .....	II-49
Gambar 2.38.	Tren Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2020 .....	II-50
Gambar 2.39.	Realisasi Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020 .....	II-50
Gambar 2.40.	Legalitas Tenaga Kesehatan dan Pengembangan SDM Kesehatan Tahun 2020 .....	II-55
Gambar 2.41.	Denah RSUD Sidoarjo Dalam Penanganan Covid-19 .....	II-58
Gambar 2.42.	Perkembangan Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2020 .....	II-59
Gambar 2.43.	Perkembangan Jalan Mantap Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 - 2020 .....	II-60
Gambar 2.44.	Perbandingan Kondisi Jalan Mantap dan Jalan Tidak Mantap di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 .....	II-61
Gambar 2.45.	Jumlah Bangunan ber-IMB (%) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020 .....	II-62
Gambar 2.46.	Peta Kegiatan Pemeliharaan (Lelang) Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020 .....	II-66
Gambar 2.47.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Tahun 2020 .....	II-67
Gambar 2.48.	Persentase Sumber Air Utama untuk Mandi/Cuci/dll di Kabupaten Sidoarjo Menurut Sumber Air Tahun 2020 .....	II-68



Gambar 2.49.	Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo Menurut Penguasaan Bangunan Tahun 2018-2020 .....	II-69
Gambar 2.50.	Rumah Tangga Memiliki Akses Sanitasi Sehat Tahun 2017-2020 .....	II-70
Gambar 2.51.	Luas Kawasan Kumuh (Ha) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2020 .....	II-70
Gambar 2.52.	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2020 .....	II-73
Gambar 2.53.	Perkembangan Indeks Rasa Aman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020 .....	II-75
Gambar 2.54.	Perkembangan Indeks Toleransi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020 .....	II-75
Gambar 2.55.	Jumlah Kejahatan di Kabupaten Sidoarjo Dilaporkan Tahun 2017-2020 .....	II-76
Gambar 2.56.	Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Ditangani Tahun 2017-2020 .....	II-77
Gambar 2.57.	Persentase PMKS terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2020 .....	II-79
Gambar 2.58.	Jumlah PMKS terlantar Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020 .....	II-80
Gambar 2.59.	Persentase Penanganan PMKS dan Korban Bencana Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 .....	II-81
Gambar 2.60.	Persentase Tenaga Kerja Terserap di 9 Sektor Tahun 2016-2020 .....	II-83
Gambar 2.61.	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Telah Bekerja Tahun 2017-2020 .....	II-83
Gambar 2.62.	Persentase Kasus PHI Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Tahun 2017-2020 .....	II-84
Gambar 2.63.	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (GDI) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2020 .....	II-85
Gambar 2.64.	Capaian Kinerja Pembangunan Gender Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 .....	II-85



Gambar 2.65.	Persentase Kasus Kekerasan dan Trafficking Perempuan dan Anak yang diselesaikan Tahun 2018-2020 .....	II-86
Gambar 2.66.	Jumlah Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	II-87
Gambar 2.67.	Jumlah Kekerasan Terhadap Anak .....	II-88
Gambar 2.68.	Jumlah Kekerasan dalam Kerja .....	II-88
Gambar 2.69.	Jumlah Kekerasan dalam Ekonomi .....	II-89
Gambar 2.70.	Jumlah Pelecehan Seksual .....	II-89
Gambar 2.71.	Jumlah Pencabulan .....	II-90
Gambar 2.72.	Jumlah Perkosaan .....	II-91
Gambar 2.73.	Jumlah Human Trafficking .....	II-91
Gambar 2.74.	Jumlah Penganiayaan .....	II-92
Gambar 2.75.	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Tahun 2016-2020 ..	II-95
Gambar 2.76.	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Tahun 2016-2020 ...	II-96
Gambar 2.77.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020 .....	II-97
Gambar 2.78.	Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II-97
Gambar 2.79.	Persentase Sampah Terkelola Tahun 2018-2020 .....	II-100
Gambar 2.80.	Persentase Volume yang Terlayani di TPA/TPST Tahun 2020 .....	II-101
Gambar 2.81.	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Tahun 2016-2020 .....	II-104
Gambar 2.82.	Perkembangan IDM dengan Kategori Minimal Berkembang Tahun 2016-2020 .....	II-105
Gambar 2.83.	Persentase Peserta KB pada Pasangan Usia Subur Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020 .....	II-106
Gambar 2.83.	Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo 2015-2020 .....	II-108
Gambar 2.84.	Perkembangan Koperasi Sehat dan Berkualitas Kabupaten Sidoarjo 2016-2020 .....	II-111
Gambar 2.85.	Perkembangan Usaha Mikro Tahun 2017-2020 .....	II-113
Gambar 2.86.	Perkembangan Besar Kredit Modal Kepada UMKM Tahun 2020 .....	II-114



Gambar 2.87.	Jumlah Investor PMA dan PMDN (Unit) Tahun 2016-2020	II-114
Gambar 2.88.	Perkembangan Jumlah Prestasi Pemuda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020 .....	II-115
Gambar 2.89.	Perkembangan Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2020 .....	II-116
Gambar 2.90.	Jumlah Group Kesenian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020 .....	II-119
Gambar 2.91.	Perkembangan Jumlah Pemanfaat Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020 .....	II-123
Gambar 2.92.	Persentase Lembaga Yang Menyelenggarakan Arsiparis Kabupaten Sidoarjo 2016-2020 .....	II-124
Gambar 2.93.	Bantuan Alat Mesin Pertanian Tahun 2018-2020 .....	II-126
Gambar 2.94.	Pertumbuhan Persentase PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2016-2020 .....	II-127
Gambar 2.95.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan .....	II-128
Gambar 2.96.	Persentase Kemampaun Perangkat Daerah Dalam Menyerap Anggaran Tahun 2015-2020 .....	II-135
Gambar 2.97.	Persentase Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020 .....	II-137
Gambar 2.98.	Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2016-2020 .....	II-137
Gambar 2.99.	Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2020 .....	II-141
Gambar 2.100.	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah) Tahun 2019-2020 .....	II-142
Gambar 2.101.	Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016– Triwulan II 2020 .....	II-143
Gambar 2.102.	Rasio Ketergantungan Penduduk Menurut Umur Tahun 2015 - 2020 .....	II-144
Gambar 2.103.	Perkembangan Indeks Rasa Aman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020 .....	II-145
Gambar 2.104.	Jumlah Kejahatan Dilaporkan Tahun 2017-2020 .....	II-135
Gambar 3.1.	Proporsi PAD Kabupaten Sidoarjo .....	III-8
Gambar 3.2.	Proporsi Dana Perimbangan Kabupaten Sidoarjo 2015-2020 .....	III-9



Gambar 3.3.	Proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Sidoarjo 2015-2020 .....	III-10
Gambar 4.1.	Persentase Perbandingan Hilangnya Pencapaian Nilai HDI Akibat Kesenjangan .....	IV-13
Gambar 4.2.	Peta Kawasan Prioritas Gerbangkertasusila .....	IV-20
Gambar 4.3.	Peta Lokasi Program di Kawasan Prioritas Gerbangkertasusila .....	IV-22
Gambar 6.1.	Strategi Umum RPJMD Kabupaten Sidoarjo .....	VI-3
Gambar 6.2.	Arah Kebijakan Umum RPJMD .....	VI-19
Gambar 6.3.	Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo .....	VI-20



# Bab

# I

## Pendahuluan

### I.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 5 (lima) tahun. RPJMD disusun sejak dilantiknya secara resmi **H. Ahmad Muhdlor, S.I.P.**, sebagai Bupati dan **H. Subandi, S.H.**, sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo, oleh Gubernur Jawa Timur **Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa** pada tanggal 26 Februari 2021 di Surabaya sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yaitu sesuai tahapan; a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD yang telah disusun sebelumnya, dilanjutkan dengan penjabaran Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih ke



dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan. Tahap selanjutnya dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan sebagai acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah berdasarkan urusan, tugas pokok dan fungsinya. Melalui tahapan ini diharapkan pemetaan program yang dilakukan di setiap Perangkat Daerah memiliki sumbangan yang kuat dan logis dalam mendukung Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Sidoarjo di tahun 2021-2026.

RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025, khususnya pada tahapan lima tahun keempat yaitu tahun 2022-2025. Tahapan ini menunjukkan langkah-langkah sistematis dan skematis dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang hendak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah ***Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera dan Madani***. Dengan demikian tujuan dan target pembangunan RPJMD tahun 2021-2026 diselaraskan dengan target RPJPD Kabupaten Sidoarjo di tahun berkenaan yang merupakan sasaran akhir (*the ultimate goals*) pada RPJPD. Penyusunan RPJMD juga memperhatikan berbagai hal penting antara lain : (1) memperkuat komitmen dan dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*); (2) Penyelarasan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN tahun 2020-2024); (3) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo -Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan; (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (5) Terjadinya Pandemi *Corona Virus Desease* (Covid-19). Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 memiliki tantangan pembangunan yang cukup berat akibat pandemi. Struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo yang bertumpu pada sektor perdagangan, industri pengolahan dan jasa menanggung dampak yang





lebih berat jika dibandingkan dengan daerah lain yang struktur ekonominya bertumpu pada sektor primer seperti pertanian. Dengan demikian, selaras dengan prioritas nasional maka arah kebijakan pembangunan ke depan akan difokuskan pada pemulihan ekonomi dan sosial.

RPJMD memiliki keterkaitan sistemik dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Setelah rumusan visi, misi dan program strategis dimanifestasikan ke dalam dokumen RPJMD, maka rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan target Program Pembangunan Daerah beserta kebutuhan pendanannya. Keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dimana RPJMD merupakan acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, sehingga target RPJMD diturunkan menjadi target dalam Renstra Perangkat Daerah, demikian pula target RKPD diturunkan dalam target tahunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dilakukan untuk menjamin ketercapaian target pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

## **I.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran



- Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011



- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabiilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26



- Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
  24. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
  25. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  26. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  27. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);



28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);



34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);



42. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9);
47. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 61);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo





Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C).

### **I.3 Hubungan Antar Dokumen**

Hubungan antar dokumen perencanaan daerah secara relevan dan kontekstual sangat mendukung dalam upaya membangun keselarasan perencanaan antar dokumen perencanaan dalam lingkup daerah maupun dengan lingkup nasional dan provinsi. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan pendekatan perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, RPJMD Kabupaten Sidoarjo harus diselaraskan dengan RPJMN, RTRW Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RTRW Provinsi Jawa Timur, RTRW Daerah lain yang berbatasan, dan RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025.

#### **I.3.1 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024.**

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo dengan RPJMN Tahun 2020-2024 diidentifikasi melalui penyajian Visi, Misi, Arahana Presiden dan Tujuh Agenda Pembangunan nasional tahun 2020-2024, yang memiliki keterkaitan kuat dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026. Terdapat 4 (empat) lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN yang menjadi rujukan dalam mengidentifikasi Isu Strategis yang terkait dengan Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut;

1. Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;



3. Matriks Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; dan
4. Arah Pembangunan Wilayah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

**Gambar 1.1. Visi, Misi, Arah dan Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024**



Sumber : Lampiran 1 Perpres 18 Tahun 2020



Mengacu pada gambar di atas, maka dapat ditarik benang merah Arah Pembangunan Nasional yang dapat dijadikan sebagai *guidance* bagi perumusan arah Pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

### **I.3.2 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025**

Sebagai upaya untuk menjamin keselarasan dan konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dengan jangka panjang (RPJPD), maka pembangunan lima tahun keempat 2021-2026 perlu difokuskan pada Sasaran Pokok RPJPD periode lima tahunan ke-empat tahun 2021-2024. Periode keempat merupakan periode Pencapaian Visi Pembangunan jangka Panjang yaitu ***Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera dan Madani***. Adapun sasaran detil Sasaran Pokok antara lain sebagai berikut :

**Sasaran Pokok: *Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Secara Berkelanjutan Guna Memenuhi Kebutuhan Pembangunan Daerah***, dengan arah kebijakan:

1. Meningkatkan persentase PAD terhadap APBD pada rentang 45,00% - 47,95%
2. Meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah pada rentang 1,34 - 1,45
3. Memantapkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang mendukung peningkatan penerimaan pendapatan daerah
4. Mewujudkan kondisi masyarakat daerah yang sadar pajak/retribusi daerah
5. Menegakkan regulasi daerah yang diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah



**Sasaran Pokok: *Terwujudnya Optimalisasi Potensi Pariwisata yang Berdaya Saing Tinggi***, dengan arah kebijakan:

1. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan sektor pariwisata di daerah
2. Mewujudkan terciptanya jaringan promosi pariwisata daerah yang mampu mendukung pengembangan wisata daerah baik pada skala nasional maupun internasional
3. Mewujudkan pengembangan potensi wisata lainnya
4. Memantapkan peran regulasi daerah untuk pengembangan pariwisata daerah
5. Mewujudkan pendapatan daerah yang unggul dari sektor pariwisata

**Sasaran Pokok: *Terwujudnya Iklim Investasi Ramah Lingkungan***, dengan arah kebijakan:

1. Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah unggulan untuk penanaman modal dan investasi
2. Mewujudkan terciptanya kondisi investasi di daerah yang berteknologi ramah lingkungan secara intensif

**Sasaran Pokok: *Terwujudnya Struktur Perekonomian Daerah yang Berorientasi Pasar dan Berdaya Saing Global***, dengan arah kebijakan:

1. Memantapkan luasnya wawasan dan keterampilan berwira usaha sebagai pondasi pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan
2. Mewujudkan pemanfaatan teknologi tepat guna secara masif untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah
3. Mewujudkan stabilitas harga pasar beriringan dengan tumbuhnya produk-produk daerah yang berdaya saing
4. Mengembangkan pangsa pasar produk-produk daerah yang didukung oleh upaya penelitian dan pengembangan pasar secara menerus
5. Mewujudkan produk-produk unggulan daerah yang berdaya saingnya dan mampu memperkuat perekonomian daerah



**Sasaran pokok: *Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Mapan,***

dengan arah kebijakan:

1. Optimalisasi pelaksanaan intensifikasi pertanian dan perikanan yang berbasis agrobisnis
2. Memantapkan stabilitas ketersediaan pangan di daerah
3. Mewujudkan kemapanan dalam keamanan pangan daerah dengan akses dan kualitas yang tinggi bagi masyarakat

**Sasaran Pokok: *Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif,*** dengan arah kebijakan:

1. Mengembangkan produk-produk daerah seiring dengan semakin tingginya konsumsi terhadap produk-produk daerah
2. Membudayakan pola pengeluaran pemerintah daerah yang tepat sasaran untuk peningkatan pembangunan daerah secara signifikan
3. Mewujudkan ekspor daerah yang unggul dan memantapkan pengelolaan impor daerah
4. Mengembangkan insentif daerah untuk kemapanan pertumbuhan UKM yang inovatif

**Sasaran Pokok: *Terwujudnya Peningkatan dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan,*** dengan arah kebijakan:

1. Memperkuat usaha-usaha yang berbasis kerakyatan sebagai penopang dasar kekuatan perekonomian daerah
2. Memperkuat lembaga-lembaga perekonomian yang berbasis kerakyatan sebagai penopang dasar kekuatan perekonomian daerah
3. Penguatan kapasitas dalam pemberdayaan UMKM untuk memperkuat perekonomian

**Sasaran Pokok: *Tersedianya Sarana dan Prasarana Sistem Transportasi yang Terpadu,*** dengan arah kebijakan:



1. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang terpadu baik secara kuantitas maupun kualitas untuk memantapkan pembangunan di daerah
2. Mewujudkan aksesibilitas yang tinggi antar wilayah dalam daerah
3. Mengoptimalkan ketersediaan angkutan umum daerah yang aman, nyaman dan terjangkau oleh masyarakat
4. Memantapkan pengelolaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang terpadu untuk menciptakan sirkulasi transportasi yang optimum.

**Sasaran Pokok: *Meningkatnya Cakupan Penyediaan Air Bersih***, dengan arah kebijakan:

1. Mewujudkan pengelolaan yang optimal untuk menjamin ketersediaan air permukaan yang berkualitas sebagai bahan baku air bersih
2. Memantapkan kuantitas pelayanan air bersih yang kualitas bagi masyarakat di daerah
3. Mempertahankan kelestarian air tanah melalui pemantapan pengendalian daerah resapan air
4. Memantapkan kapasitas pemanfaatan teknologi dalam pengolahan air bersih
5. Mewujudkan pelayanan jaringan air bersih yang sangat terjangkau oleh masyarakat

**Sasaran Pokok: *Meningkatnya Sistem Tata Air yang Terpadu dan Sistem Penanggulangan Banjir***, dengan arah kebijakan:

1. Pemantapan fungsi layanan infrastruktur jaringan irigasi teknis di daerah
2. Mewujudkan pemerataan distribusi dan cakupan pelayanan jaringan irigasi daerah secara meluas
2. Mewujudkan terciptanya hierarki dan sistem pengelolaan dan pengembangan saluran drainase daerah yang optimal
3. Mewujudkan terciptanya daerah yang bebas banjir dan genangan air paska Hujan



**Sasaran Pokok: *Terwujudnya Sistem Sanitasi yang Terintegrasi***, dengan arah kebijakan:

1. Memantapkan pengelolaan sumber-sumber pencemar dan penghasil limbah domestik secara berkelanjutan
2. Memantapkan sistem pengelolaan sanitasi yang terintegrasi di daerah
3. Mengoptimalkan sistem pengelolaan persampahan yang terintegrasi di daerah

**Sasaran Pokok: *Meningkatnya Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan***, dengan arah kebijakan:

1. Memantapkan pemanfaatan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan
2. Meningkatkan pengembangan diversifikasi energi untuk pembangkit listrik yang berwawasan lingkungan.
2. Mewujudkan pengembangan pengelolaan sampah sebagai sumber energi alternatif.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak termasuk di dalamnya sumber daya alam bawah tanah serta wilayah pesisir dan perairan.

**Sasaran Pokok: *Terwujudnya Pengembangan Perumahan dan Permukiman Layak Huni***, dengan arah kebijakan:

1. Mewujudkan pengembangan perumahan daerah yang layak dan terjangkau oleh masyarakat.
2. Memantapkan penyediaan perumahan dengan konsep hunian berimbang di daerah.
2. Mewujudkan terciptanya pengembangan hunian vertikal di daerah secara optimal untuk mengatasi keterbatasan lahan.
3. Mewujudkan perumahan dan permukiman daerah yang ditopang oleh sistem pembiayaan, kelembagaan dan regulasi yang optimal.



**Sasaran Pokok: *Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)***, dengan arah kebijakan:

1. Mewujudkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan yang rendah di sungai, pesisir pantai dan air tanah,
2. Mewujudkan rendahnya tingkat pencemaran udara, air, tanah dan tingkat kebisingan serta tingkat pencemaran oleh limbah B3,
3. Mewujudkan kecukupan luasan RTH Publik dan Privat yang proporsional sesuai kaidah ramah lingkungan,
4. Mewujudkan pemanfaatan ruang daerah yang sesuai dengan peruntukannya dan berbasis pada kelestarian lingkungan.

**Sasaran Pokok: *Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan yang Merata dan Berdaya Saing***, dengan arah kebijakan:

1. Meningkatkan Angka Melek Huruf daerah pada rentang : 98,65% - 98,71% dan Rata-rata Lama Sekolah pada rentang 10,74 - 10,78 tahun 2025.
2. Memantapkan kualitas pendidikan dasar dan menengah yang terdistribusi merata dan murah bagi masyarakat di daerah,
3. Memantapkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas untuk pengembangan pendidikan di daerah,
4. Mewujudkan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional di daerah,
5. Mewujudkan ketersediaan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin atau rawan social.

**Sasaran Pokok: *Meningkatnya Pola Hidup Sehat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat***, dengan arah kebijakan:

1. Mewujudkan masyarakat di daerah dengan derajat kesehatan tinggi dengan Angka Harapan Hidup daerah pada rentang 72,48 - 72,56 tahun.





2. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas dan memadai.
2. Mewujudkan ketersediaan jumlah tenaga kesehatan yang memadai untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
3. Mewujudkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat secara optimal.

**Sasaran Pokok: *Terwujudnya Peningkatan Pendapatan per Kapita Masyarakat yang Berkelanjutan***, dengan arah kebijakan:

1. Mewujudkan terciptanya pemerataan pendapatan pada seluruh lapisan masyarakat.
2. Mewujudkan rendahnya tingkat kemiskinan secara kontinyu di daerah,
3. Mewujudkan ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang terbuka lebar bagi masyarakat di daerah,
4. Mewujudkan ketersediaan luasnya kesempatan usaha dan lapangan usaha untuk berkembang di daerah.

**Sasaran Pokok: *Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Sumberdaya Aparatur***, dengan arah kebijakan:

1. Mengoptimalkan ketersediaan sumberdaya aparatur pemerintahan daerah
2. Mewujudkan terciptanya pemenuhan kebutuhan kapasitas sumber daya aparatur yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Mewujudkan terciptanya kebijakan daerah yang optimal mengatur.

**Sasaran Pokok: *Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat***, dengan arah kebijakan:

1. Mewujudkan tersedianya gedung pemerintahan daerah yang memadai dan representatif.



2. Mengoptimalkan ketersediaan prasarana pendukung dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

**Sasaran Pokok: *Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Sistem Pelayanan Publik yang Memadai***, dengan arah kebijakan:

1. Memantapkan penerapan ukuran kelembagaan organisasi perangkat daerah secara optimal.
2. Mengoptimalkan standarisasi pelayanan publik di daerah,
3. Mengintensifkan kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk pembangunan daerah,
4. Mewujudkan terciptanya sistem *e-government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Sasaran Pokok: *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik***, dengan arah kebijakan:

1. Mewujudkan efektifitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan di daerah,
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
3. Memantapkan penerapan regulasi daerah yang mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

**Sasaran Pokok *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik***, dengan arah kebijakan:

1. Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kekayaan desa,
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,
3. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat desa.
4. Mewujudkan terlaksananya regulasi desa yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik.



**Sasaran Pokok: *Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan***, dengan arah kebijakan:

1. Memantapkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan pengendalian pembangunan.

**Sasaran Pokok: *Tersedianya Akses yang Sama Bagi Masyarakat dalam Proses Pembangunan***, dengan arah kebijakan:

1. Memantapkan keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan dan merasakan hasil pembangunan,
2. Mengintensifkan sosialisasi pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat.

**Sasaran Pokok: *Terwujudnya Kesetiakawanan Sosial Berlandaskan Dasar Negara dan Nilai-Nilai Keagamaan***, dengan arah kebijakan:

1. Mewujudkan terciptanya toleransi dalam kehidupan beragama di masyarakat,
2. Mewujudkan terciptanya kesadaran gotong royong dan tenggang rasa yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat,
3. Mewujudkan terciptanya ketertiban warga masyarakat dalam menjalankan kehidupan beragama dalam masyarakat.

**Sasaran Pokok: *Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang Aman, Tenram dan Tertib***, dengan arah kebijakan:

1. Mewujudkan terciptanya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam menciptakan lingkungan yang aman, tenram dan tertib.

**Sasaran Pokok: *Terwujudnya Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif***, dengan arah kebijakan:



1. Mewujudkan terciptanya rasa saling menghormati dan menghargai dalam tatanan kehidupan bermasyarakat,
2. Mewujudkan tingkat kriminalitas yang rendah dalam masyarakat secara kontinyu,
3. Mewujudkan terciptanya kondisi yang bebas aksi demonstrasi anarkis di daerah.

**Sasaran Pokok: *Terwujudnya Upaya Mitigasi Bencana Daerah***, dengan arah kebijakan:

1. Memantapkan koordinasi antar sektor dalam penanganan kebencanaan daerah.
2. Mewujudkan optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana yang handal dalam pengendalian dan mitigasi bencana daerah,
3. Mewujudkan terciptanya kawasan di sekitar semburan Lumpur Porong yang dikelola dengan baik.

**Sasaran Pokok: *Meningkatnya Kualitas Kehidupan Berdemokrasi yang Sehat dan Santun***, dengan arah kebijakan:

1. Mewujudkan terciptanya suasana kehidupan berpolitik yang baik dan kondusif dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Mewujudkan pelaksanaan Pemilu, Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah langsung yang berkualitas.

**Sasaran Pokok: *Terwujudnya Pemberdayaan Organisasi Politik dan Masyarakat***, dengan arah kebijakan:

1. Mewujudkan terciptanya jalinan kerja yang erat dan harmonis antara pemerintah dengan Orpol, Ormas dan LSM.
2. Mewujudkan peran organisasi politik dan masyarakat yang makin berarti dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.



**Sasaran Pokok: *Terwujudnya Kesadaran Hukum dalam Kehidupan Masyarakat***, dengan arah kebijakan:

1. Mewujudkan terciptanya masyarakat yang disiplin, taat asas dan taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

**Sasaran Pokok: *Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berwibawa Melalui Penataan Pranata Hukum***, dengan arah kebijakan:

1. Mewujudkan penerapan regulasi daerah yang mampu mengakomodasi dinamika dalam kehidupan masyarakat di daerah.
2. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat.

### **I.3.3 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Jawa Timur Tahun 2019-2024.**

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, dilakukan dengan mengidentifikasi Visi, Misi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur sebagai panduan untuk merumuskan arah pembangunan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo telah terpilih. Adapun Visi, Misi dan Arah Kebijakan Gubernur Jawa Timur tahun 2019-2024 sebagai berikut.

#### **Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024**

*"Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong"*

#### **Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024**

Sedangkan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sebagai penjabaran dari Visi Pembangunan adalah;



1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

### **Strategi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024**

Guna mendukung pencapaian keempat misi di atas, maka dilakukan melalui serangkaian Strategi Pembangunan sebagai berikut :

**Gambar 1.2. Strategi RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024**

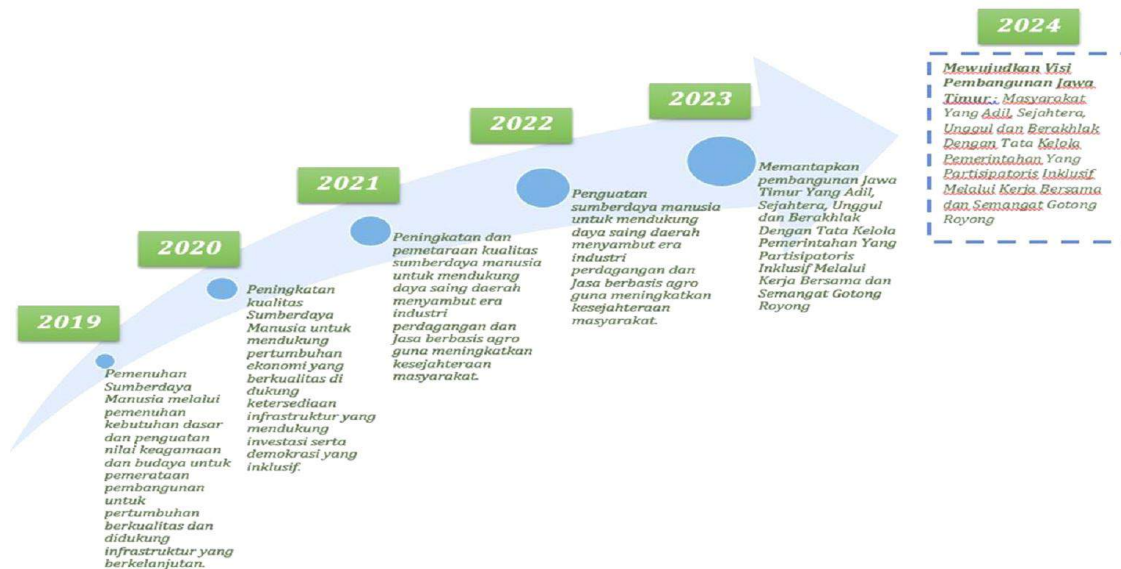




## Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Mengacu pada Visi, Misi, dan Strategi Pembangunan di atas, maka Arah Kebijakan Pembangunan Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana disajikan dalam ilustrasi *milestone* di bawah ini:

**Gambar 1.3. Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024**



Telaah mengenai Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 di atas dapat memberikan peta mengenai orientasi dan arah pengembangan pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

### I.3.4 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dengan RTRWN Tahun 2020-2024.

Hasil telaah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), mengatur secara umum tentang pengembangan wilayah nasional dan daerah, namun tidak secara



khusus menyampaikan tentang arah pengembangan Kawasan Jawa Timur pada umumnya maupun Kabupaten Sidoarjo khususnya. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang penting untuk dijadikan dasar kebijakan bagi pengembangan Kawasan Sidoarjo, yaitu;

1. Pada Pasal 7 ayat 2 huruf b2, menyatakan bahwa kebijakan yang berlaku untuk daerah-daerah di Pulau Jawa dan Bali diharapkan dapat mengembangkan Kawasan lindung dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
2. Pasal 14 ayat 2, pengembangan Kawasan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan kriteria:
  - a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
  - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
  - c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
  - d. kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional.

Kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) di atas diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan Kabupaten Sidoarjo sebagai ;

1. Kota perdagangan dan industri yang tetap harus mempertahankan aspek lingkungan, antara lain proporsi tersedianya ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas seluruh wilayah, hal ini dapat memanfaatkan RTH Publik dan Privat;





2. Kota titik pertumbuhan perekonomian Jawa Timur dan Nasional yang berfungsi sebagai motor penggerak aktivitas perekonomian regional, nasional dan internasional harus terus dipastikan arah pengembangan kotanya selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi.

### **1.3.5 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 dengan RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.**

Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Jawa Timur sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031.

#### **Visi Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur**

Pada Pasal 4 disebutkan bahwa Visi Penataan Ruang Provinsi adalah *"Terwujudnya Ruang Wilayah Provinsi Berbasis Agribisnis dan Jasa Komersial yang Berdaya Saing Global dalam Pembangunan Berkelanjutan"*.

#### **Misi Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur**

Pada Pasal 5 disampaikan misi penataan ruang Provinsi Jawa Timur sebagai implementasi dari visi di atas, adalah mewujudkan:

1. Keseimbangan pemerataan pembangunan antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi;
2. Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam meningkatkan daya saing daerah dalam kancah Asia;
3. Penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara berkeadilan dan berhierarki serta bernilai tambah tinggi;
4. Pemantapan fungsi lindung dan kelestarian sumber daya alam dan buatan;
5. Optimasi fungsi budi daya kawasan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam persaingan global;
6. Keterpaduan program pembangunan berbasis agribisnis dan jasa komersial yang didukung seluruh pemangku kepentingan; dan



7. Kemudahan bagi pengembangan investasi daerah serta peningkatan kerja sama regional.

**Tabel 1.1. Kebijakan RTRW Jawa Timur yang Terkait dengan Pengembangan Kabupaten Sidoarjo.**

No	Kebijakan Tata Ruang Jawa Timur	Arah Kebijakan
1	Rencana Sistem Perkotaan (Pasal 19)	Sistem perkotaan, meliputi: Kawasan Perkotaan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan (Gerbangkertosusila) dan Malang;
2	Wilayah Pelayanan (WP), Sidoarjo salah satu dari 8 (delapan) WP di Jawa Timur. (Pasal 19 ayat 3)	WP Germakertosusila Plus dengan pusat di Kota Surabaya meliputi: Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep, dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri;



No	Kebijakan Tata Ruang Jawa Timur	Arah Kebijakan
3	Jalan Nasional Arteri Primer	Surabaya – Malang; Surabaya – Mojokerto – Jombang – Kertosono – Nganjuk – Caruban – Ngawi – Mantingan; Surabaya – Lamongan – Widang – Tuban – Bulu (Batas Jateng); Surabaya – Sidoarjo – Gempol – Pasuruan – Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi.
4	Kawasan peruntukan industri dengan luas sekurang-kurangnya 69.288,52 Ha. (Pasal 80 ayat 1)	Kawasan industri; Kawasan peruntukan industri di luar kawasan industri; dan Sentra industri. Kawasan industri sebagaimana dimaksud di atas meliputi seluruh wilayah kabupaten / kota di Jawa Timur, dengan prioritas pengembangan meliputi wilayah Sidoarjo. Kawasan peruntukan industri di luar kawasan industri sebagaimana dimaksud di atas juga meliputi wilayah Sidoarjo.
5	Kawasan Strategis Provinsi Jawa Timur : Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi (Pasal 87)	Rencana kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan pemerintah pusat yaitu kawasan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) sebagai KSN.
6	Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai KSP	Kawasan industri berteknologi tinggi <i>Surabaya Industrial Estate Rungkut</i>



No	Kebijakan Tata Ruang Jawa Timur	Arah Kebijakan
		(SIER) di Kota Surabaya dan Berbek di Kabupaten Sidoarjo; kawasan ekonomi unggulan terdiri atas LIS (Lamongan Integrated Shorebase) dan sekitarnya di Kabupaten Lamongan, Pelabuhan Tanjung Bulupandan dan sekitarnya di Kabupaten Bangkalan, Pelabuhan Sendang Biru dan sekitarnya di Kabupaten Malang, Pelabuhan Teluk Lamong dan sekitarnya di Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya, dan Industri Perhiasan Gemopolis di Kabupaten Sidoarjo;

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan Kabupaten Sidoarjo di atas menjadi dasar bagi pengembangan kewilayahan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Kebijakan tersebut telah diidentifikasi dengan baik, sehingga saat Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dapat dirumuskan keterkaitannya dengan program pengembangan wilayah.

### **1.3.6 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029.**

Berbagai kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029**, dan mengacu pada **Peraturan Daerah Nomor 1**



## **Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039.**

Visi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah Sidoarjo sebagai ***wilayah industri, perdagangan, pertanian, serta permukiman yang harmoni dan berkelanjutan.*** Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan religius yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global,
2. Mengembangkan perekonomian wilayah yang tangguh dan berkeadilan sesuai dengandaya dukung lingkungan untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat,
3. Meningkatkan penataan ruang wilayah melalui pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang perekonomian dan dinamikan perkembangan wilayah,
4. Mengembangkan tata pemerintahan yang baik untuk mewujudkan penataan ruang.

Adapun detil kebijakan Stuktur Ruang dan Pola Ruang sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1.2 Kebijakan RTRW Kabupaten Sidoarjo**

<b>Pasal</b>	<b>Kebijakan RTRW Kabupaten Sidoarjo</b>
Perda No. 6 Tahun 2009, Pasal 21 tentang Penetapan Kawasan	Kawasan perdesaan di Kabupaten Sidoarjo meliputi wilayah Kecamatan Sedati, Candi, Tanggulangin, Krian, Tarik, Prambon, Wonoayu, Sukodono, Tulangan, Krembung, dan Balongbendo, Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Sidoarjo meliputi wilayah yang ada di Kecamatan Waru, Sedati, Buduran, Gedangan, Sidoarjo, Candi, Tanggulangin,



Pasal	Kebijakan RTRW Kabupaten Sidoarjo
	Jabon, Taman, Krian, Balongbendo, Krembung, Tarik, Prambon, Wonoayu, Sukodono, Porong, dan Tulangan, Kawasan permukiman tidak pada atau menggunakan lahan sawah yang sudah ada dan atau mengalihfungsikan sawah yang ada.
Sistem Perkotaan, pasal 24 ayat 1	Orde perkotaan, meliputi: Orde K1: Perkotaan di Kecamatan Waru dan Kecamatan Sidoarjo, Orde K2: Perkotaan di Kecamatan Prambon, Kecamatan Krian, Kawasan Pesisir, dan Kecamatan Sedati, Orde K3: Perkotaan Kecamatan Candi, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Porong, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Buduran, dan Kecamatan Wonoayu
Sistem perkotaan, pasal 24 ayat 2	Hirarki atau besaran perkotaan sebagaimana dimaksud meliputi: Perkotaan Sedang meliputi perkotaan yang terdapat di Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Krian, Kecamatan Taman, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Gedangan. Perkotaan Kecil meliputi perkotaan yang ada di Kecamatan Tulangan, Kecamatan Krembung, Kecamatan Jabon, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Porong, Kecamatan Tarik, Kecamatan Prambon, Kecamatan Sedati dan Kecamatan Sukodono.
	Perwilayahan sebagaimana dimaksud adalah 5 (lima) SSWP:



<b>Pasal</b>	<b>Kebijakan RTRW Kabupaten Sidoarjo</b>
	<p>SSWP I meliputi wilayah Kecamatan Waru, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Taman dan Kecamatan Sedati, dengan fungsi utama Permukiman, Industri dan Perdagangan skala lokal, regional, dan internasional dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Waru;</p> <p>SSWP II meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sidoarjo, sebagian Kecamatan Buduran, dan sebagian Kecamatan Candi, dengan fungsi utama Permukiman, Pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Sidoarjo;</p> <p>SSWP III meliputi wilayah sebagian Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon, sebagian Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tulangan, dan Kecamatan Krembung; dengan fungsi utama Kawasan permukiman, Konservasi Geologi, industri, pertanian, dan perdagangan skala regional dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Krembung;</p> <p>SSWP IV meliputi wilayah Kecamatan Krian, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Tarik, Kecamatan Prambon, dan Kecamatan Wonoayu; dengan fungsi utama pertanian teknis, zona industri ditunjang dengan kegiatan permukiman kepadatan rendah dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Krian;</p>



<b>Pasal</b>	<b>Kebijakan RTRW Kabupaten Sidoarjo</b>
	SSWP V meliputi wilayah pesisir di Kecamatan Sedati, pesisir Kecamatan Buduran, pesisir Kecamatan Sidoarjo, pesisir Kecamatan Candi, pesisir Kecamatan Porong, Pesisir Kecamatan Tanggulangin, dan pesisir Kecamatan Jabon; dengan fungsi utama kawasan budidaya perikanan dan pariwisata dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Candi;
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039, Pasal 4	Wilayah perencanaan yaitu Kecamatan Sidoarjo meliputi: a. Desa Lebo; b. Desa Suko; c. Desa Banjarbendo; d. Kelurahan Lemah Putro; e. Kelurahan Sidokare; f. Kelurahan Celep; g. Kelurahan Sekardangan; h. Kelurahan Gebang; i. Desa Rangkah Kidul; j. Kelurahan Bulusidokare; k. Kelurahan Pucanganom; l. Kelurahan Pekauman; m. Kelurahan Sidoklumpuk; n. Kelurahan Sidokumpul; o. Desa Bluru Kidul; p. Desa Kemiri; q. Kelurahan Pucang; r. Kelurahan Magersari; s. Desa Jati; t. Desa Cemengkalang;



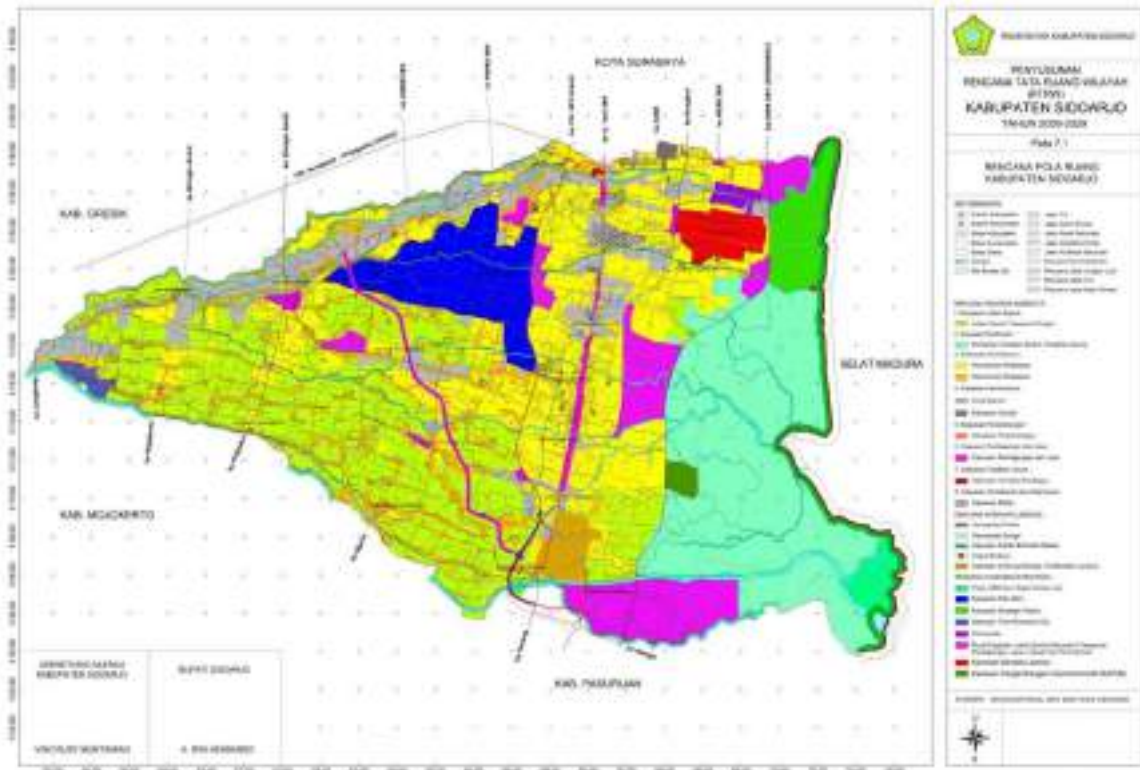


Pasal	Kebijakan RTRW Kabupaten Sidoarjo
	<p>u. Desa Cemengbakalan; v. Kelurahan Urangagung; w. Desa Sarirogo; dan x. Desa Sumput.</p> <p>Batas-batas administrasi BWP Sidoarjo adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Sebelah Utara : Kecamatan Sukodono dan Buduran b. Sebelah Selatan : Kecamatan Jabon dan Kecamatan Candi c. Sebelah Barat : Kecamatan Wonoayu d. Sebelah Timur : Selat Madura</p>

Rencana pengembangan kewilayahan Kabupaten Sidoarjo berpijak pada kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo sebagaimana disampaikan dalam **Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029**, dan mengacu pada **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039**. Gambaran secara detil mengenai Pola Ruang kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan maupun yang terkait dengan wilayah perkotaan sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.



**Gambar 1.4. Kebijakan Pola Ruang Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029**



Sumber : Perda No. 18 Tahun 2009 tentang Pola Ruang RTRW Kabupaten Sidoarjo.

Pada peta Pola Ruang Kabupaten Sidoarjo sebagaimana disajikan di atas, maka arah pengembangan kewilayahan dibagi dalam 5 (lima) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP), antara lain sebagai berikut;

SSWP I : meliputi wilayah Kecamatan Waru, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Taman dan Kecamatan Sedati, dengan fungsi utama Permukiman, Industri dan Perdagangan skala lokal, regional, dan internasional dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Waru;

SSWP II : meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sidoarjo, sebagian Kecamatan Buduran, dan sebagian Kecamatan Candi, dengan fungsi utama Permukiman, Pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Sidoarjo;



- SSWP III : meliputi wilayah sebagian Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon, sebagian Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tulangan, dan Kecamatan Krembung; dengan fungsi utama Kawasan permukiman, Konservasi Geologi, industri, pertanian, dan perdagangan skala regional dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Krembung;
- SSWP IV : meliputi wilayah Kecamatan Krian, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Tarik, Kecamatan Prambon, dan Kecamatan Wonoayu; dengan fungsi utama pertanian teknis, zona industri ditunjang dengan kegiatan permukiman kepadatan rendah dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Krian;
- SSWP V : meliputi wilayah pesisir di Kecamatan Sedati, pesisir Kecamatan Buduran, pesisir Kecamatan Sidoarjo, pesisir Kecamatan Candi, pesisir Kecamatan Porong, Pesisir Kecamatan Tanggulangin, dan pesisir Kecamatan Jabon; dengan fungsi utama kawasan budidaya perikanan dan pariwisata dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Candi.

Secara detil kebijakan Pola Ruang Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Kabupaten Sidoarjo berada di Kecamatan Sidoarjo meliputi:

1. Desa Lebo;
2. Desa Suko;
3. Desa Banjarbendo;
4. Kelurahan Lemah Putro;
5. Kelurahan Sidokare;
6. Kelurahan Celep;
7. Kelurahan Sekardangan;
8. Kelurahan Gebang;
9. Desa Rangkah Kidul;
10. Kelurahan Bulusidokare;
11. Kelurahan Pucanganom;



12. Kelurahan Pekauman;
13. Kelurahan Sidoklumpuk;
14. Kelurahan Sidokumpul;
15. Desa Bluru Kidul;
16. Desa Kemiri;
17. Kelurahan Pucang;
18. Kelurahan Magersari;
19. Desa Jati;
20. Desa Cemengkalang;
21. Desa Cemengbakalan;
22. Kelurahan Urangagung;
23. Desa Sariogo; dan
24. Desa Sumput





**Tabel 1.3 Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo  
2021-2026 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)**

<b>NO</b>	<b>Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)</b>	<b>RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026</b>
1	Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
3	Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua	Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang



<b>NO</b>	<b>Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)</b>	<b>RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026</b>
		Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.
10	Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.



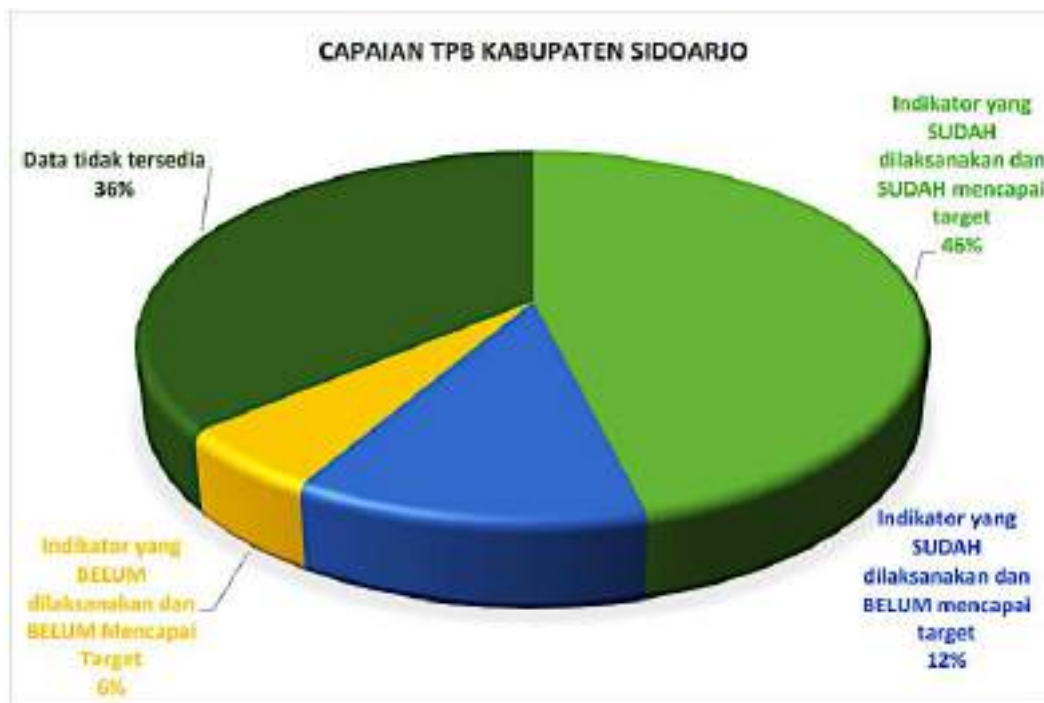
<b>NO</b>	<b>Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)</b>	<b>RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026</b>
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudra untuk Pembangunan Berkelanjutan	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk	Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai





NO	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026
	Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.

**Gambar 1.6 Capaian TPB Kabupaten Sidoarjo**



Terkait dengan Tujuan 17, yaitu Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan tidak menjadi kewenangan Kabupaten sehingga tidak termasuk dalam analisa capaian TPB/SDGs yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dari keseluruhan indikator yang telah dikaji pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Sidoarjo yang sudah dilaksanakan dan sudah



mencapai target sebesar 46%. Mayoritas indikator yang tercapai merupakan TPB Tujuan 1 dan 3 yaitu sebesar masing-masing 15 indikator.

Indikator TPB Tujuan 1 yang telah tercapai yaitu:

1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
2. Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.
3. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
4. Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.
5. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.
6. Pendampingan psikososial korban bencana sosial.
7. Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.
8. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
9. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
10. Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.
11. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
12. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.
13. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.
14. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)
15. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan



Sedangkan indikator TPB Tujuan 3 yang telah tercapai yaitu:

1. Angka Kematian Ibu (AKI).
2. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
3. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
4. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.
5. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.
6. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.
7. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.
8. Prevalensi HIV pada populasi dewasa.
9. Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
10. Kejadian Malaria per 1000 orang.
11. Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.
12. Persentase merokok pada penduduk umur  $\geq 15$  tahun.
13. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.
14. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.
15. Total Fertility Rate (TFR).

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 dengan KLHS RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2016 dapat dilihat dari persandingan isu strategis sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.



**Tabel 1.4 Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo  
2021-2026 Dengan KLHS RPJMD**

<b>No.</b>	<b>Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026</b>	<b>RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026</b>
1	Tatakelola Pemerintah daerah yang inovatif dan handal	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.
2	Akses masyarakat terhadap pelayanan Pendidikan dan kesehatan	Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.
3	Infrastruktur publik yang berkualitas dan ramah lingkungan	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.
4	Optimalisasi potensi sektoral	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.
5	Integrasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.
6	Iklm investasi yang kondusif dan pengelolaan hubungan industrial yang harmonis	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.



<b>No.</b>	<b>Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026</b>	<b>RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026</b>
7	Kelembagaan ekonomi masyarakat yang kuat melalui pemberdayaan masyarakat, koperasi dan UMKM	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.  Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.
8	Kebijakan tata ruang (spasial) dan penganggulangan bencana	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.
9	Pembangunan desa mandiri dan penguatan pasar tradisional	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
10	Pengendalian jumlah penduduk	Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.
11	Penguatan harmonisasi kehidupan bermasyarakat	Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan



<b>No.</b>	<b>Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026</b>	<b>RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026</b>
		serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.
12	Penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
13	Pengarutamaan Gender	Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.
14	Penguatan Kerjasama eksternal pembangunan infrastruktur	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.

## **I.4 Maksud dan Tujuan**

### **I.4.1 Maksud**

RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ke dalam perencanaan lima tahun, guna memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan.

### **I.4.2 Tujuan**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 bertujuan untuk:



- a. Mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah melalui kebijakan dan program pembangunan daerah yang dilandasi oleh prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), dilaksanakan secara sinergis, terpadu, dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan daerah secara efisien, efektif serta berkeadilan;
- b. Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta instrumen bagi Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
- c. Memberikan arah pembangunan daerah jangka menengah, sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD.
- d. Mewujudkan pembangunan daerah yang mengedepankan pendekatan *People Centered Development* dengan memperhatikan kearifan local;
- e. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

## **I.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini disajikan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### ***1.1. Latar Belakang***

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.



### ***1.2. Dasar Hukum Penyusunan***

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

### ***1.3. Hubungan Antar Dokumen***

Bagian ini menjelaskan hubungan Rancangan awal RPJMD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain seperti: RPJMD, RPJPD, RPJMD Provinsi, RTRW Nasional, dan RTRW Provinsi.

### ***1.4. Maksud dan Tujuan***

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Awal RPJMD bagi daerah yang bersangkutan.

### ***1.5. Sistematika Penulisan***

Mengemukakan sistematika penyusunan dokumen Rancangan awal RPJMD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab.

## **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi empat aspek serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

### ***2.1. Aspek Geografi dan Demografi***

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

### ***2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat***

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari capaian indikator kinerja pembangunan daerah aspek kesejahteraan masyarakat.

### ***2.3. Aspek Pelayanan Umum***

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

### ***2.4. Aspek Daya Saing Daerah***





Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari upaya menunjukkan daya saing daerah.

### **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis mengenai pengelolaan keuangan daerah.

#### **3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

##### ***3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD***

Bagian ini menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah.

##### ***3.1.2. Neraca Daerah***

Bagian ini menguraikan sekurang-kurangnya mengenai perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

#### **3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan.

##### ***3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran***

Pada bagian ini diuraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja.

##### ***3.2.2. Analisis Pembiayaan***

Pada bagian ini diuraikan mengenai analisis deficit riil, komposisi penutup deficit riil anggaran, dan realisasi Silpa.

#### **3.3. Kerangka Pendanaan**

##### ***3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja***

Pada bagian ini diuraikan mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan- kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data.



### ***3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan***

Pada bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai perhitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya.

## **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Bab ini akan menguraikan mengenai permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

### ***4.1 Permasalahan Pembangunan***

Permasalahan pembangunan disajikan disajikan dalam dua bentuk, yang pertama berdasarkan urusan dan kedua adalah rumusan permasalahan pembangunan tingkat daerah. Permasalahan Pembangunan di tingkat Urusan sebagai pijakan untuk penetapan program prioritas, sedangkan permasalahan pembangunan tingkat daerah menjadi pijakan untuk perumusan isu strategis daerah.

### ***4.2 Isu Strategis***

Isu Strategis merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan dan sekaligus mencerminkan eskalasi isu penting di tingkat internasional, nasional, maupun regional. Isu Strategis Daerah pada saat perumusan RPJMD akan mendukung rumusan Misi kepala daerah terpilih.

## **BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran beserta indikator kinerja tujuan dan sasaran. Perumusan Visi, Misi dan Tujuan harus menunjukkan kerangka logis sistematis dan komprehensif, agar mampu menjadi dasar pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun program dan kegiatan untuk mencapainya.

## **BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Menjelaskan tentang bagaimana strategi dan arah kebijakan serta



program-program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang didukung Perangkat Daerah untuk mewujudkan misi dan mencapai visi daerah.

## **BAB VII : KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan kebijakan alokasi pendanaan/anggaran program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui penentuan pagu indikatif kepada perangkat daerah, sehingga alokasi anggaran ke dalam program benar-benar dapat mendukung pencapaian kinerja tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.

## **BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Menjelaskan apa dan bagaimana pengukuran kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator dan target kinerja yang terukur dan tepat dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang akhirnya akan mampu mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Indikator sebagaimana dimaksud berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

## **BAB IX : PENUTUP**

Menyajikan ketentuan mengenai Aturan Peralihan dan Kaidah Pelaksanaan. Aturan Peralihan menyampaikan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan perencanaan, sedangkan Kaidah Pelaksanaan menyampaikan berbagai petunjuk penggunaan dokumen RPJMD bagi aparatur pemerintah maupun *stakeholder* pembangunan lainnya.





tantangan dan Peluang yang besar dalam pengembangan kebijakan kewilayahan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.1. Jumlah Desa dan Kelurahan se Kecamatan Sidoarjo**

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
1	Sidoarjo	10	14	6.256,0
2	Buduran	15	-	4102,5
3	Candi	24	-	4.066,8
4	Porong	13	6	2.982,3
5	Krembung	19	-	3.120,5
6	Tulangan	22	-	2.955,0
7	Tanggulangin	19	-	3.229,0
8	Jabon	15	-	8.099,8
9	Krian	19	3	3.250,0
10	Balongbendo	20	-	3.140,0
11	Wonoayu	23	-	3.392,0
12	Tarik	20	-	3.606,0
13	Prambon	20	-	3.422,5
14	Taman	16	8	3.153,5
15	Waru	17	-	3.032,0
16	Gedangan	15	-	2.405,8
17	Sedati	16	-	7.943,0
18	Sukodono	19	-	3.267,8

Sumber: Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2021

Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 kecamatan, 31 kelurahan dan 322 desa. Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo meliputi Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Porong, Kecamatan Krembung, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Jabon, Kecamatan Krian, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Tarik, Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Prambon, Kecamatan Taman, Kecamatan Waru, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sedati dan Kecamatan Sukodono. Batas administrasi Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik

Sebelah Timur : Selat Madura

Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan

Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto



### 2.1.2 Topografi

Bentang alam Kabupaten Sidoarjo merupakan medan dataran dan medan bergelombang. Kemiringan lereng berkisar antara 5 - 15 %. Bentang alam dataran terbentuk oleh proses endapan aluvial pantai dan delta sungai. Ketinggian 0-4 m berada di sebelah timur dan merupakan daerah pantai dan pertambakan, ketinggian 4-10 m berada di bagian tengah dan berair tawar serta ketinggian 10-20 m berada di bagian barat.

**Tabel 2.2. Tinggi Rata-Rata dari Permukaan Laut  
Tiap Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo**

No	Kecamatan	Tinggi Rata-Rata dari Permukaan Laut (m)
1	Sidoarjo	4
2	Buduran	4
3	Candi	4
4	Porong	4
5	Krembung	5
6	Tulangan	7
7	Tanggulangin	4
8	Jabon	2
9	Krian	12
10	Balongbendo	20
11	Wonoayu	4
12	Tarik	16
13	Prambon	10
14	Taman	9
15	Waru	5
16	Gedangan	4
17	Sedati	4
18	Sukodono	7

Sumber: Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2021

Kondisi topografis Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah delta yang diapit Kali Surabaya (disebelah Utara) dan Kali Porong (disebelah Selatan) dengan kemiringan tanah 2% (landai), berada pada ketinggian 0-25 meter dpl, daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki dua karakteristik air tanah. Pada bagian Timur seluas 214,20 km<sup>2</sup> (29,99%) berketinggian 0-3 meter dpl berair tawar, banyak dimanfaatkan untuk permukiman, perdagangan dan



perkantoran. Sedangkan dibagian Barat 208,56 (29,20%) berair tawar, banyak dimanfaatkan untuk pertanian. Pada umumnya kedalaman air tanah berada pada kedalaman rata-rata antara 0-5 m dari permukaan tanah. Secara administratif, Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi desa dengan kategori perdesaan (rural area) dan desa dengan kategori perkotaan (urban area).

Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 71.424,25 Ha dan berdasarkan karakteristik topografinya terbagi atas tiga kelas, yaitu :

1. 0-3 meter merupakan daerah pantai dan pertambakan yang berair asin/payau berada di belahan Timur seluas 27.011,25 Ha atau 37,82%;
2. 3-10 meter merupakan daerah bagian tengah sekitar jalan protokol yang berair tawar seluas 25,889 Ha atau 36,24%; dan
3. 10-25 meter terletak di daerah bagian Barat seluas 18.524 Ha atau 25,95%.

### **2.1.3 Geologi**

Geologi yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut : Jenis lapisan batuan plistosen fasien sedimen seluas 2.736 Ha yang tersebar di Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Taman, Kecamatan Waru, Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Sedati. Jenis lapisan batuan alluvium terdiri seluas 24.602,07 Ha dari yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.



**Tabel 2.3 Jenis Batuan Tiap Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo**

No	Kecamatan	Plistosen Fasien Sedimen	Alluvium
1	Sidoarjo	42,00	6.214,00
2	Buduran	1.469,00	2.633,50
3	Candi	0,00	40,67
4	Porong	0,00	29,82
5	Krembung	0,00	29,55
6	Tulangan	0,00	31,21
7	Tanggulangin	0,00	32,29
8	Jabon	0,00	81,00
9	Krian	0,00	32,50
10	Balongsendo	0,00	31,40
11	Wonoayu	0,00	33,92
12	Tarik	0,00	36,06
13	Prambon	0,00	34,23
14	Taman	448,00	2.705,50
15	Waru	384,00	2.648,00
16	Gedangan	38,00	2.367,75
17	Sedati	355,00	7.588,00
18	Sukodono	0,00	32.68,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.736,00</b>	<b>24.602,07</b>

*Sumber: Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2021*

Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut: Jenis tanah alluvial kelabu seluas 47.017,64 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Sifat tanah alluvial kelabu adalah permiabilitasnya lambat dengan produktifitas tanah beraneka dari rendah sampai sedang. Peruntukan lahan untuk jenis tanah alluvial kelabu adalah palawija dan perikanan.

Jenis tanah assosiasi alluvial kelabu dan alluvial coklat kekuning-kuningan seluas 4.970,23 Ha yang tersebar di Kecamatan Krembung, Kecamatan Balongsendo, Kecamatan Tarik dan Kecamatan Prambon. Jenis tanah alluvial hidromorf seluas 21.361,23 Ha yang tersebar di Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Porong, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Jabon, Kecamatan Sedati dan





Kecamatan Waru. Jenis tanah kelabu tua seluas 870,70 Ha yang tersebar di Kecamatan Buduran dan Kecamatan Gedangan.

**Tabel 2.4 Lapisan Tanah Tiap Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo**

No	Kecamatan	Alluvial Kelabu	Alluvial Kelabu dan Cokelat Kekuningan	Alluvial Hidromort	Kelabu Tua
1	Sidoarjo	2.966,11	0,00	3.289,89	0,00
2	Buduran	1.480,02	0,00	1.853,22	769,26
3	Candi	1.552,88	0,00	2.513,87	0,00
4	Porong	2.083,07	0,00	899,18	0,00
5	Kremlung	2.500,95	454,05	0,00	0,00
6	Tulangan	3.120,50	0,00	0,00	0,00
7	Tanggulangin	1.564,77	0,00	1.664,23	0,00
8	Jabon	2.580,20	0,00	5.519,55	0,00
9	Krian	3.250,00	0,00	0,00	0,00
10	Balombangendo	3.140,00	2.795,55	0,00	0,00
11	Wonoayu	3.392,00	0,00	0,00	0,00
12	Tarik	2.618,93	987,07	0,00	0,00
13	Prambon	2.688,94	733,56	0,00	0,00
14	Taman	3.153,50	0,00	0,00	0,00
15	Waru	2.020,67	0,00	1.011,33	0,00
16	Gedangan	2.304,31	0,00	0,00	101,44
17	Sedati	3.333,04	0,00	4.609,96	0,00
18	Sukodono	3.267,75	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>47.017,64</b>	<b>4.970,23</b>	<b>21.361,23</b>	<b>870,70</b>

Sumber: Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2021

Data geologi Kabupaten Sidoarjo berdasarkan luasan dari masing-masing jenis batuan adalah sebagai berikut :

- a. Jenis lapisan batuan *Plistosen Fasien Sedimen* seluas 2.736 Ha, tersebar di Kecamatan Sidoarjo, Buduran, Taman, Waru, Gedangan, dan Sedati.
- b. Jenis lapisan batuan Alluvium seluas 68.688,3 Ha, tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.





Menurutnya sesar-sesar ini masih aktif dan mengalami pergerakan setiap tahunnya rata-rata sejauh 0,05 milimeter. Sesar yang aktif tersebut menimbulkan ancaman gempa, kerentanan tanah dan bangunan. Artinya jika kawasan tersebut mempunyai kondisi tanah yang buruk dan bangunan yang kurang kokoh, maka bisa dikategorikan kawasan berisiko tinggi.

#### 2.1.4. Klimatologi

Letak yang berada di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan Kabupaten Sidoarjo mengalami dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berkisar antara Bulan Juli-Oktober sedangkan musim penghujan berkisar antara bulan November-Juni. Keadaan suhu di Kabupaten Sidoarjo maksimum mencapai 35°C dan suhu minimum mencapai 20°C.

Bulan Januari hingga April curah hujan di Kabupaten Sidoarjo Suku cukup tinggi. Lokasi penakaran hujan di 18 Kecamatan, secara rata-rata curah hujan tertinggi pada tahun 2019 tercatat sebesar 629 mm Yang terjadi pada Bulan Maret. curah hujan pada Bulan Mei-Juni sangat rendah (curah hujan sebesar 13 mm dan 42 mm), bahkan di bulan Juli tidak terjadi hujan sama sekali. Lihat tabel 2.5. berikut.

**Tabel 2.5. Statistik Geografi dan Iklim di Sidoarjo**

Uraian	Satuan	2020
1. Rata-rata Curah Hujan (max)	Mm	629,0
2. Jumlah Hari HUjan (max)	Hari	25,0
3. Lapis Tanah Alluvial kelabu	Persen	65,8
4. Kelembapan Udara (%)	Min	34,0
5. Rata-rata Kecepatan Angin (max)	Km/jam	22,0
6. Tekanan Udara (min)	Mb	884,7
7. Suhu Udara:		
8. Minimum	°C	7,8
9. Maximum	°C	29,4

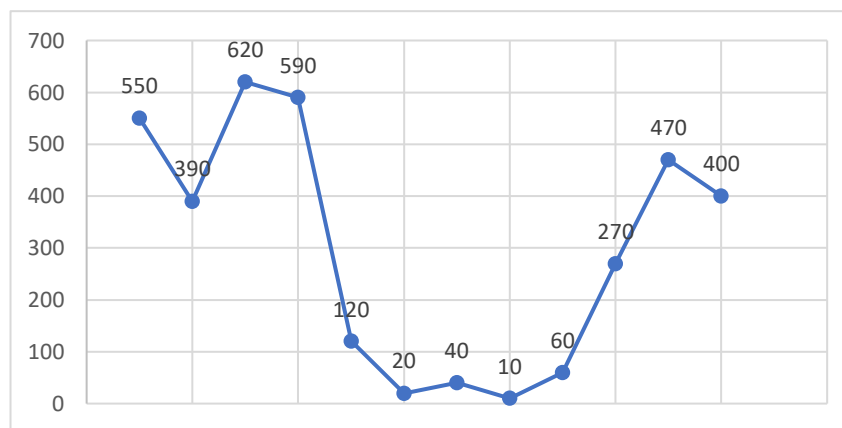
Sumber: Statistik Daerah Sidoarjo Tahun 2021



Rata-rata kelembapan udara pada tahun 2020 berkisaran antara 20,2- 22,1°C. Suhu udara Sidoarjo yang panas, mencapai puncaknya pada bulan Oktober-Desember dengan suhu diatas 27°C.

Rata-rata suhu udara terendah terjadi pada Bulan Juli - Agustus yang berkisar pada angka 20°C. Pada bulan-bulan tersebut suhu udara di wilayah Sidoarjo, pada pagi hari terasa dingin dan siang hari tidak terlampau panas. Sementara itu, suhu udara minimum pada siang hari (jam 12.00). Namun, suhu udara sepanjang tahun 2020 tidak pernah berada di bawah suhu 20°C. lihat gambar 2.3.

**Gambar 2.3. Curah Hujan dan Suhu Udara Per Bulan Tahun 2020**



Sumber: Statistik Daerah Sidoarjo, 2021

Sedangkan wilayah Sidoarjo secara hidrogeologi dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok lapisan penyimpan air tanah (*akuifer*) yaitu : *akuifer* dengan produktifitas tinggi, *akuifer* dengan produktifitas sedang, *akuifer* dengan produktifitas kecil dan daerah air tanah langka. Berdasarkan pengamatan di lapangan, hasil interpretasi data geolistrik, dan log pemboran, *akuifer* daerah Sidoarjo dapat dibagi dalam 2 sistem *akuifer*, yaitu : *akuifer* bebas (menghasilkan air melalui sumur-sumur gali yang dangkal), dan *akuifer* tertekan (sumur artesis).

#### 1. *Akuifer* Bebas (Sumur Gali)

Jenis *akuifer* ini dapat dijumpai pada sumur gali-sumur gali penduduk pada morfologi dataran dan pedataran bergelombang. Kedalaman muka air tanah



(statis) ini berkisar dari 1 hingga 14 meter di bawah muka tanah setempat (bmt), air tanah bebas di daerah dataran tersimpan dalam endapan *alluvial* (pada material yang belum terpadatkan). Kondisi muka air tanah dipengaruhi oleh perubahan dua musim (kemarau/hujan). Buaian (fluktuasi) air tanah berkisar 2 – 4 meter/tahun. Sumur gali yang terdalam terletak di Barat Kabupaten Sidoarjo yaitu di Desa Mliriprowo (S 7°28' dan E 112°30'), yaitu sekitar 14 meter (bmt), dan terdangkal di sekitar pantai antara lain Desa Wadungasih dan Siwalanpanji yaitu sekitar 2 meter (mbt). Pasokan air pada akuifer bebas di daerah pedataran berasal dari hujan dan aliran permukaan (air sungai, air laut).

## 2. Akuifer Tertekan (Sumur Dalam).

Akuifer tertekan (sumur dalam) umumnya dijumpai pada endapan aluvial yang bersifat tidak padu (lepas) merupakan kelanjutan dari akuifer bebas ke bagian bawahnya. Hal ini dapat dilihat dari penampang pemboran daerah Candi, Krian, dan Porong. Kedalaman akuifer yang disadap umumnya 30 sampai 120 meter dalam sistem banyak lapisan (*multilayer*) dengan ketebalan sekitar 4 hingga > 40 meter. Alas (*bedrock*) endapan alluvial ini berupa batu lempung dan lanau yang miring ke arah Barat. Zona ini tersebar cukup luas terutama di bagian Selatan dan Timur. Kedalaman (*bottom*) dari lapisan akuifer dangkal ini mengalami kontak dengan lapisan kedap (lempung) di sebelah Barat Sidoarjo sekitar 48 meter (bmt), sedangkan ke arah Timur (mendekati pantai) sekitar 27 hingga 38 meter (bmt). Dari hasil analisis kualitas air terhadap 10 contoh air yang diambil dari beberapa sumur gali (air tanah dangkal) penduduk menunjukkan kualitas air yang cukup normal. Adapun beberapa parameter yang melebihi baku mutu di antaranya kadar kandungan daya hantar listrik, natrium, klorida, sulfat dan zat padat terlarut. Adanya kandungan kimia yang melebihi baku mutu tersebut, diduga karena adanya pencemaran dari semburan lumpur yang berasal dari sekitar Sumur Banjar Panji 1. Pencemaran air tanah dangkal hanya terjadi sampai jarak kurang lebih 1 Km sebelah Barat dari pusat semburan.



### 3. Air Permukaan

Air permukaan atau limpasan permukaan adalah air yang berada di atas permukaan, seperti aliran sungai, dan kanal. Kabupaten Sidoarjo dilalui oleh beberapa sungai besar dengan bentuk yang berkelok-kelok yang dapat dilihat pada Kali Brantas - Kali Surabaya. Kali ini merupakan perbatasan dengan Kabupaten Mojokerto di bagian Utara. Sedangkan Kali Mas merupakan batas dengan Kabupaten Gresik. Adapun Kali Porong merupakan batas dengan Kabupaten Pasuruan di bagian Selatan. Beberapa sungai kecil dari Utara ke Selatan di antaranya Kali Biwangan Gede, Kali Sumber, Kali Ketingan, Kali Kedunggulung, dan Kali Buwon. Sedangkan kanal (sebagai saluran induk) terdapat pada saluran induk Mangetan, Pelayaran, Lengkong, Kemlaten, dan Porong. Daerah aliran sungai-sungai dan kanal-kanal ini termasuk pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. Pola aliran sungai umumnya berbentuk pola sejajar yang mengalir ke arah hilir (Timur) Kabupaten Sidoarjo yang lahannya berupa rawa dan akhirnya bermuara ke Selat Madura.

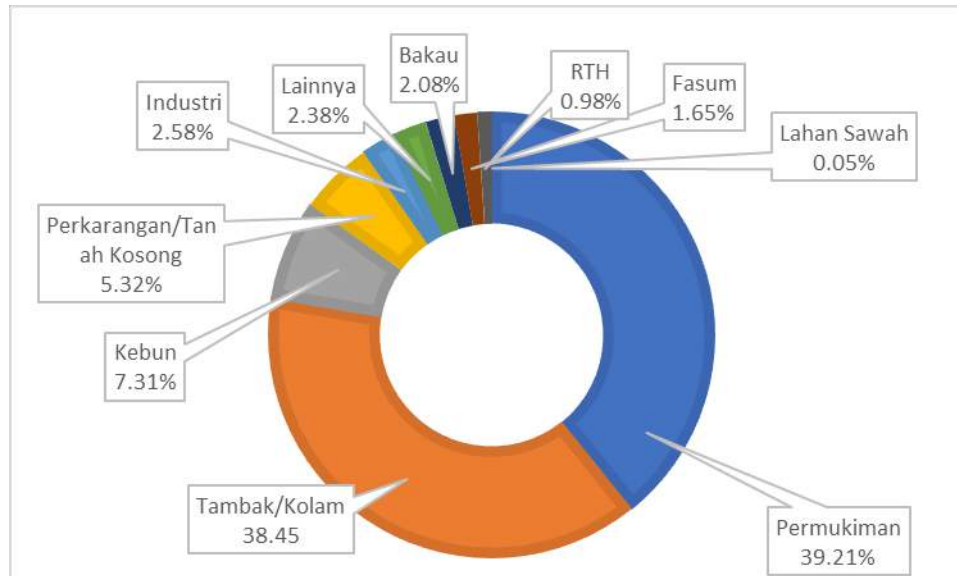
#### **2.1.5. Hidrologi**

Kabupaten Sidoarjo dilalui oleh beberapa sungai besar dengan bentuk yang berkelok-kelok seperti yang dapat dilihat pada Kali Brantas - Kali Surabaya. Kali ini merupakan berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto di bagian utara Kabupaten Sidoarjo. Adapun Kali Porong merupakan batas dengan Kabupaten Pasuruan di bagian selatan. Beberapa sungai kecil dari utara ke selatan di antaranya Kali Biwangan Gede, Kali Sumber Kali Ketingan, Kali Kedunggulung dan Kali Buwon. Sedangkan kanal (sebagai saluran induk) terdapat sebagai saluran induk Mangetan, Pelayaran, Lengkong, Kemlaten, dan Porong. Daerah aliran sungai-sungai dan kanal- kanal ini termasuk pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. Pola aliran sungai umumnya berbentuk pola sejajar yang mengalir ke arah hilir (timur) Kabupaten Sidoarjo yang lahannya berupa rawa dan akhirnya bermuara ke Selat Madura.



## 2.1.6. Penggunaan Lahan

**Gambar 2.4. Penggunaan Lahan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020**



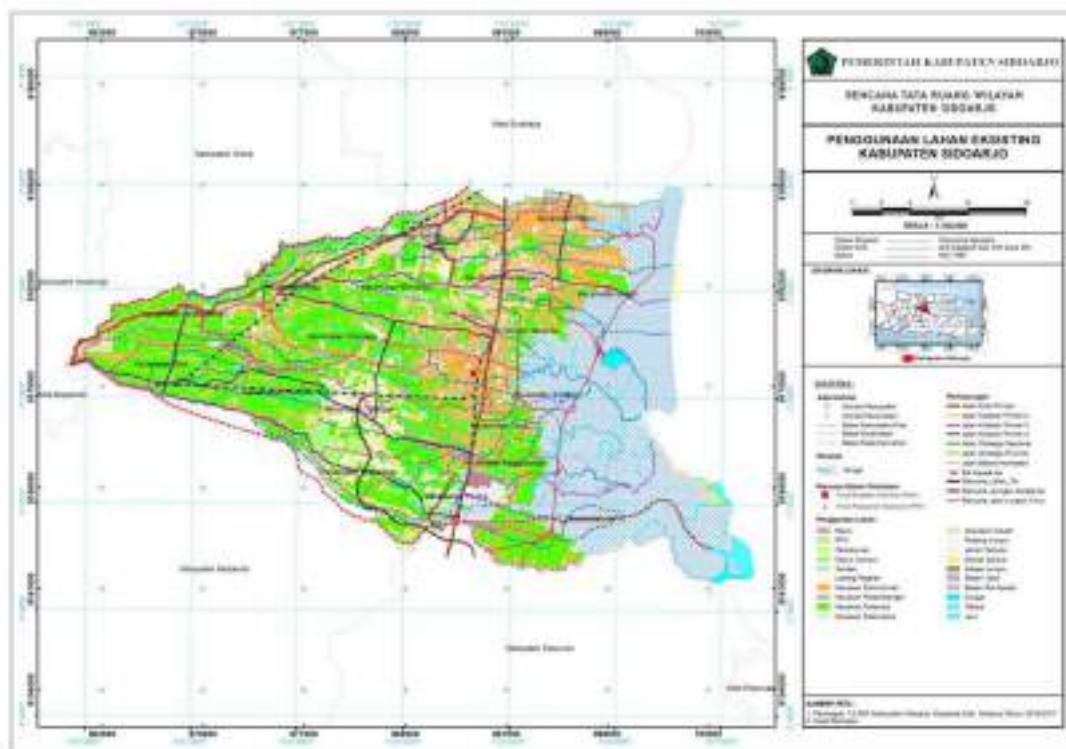
Sumber: BPS Statistik Daerah Sidoarjo, 2020

Gambar 2.4. menunjukkan bahwa penggunaan lahan terbesar adalah Lahan peruntukan Permukiman sebesar 39,21%, peruntukan terbesar kedua adalah lahan tambak/kolam, dan ketiga adalah peruntukan lahan kebun sebesar 7.31%. Lahan perkarangan/lahan kosong belum dimanfaatkan sebesar 5,32%, sedangkan penggunaan lahan terkecil adalah lahan sawah sebesar 0,05%.

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu kabupaten pendukung perkembangan perekonomian Provinsi Jawa Timur. Kabupaten yang berdampingan langsung dengan Ibu Kota Provinsi memiliki karakteristik dan peluang besar dalam meningkatkan wilayah perdagangan, perindustrian dan jasa. Perkembangan Kawasan lahan tidak jauh berbeda dengan Kota Surabaya, Gresik, dan Mojokerto. Berikut gambar peta penggunaan lahan Kabupaten Sidoarjo.



**Gambar 2.5. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Sidoarjo**



*Sumber: BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo, 2020*

Berdasarkan gambar 2.5. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Sidoarjo, peta diatas memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah Kabupaten di masa mendatang. Pengembangan wilayah Kabupaten tidak luput pada letak daerah strategis suatu Kawasan.

### **2.1.7. Potensi Pariwisata**

Salah satu potensi Kabupaten Sidoarjo merupakan potensi yang dapat dikembangkan ke depan adalah pariwisata, baik karena ciri-cirinya yang khas, dan kualitasnya. Disamping itu juga, potensi unggulan tersebut berasal dari pemanfaatan potensi yang berasal dari sumber daya alam dan kekayaan budaya lokal yang potensial untuk ditumbuh kembangkan.

Jenis sektor pariwisata akomodasi dan penyediaan makan minum yang pada tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Potensi Industri Pengolahan terdiri dari berbagai macam produk/ komoditas yang tersebar di





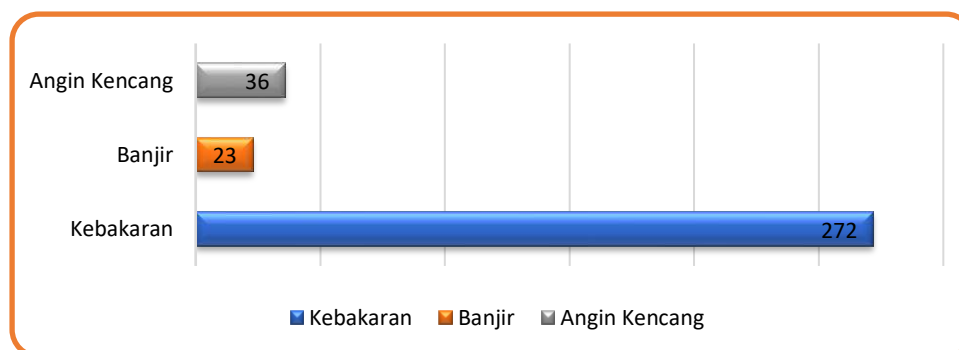
18 Kecamatan. Kabupaten Sidoarjo mempunyai potensi yang cukup besar dalam mengembangkan sektor pariwisata, terlihat dari peningkatan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang semakin meningkat tiap tahunnya, dengan jenis potensi obyek wisata, sebagai berikut :

1. Wisata Alam
2. Wisata Buatan
3. Wisata Minat Khusus dan Belanja
4. Wisata Pemancingan
5. Wisata Sejarah
6. Hiburan Lain
7. Wisata Cagar Budaya
8. Wisata Industri dan Belanja
9. Wisata Religi
10. Wisata Ruang Terbuka Hijau (RTH)
11. Wisata Edukasi
12. Wisata Olahraga
13. Wisata Geologi

#### 2.1.8. Daerah Rawan Bencana

Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah dengan tingkat resiko bencana sedang. Bencana di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan intensitas kasusnya, dibagi menjadi 3 yaitu angin kencang, banjir, dan kebakaran. Jumlah kejadian bencana paling tinggi adalah kebakaran, dimana selama tahun 2020 terjadi kebakaran sebanyak 272 kasus, disusul kemudian angin kencang sebanyak 33 kasus dan terakhir banjir sebanyak 23 kasus.

**Gambar 2.6. Jumlah Bencana Alam Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020**

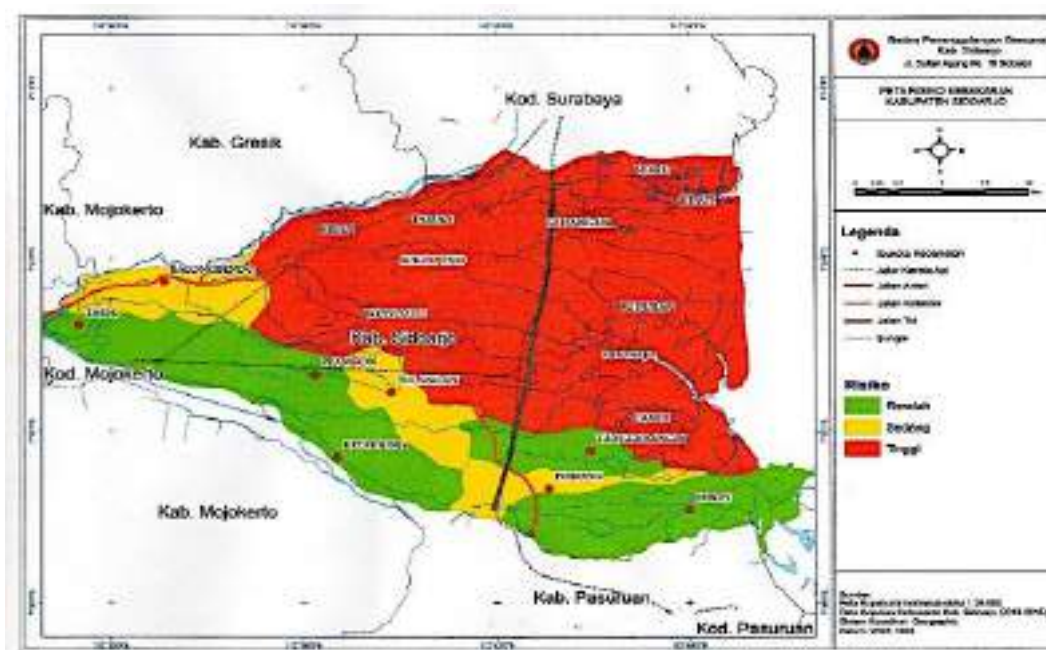


Sumber: BPBD Kabupaten Sidoarjo, 2020



Kebakaran merupakan jenis bencana yang tidak dapat diprediksi akan tetapi dapat dicegah. Penentuan daerah rawan kebakaran di Kabupaten Sidoarjo didasarkan atas kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, data kejadian kebakaran, kondisi bangunan dan proporsi kegiatan terbangun dengan luas. Kasus kebakaran terjadi hingga ratusan kali jumlahnya. Peta rawan bencana kebakaran kabupaten Sidoarjo tercantum dalam gambar di bawah ini:

**Gambar 2.7. Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Kabupaten Sidoarjo**

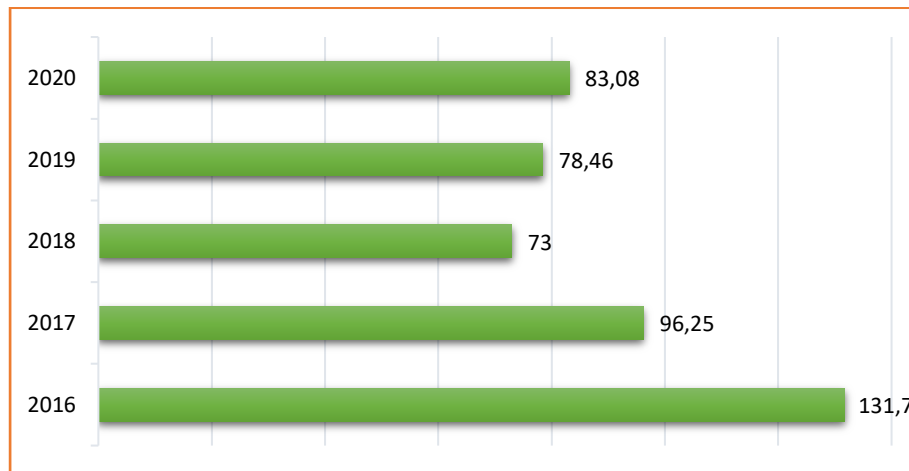


Sumber: BPBD Kabupaten Sidoarjo, 2020

Pada tahun 2020 Kabupaten Sidoarjo berupaya menekan angka jumlah kejadian kebakaran dengan antisipasi, kesiapsiagaan, dan pemetaan daerah rawan terjadi kebakaran. Kasus kebakaran yang berhasil ditangani pada tahun 2020 mencapai angka 83,03 persen. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun 2019 dan tahun 2018. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat Gambar 2.8. berikut:



**Gambar 2.8. Persentase Penanganan Kasus Kebakaran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020**



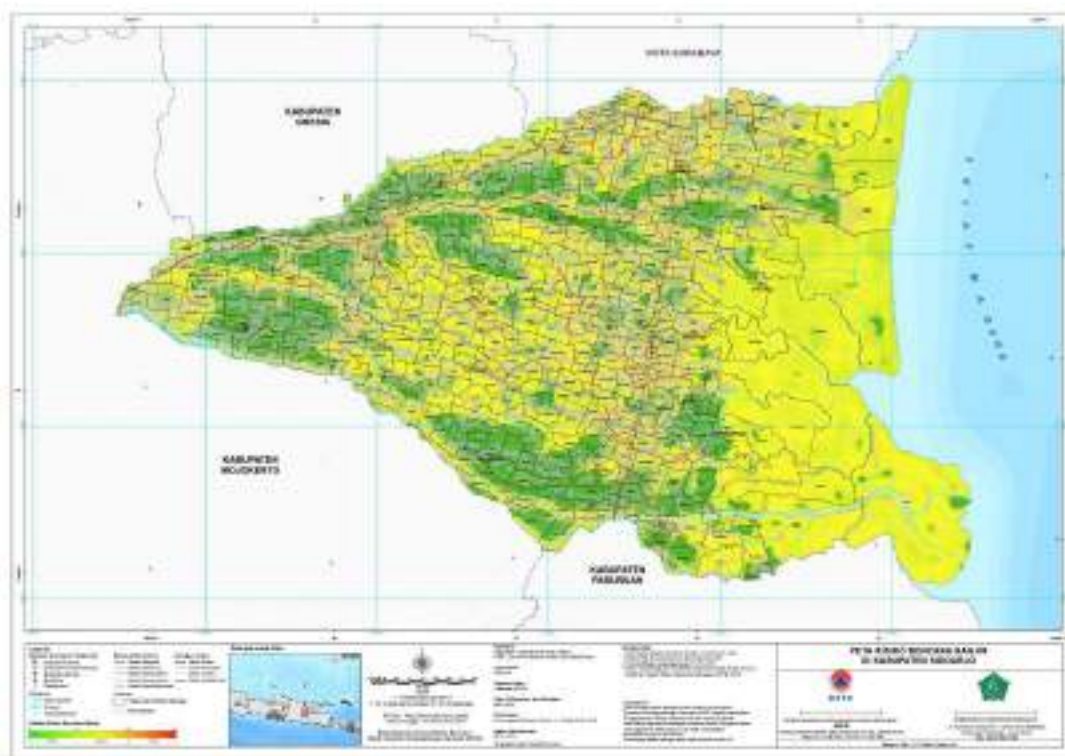
Sumber: BPBD Kabupaten Sidoarjo 2020

Selain kebakaran, sebagai wilayah yang secara umum dapat dikategorikan sebagai dataran rendah dan merupakan wilayah sungai, Kabupaten Sidoarjo sangat rentan terhadap banjir. Wilayah yang rentan banjir adalah wilayah di kanan-kiri sungai, khususnya pada musim penghujan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar fungsi sungai di Kabupaten Sidoarjo sebagai saluran irigasi sekaligus saluran pematusan. Kawasan yang sering mengalami banjir atau genangan terbanyak adalah di wilayah Kota Sidoarjo dan Kecamatan Waru, serta daerah pemukiman baru yang memang sarana drainasenya belum memadai.

Di samping itu pada daerah hilir sungai atau sebelah Timur Jalan Raya Surabaya Sidoarjo Porong dan antara Jalan Tol dengan Jalan Raya sering terjadi genangan. Beberapa daerah yang rawan dan sering terkena banjir/genangan antara lain: Kawasan perkotaan Bluru Kidul, Rangka, Gebang, Kemiri, Suko dan daerah lainnya di luar kota Sidoarjo. Sebaran genangan di Kabupaten Sidoarjo secara menyeluruh dapat dilihat pada peta banjir berikut ini:



**Gambar 2.9. Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Sidoarjo**



*Sumber: BPBD Kabupaten Sidoarjo 2020*

Sedangkan bencana geologi yang ditimbulkan akibat semburan lumpur Sidoarjo yang terjadi sejak 29 Mei 2006 hingga kini masih perlu penanganan lebih lanjut. Berdasarkan peta area terdampak, luas wilayah penanganan sosial kemasyarakatan dari bencana semburan lumpur Lapindo mencapai 1.143,3 hektar. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007, wilayah yang menjadi tanggung jawab PT Lapindo seluas 634,5 hektar. Peta lokasi lumpur Sidoarjo sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.



**Gambar 2.10. Peta Lokasi Bencana Lumpur Sidoarjo**



*Sumber : Citra Google Map, diakses Juli 2021.*

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah penurunan tanah (*land subsidence*) disekitar lokasi semburan lumpur. Selain resiko kemungkinan terjadinya tanah amblas, resiko lain adalah terjadinya banjir di beberapa titik. Berdasarkan penelitian BPBD Kabupaten Sidoarjo di daerah Porong menggunakan data InSAR mengemukakan bahwa sebagian kawasan Tanggulangin mengalami penurunan yang signifikan sejak akhir tahun 2019. Diantara desa yang masuk dalam kawasan tersebut, Desa Kedungbanteng dan Banjarasri merupakan desa yang terdampak cukup parah karena berada pada titik terendah penurunan.

Dampak yang paling terlihat dari peristiwa ini yaitu terjadinya genangan yang cukup mengkhawatirkan dan sulit untuk dikendalikan. Hasil studi terdahulu menggunakan pengamatan GPS dan analisis hidrologi menunjukkan terjadinya perubahan elevasi saluran afvour yang dipengaruhi oleh penurunan tanah sehingga menyebabkan sejumlah volume air yang seharusnya dialirkan ke muara menggenangi kedua desa tersebut. Sedangkan lokasi secara umum area terdampak lumpur Sidoarjo sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.



**Gambar 2.11. Peta Area Terdampak Lumpur Sidoarjo**



*Sumber : Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2013*

*Keterangan :*

- Area 1 : Area Terdampak tanggal 22 Maret tahun 2007 berdasarkan Perpres No 14 Tahun 2007
- Area 2 : Wilayah penanganan luapan lumpur di Desa Besuki, Pajarakan, Desa Kedungcangkring berdasarkan Perpres No 48 tahun 2008.
- Area 3 : Wilayah penanganan luapan lumpur Desa Siring bagian Barat, Desa Jatirejo, Desa Mindi, berdasarkan Perpres No 68 tahun 2011
- Area 4 : yang berada di sekitar area luapan lumpur adalah daerah tidak aman sebagaimana ditetapkan oleh Perpres No 33 tahun 2013.

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 33 tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, diketahui bahwa



selain area 1, 2 dan 3 yang telah ditetapkan sebagai area terdampak, juga terdapat area 4 yang merupakan wilayah tidak aman yang setiap saat dapat menimbulkan bencana/kerugian bagi masyarakat. Beberapa wilayah sebagaimana disajikan di atas merupakan titik penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan kabupaten Sidoarjo.

**Gambar 2.12. Sebaran Titik Penurunan Tanah**

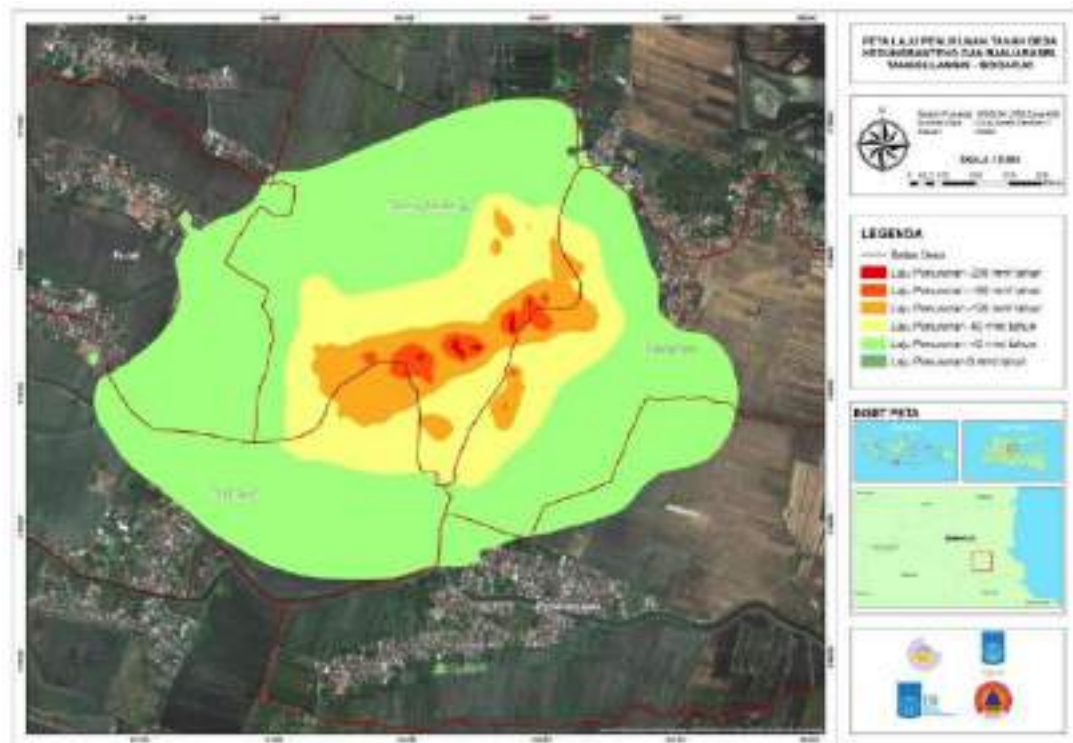


*Sumber : BPBD Kabupaten Sidoarjo, 2021*

Pada peta lokasi di atas, terjadi penurunan tanah hingga mencapai 60-80 cm selama kurun waktu 15 tahun. Hal ini yang menyebabkan banjir genangan di wilayah tersebut selalu terjadi, khususnya disaat musim penghujan. Selain itu genangan yang terjadi dalam waktu yang lama, sehingga sangat meresahkan warga.



**Gambar 2.13. Peta Kumulatif Penurunan Tanah (*cumulative land subsidence*) Wilayah Desa Kedungbanteng dan Banjarsari**



Sumber : BPBD Kabupaten Sidoarjo, 2021

Sedangkan berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa penurunan tanah membentuk pola cekungan, dimana laju penurunannya sesuai dengan pola warnanya. Daerah dengan warna hijau memiliki laju penurunan tanah sebesar 40 mm/ tahun, sedangkan gambar di dalamnya dengan warna kuning memiliki laju penurunan tanah sebesar 80 mm/ tahun. Daerah yang memiliki warna coklat adalah daerah yang genangan banjirnya cukup lama, disebabkan daerah ini memiliki laju penurunan tanah sebesar 120 mm/tahun. Sedangkan titik yang berwarna orange dan merah, masing-masing memiliki laju penurunan tanah sebesar 160 dan 200 mm/ tahun.

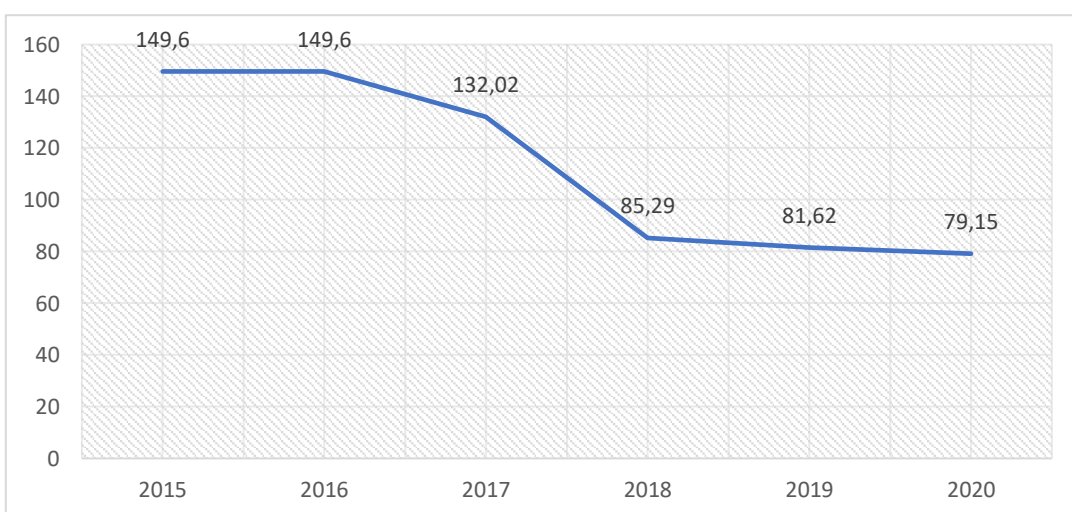
Mengacu pada berbagai Perkembangan kebencanaan di Sidoarjo di atas, maka berpengaruh terhadap nilai Indeks Resiko Bencana (IRB). Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2015 hingga tahun 2020 terus mengalami perbaikan. Pada tahun 2015 IRB Sidoarjo terkategori tinggi dengan skor 149,6 dan turun menjadi 79,15 pada tahun 2020 dengan





kategori sedang. Tren menurun hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Sidoarjo sedang berupaya terus dalam menangani bahaya bencana yang sering terjadi dalam wilayah administrasi daerah. Beberapa ator yang efektifitas penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bencana dan Kebakaran; Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD Kabupaten Sidoarjo; Optimalisasi Fungsi Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana; Pembentukan dan Penguatan Forum PRB; Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah; Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana dan kebakaran lintas lembaga; Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan kebakaran melalui sosialisasi, edukasi dan komunikasi aktif (diklat, pelatihan, dsb.) Sertifikasi Personil Penanggulangan Bencana untuk Penggunaan Peralatan Penanggulangan Bencana; Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan di wilayah / daerah rawan bencana. Kenaikan tren terjadi karena minimnya alat, SDM, dan kendaraan pemadam kebakaran tidak mampu menjangkau areal pemukiman sempit.

**Gambar 2.14. Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2020**



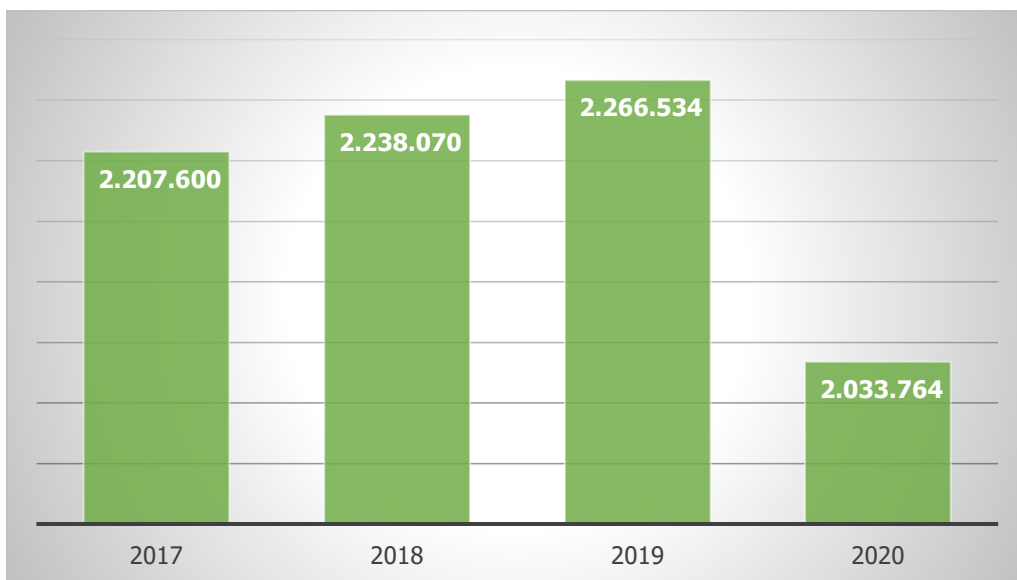
Sumber: BPBD Kabupaten Sidoarjo 2020



### 2.1.9. Kondisi Demografi

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 sebesar 2.033.764 jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan sebagaimana gambar 2.15. berikut.

**Gambar 2.15. Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020**



Sumber: Sidoarjo dalam angka 2021

Penurunan penduduk sebagaimana di atas disebabkan karena adanya verifikasi / validasi jumlah penduduk dari instansi terkait. Jumlah penduduk tersebut tersebar di 18 kecamatan sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2020**

KECAMATAN	TAHUN							
	2017		2018		2019		2020	
	LAKI LAKI	PEREMPUAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN
TARIK	35.486	35.094	35.878	35.431	36.357	35.850	34.830	34.359
PRAMBON	41.984	41.141	42.529	41.566	43.075	42.082	40.397	39.555
KREMBUNG	36.995	36.752	37.476	37.230	37.986	37.745	35.024	34.863



KECAMATAN	TAHUN							
	2017		2018		2019		2020	
	LAKI LAKI	PEREMPUAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN
PORONG	43.163	42.552	43.175	42.615	43.160	42.540	37.102	36.344
JABON	30.228	29.984	30.437	30.222	30.677	30.415	28.274	27.992
TANGGULANGIN	53.168	52.255	53.445	52.558	53.840	52.845	45.097	44.707
CANDI	81.531	80.526	83.326	82.226	84.923	83.856	76.872	76.551
SIDOARJO	111.467	111.764	112.668	113.093	114.090	114.623	100.000	101.115
TULANGAN	51.864	51.280	53.067	52.383	54.137	53.546	51.423	50.916
WONOAYU	44.040	43.429	44.882	44.327	45.728	45.066	43.169	42.417
KRIAN	68.300	66.518	69.884	67.934	71.152	69.031	66.413	64.517
BALONGBENDO	39.727	38.694	40.217	39.157	40.613	39.609	38.449	37.601
TAMAN	117.000	113.668	118.360	114.987	119.287	115.951	104.753	103.062
SUKODONO	64.849	62.373	66.283	63.773	67.520	65.124	61.855	60.004
BUDURAN	52.490	51.502	53.699	52.541	54.810	53.647	49.710	49.000
GEDANGAN	66.870	65.271	67.564	65.958	68.239	66.548	60.286	59.717
SEDATI	54.847	53.166	55.742	54.089	56.723	55.065	48.821	47.815
WARU	119.057	118.565	119.737	119.611	120.339	120.335	99.933	100.821
<b>TOTAL</b>	<b>1.113.066</b>	<b>1.094.534</b>	<b>1.128.369</b>	<b>1.109.701</b>	<b>1.142.656</b>	<b>1.123.878</b>	<b>1.022.408</b>	<b>1.011.356</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pria maupun wanita diseluruh kecamatan hampir berjumlah seimbang, tidak ada perbedaan jumlah yang tinggi. Kecamatan yang jumlah laki-laki dan perempuan tertinggi pertama adalah Kecamatan Waru, kedua adalah Kecamatan Taman dan ketiga adalah Kecamatan Sidoarjo.

**Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Pindah Datang/Keluar Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH	
		KELUAR	DATANG
1	Tarik	445	564
2	Prambon	397	580
3	Krembung	302	372
4	Porong	575	424
5	Jabon	484	491
6	Tanggulangin	536	481
7	Candi	1.018	1.604
8	Sidoarjo	1.696	1.958
9	Tulangan	419	735
10	Wonoayu	307	504
11	Krian	979	1.434
12	Balongsendo	481	488
13	Taman	1.963	2.264



NO	KECAMATAN	JUMLAH	
		KELUAR	DATANG
14	Sukodono	770	1.354
15	Buduran	721	1.154
16	Gedangan	1.083	1.377
17	Sedati	838	1.158
18	Waru	2.528	2.145
	<b>TOTAL</b>	<b>15.542</b>	<b>19.087</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020, diolah

Mengacu pada tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk yang keluar dari wilayah administrasi kabupaten Sidoarjo sebesar 15.540 jiwa, dan jumlah penduduk yang masuk Kabupaten Sidoarjo sebesar 19.087. Berdasarkan pada data tersebut kita ketahui bahwa terdapat selisih 3.540 jiwa dimana penduduk yang masuk ke kabupaten Sidoarjo lebih banyak. Hal ini menjadi tantangan pengenalan jumlah penduduk ke depan.

**Tabel 2.8. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin (%) Tahun 2020**

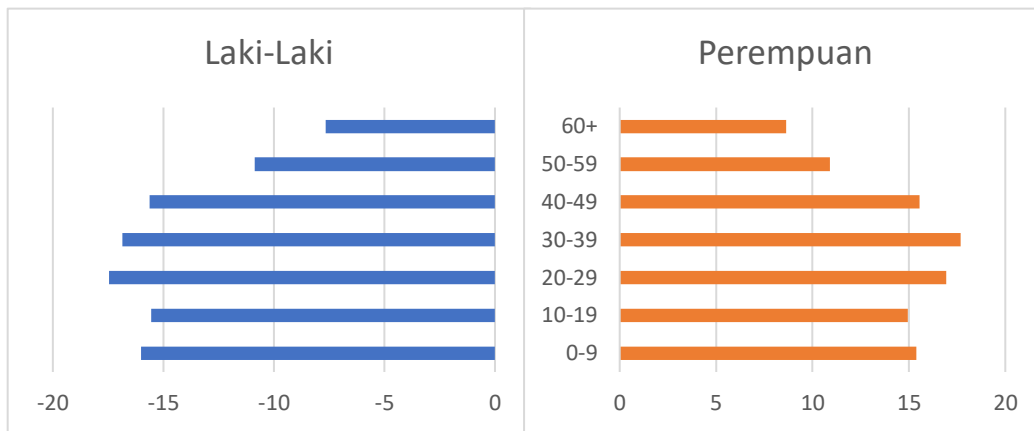
No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan
1	0-9	16.01	15.38
2	10-19	15.54	14.93
3	20-29	17.46	16.93
4	30-39	16.85	17.68
5	40-49	15.62	15.54
6	50-59	10.87	10.90
7	60+	7.65	8.64

Sumber: BPS Sidoarjo, 2021

Sedangkan apabila dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, golongan usia terbanyak adalah penduduk laki-laki terbanyak adalah golongan usia 20-29 yaitu 17,46%, sedangkan penduduk perempuan golongan usai terbanyak adalah golongan usia 30-39 sebesar 17.69%. Apabila komposisi penduduk diatas disajikan dalam ilustrasi gambar dapat disajikan dalam gambar di bawah ini.



**Gambar 2.16. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin (%) Tahun 2020**



Sumber: BPS Sidoarjo, 2021

Sedangkan berdasarkan struktur usia penduduk Kabupaten Sidoarjo membentuk Piramida jenis piramida muda (*expansive*), dimana sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi daerah karena tingkat produktifitas suatu wilayah akan jauh lebih tinggi karena banyaknya usia muda dan sedikitnya usia tua. Penduduk di Kabupaten Sidoarjo terbanyak berada di golongan usia produktif, yaitu antara 30 tahun sampai dengan 39 tahun.

**Tabel 2.9. Penduduk Per Kecamatan Menurut Pendidikan Tahun 2020**

NO	NAMA KECAMATAN	TDK/BLM SEKOLAH	BLM TAMAT SD/ SEDERAJAT	TAMAT SD/ SEDERAJAT	SLTP/ SEDERAJAT	SLTA/ SEDERAJAT	D-IV/ II	AKADEMI/ D-III/ SARJANA MUDA	D-IV/ S-I	S-II	S-III
1.	TARK	14.000	4.988	16.359	13.380	17.573	185	496	2.057	72	8
2.	PRAMBON	14.197	6.588	18.477	14.201	22.597	180	690	2.980	88	4
3.	KREMBUNG	13.414	6.562	13.825	12.830	20.042	174	677	2.475	87	5
4.	PORONG	20.476	1.794	15.643	12.682	19.207	121	623	2.775	120	5
5.	JASON	12.605	2.980	13.845	10.911	13.584	108	549	1.630	49	5
6.	TANGULANGIN	19.958	5.489	17.070	15.417	25.717	187	1.024	4.737	201	4
7.	CANDI	31.829	14.202	25.530	21.222	44.841	469	2.631	12.031	627	40
8.	SIDOARJO	44.243	33.853	27.411	24.501	58.968	825	4.811	24.910	1.523	70
9.	TULANGAN	19.302	9.500	18.719	17.054	31.518	117	1.119	4.747	161	2
10.	WONGAYU	23.176	4.322	20.446	19.367	21.795	184	760	3.478	131	5
11.	KRIAN	27.835	11.420	25.297	20.757	37.012	149	1.645	6.878	248	8
12.	BALOMBENDO	18.086	4.060	16.246	13.794	19.762	174	600	2.645	64	1
13.	TAMAN	36.331	20.240	30.543	28.769	68.332	1219	4.200	17.018	1.076	87
14.	SUKODONO	25.096	9.503	19.120	17.342	38.261	515	2.041	9.510	437	25
15.	BUGURAN	19.340	8.982	12.972	14.106	31.061	165	1.884	6.601	178	21
16.	GEDANGAN	29.664	6.875	16.815	16.947	36.305	428	2.205	10.375	363	28
17.	SEDATI	19.950	7.264	15.429	13.056	30.326	358	1.840	7.734	652	27
18.	WARU	42.105	15.550	23.441	25.481	62.121	674	4.438	24.923	1.856	95
TOTAL		429.107	194.768	347.288	305.207	599.228	6.492	32.134	150.834	8.553	433

Sumber: SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020, diolah



Penduduk Kabupaten Sidoarjo Sebagian besar penduduk Kabupaten Sidoarjo memiliki kualifikasi pendidikan paling banyak adalah lulusan SMA Sederajat sebanyak 599.248 orang, tertinggi kedua adalah jenjang Pendidikan tidak/belum sekolah sebanyak 429.107 orang, dan ketiga tertinggi adalah jenjang Pendidikan SLTP/Sederajat sebanyak 305.207 orang. Jumlah jenjang Pendidikan penduduk menurut pendidikan tersajikan dalam tabel 2.9. di atas.

## **2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Untuk menganalisis aspek kesejahteraan masyarakat, selanjutnya akan dipaparkan beberapa capaian data sebagai berikut.

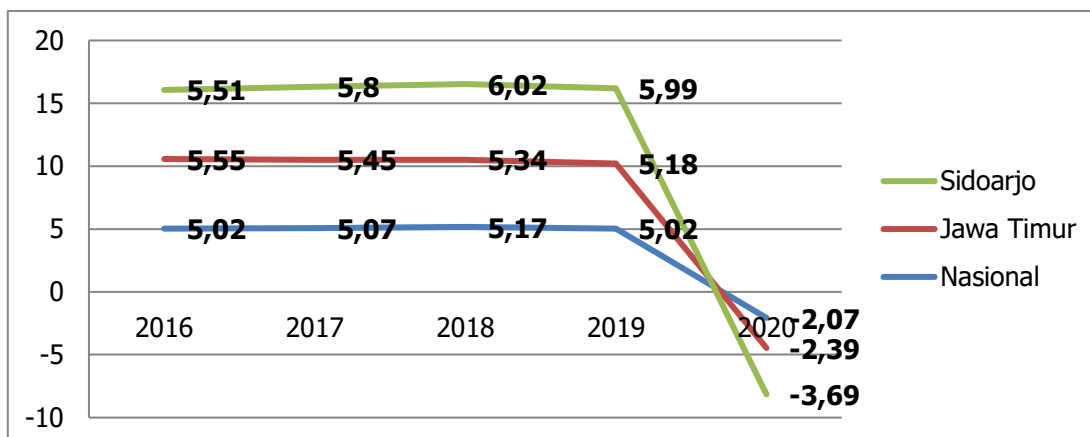
### **2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

#### **2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo cenderung mengalami perlambatan selama mulai tahun 2016. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 6,02 persen. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Sidoarjo berada pada angka 5,51 persen kemudian naik menjadi 5,8 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Sidoarjo sedikit mengalami perlambatan daripada tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 5,99 persen. Dan pada tahun 2020, sebagai akibat dari bencana pandemi *Covid-19* pertumbuhan ekonomi Sidoarjo tercatat mengalami kontraksi hingga minus 3,69 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Gambar 2.17 berikut ini.



**Gambar 2.17. Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020**



Sumber: BPS Kab. Sidoarjo dan Bappeda Kab. Sidoarjo (data diolah)

Struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo yang didominasi sektor Industri Pengolahan sebesar 47,80 %, perdagangan sebesar 16,31% dan Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,28% mendapat tekanan yang besar akibat kebijakan Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Melalui kebijakan pemulihan ekonomi dan sosial diharapkan dapat menstimulasi perekonomian ke titik yang lebih baik.

**Gambar 2.18. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK dan PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020**

Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)		
	2018	2019**	2020**	2018	2019**	2020**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.104,6	4.217,1	4.431,8	2.551,7	2.558,3	2.628,5
B Pertambangan dan Pengalihan	188,9	189,3	123,9	154,1	156,8	110,2
C Industri Pengolahan	88.415,2	97.732,9	100.918,7	65.974,7	71.841,3	72.546,5
D Pengadaan Listrik dan Gas	1.725,6	1.743,1	1.666,7	1.074,4	1.066,0	1.018,4
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Deur Ulang	118,6	121,9	129,3	100,7	105,3	110,2
F Konstruksi	17.134,3	17.732,8	17.121,4	12.240,1	12.962,7	11.221,2
G Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sep Motor	80.735,8	81.259,5	81.599,8	21.429,5	22.783,4	20.736,1
H Transportasi dan Pergudangan	22.659,5	22.949,0	14.604,9	10.853,0	9.721,8	6.489,6
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.500,5	7.119,5	6.733,7	4.649,6	5.008,0	4.653,7
J Informasi dan Komunikasi	6.467,9	7.064,6	7.616,7	5.626,1	6.265,6	6.739,9
K Jasa keuangan dan Asuransi	2.337,1	2.453,6	2.451,7	1.552,6	1.614,0	1.604,3
L Real Estate	1.728,3	1.872,3	1.958,8	1.271,8	1.348,3	1.385,9
M,N Jasa Perusahaan	306,1	333,4	316,8	210,9	214,1	207,8
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sos Wajib	3.438,2	3.721,6	3.798,3	2.205,8	2.389,7	2.342,5
P Jasa Pendidikan	2.163,7	2.361,3	2.471,6	1.525,1	1.637,6	1.685,8
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	568,8	618,0	679,8	432,8	459,0	497,1
R,S,T,U Jasa lainnya	862,8	712,2	634,8	499,7	530,5	449,6
<b>PDRB</b>	<b>189.256,0</b>	<b>204.201,6</b>	<b>197.240,7</b>	<b>122.552,1</b>	<b>140.492,9</b>	<b>135.305,3</b>

Sumber: BPS Kab. Sidoarjo



Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di sebagian besar lapangan usaha karena pandemi Covid-19. Nilai PDRB Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 135,31 triliun rupiah. Angka tersebut turun dari 140,49 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan sebesar 3,69 persen.

Tiga Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam diantaranya Transportasi dan Pergudangan; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil. Rendahnya daya beli masyarakat karena penurunan pendapatan menyebabkan sepi pasar jual beli online di awal-awal terjadinya pandemi COVID-19 sehingga permintaan jasa kurir pun ikut menurun. Peraturan pemerintah daerah yang mewajibkan usaha untuk berhenti beroperasi beberapa bulan karena COVID-19 menyebabkan produktivitas pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian menurun.

#### **2.2.1.2 Laju Inflasi**

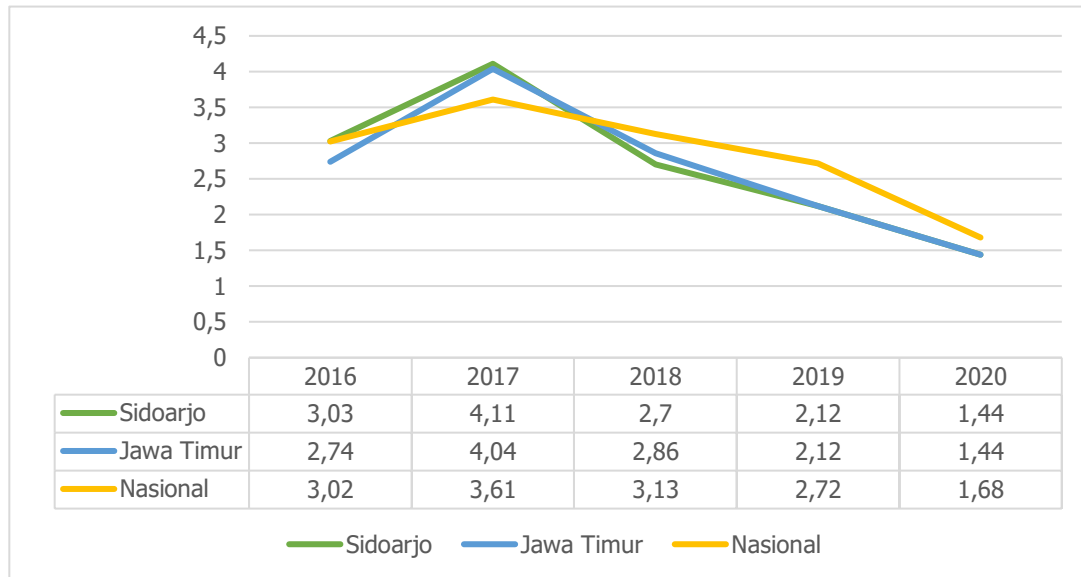
Perkembangan inflasi di Kabupaten Sidoarjo secara tidak langsung dipengaruhi oleh kebijakan makro ekonomi dari pemerintah pusat yang dapat mempengaruhi kenaikan harga-harga. Inflasi di Kabupaten Sidoarjo setiap bulan pada tahun 2020 fluktuatif. Hal ini sebagai dampak dari kebijakan penanganan pandemi *Covid-19* yang berlangsung selama tahun 2020. Pada tahun 2020 kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan sebagai bentuk antisipasi penyebaran *Covid-19* sehingga berdampak juga pada aktivitas ekonomi masyarakat. Inflasi yang sangat tinggi cenderung terjadi pada bulan-bulan tertentu seperti bulan ketika terdapat hari-hari besar seperti Idul Fitri, Tahun Ajaran Baru, Natal dan Tahun baru, hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya inflasi pada bulan Januari, Juni, dan Desember 2020. Peningkatan laju inflasi yang tinggi dikarenakan pada bulan-bulan





tersebut permintaan akan barang meningkat terutama permintaan bahan pokok sehingga menyebabkan kenaikan harga.

**Gambar 2.19. Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS, diolah

Kinerja Pemerintah kabupaten Sidoarjo dalam hal pengendalian inflasi bisa dikatakan cukup baik. Fluktuasi inflasi yang terjadi dapat ditekan dengan baik sehingga pergeseran angka inflasinya tidak terlalu lebar. Namun demikian, kinerja pengendalian Inflasi di Kabupaten Sidoarjo masih berada di bawah capaian Nasional dan Jawa Timur.

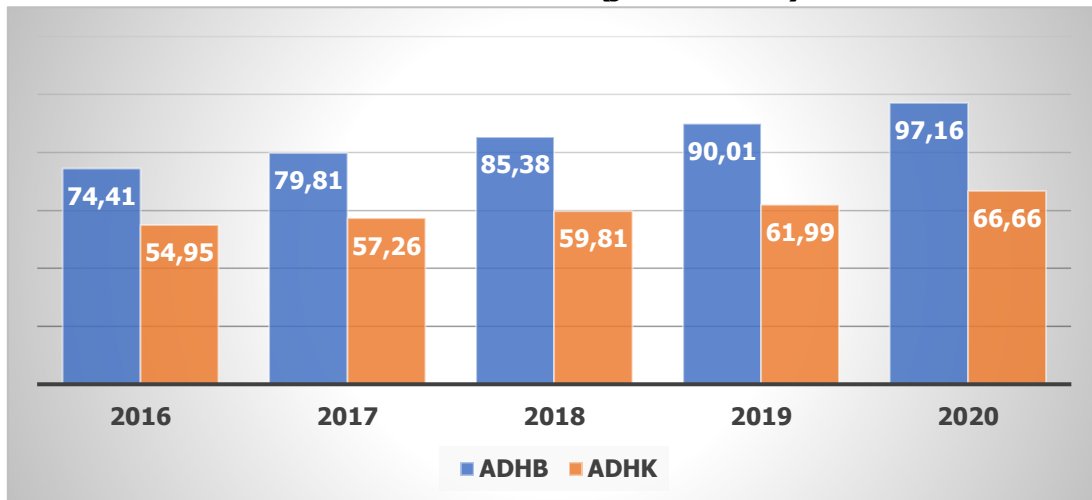
### 2.2.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian suatu daerah. Ukuran kemakmuran masyarakat suatu daerah dapat dilihat dari besarnya peningkatan PDRB per kapita. Pada umumnya, indikator ini disajikan dari angka atas dasar harga berlaku, walaupun sebetulnya masih mengandung perubahan harga barang dan jasa. Pertumbuhan agregat pendapatan perkapita regional tentunya tidak lepas dari besarnya PDRB Kabupaten Sidoarjo secara total. Peningkatan PDRB yang



beriringan dengan peningkatan jumlah penduduk akan diikuti oleh peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Sidoarjo.

**Gambar 2.20 Pendapatan Perkapita Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020 (juta/tahun)**



Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, diolah

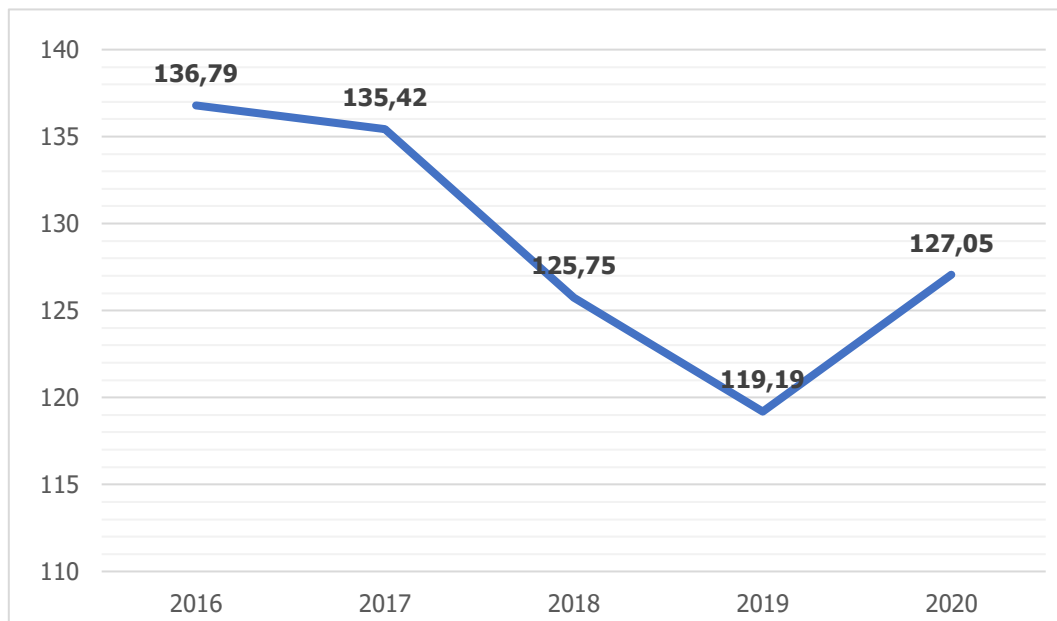
PDRB per kapita Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2020 selalu mengalami peningkatan. Apabila dilihat dari pertumbuhan PDRB Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2020 nampak sudah cukup signifikan. Pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB perkapita tahun 2019 sebesar Rp. 90,01 juta atau meningkat dibanding tahun 2018. Walaupun dalam situasi pandemi *Covid-19*, PDRB pada tahun 2020 secara statistik tergambar mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini karena ada penyesuaian data terbaru jumlah penduduk hasil sensus 2020. Dimana jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 hasil sensus sebesar 2,03 juta jiwa, lebih rendah daripada jumlah penduduk yang diproyeksikan yaitu sebesar 2,27 juta jiwa.



#### 2.2.1.4 Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

**Gambar 2.21. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020**

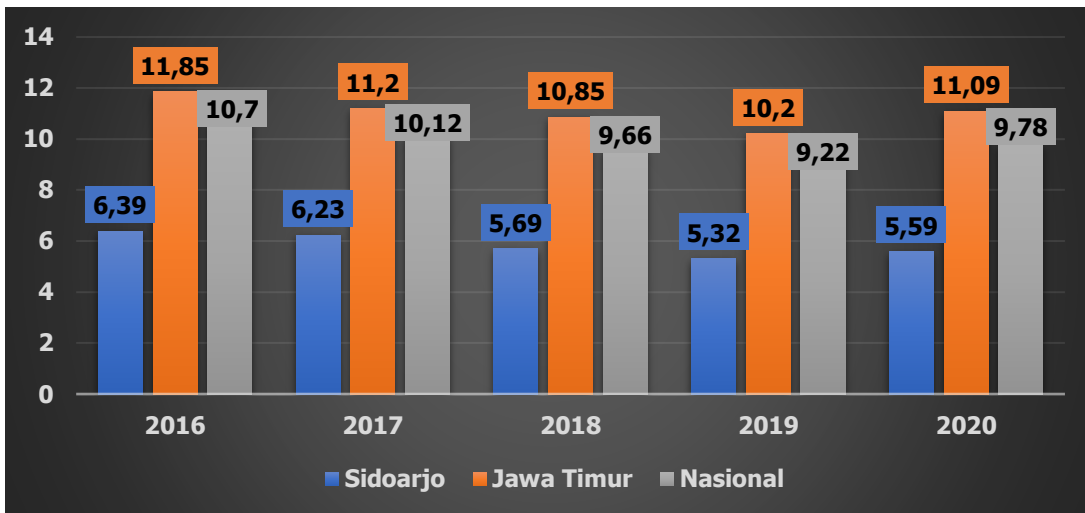


Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, diolah

Pada gambar di atas terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun berhasil menekan angka kemiskinan. Penduduk miskin Sidoarjo selama tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami penurunan. Namun pada tahun 2020, persentase kemiskinan Kabupaten Sidoarjo naik sebesar 0,27 poin menjadi 5,59 persen dibanding tahun 2019 yang sebesar 5,32 persen. Persentase tersebut setara dengan 127,05 ribu jiwa.



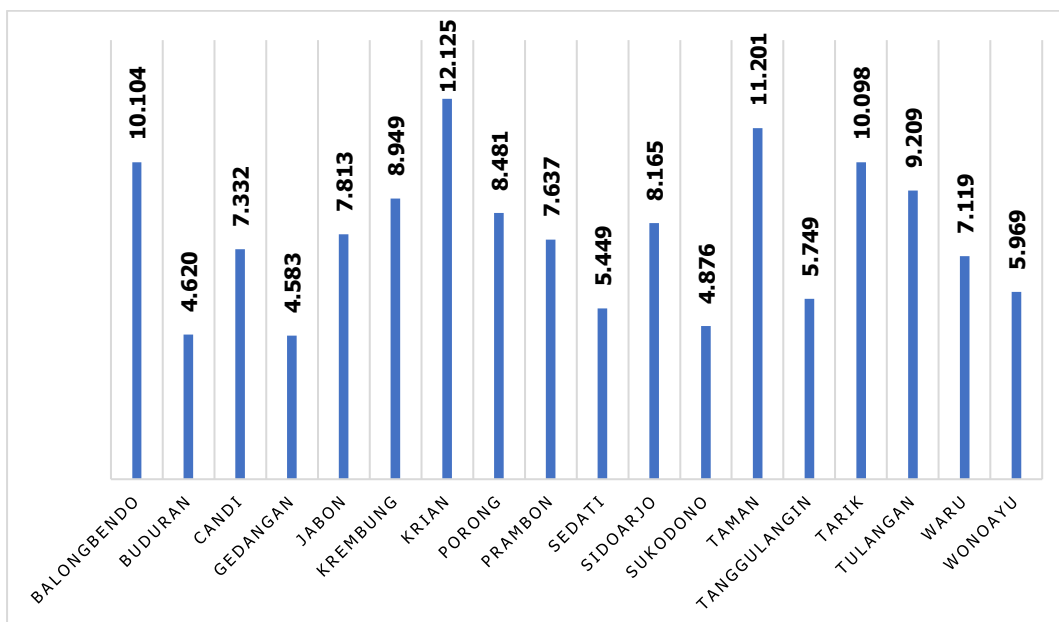
**Gambar 2.22. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016-2020**



Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, diolah

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, persentase penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo selalu berada di bawah angka nasional dan Jawa Timur. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo secara agregasi mengalami penurunan. Hal ini bisa diartikan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal penanganan kemiskinan sangat baik.

**Gambar 2.2. Sebaran Penduduk Miskin Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Kecamatan tahun 2020**



Sumber: DTKS Dinsos Kabupaten Sidoarjo, diolah



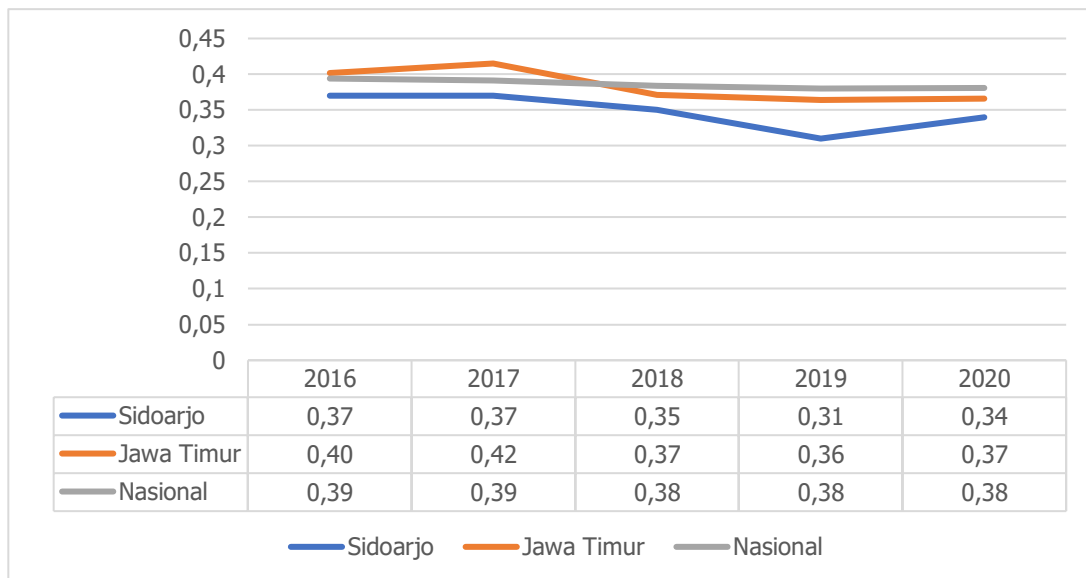
Berdasarkan data terbaru Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Oktober 2020, Penduduk miskin Sidoarjo menurut sebaran per kecamatan dapat diketahui bahwa titik jumlah penduduk miskin tertinggi berada di kecamatan Krian dengan total penduduk miskin sebesar 12.125 jiwa KRT, disusul kemudian oleh kecamatan Taman dengan jumlah penduduk miskin sebesar 11.201 jiwa KRT, dan kecamatan Balong Bendo di tempat ketiga dengan jumlah total penduduk miskinnya sebesar 10.104 jiwa KRT. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terkecil ditempati oleh kecamatan Gedangan dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.583 jiwa KRT. Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa Kecamatan Krian memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi sebesar 12.125 jiwa, yang disusul oleh kecamatan Taman dan Kecamatan Balongbendo, masing-masing sebesar 11.201 dan 10.104. Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang akan diprioritaskan dalam pembangunan tahun 2021-2026.

#### **2.2.1.5 Indeks Gini**

Indeks Gini merupakan salah satu ukuran umum untuk menunjukkan adanya tingkat pemerataan distribusi pendapatan atau kekayaan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.



**Gambar 2.24. Indeks Gini Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016-2020**



Sumber: BPS Jatim, diolah

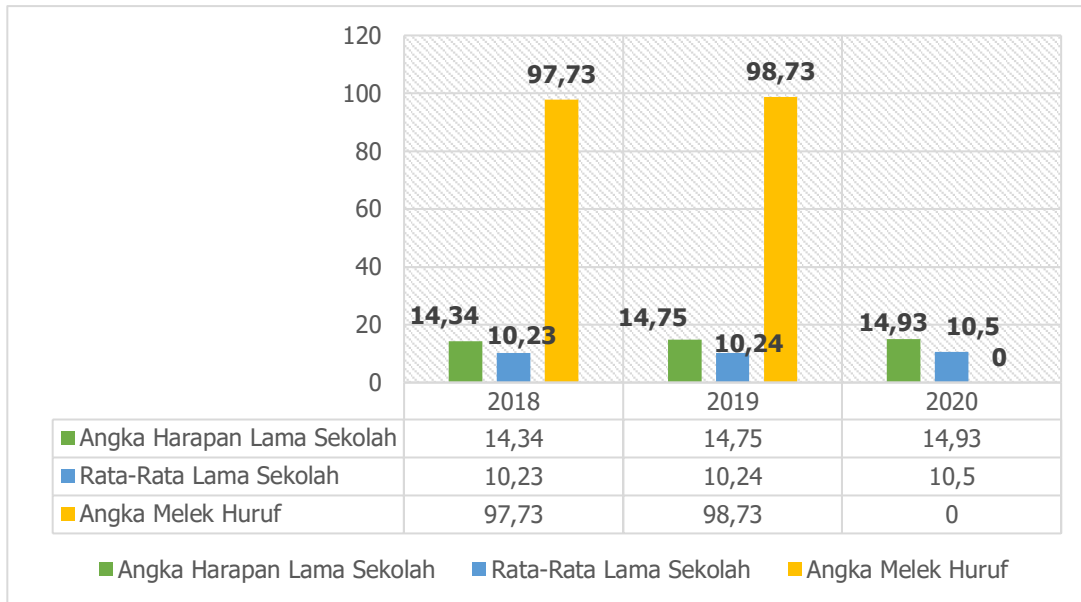
Indeks gini Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 sampai tahun 2020 cenderung stabil berada di kisaran 0,31 -0,35. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pemerataan pendapatan di Kabupaten Sidoarjo adalah sedang. Ketimpangan di Kabupaten Sidoarjo secara statistik lebih baik dari angka nasional dan Jawa Timur.

#### **2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran usia harapan hidup, pendidikan melalui pengukuran angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita.



**Gambar 2.25 Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020**

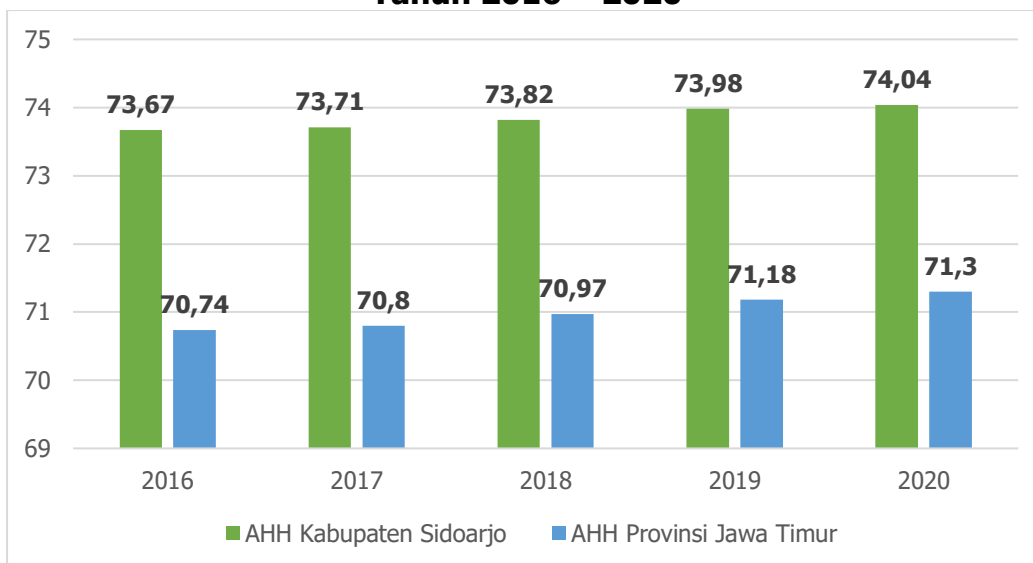


Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Sidoarjo, diolah

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2018 terus mengalami kenaikan. AHLS tahun 2018 sebesar 14,34 naik menjadi 14,75 pada tahun 2019 dan Kembali naik pada tahun 2020 menjadi 14,93. Dengan realisasi angka 14,93 tahun tersebut dapat diartikan bahwa anak-anak usia 7 tahun di Kabupaten Sidoarjo memiliki peluang untuk bisa menamatkan pendidikan mereka hingga lulus Diploma II. Begitu pun dengan angka rata-rata lama sekolah, yaitu capaian tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Realisasi capaian rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 sebesar 10,5. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat di Kabupaten Sidoarjo rata-rata usia 25 tahun keatas sebagian besar telah mengenyam pendidikan kelas X (SMA Kelas I) hingga kelas XI (SMA Kelas II). Angka melek huruf juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 angka melek huruf pada usia di atas 15 tahun sebesar 97,73 dan naik menjadi 98,73 pada tahun 2019. Sedangkan angka melek huruf pada tahun 2020 belum dirilis oleh BPS.



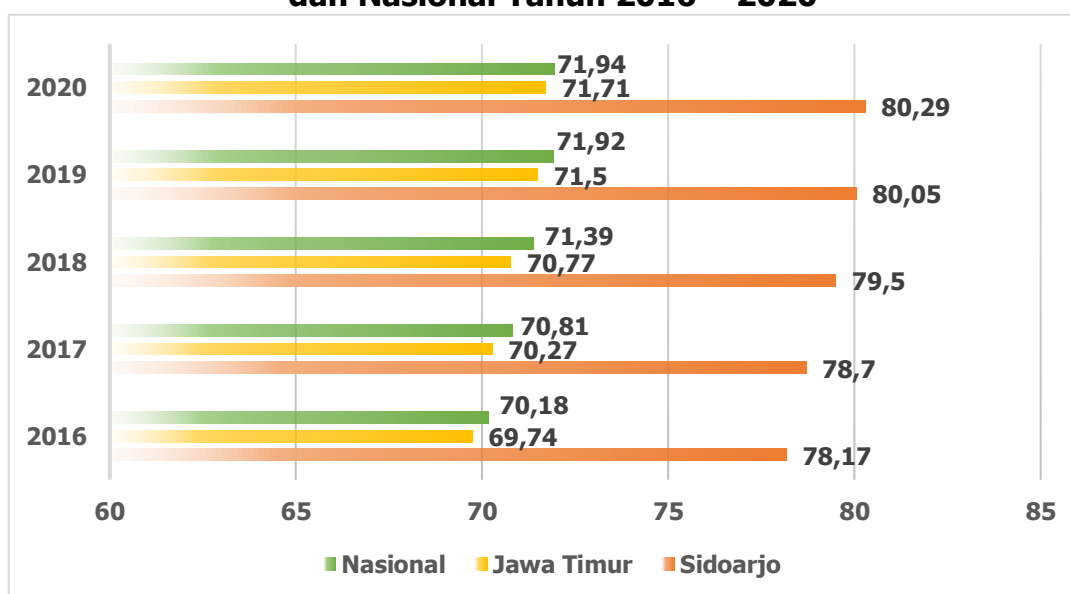
**Gambar 2.26. AHH Kabupaten Sidoarjo dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 – 2020**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

Tingginya Angka Harapan Hidup (AHH) mencerminkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), angka harapan hidup penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 mencapai 73,67%. Levelnya terus naik menjadi 73,71% di tahun 2017, naik menjadi 73,82% di tahun 2018, 73,98% di tahun 2019, dan naik menjadi 74,04% di tahun 2020.

**Gambar 2.27. Perkembangan IPM Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016 – 2020**



Sumber: BPS, diolah 2021



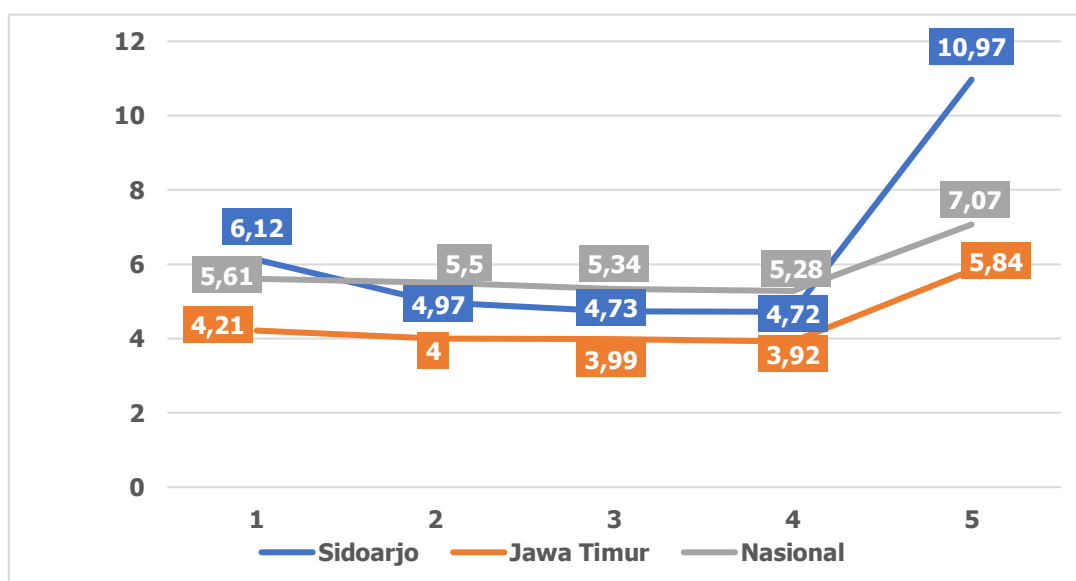


IPM kabupaten Sidoarjo lebih baik dari capaian Jawa Timur dan Nasional. IPM Sidoarjo menduduki peringkat ke-4 (empat) dari seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pencapaian IPM tertinggi di Jawa Timur diduduki oleh Surabaya kemudian disusul oleh Kota Malang dan Kota Madiun.

### 2.2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Penganggur adalah penduduk angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan dan tidak mempersiapkan usaha karena putus asa, atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulainya. Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa). Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

**Gambar 2.28. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016 – 2020**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021



Mencermati dari gambar di atas terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka menunjukkan dari tahun 2015 hingga tahun 2020 sudah menunjukkan penurunan, namun meningkat secara drastis di tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Secara agregat angka TPT Kabupaten Sidoarjo masih berada di bawah capaian TPT nasional dan lebih tinggi daripada capaian Jawa Timur. Dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 77 ribu orang dan TPT naik 6,35 persen poin menjadi 10,97 persen pada Agustus 2020. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih mendominasi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 14,9 persen.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mengatasi tingginya angka TPT ini telah melakukan upaya-upaya, antara lain : 1) Menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi baik yang bersertifikasi maupun yang berorientasi pada membuka lapangan usaha secara mandiri; 2) Menyelenggarakan Bursa Kerja, baik Bursa Kerja Terbuka maupun Bursa Kerja Khusus; 3) Menjalin hubungan industrial yang kondusif guna mengurangi angka pemutusan hubungan kerja, dengan membuat perjanjian kepada perusahaan yang mengalami kesulitan dalam membayar gaji karyawannya, untuk kembali memperkerjakan karyawan yang di-PHK apabila kondisi keuangan perusahaan sudah membaik.

#### **2.2.1.8 Indeks Kesalehan Sosial**

Indeks kesalehan sosial merupakan gabungan indeks kepedulian sosial dan indeks kepedulian lingkungan. Indeks ini merupakan manifestasi akan kesalehan sosial masyarakat berupa kepedulian akan lingkungan sosial dan lingkungan alam. Dimensi kepedulian sosial terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: sikap percaya, toleransi, kelompok dan jejaring, resiprositas, dan partisipasi dalam aksi bersama. Sedangkan dimensi kepedulian lingkungan terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: penghematan energi, pengelolaan sampah, penghematan air, pengurangan polusi udara (transportasi pribadi),



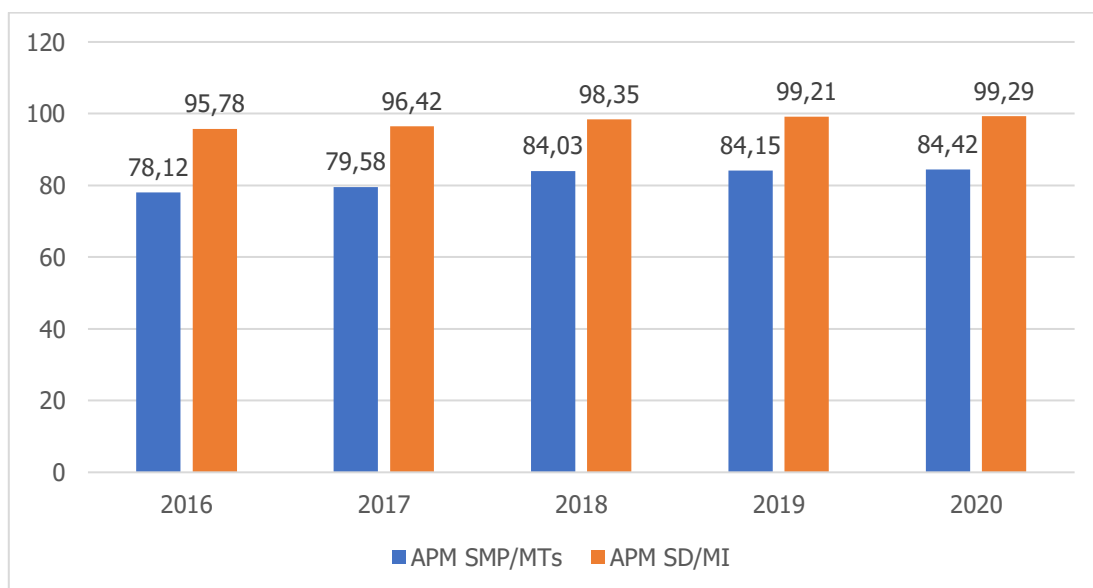
dan penjagaan lingkungan. Indeks Kesalehan Sosial merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo. Indeks ini juga menjadi indicator kinerja utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

## 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

### 2.2.2.1 Pendidikan

Indeks pendidikan diukur dengan angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka Harapan Sekolah memiliki keterkaitan dengan angka partisipasi kasar dan murni PAUD, SD, dan SMP. Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut. Khusus APM jenjang SMA/MA/SMK, terhitung mulai 1 Januari 2017 telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rekap data perkembangan APM Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 - 2020 disajikan pada Gambar 2.30. sebagai berikut:

**Gambar 2.29. APM Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016 - 2020**



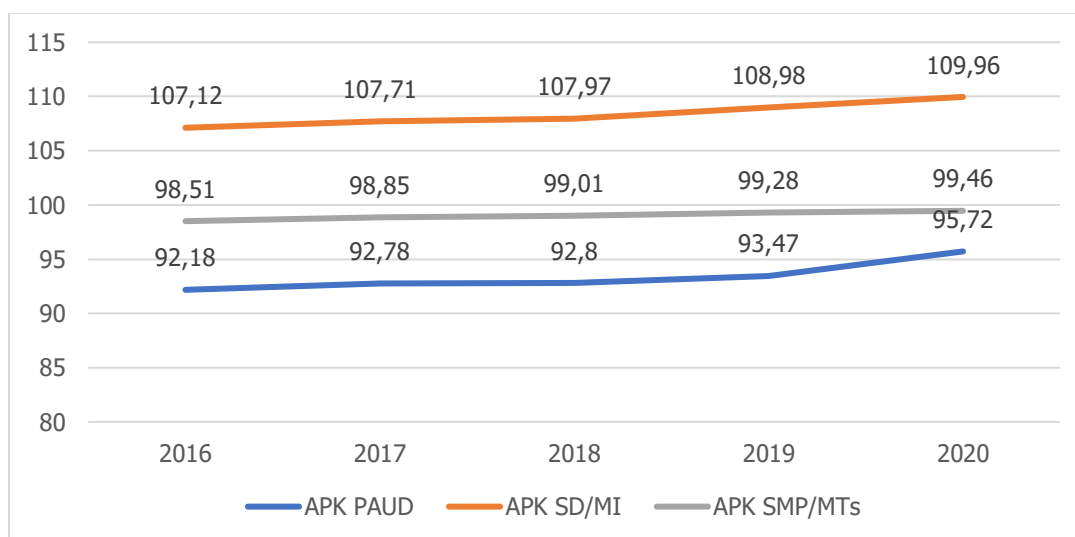
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, 2021



Berdasarkan gambar 2.29. menunjukkan grafik APM yang terus merangkak naik dari tahun ke tahun. Angka APM SD/Sederajat selalu unggul dibandingkan APM SMP sebesar 99,29% , APM SMP mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hingga tahun 2020 sebesar 84,42%.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.30. berikut.

**Gambar 2.30. APK Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020**



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, 2021

Pada Gambar di atas Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2016-2020, memiliki daya serap hingga melebihi 100% pada APK SD di antara usia 7- 12 tahun. Pada tingkat APK SMP dengan umur 13 sampai 15 tahun jumlah APK selalu merangkak naik, nilai APK paling rendah pada tingkat SMP pada tahun

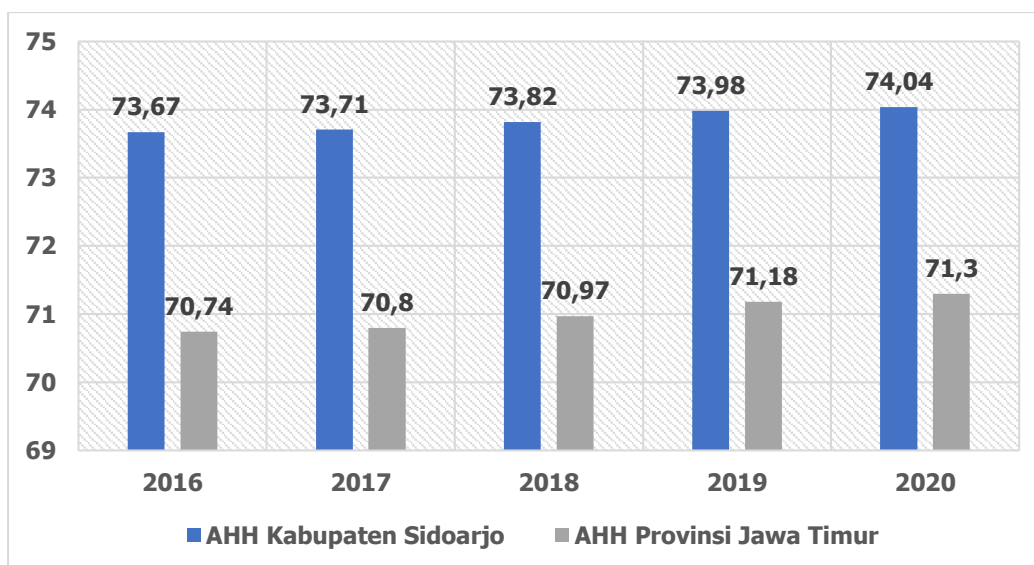


2016 yang hanya memiliki nilai APK 98.51%, dan APK paling rendah adalah pada APK PAUD bila dibandingkan dengan APK SD/MI dan SMP/MTs.

### 2.2.2.2 Kesehatan

Tingginya Angka Harapan Hidup (AHH) mencerminkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), angka harapan hidup penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 mencapai 73,67%. Levelnya terus naik menjadi 73,71% di tahun 2017, naik menjadi 73,82% di tahun 2018, 73,98% di tahun 2019, dan naik menjadi 74.04% di tahun 2020.

**Gambar 2.31. AHH Kabupaten Sidoarjo dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 – 2020**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

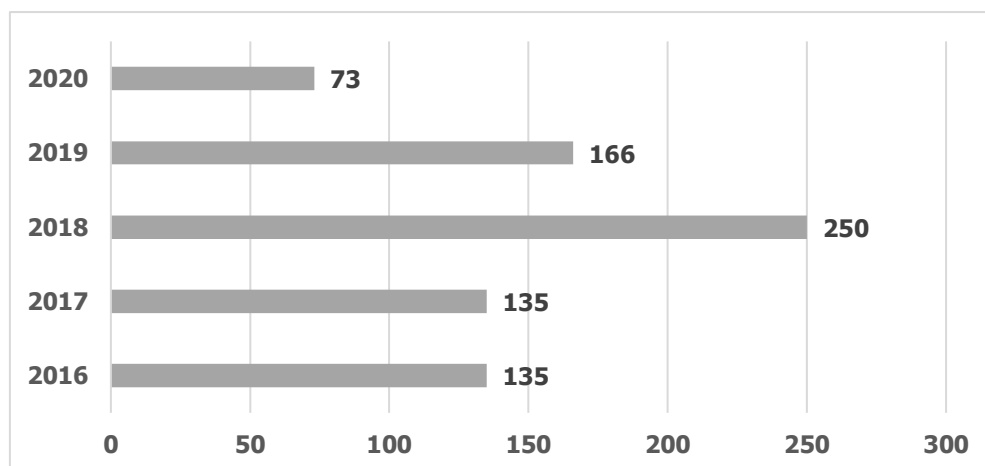
### 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian urusan pemuda antara lain jumlah prestasi pemuda yang diperoleh di tingkat Regional, Nasional dan Internasional dan jumlah prestasi olahraga tingkat Regional, Nasional dan Internasional. Indikator jumlah prestasi pemuda yang diperoleh digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembinaan pemuda di Kabupaten Sidoarjo dengan menghitung jumlah pemuda yang



berprestasi dalam berbagai bidang di skala Regional, Nasional atau Internasional. Pada tahun 2018 jumlah prestasi pemuda sebanyak 10 prestasi. Jumlah prestasi olahraga Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 sebanyak 250 prestasi. Capaian prestasi ini meningkat sebanyak 115 prestasi dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, namun capaian tersebut terus menurun pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 73 jumlah prestasi yang diperoleh. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan upaya-upaya pembinaan terhadap seluruh potensi keolahragaan yang ada seperti melakukan pembinaan yang lebih terfokus pada bidang unggulan yang teridentifikasi berpotensi meraih prestasi di tingkat Nasional.

**Gambar 2.32. Jumlah Prestasi Pemuda dan Olahraga di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional Tahun 2016-2020**



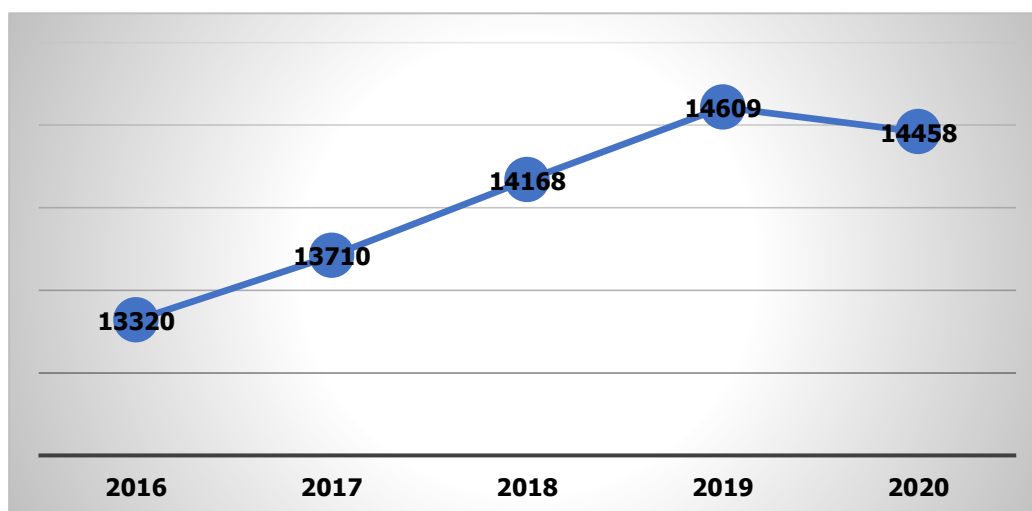
*Sumber: Disparpora Sidoarjo, 2020*

Eksistensi kelompok seni dan budaya yang ada di masyarakat harus dijaga untuk menunjang pelestarian seni dan budaya daerah. Pada tahun 2017, adat budaya yang dilestarikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo ada 4 jenis budaya, antara lain: Macapat, Aqiqah, Ruwatan dan Lelang Bandeng. Untuk melestarikan seni budaya, peran kelompok seni budaya di masyarakat sangat besar. Kelompok seni budaya terbagi dalam beberapa bidang seni yaitu Ludruk, Wayang Kulit, Reog



Ponorogo, Patrol, Jaranan/Bantengan, Musik, Kentrung, Tari, Teater, Karawitan, Campursari dan Mocopat. Jumlah kesenian dan budaya daerah yang dilestarikan pada Tahun 2016 sebanyak 13.320, setiap tahun terus meningkat pada Tahun 2019 menjadi 14.609 dan turun pada Tahun 2020 menjadi 14.458.

**Gambar 2.33. Jumlah Group Kesenian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020**



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, 2020

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya.



## 2.3 Aspek Pelayanan Umum

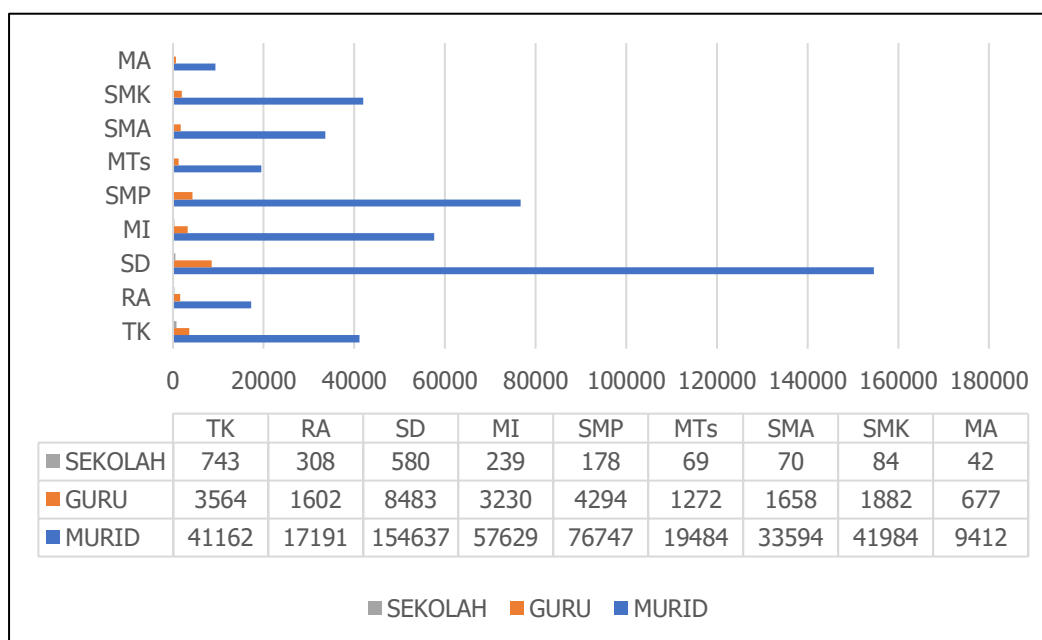
### 2.3.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

#### 2.3.1.1 Pendidikan

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar.

Jumlah sekolah tingkat SD lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan tingkat jenjang pendidikan yang lain, jumlah sekolah tingkat SD sebanyak 580. Jumlah guru SD sebanyak 8.483 guru dan jumlah murid terbanyak juga pada tingkat SD sebanyak 154.637. Lebih jelasnya lihat gambar 2.34 berikut.

**Gambar 2.34. Jumlah Murid, Guru dan Sekolah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020**



Sumber: BPS Sidoarjo dalam angka, 2021

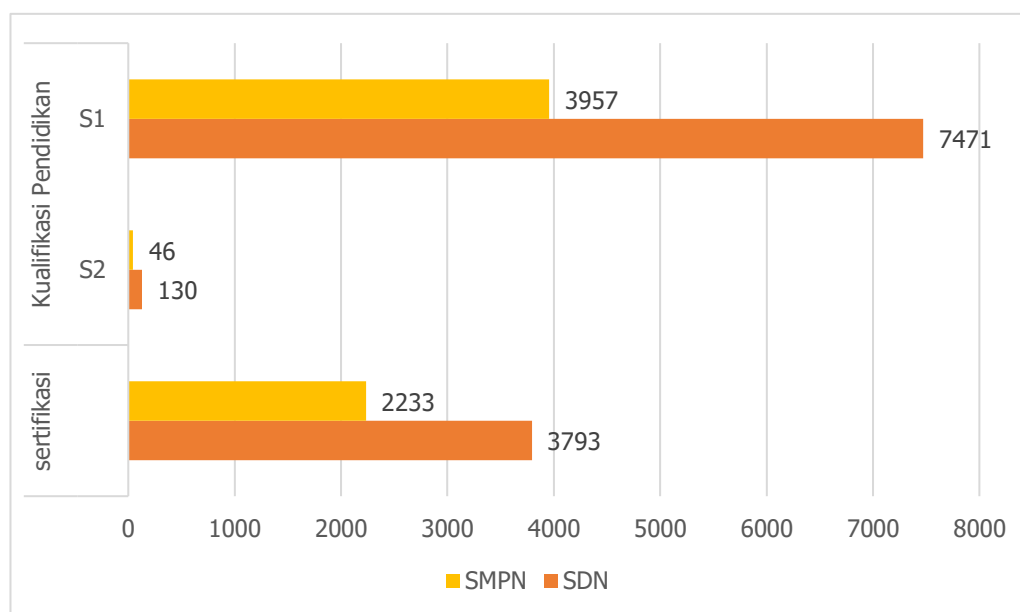
Persentase Guru/Pendidik yang telah bersertifikasi merupakan salah satu indikator kinerja untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan





berdaya saing. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan guru/tenaga pendidik yang bersertifikasi profesi mengalami peningkatan yang berdampak pada layanan mutu pendidikan yang berkualitas. Perkembangan Guru/Pendidik yang telah bersertifikasi pada tahun Tahun 2020 untuk SD sebanyak 3.793 guru dari total Guru SD 7.601 orang atau sebesar 49,90%. Sedangkan untuk SMP mencapai tingkat realisasi sebesar 54.55%. sedangkan dari segi kualifikasi Pendidikan, Guru SD dengan jenjang Pendidikan minimal S1 berjumlah 7.471 orang atau 98% dan Guru SMP dengan Pendidikan minimal S1 sebanyak 3.957 orang atau sebesar 99%. lihat gambar 2.35 sebagai berikut :

**Gambar 2.35 Kualitas Guru Pendidik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020**



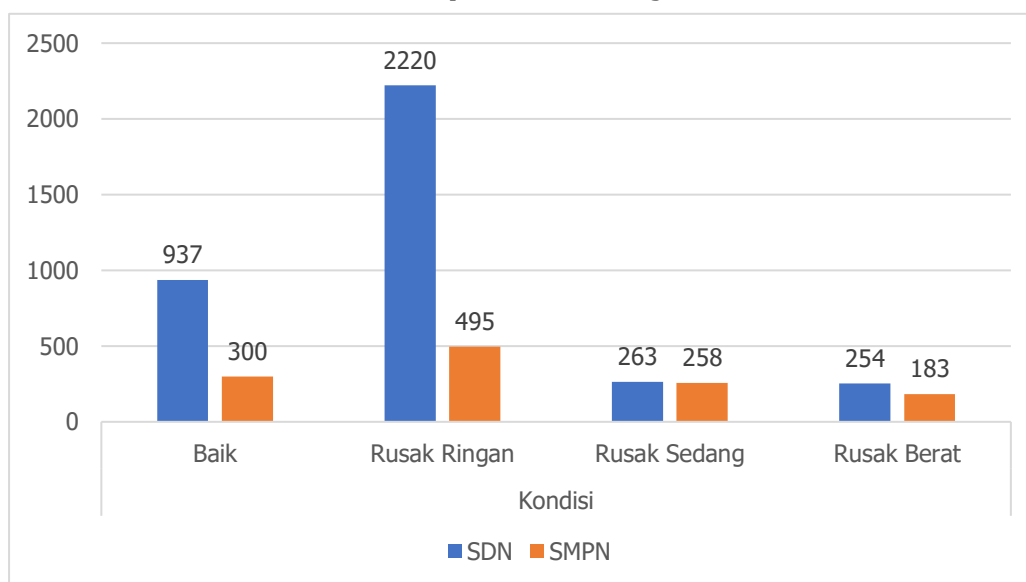
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, 2020

Selain tenaga pendidik yang berkualitas, salah satu penentu kualitas Pendidikan adalah sarana prasarana yang memadai. Jumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 466 sekolah dengan jumlah ruang kelas sebanyak 3.674 lokal. Dari total jumlah tersebut ruang kelas dalam kondisi baik sebanyak 937 ruang, rusak ringan 2.220 ruang, rusak sedang 263 ruang, dan rusak berat sebanyak 254 ruang. Untuk mengatasi kerusakan yang terjadi pada ruang kelas, Dinas Pendidikan pada tahun 2021



ini telah merencanakan perbaikan ruang kelas rusak berat sebanyak 127 ruangan. Sedangkan jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sebanyak 46 sekolah dengan ruang kelas total berjumlah 1.236 ruangan. Dari jumlah tersebut, ruang kelas dengan kondisi baik berjumlah 300, rusak ringan 495 ruang, rusak sedang 258 ruang, dan rusak berat sebanyak 183 ruang. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar berikut:

**Gambar 2.36. Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan Kabupaten Sidoarjo**



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Sidoarjo, 2021

Dari sisi kualitas kelembagaan, jumlah SD yang terakreditasi A dalam 3 (tiga) tahun terakhir fluktuatif. Pada tahun 2018 sebesar 74,21 persen kemudian turun pada 2019 menjadi 73,56 persen dan Kembali naik sedikit pada tahun 2020 menjadi 73,64 persen. Namun angka tersebut masih berada dibawah capaian tahun 2018. Pada jenjang SMP juga terjadi hal yang sama, dimana jumlah SMP yang berakreditasi A pada tahun 2018 sebesar 66,67 persen lalu turun menjadi 64,91 persen pada tahun 2019 dan Kembali naik pada tahun 2020 menjadi 66,67 persen. Sedangkan untuk nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) di tingkat SD dan SMP pada tahun 2020 tidak dilaksanakan karena disebabkan oleh Pandemi Covid-19, sesuai Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan



Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Deseases (Covid-19)*. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel di bawah ini:

**Tabel 2.10. Kualitas Kelembagaan Pendidikan  
Kabupaten Sidoarjo**

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
	REALISASI	REALISASI	REALISASI
Rata-Rata Nilai UN SD/MI	8,39	8,57	*)
Rata-Rata Nilai UN SMP/MTs	5,16	5,64	*)
Persentase SD yang Terakreditasi A	74,21	73,56	73,64
Persentase SMP yang Terakreditasi A	66,67	64,91	66,67

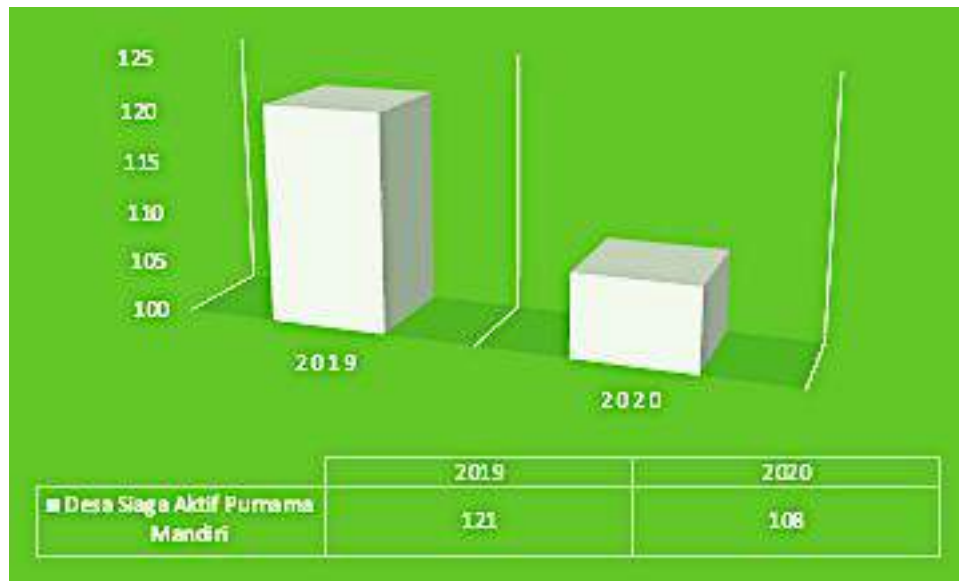
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Sidoarjo, 2021

### 2.3.1.2 Kesehatan

Klasifikasi Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan dari tahun 2019-2020, bermula dari tahun 2019-2020, bermula dari tahun 2019 capaiannya 121 %, sedangkan 2020 capaiannya mencapai 108 %. Hal ini disebabkan target yang terpasang di tahun 2019 lebih rendah dibanding dengan target yang terpasang di tahun 2020. Dari 353 desa/kelurahan di Kabupaten Sidoarjo, ada 6 (enam) desa/kelurahan yang terdampak lumpur lapindo, sehingga keberadaan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 hanya tercatat 347 desa/kelurahan. Untuk tahun 2019, target desa siaga aktif purnama mandiri sebesar 41 % sedangkan tahun 2020 target desa siaga aktif purnama mandiri sebesar 50 %. Gambaran ringkas klasifikasi Desa Siaga Aktif bisa dilihat pada Gambar 2.37. berikut.



**Gambar 2.37. Klasifikasi Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri Kabupaten Sidoarjo (%) Tahun 2019-2020**



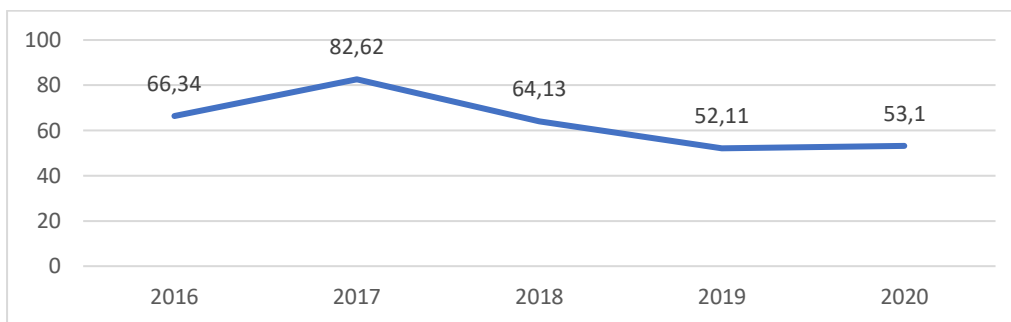
Sumber: Dinas Kesehatan Sidoarjo, 2020

Data Prevalensi Balita Gizi Buruk, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Balita kurang gizi di Kabupaten Sidoarjo telah mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang baik karena jumlah balita yang mengalami gizi buruk, jumlah kematian ibu, dan jumlah kematian bayi semakin kecil dari tahun ke tahun.

Kematian Ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas, kecuali kasus kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) di kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun menunjukkan fluktuatif, tahun 2016 AKI Kabupaten Sidoarjo sebesar 52,11% per 100.000 kelahiran hidup, AKI pada Tahun 2017 meningkat sebesar 82,62%, dan terus menurun hingga Tahun 2019 menjadi 52,11%, meningkat pada Tahun 2020 sebesar 53,1%. selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.38. berikut.



**Gambar 2.38. Tren Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2020**

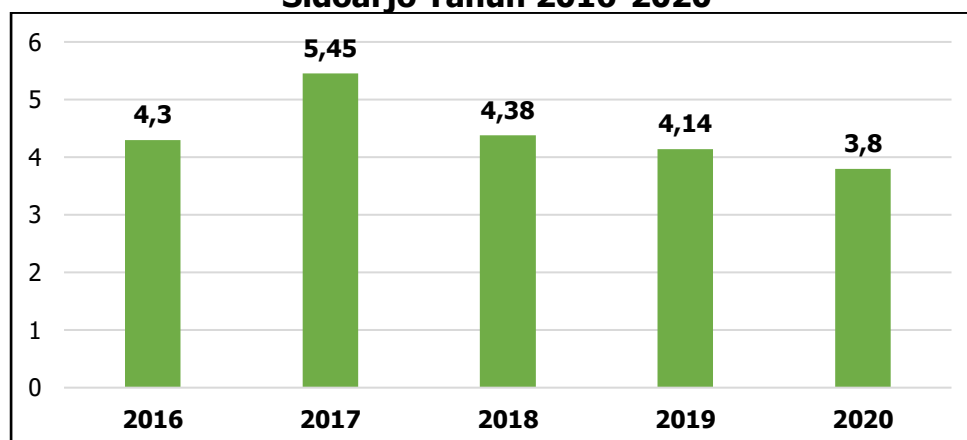


*sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, 2020*

Kematian ibu hamil dan bersalin dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan dan pengetahuan, sosial budaya, sosial ekonomi, geografi dan lingkungan, aksesabilitas ibu pada fasilitas kesehatan serta kebijakan makro dalam kualitas pelayanan kesehatan.

Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan keberhasilan pelayanan kesehatan pada bayi di suatu wilayah. Di Kabupaten Sidoarjo, target Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2020 adalah 3,8%, tahun 2019 sebesar 4,14%. Jika dibanding dengan realisasi tahun 2018 sebesar 4,38 %, tahun 2017 sebesar 5,45% dan tahun 2016 sebesar 4,3%, maka capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 ini cukup baik. Selengkapnya, antara target dan realisasi AKB di Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada gambar 2.39 berikut.

**Gambar 2.39. Realisasi Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020**



*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, 2020*



Sedangkan dalam hal pengendalian Gizi buruk atau *stunting* secara kinerja sangat berhasil. Hal ini terlihat dari data balita *stunting* yang persentasenya mengalami penurunan yang cukup drastis. Angka *stunting* Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 sebesar 7,84 persen dari yang sebelumnya sebesar 23 persen pada tahun 2019. Berikut adalah data balita *stunting* dan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 serta sebarannya pada tahun 2020:

**Tabel 2.11. Persentase Perkembangan kasus *Stunting* Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2020**

NO	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
1	Balita Stunting	19,4	16,9	23,74	23,00	7,84
2	Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, 2021

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menetapkan lokus prioritas penanganan *stunting* di 7 (tujuh) Kecamatan dan 24 Desa/Kelurahan. Data lengkapnya bisa dilihat dalam tabel 2.12 di bawah ini:

**Tabel 2.12. Lokus Prioritas Penanganan kasus *Stunting* Kabupaten Sidoarjo 2022**

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	Desa Kupang	Jabon
2	Desa Kedungrejo	Jabon
3	Desa Tambakkalisogo	Jabon
4	Desa Pangreh	Jabon
5	Desa Keboguyang	Jabon
6	Desa Balongtani	Jabon
7	Desa Kedungpandan	Jabon
8	Desa Ngingas	Waru
9	Desa Berbek	Waru
10	Desa Tambakrejo	Waru
11	Desa Tambaksumur	Waru



NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
12	Desa Kepuhkiriman	Waru
13	Desa Wedoro	Waru
14	Desa Kureksari	Waru
15	Desa Sruni	Gedangan
16	Desa Entalseiwu	Buduran
17	Desa Siwalanpanji	Buduran
18	Desa Larangan	Candi
19	Desa Balongdowo	Candi
20	Desa Wedoro Klurak	Candi
21	Desa Bakungpringgodani	Balombangendo
22	Kel. Pucanganom	Sidoarjo
23	Kel. Bulusidokare	Sidoarjo
24	Kel. Celep	Sidoarjo

Sumber: Lampiran Keputusan Bupati Sidoarjo No. 188/344/438.1.1.3/2021

Kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit pada tahun 2020 bisa dinilai belum maksimal. Hal ini terlihat dari kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular yang rata-rata masih berada di bawah target. Penyebab dari kurang maksimalnya tindakan pencegahan dan pengendalian ini karena adanya pandemi *Covid-19*. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat data tabel 2.13 di bawah ini:

**Tabel 2.13. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun 2020**

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Pembinaan dan Pelayanan Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular</b>	Persentase orang dengan TB mendapat pelayanan TB sesuai standar	100	33,98	33,98
	Persentase CFR DBD	< 1	1,4	> 100
	IR DBD per 100.000	< 47	6,5	98,75
	RFT penderita kusta	90	88,88	98,88
	Persentase bumil yang di skrining Hepatitis B	90	80	88,88
	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar	100	61,92	61,92
<b>Pencegahan dan pengendalian penyakit</b>	Persentase desa/kel yg melaksanakan POSBINDU PT	50	199	199
	Jumlah POSBINDU yg dimonev	120	120	100



Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
tidak menular dan kesehatan indra	Persentase penduduk umur 15 - 59 th mendptkn skrining kesehatan sesuai standar	100	57,18	57,18
	Persentase penderita Hipertensi mendpt pelayanan kesehatan sesuai standar	100	42,16	42,16
	Persentase penderita Diabetes mendpt pelayanan kesehatan sesuai standar	100	78,46	78,46

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, 2021

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki sarana dan prasarana Kesehatan sebanyak Rumah Sakit berjumlah 22, Rumah sakit bersalin berjumlah 11, Poliklinik berjumlah 110, puskesmas berjumlah 28, Puskesmas Pembantu berjumlah 59. Secara keseluruhan jumlah sarana prasarana Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan. Lebih jelas data dapat dilihat pada tabel. 2.14. sebagai berikut.

**Tabel 2.14. Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan Berdasarkan Desa/Kelurahan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020**

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan									
	Rumah Sakit		Rumah Sakit Bersalin		Poliklinik		Puskesmas		Puskesmas Pembantu	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Tarik	1	1	-	-	3	4	1	1	3	3
Prambon	1	1	1	1	8	5	1	1	3	3
Kremlung	-	-	-	-	2	2	1	1	3	3
Porong	1	1	-	-	4	4	2	2	3	3
Jabon	-	-	-	-	4	-	1	1	5	4
Tanggulangin	-	-	-	-	2	2	1	1	2	4
Candi	-	-	-	-	4	3	1	2	5	4
Tulangan	1	1	1	1	8	8	2	3	4	4
Wonoayu	-	-	-	-	2	3	1	1	4	4
Sukodono	2	2	-	-	3	2	1	1	3	3
Sidoarjo	4	4	1	1	12	12	3	3	2	2
Buduran	-	-	-	-	8	7	1	1	4	4
Sedati	2	2	1	-	4	4	1	1	2	2
Waru	3	3	2	2	8	8	2	2	4	2
Gedangan	1	1	1	1	9	6	3	2	2	2
Taman	3	3	2	1	14	14	3	2	4	4
Krian	2	2	-	-	12	7	2	2	3	3
Balongbendo	1	1	2	1	3	3	1	1	3	3
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>110</b>	<b>94</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>59</b>	<b>57</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Sidoarjo 2021, diolah





Menurut WHO, perbandingan ideal Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk adalah 1 : 30.000. Namun pada kenyataannya, jumlah Puskesmas di Kab. Sidoarjo sampai dengan saat ini hanya terdapat 27 unit Puskesmas yang tersebar di 18 kecamatan. Dari 27 Puskesmas tersebut, terbagi dalam kategori Puskesmas rawat inap sebanyak 14 Puskesmas, dan Puskesmas non rawat inap sebanyak 12 Puskesmas. Dimana 1 unit Puskesmas harus melayani 87.777 penduduk. Kondisi yang demikian merupakan kondisi yang jauh dari jumlah ideal rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk. Kondisi keterbatasan jumlah Puskesmas ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memprioritaskan penambahan/pembangunan Puskesmas dari tahun ke tahun yang telah dtertuang dalam *grand design* pembangunan Puskesmas berikut:

**Tabel 2.15. Grand Design Pembangunan Puskesmas Kabupaten Sidoarjo**

NO	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sidodadi Candi	Wonokasian Wonoayu	Klurak Candi	Ketegan Taman	Randegan Tanggulangin	Ngares Rejo
2	Puri Surya Jaya Gedangan	Kremlangan Taman	Tambakrejo Waru	Wedoro waru	Mliriprowo Tarik	Kali Pecabeian Candi
3		Kedungsumur Kremlangan	Kramat Jegu Taman	Kloposepuluh Sukodono	Penambahan Balongbendo	Wadungasih Waru
4		Sedati sedati	Masangan Kulon Sukodono	Bluru kidul Sidoarjo	Wage Taman	Sedati Gede Sedati
5		Urangagung Sidoarjo	Jatikalang Krian	Sidokepung Buduran	Ngampelsari Candi	Tawang Sari Taman
6		Bulang Prambon	Kebo Guyang Jabon	Ngingas waru	Pabeian Sedati	Kletek Taman
7		Grogol Tulangan	Siwalan Panji Buduran	Jun wangi Krian	Punggul Gedangan	Sawo Tratap Gedangan

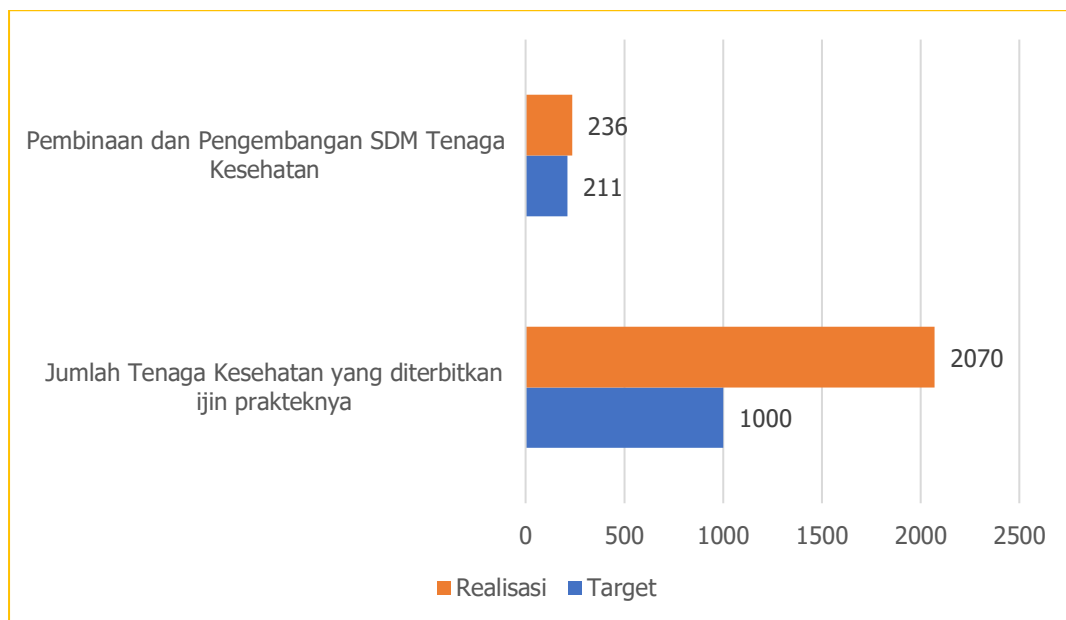
Sumber: Dinas Kesehatan Sidoarjo 2021, diolah

Selain sarana dan prasarana, salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah SDM tenaga kesehatan yang



bertugas di sarana pelayanan kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur ketersediaan tenaga kesehatan untuk mencapai target pembangunan kesehatan tertentu adalah melalui rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk. Kegiatan untuk mendukung ketersediaan SDM, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 telah merealisasikan jumlah tenaga Kesehatan yang diterbitkan ijin prakteknya sebanyak 2.070 izin dan melakukan pembinaan dan pengembangan SDM tenaga Kesehatan sebanyak 236 binaan. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.40.

**Gambar 2.40. Legalitas Tenaga Kesehatan dan Pengembangan SDM Kesehatan Tahun 2020**



Sumber: Dinas Kesehatan Sidoarjo 2021

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan atas pelayanan yang diberikan oleh RSUD. Perolehan nilai Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan RSUD dapat ditunjukkan oleh tabel berikut.



**Tabel 2.16. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap RSUD  
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020**

Keterangan	TAHUN					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	N/A	B	A	B	A	A

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo 2021

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) RSUD Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan dengan merujuk pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penilaian ini dilakukan terhadap sembilan unsur pelayanan yaitu persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya / tarif, spesifikasi produk pelayanan, kompetensi petugas, perilaku petugas, sarana prasarana, serta penanganan pengaduan, saran dan masukan pada 25 unit pelayanan / instalasi yang dinilai. Pada tahun 2020, SKM RSUD Kabupaten Sidoarjo telah mencapai target karena memperoleh predikat A (Sangat Baik) dengan nilai 90,771. Nilai SKM RSUD Kabupaten Sidoarjo di tahun 2020 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mendapatkan nilai 90,303. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin puas dengan pelayanan yang diberikan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo.

Cakupan penduduk Kabupaten Sidoarjo yang telah memiliki jaminan kesehatan di tahun 2020 adalah 81,8 persen. Cakupan ini telah terjadi peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, meskipun angka ini belum mencapai 100 %. Sampai saat ini Dinas Kesehatan Kab. Sidoarjo telah melakukan berbagai upaya guna mengoptimalkan pelayanan BPJS Kesehatan agar menjangkau seluruh masyarakat di Kabupaten Sidoarjo diantaranya yakni :

1. Sosialisasi Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin;



2. Monev Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yang melibatkan 26 Puskesmas , 6 Rumah Sakit, BPJS, 18 Kecamatan, dan Lintas Sektor lainnya;
3. Menambah pagu anggaran untuk program jaminan kesehatan, dan;
4. Menambah jejaring FKTP yang bekerjasama dengan BPJS.

**Tabel. 2.17. Cakupan Peserta Jaminan Kesehatan**

No	Jenis Kepesertaan	Peserta Jaminan Kesehatan	
		Jumlah	%
<b>PBI (PENERIMA BANTUAN IURAN)</b>			
1	PBI APBN	379.651 jiwa	16,6
2	PBI APBD	117.813 jiwa	5,2
Sub Jumlah PBI		497.464 jiwa	21,8
<b>Non PBI (NON PENERIMA BANTUAN IURAN)</b>			
3	PPU (Pekerja Penerima Upah)	646.445 jiwa	28,3
4	PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) / Mandiri	389.598 jiwa	17,1
5	BP (Bukan Pekerja)	49.402 jiwa	2,2
Sub Jumlah Non PBI		1.085.445 jiwa	47,6
<b>JUMLAH (KAB/KOTA)</b>		<b>1.582.909 jiwa</b>	<b>81,8</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sidoarjo

Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019, dan penyebarannya sampai ke Indonesia pada awal tahun 2020, tepatnya setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kasus ditemukan pertama kali covid-19 di Istana Negara tanggal 02 Maret 2020. Kesiapan RSUD Kabupaten Sidoarjo sebagai rumah sakit rujukan bagi pasien Covid-19 antara lain adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.41. Denah RSUD Sidoarjo Dalam Penanganan Covid-19**



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sidoarjo

- A. Menerapkan zonasi Covid-19 di RSUD Kabupaten Sidoarjo yang meliputi:
  - Zonasi merah untuk pelayanan pasien Covid-19
  - Zonasi kuning untuk pelayanan pasien non Covid-19
- B. Pelayanan Rawat Jalan dengan Konsep Kluster (Asuhan Keperawatan, Periksa Dokter, Layanan Farmasi, Laboratorium, Radiologi, Rehabilitasi di Satu Area);
- C. Pelayanan Covid-19 di IGD, Maternal Neonatal, Kamar Operasi, Hemodialisis, Radiologi, Laboratorium, Kamar Jenazah;
- D. Mobilisasi SDM untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di Ruang Isolasi Covid-19;
- E. Menyediakan Ruang Isolasi yang Cukup dengan Standar Ruang Isolasi Khusus (Tekanan Negatif – Hepafilter), ICU dan Ruang Isolasi Biasa;
- F. Menyediakan Ruangan Khusus One Day Care (ODC) dan Tindakan Elektif.

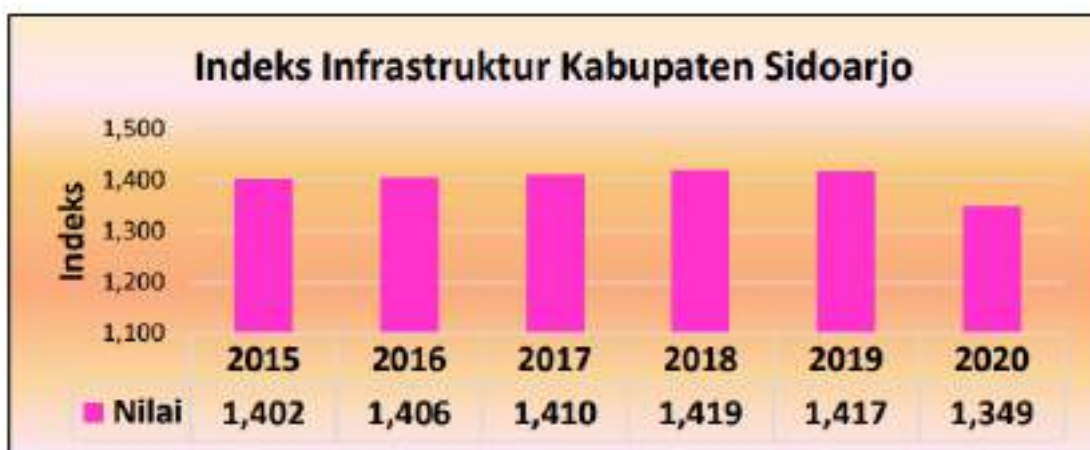
Dari data info *Covid-19* Sidoarjo, per tanggal 21 Juli 2021 pasien positif berjumlah 16.029, sembuh sebanyak 12.084 orang, meninggal sebanyak 652 orang, dan suspek berjumlah 6.463 orang.



### 2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang ke-PU-an merupakan salah satu pengampu Indikator Kinerja Utama dalam periode RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021. Indeks pengukuran infrastruktur mengukur secara agregat dari beberapa jenis infrastruktur yang antara lain meliputi jalan dan jembatan, bendungan, pasar, rusunawa dan jalan kereta api. Manfaat dari pengukuran indeks infrastruktur ini adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan, kelayakan, dan pelayanan dari pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Berikut data capaian indeks infrastruktur Sidoarjo selama kurun waktu 2015-2020:

**Gambar. 2.42. Perkembangan Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2020**



Sumber: Bappeda Kab. Sidoarjo

Terkait indeks infrastruktur di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan anggaran untuk infrastruktur dialokasikan untuk percepatan penanganan Covid-19. Ke depan, komposit indeks infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo diperluas lagi meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pengelolaan sampah, transportasi, perhubungan, telekomunikasi dan informatika, jalan, jembatan, pengendalian banjir, rusunawa, dan gedung terpadu pemerintahan.

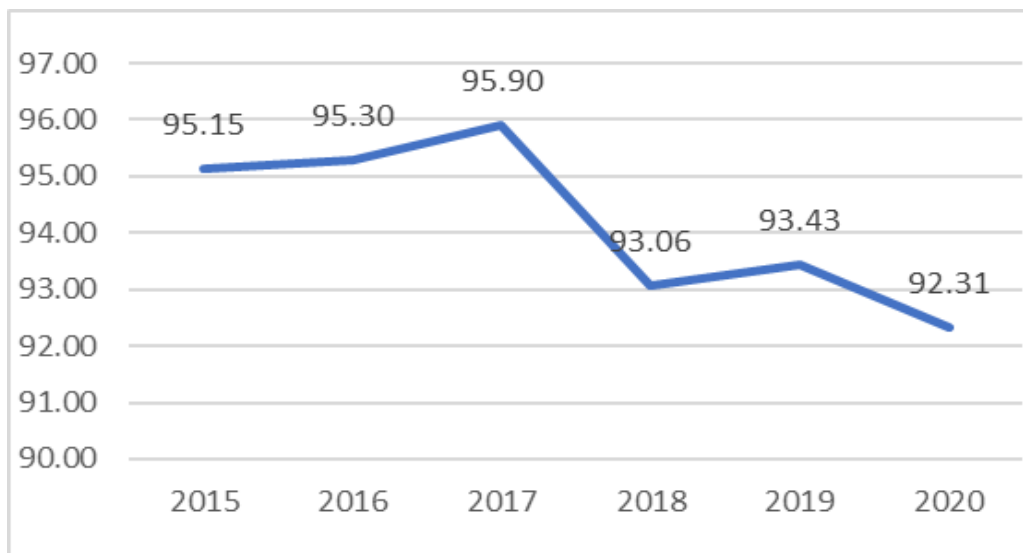
Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mendasar dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Pemerintah Kabupaten



Sidoarjo berupaya penuh dalam pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Pada tahun 2017, rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo adalah 0,51 yakni jalan Kabupaten Sidoarjo sepanjang 1.689.290 meter melayani jumlah penduduk sebesar 3.342.627 orang.

Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan Kabupaten serta mengoptimalkan jalan yang mengalami *bottle-neck* di Kabupaten Sidoarjo yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional. Salah satu upaya Pemerintah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal atas pembangunan fisik penunjang perekonomian adalah melakukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi jalan dalam kondisi mantap.

**Gambar. 2.43. Perkembangan Jalan Mantap Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 - 2020**



Sumber: Dinas PU BM dan SDA Kabupaten Sidoarjo, 2020

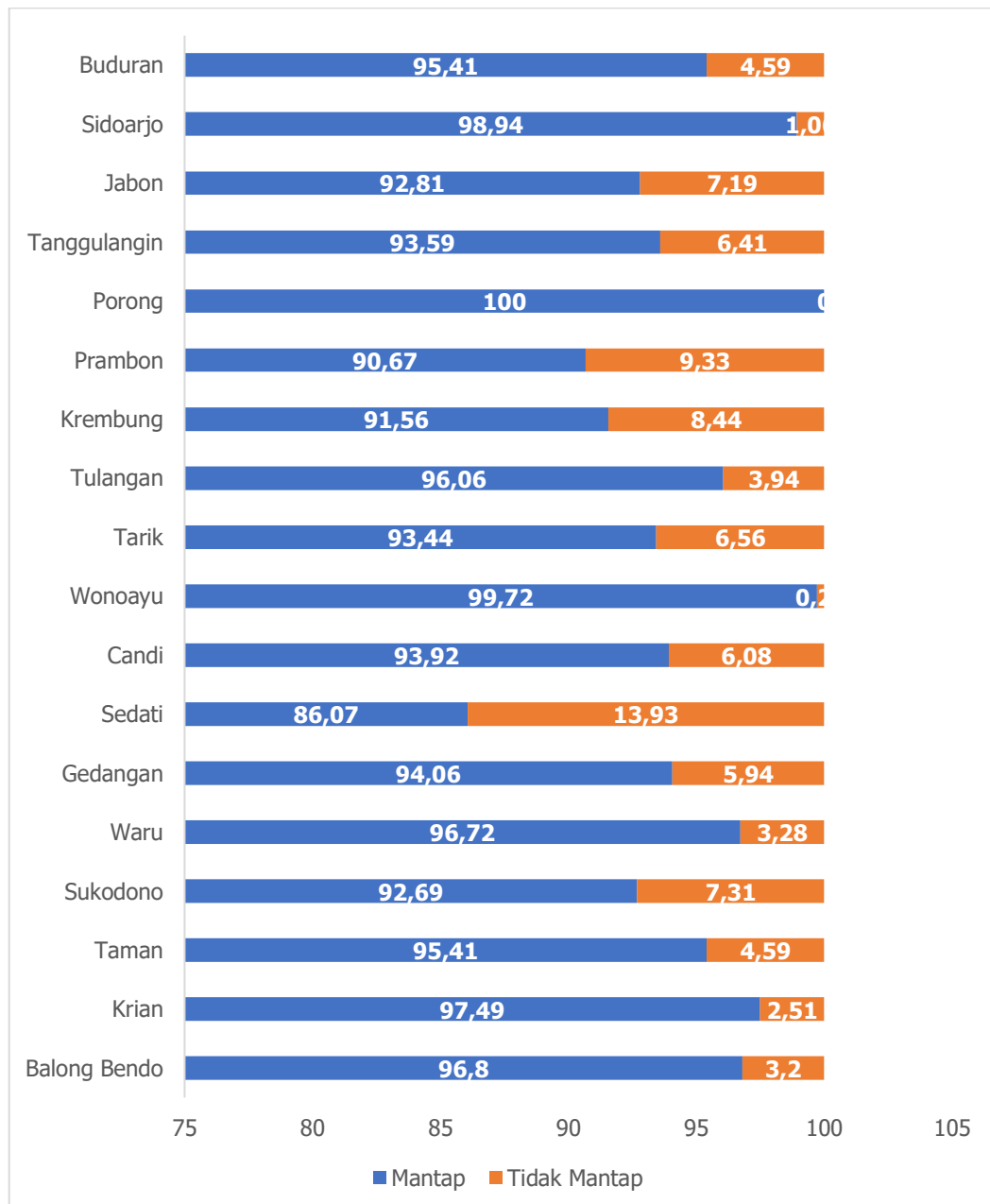
Berdasarkan Gambar 2.38. diperoleh persentase bahwa kondisi jalan mantap mengalami kenaikan pada tahun 2015, 2016, dan 2017 namun



mengalami penurunan menjadi 93,06% di tahun 2018, tahun 2019 kembali naik menjadi 93,43% dan Kembali turun ke tingkat 92,31% pada tahun 2020.

Beberapa kondisi jalan kondisi mantap di seluruh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo lebih besar bila dibandingkan jalan tidak mantap. Rata-rata kondisi mantap di beberapa kecamatan di Kabupaten Sidoarjo memiliki nilai 90% lebih. Lihat gambar 2.44.

**Gambar 2.44. Perbandingan Kondisi Jalan Mantap dan Jalan Tidak Mantap di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020**



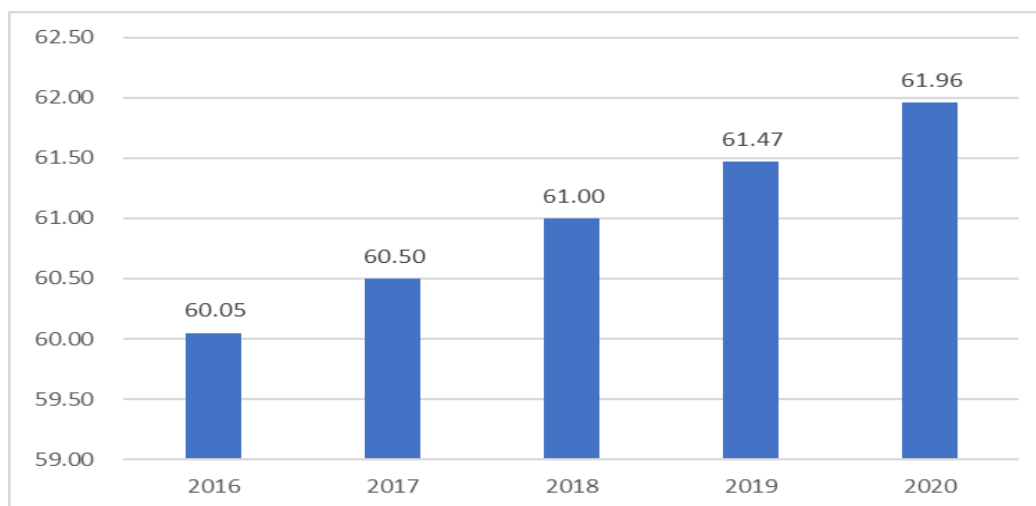
Sumber: Dinas PUBM dan SDA Kabupaten Sidoarjo, 2020





Kecamatan Sedati memiliki prosentase jalan mantap yang paling kecil, yaitu 86,07%, kemudian disusul kecamatan Prambon sebesar 90,67%. Hal ini disebabkan karena ekskalasi angkutan berat cukup tinggi di kedua kecamatan tersebut.

**Gambar 2.45. Jumlah Bangunan ber-IMB (%) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020**



Sumber: Dinas Perkim CKTR Sidoarjo, 2020

Berdasarkan Gambar 2.40. terjadi peningkatan jumlah bangunan ber-IMB dari tahun ke tahun. Peningkatan ini terjadi disebabkan karena adanya kesadaran masyarakat akan perijinan bangunan, ketentuan yang mengharuskan bangunan ber-IMB untuk pengajuan ke bank serta kemudahan pelayanan perijinan berbasis IT. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan jumlah bangunan ber-IMB antara lain masih banyak pengajuan IMB yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan juga karena perkembangan pertumbuhan bangunan tidak sejalan. Jumlah bangunan ber-IMB di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2016 hingga 2020 terus meningkat, pada tahun 2016 sebesar 60.05% dan menjadi 61.96% pada tahun 2020.

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten dan rencana rincinya menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan. Penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berupa Izin



Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten. Berdasarkan jenisnya, terdapat 3 (tiga) jenis IMB yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu IMB rumah tinggal, IMB non rumah tinggal serta IMB Reklame.

**Tabel 2.18. Presentasi Capaian Fasilitas Pertanahan dan Pengadaan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2020**

Indikator	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Prosentase Terfasilitasinya pertanahan dan Pengadaan Tanah sesuai Prosedur (%)	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perkim CKTR Sidoarjo, 2020

Penanganan permasalahan pertanahan dan pengadaan tanah sesuai prosedur yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dari tahun ket ahun antara tahun 2017 hingga tahun 2020 selalu konsisten diangka 100%.

Ditinjau dari daerah genangan (daerah banjir) menunjukkan bahwa di Kabupaten Sidoarjo sebelah Barat pada umumnya tidak pernah tergenang, hal ini disebabkan karena wilayah Barat merupakan daerah yang relatif lebih tinggi dibanding daerah lain. Sedangkan wilayah Tengah merupakan daerah yang jarang tergenang. Daerah yang drainasenya tergenang periodik dan tergenang terus menerus lokasinya tersebar sporadis di daerah pesisir Timur Kabupaten Sidoarjo. Penanganan luas genangan atau banjir dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ini masih berada di bawah target yang ditentukan.

Sedangkan sistem irigasi di Kabupaten Sidoarjo dikenal dengan nama Sistem Irigasi Delta Brantas. Pemberian air irigasi pada sistem irigasi ini dilakukan dengan cara rotasi yang dikenal dengan sistem golongan. Hal ini dikarenakan kebutuhan air irigasi tidak dapat dicukupi untuk semua lahan dalam waktu yang sama sehingga dilakukan rotasi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 2.19 di bawah ini:



**Tabel 2.19. Presentasi Kecukupan Irigasi dan Luasan Genangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020**

INDIKATOR KINERJA	2016		2017		2018		2019		2020	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Prosentase kecukupan kebutuhan air irigasi	82,00	73,80	82,00	72,00	84,00	74,00	85,00	83,00	86,00	85,40
Prosentase luasan genangan/banjir tertangani	60,00	41,70	60,00	44,00	64,00	50,00	65,00	53,00	67,00	61,61

Kondisi existing badan air atau sungai di Kabupaten Sidoarjo berupa saluran pembawa (primer dan sekunder) dan saluran pembuang (Afvoer). Kabupaten Sidoarjo memiliki 2 saluran pembawa primer dan 46 saluran pembawa sekunder serta 47 saluran pembuang (Afvoer). Menurut penggunaannya, saluran-saluran tersebut berfungsi untuk irigasi pada kegiatan pertanian serta sebagai air baku air minum.

Dari tabel 2.19 di atas, nampak bahwa perkembangan persentase tingkat capaian atau kecukupan kebutuhan air untuk irigasi selama kurun waktu tersebut walaupun sempat turun pada tahun 2017 namun selalu meningkat pada tahun-tahun berikutnya, yaitu ; 73,80% (2016), 72% (2017), 74% (2018), 83% (2019), dan 85,40% (2020). Dengan kata lain bahwa dari seluruh kebutuhan air untuk irigasi di Kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu lima tahun terakhir (2016 – 2020) rata – rata hanya tercukupi/terpenuhi sebesar 77,64%. Disamping itu dari tabel 2.19 diatas luasan daerah/area genangan yang tertangani masih sangat rendah, yaitu berkisar antara 41,7% sampai dengan 61,61% dari seluruh luasan genangan yang terjadi. Luasan genangan yang ditangani hanya di areal pertanian dan permukiman.



**Tabel 2.20 Luas Area Genangan Tertangani Tahun 2016 – 2020**

No	Lokasi	2016	2017	2018	2019	2020
		(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)
1	Pertanian	509	490	405	471	523
2	Permukiman	90	82	68	52	82
<b>Jumlah</b>		<b>599</b>	<b>572</b>	<b>473</b>	<b>523</b>	<b>605</b>
<b>Persentase</b>		41,70	44,00	50,00	53,00	61,61

Sumber : Dinas PUBMSDA

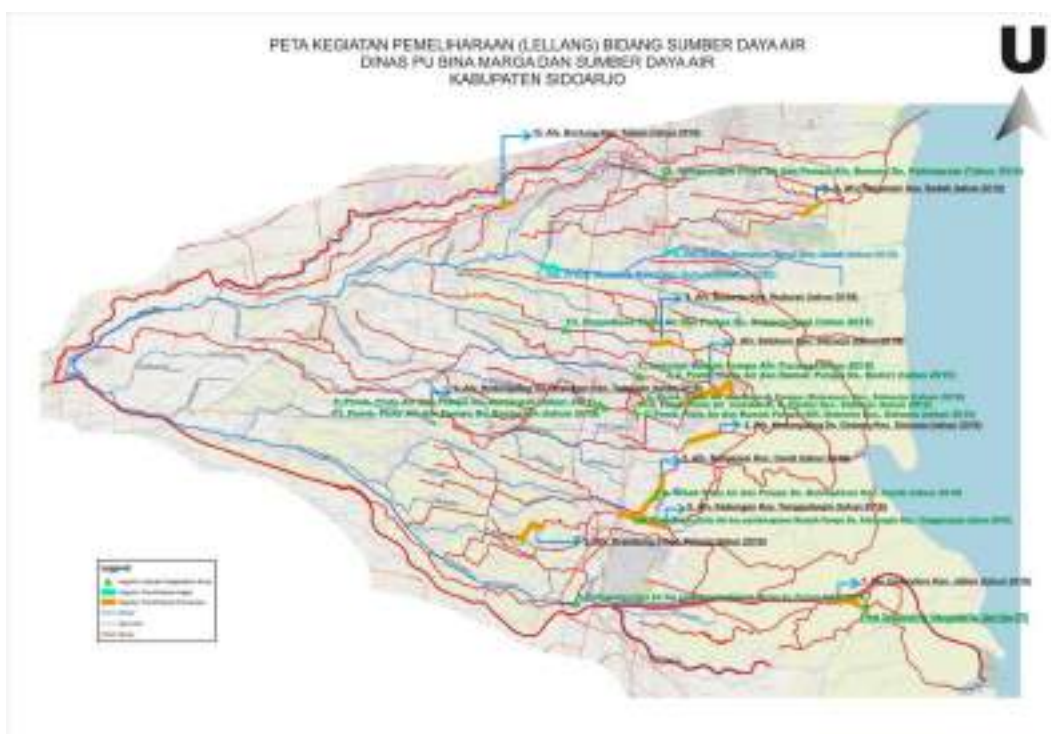
Penurunan luas genangan di permukiman relatif lambat, sehingga masih diperlukan penataan secara komprehensif. Hal tersebut karena belum optimalnya sistem pengendalian genangan/banjir di perkotaan/ pemukiman. Selain itu juga karena kurangnya kesadaran masyarakat sekitar saluran yaitu sering menjadikan saluran sebagai tempat sampah. Pemahaman yang kurang tepat tersebut berdampak pada terjadinya hambatan aliran akibat penumpukan sampah di saluran / sungai, sehingga pada saat terjadi curah hujan yang tinggi terjadi luapan air karena badan saluran tidak mampu menampung debit yang ada

Secara umum kondisi daya tampung sungai berkurang secara vertikal (sedimentasi) sementara penambahan tampungan secara horisontal (pelebaran dan pemanfaatan sempadan) sulit dilakukan. Upaya normalisasi cukup efektif mengurangi resiko banjir di beberapa lokasi sungai. Normalisasi sungai di Kabupaten Sidoarjo merupakan aktivitas penting sebagai upaya untuk penanggulangan banjir.

Sedangkan normalisasi sungai di Kabupaten Sidoarjo merupakan aktivitas penting karena sebagai upaya untuk penanggulangan bencana banjir. Data normalisasi sungai selama tahun 2018 hingga tahun 2020 tergambar dalam peta berikut:



**Gambar 2.46. Peta Kegiatan Pemeliharaan (Lelang) Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020**



Sumber: Dinas PUBM SDA, 2020

**Tabel 2.21. Data Normalisasi Sungai Kabupaten Sidoarjo**

NO	LOKASI	TAHUN
1	Afvour Bangepuk Kec. Candi	2018
2	Afvour Kedunguling Desa Grabagan Kec, Tulangan	2018
3	Afvour Kedungan Kec, Tanggulangin	2018
4	Afvour Buduran Kec. Buduran	2018
5	Afvour Buntung Kec. Taman	2018
6	Afvour Sidokare Kec. Sidoarjo	2019
7	Afvour Kedunguling Desa Gebang Kec, Sidoarjo	2019
8	Afvour Golondoro Kec. Jabon	2019
9	Afvour Semampir Kec. Sedati	2019
10	Afvour Krembung II Kec. Porong	2019
11	Saluran Primer Mangetan Kanal, Kec. Sedati	2019
12	Saluran Primer Mangetan Kanal, Kec. Sukodono	2020

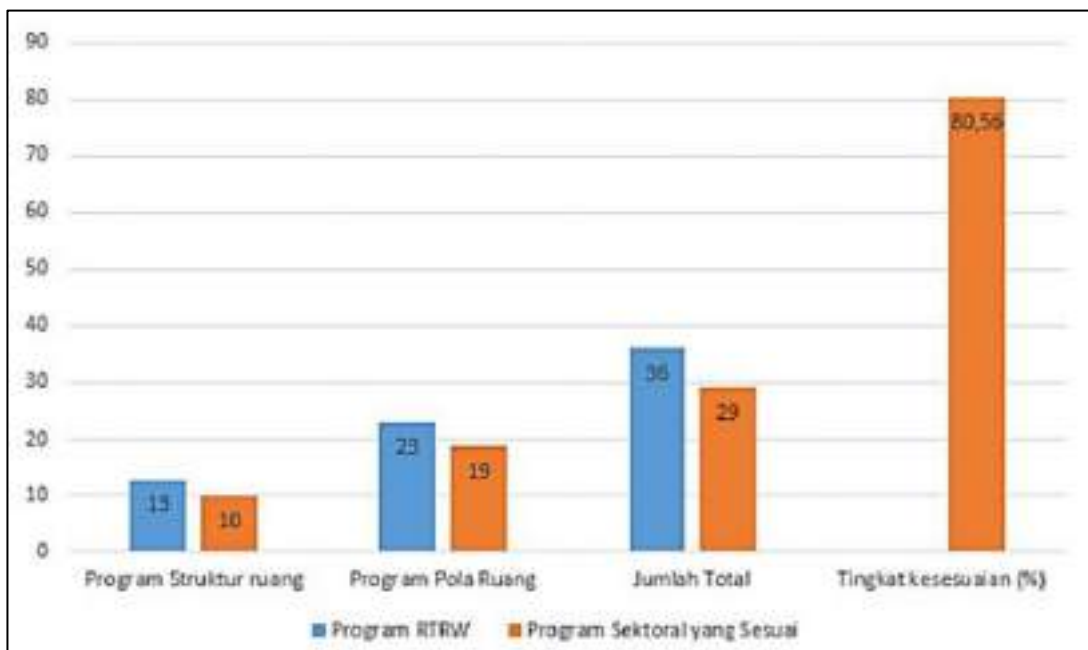
Sumber: Dinas PUBM SDA, 2020



Berdasarkan data di atas diketahui bahwa normalisasi yang telah dilakukan sebagaimana terdapat dalam tabel di atas. Normalisasi tersebut difokuskan di beberapa titik yang memiliki dampak terhadap bencana banjir disekitarnya, sedangkan tahap selanjutnya akan diarahkan pada saluran lain yang memiliki dampak lebih kecil.

Hasil evaluasi rencana pembangunan terhadap RTRW di Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 termasuk dalam klasifikasi tingkat kesesuaian tinggi dengan nilai sebesar 86,11%. Hasil tersebut merupakan pencapaian yang sangat baik sehingga untuk kegiatan selanjutnya perlu menjaga kesesuaian kualitas pemanfaatan ruang dengan memantapkan program-program pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Lebih lengkapnya tersaji dalam gambar 2.47 di bawah ini:

**Gambar 2.47. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Tahun 2020**



*Sumber: Dinas Perkim CKTR Sidoarjo, 2020*

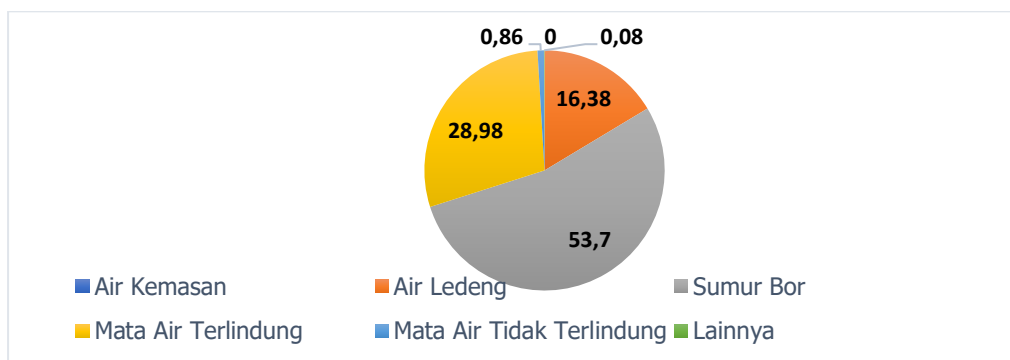
#### **2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara umum dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata



Ruang. Secara garis besar indikator kinerja yang ada pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai realiasi yang selalu meningkat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengupayakan masyarakatnya untuk mendapatkan sumber air untuk mandi dan cuci yang bersih. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.48.

**Gambar 2.48. Persentase Sumber Air Utama untuk Mandi/Cuci/dll di Kabupaten Sidoarjo Menurut Sumber Air Tahun 2020**



Sumber: *Sidoarjo dalam Angka, 2021*

Berdasarkan gambar 2.43. Rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo dalam memenuhi kebutuhan primer untuk mandi, mencuci, dan memasak banyak yang menggunakan sumur bor dengan persentase sebesar 53,7%, kedua adalah mata air terlindung sebesar 28,98% dan ketiga adalah air ledeng sebesar 16,38%. Selain itu masyarakat masih menggunakan Sumur terlindung, mata air tidak terlindung, dan sumur tidak terlindung.

### **Air Bersih**

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan jumlah penduduk yang terlayani air bersih juga mengalami peningkatan. Akses sanitasi dan air bersih merupakan salah satu indikator kumuh. Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo persentase prasarana sanitasi yang disediakan sesuai target mencapai 95,9 % pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah berupaya untuk meningkatkan



sarana prasana atau akses sanitasi. Sementara itu, persentase prasarana air bersih yang disediakan mencapai 4.07 % pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 5.49 % pada tahun 2020 seperti yang ditunjukkan oleh tabel berikut.

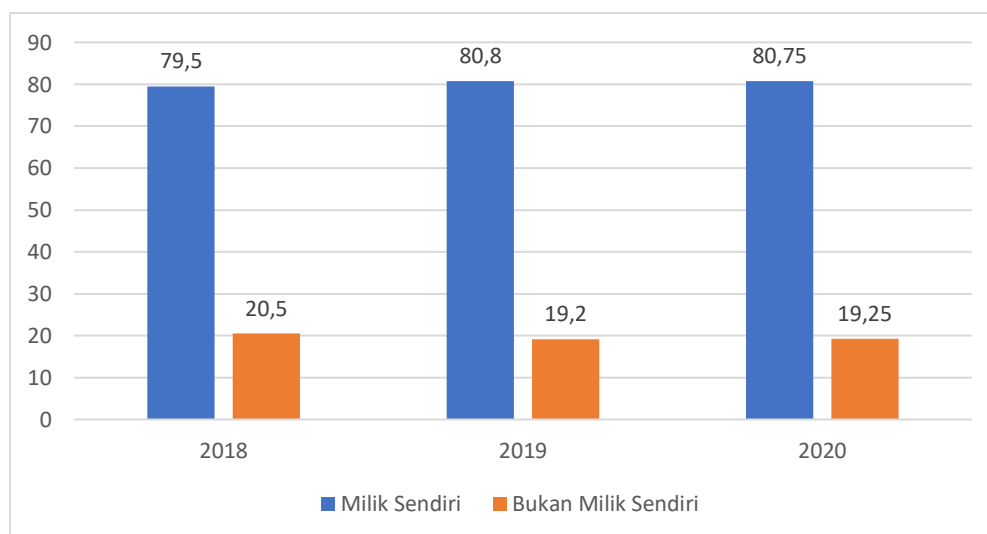
**Tabel 2.22. Persentase Prasarana Sanitasi dan Air Bersih Tahun 2017-2020**

No	Keterangan	2017	2018	2019	2020
1	Prasarana Sanitasi yang disediakan	N/A	94,01%	93	95.9
2	Prasarana Air Bersih yang disediakan	0.70%	1%	4.07	5.49

Sumber: Data Dinamis TW II Sidoarjo, 2020, diolah

Kepemilikan bangunan juga menjadi salah satu indikator perhatian pemerintah daerah. Kepemilikan bangunan yang dimiliki masyarakat Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 79,5% pada tahun 2018, 80,8% pada tahun 2019, dan sebesar 80,75% pada tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa masyarakat telah mampu memenuhi kebutuhan dasar berupa papan. Lihat gambar 2.49. berikut.

**Gambar 2.49. Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo Menurut Penguasaan Bangunan Tahun 2018-2020**



Sumber: BPS, diolah 2021

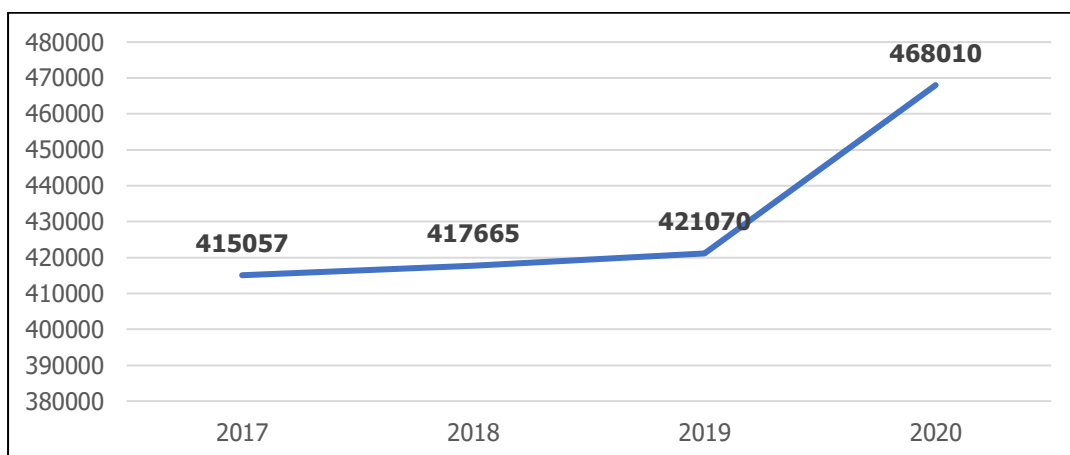
Selanjutnya, jumlah rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan yang telah memiliki akses sanitasi sehat pada tahun 2020





berjumlah 468.010 rumah tangga. Terdapat kenaikan jumlah rumah tangga yang memiliki sanitasi sehat sebesar 3.405 KK jika dibandingkan dengan Tahun 2019. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo keseluruhan sebesar 2.033.764 Jiwa (SIAC Dispendukcapil, Desember 2020) atau 406.753 KK, maka 95,4% penduduk Kabupaten Sidoarjo bersanitasi sehat. Tren tersebut dapat dilihat pada gambar 2.50. berikut

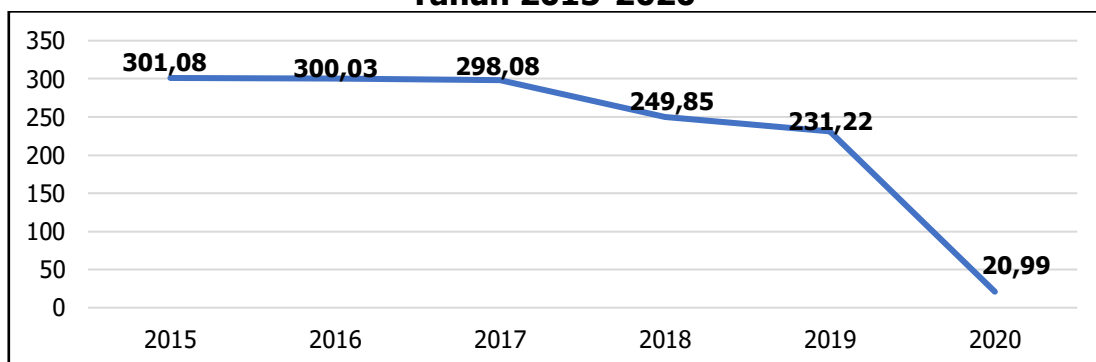
**Gambar 2.50. Rumah Tangga Memiliki Akses Sanitasi Sehat Tahun 2017-2020**



Sumber: Dinas Perkim CKTR Kabupaten Sidoarjo, 2020

Luas kawasan kumuh di Kabupaten Sidoarjo seluas 301,08 Ha. Luasan wilayah kumuh tersebut terbagi dalam 52 desa dan 14 kecamatan. Secara global terjadi penurunan Kawasan kumuh di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2015 sebesar 301,08 Ha menjadi seluas 20,99 Ha pada tahun 2020.

**Gambar 2.51. Luas Kawasan Kumuh (Ha) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2020**



Sumber: Dinas Perkim CKTR Kabupaten Sidoarjo, 2020



Penurunan yang sangat drastis pada tahun 2020 membuktikan bahwa pemerintah daerah sangat konser dalam menata kehidupan yang layak dan tata kota wilayah yang asri, nyaman, dan indah. Adapun sebaran Kawasan kumuh tersebut seperti yang tertera dalam tabel 2.23 berikut:

**Tabel 2.23. Lokasi Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020**

KECAMATAN		KELURAHAN/DESA		LUAS KUMUH (HA)
1	Balongbendo	1	Kemangsen	3,90
		2	Sumokembangsri	12,92
2	Candi	3	Balongdowo	4,35
		4	Bligo	11,71
		5	Tenggulunan	2,76
3	Gedangan	6	Bangah	10,87
		7	Punggul	5,86
		8	Sawotratap	4,50
		9	Sruni	3,50
4	Krembung	10	Cangkring	7,45
5	Krian	11	Krian	4,52
		12	Sidomojo	3,29
		13	Tambakkemerakan	6,04
		14	Terungkulon	2,50
6	Porong	15	Kebonagung	3,74
		16	Porong	1,81
		17	Wunut	8,70
7	Sedati	18	Banjerkemuning	5,20
		19	Cemandi	0,42
		20	Kalanganyar	1,38
		21	Pabean	4,00
		22	Segorotambak	1,82
		23	Tambakcemandi	4,74
8	Sidoarjo	24	Banjarbendo	2,02
		25	Bluru Kidul	0,07
		26	Gebang	3,71
		27	Lemahputro	2,03
		28	Pekauman	12,00
		29	Pucang	5,28
		30	Pucanganom	3,68
		31	Rangkahkidul	4,21
		32	Sidokare	11,31
		33	Sidoklumpuk	6,75



KECAMATAN		KELURAHAN/DESA		LUAS KUMUH (HA)
		34	Sidokumpul	3,25
9	Sukodono	35	Cangkringsari	4,70
		36	Kloposepuluh	12,94
		37	Pademonegoro	9,99
		38	Pekarungan	4,82
		39	Sukodono	13,91
10	Taman	40	Bringinbendo	1,30
		41	Pertapanmaduretno	5,41
11	Tanggulangin	42	Gempolsari	3,62
		43	Kalitengah	0,62
12	Waru	44	Berbek	3,16
		45	Tambakrejo	2,71
		46	Tambaksumur	7,04
		47	Wadungsari	3,44
		48	Waru	3,73
		49	Wedoro	8,11
		50	Ngingas	9,78
13	Jabon	51	Kedungpandan	8,18
14	Tarik	52	Gempolklutuk	2,88
<b>Total Luas Kumuh (Ha)</b>				<b>276,62</b>

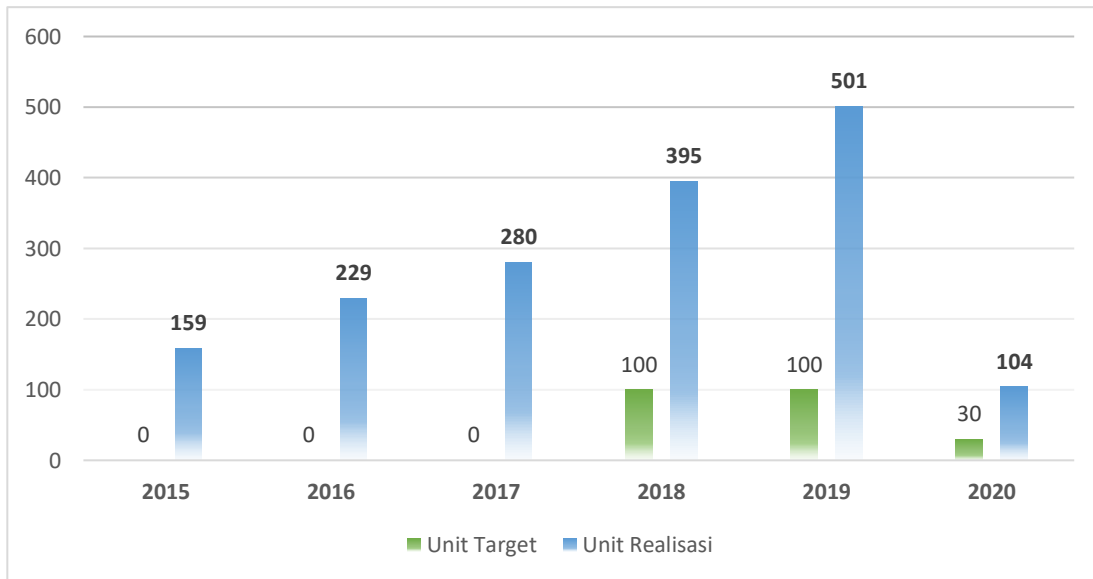
Sumber: Dinas Perkim CKTR Kabupaten Sidoarjo, 2020

Sampai Tahun 2017 kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni selain memperoleh bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) juga memperoleh bantuan dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh KODIM dan dana Corporation Social Responsibility (CSR). Dengan Jumlah rumah sebanyak 443.360 unit, telah dilakukan rehabilitasi sebanyak 442.857 unit rumah tinggal, atau sekitar 99,89% dari jumlah keseluruhan rumah tinggal di Kabupaten Sidoarjo. Pada awal Tahun 2019, adanya pengalihan peningkatan RTLH dari BPMPKB ke DP2CKTR terdapat 503 unit RTLH yang direalisasikan mulai tahun 2019. Pada Tahun 2020 telah dilakukan realisasi peningkatan rumah layak huni di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 104 Unit dengan APBD 30 unit rumah dan dana APBN program BSPS sebanyak 74 unit rumah. Keberhasilan peningkatan rumah layak huni ini telah banyak dilakukan



oleh kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat. Untuk lebih detailnya bisa dilihat dalam gambar 2.52 dibawah ini:

**Gambar 2.52. Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2020**



Sumber: Dinas Perumahan Permukiman dan CKTR Kabupaten Sidoarjo, 2020

### 2.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis di mana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman



dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Menurut Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), indeks resiko bencana Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 termasuk kategori sedang dengan skor 78,89. Namun demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tetap waspada dengan kemungkinan akan terjadinya bencana di Sidoarjo. Hasil Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 mengidentifikasi 7 (tujuh) risiko bencana dan 4 (empat) diantaranya berada pada tingkat risiko tinggi dan sisanya kategori sedang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.24. Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Sidoarjo**

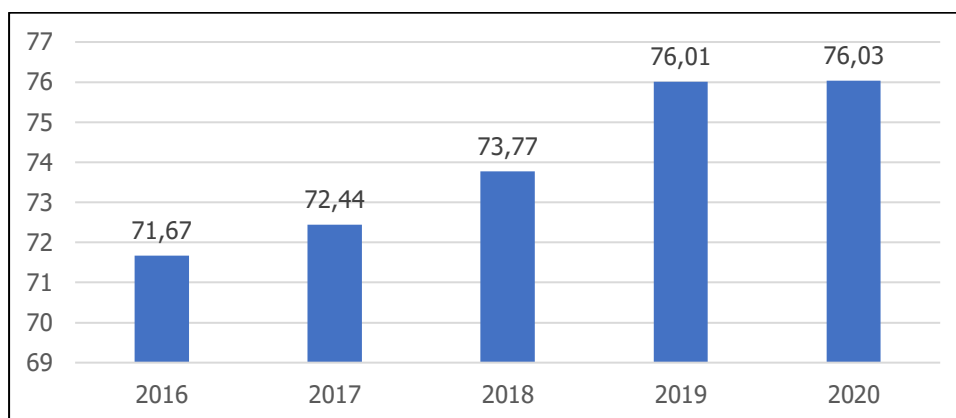
NO	JENIS BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT RISIKO
1.	BANJIR	TINGGI	RENDAH	TINGGI	TINGGI
2.	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	TINGGI	RENDAH	TINGGI	TINGGI
3.	CUACA EKSTRIM	TINGGI	RENDAH	SEDANG	TINGGI
4.	EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	RENDAH	RENDAH	TINGGI	SEDANG
5.	GEMPABUMI	RENDAH	RENDAH	TINGGI	SEDANG
6.	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TINGGI	RENDAH	SEDANG	TINGGI
7.	KEKERINGAN	RENDAH	RENDAH	TINGGI	SEDANG

*Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2022*

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Ketentraman masyarakat dapat diukur menggunakan indeks rasa aman. Indeks rasa aman Kabupaten Sidoarjo semakin meningkat dari tahun ke tahun. Puncaknya indeks rasa aman dirasakan pada tahun 2020 dengan indeks rasa aman sebesar 76,03%. lihat gambar 2.53. berikut



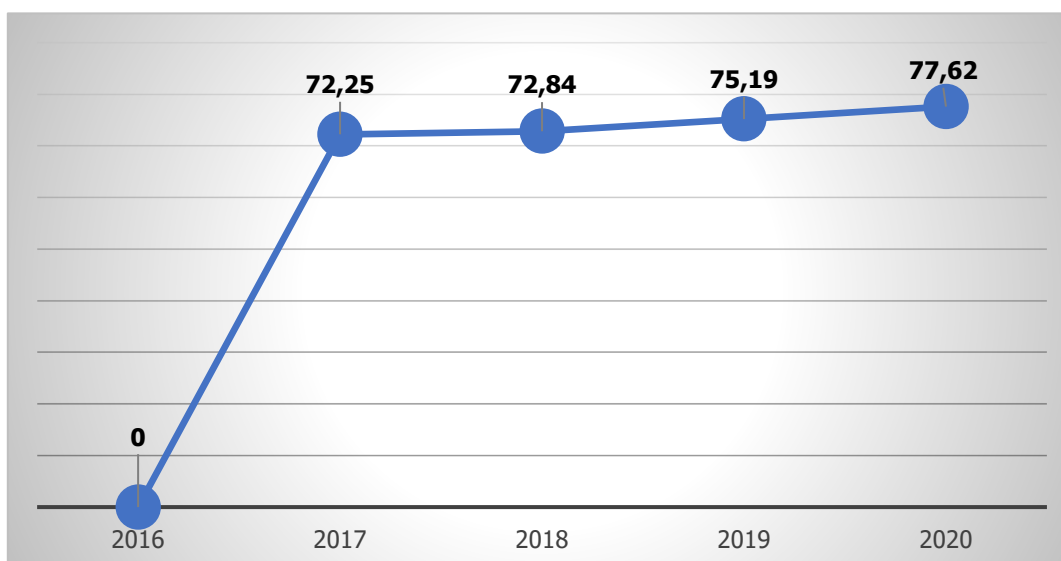
**Gambar 2.53. Perkembangan Indeks Rasa Aman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020**



Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo, 2020

Rasa aman dan tentram di lingkungan masyarakat dapat tercipta karena rasa saling memiliki sikap toleransi antar sesama warga. Tanpa terdapat gesekan yang menyinggung SARA. Karena hal ini termasuk salah satu Hak Asasi Manusia yang paling dasar. Perkembangan Indeks Toleransi di Kabupaten Sidoarjo selalu mengalami peningkatan di tiap tahunnya, yaitu 72,75 pada tahun 2017 dan terus meningkat hingga angka 77,62 poin pada tahun 2020.

**Gambar 2.54. Perkembangan Indeks Toleransi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020**

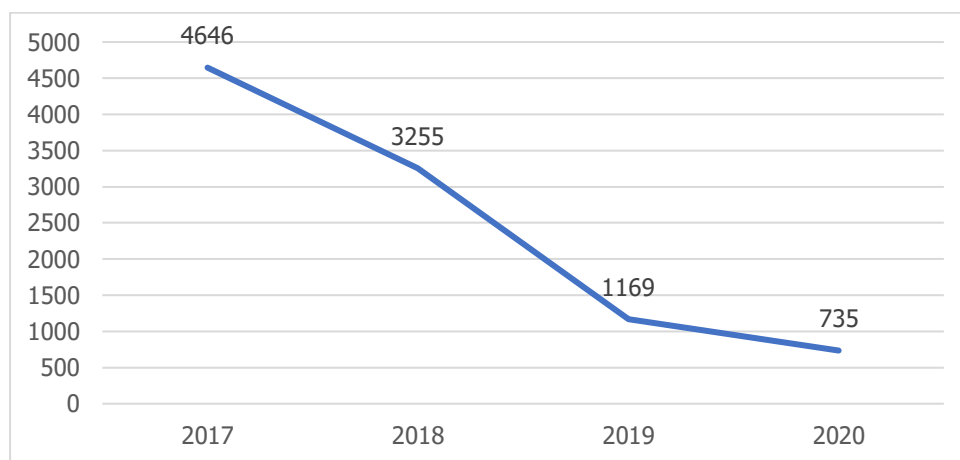


Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo, 2020



Berdasarkan indeks rasa aman yang semakin tahun meningkat hal ini dibuktikan dengan jumlah kejahatan yang dilaporkan semakin turun dari tahun ke tahun. Berawal kasus tindak kejahatan sebanyak 4.646 turun secara drastis pada tahun 2020 menjadi sebesar kasus 735 yang dilaporkan. Hal ini merupakan hal positif untuk masyarakat menjadi tenang tinggal di daerahnya sendiri. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.55. berikut.

**Gambar 2.55. Jumlah Kejahatan di Kabupaten Sidoarjo Dilaporkan Tahun 2017-2020**



Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2021

Salah satu faktor penurunan tindak kejahatan adalah sikap disiplin dan bertanggung jawab antara masyarakat serta penegak hukum yang tegas dalam menindak setiap pelaku kriminalitas. Upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban juga didukung dengan adanya keanggotaan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Anggota Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sidoarjo mencapai 100% pada tahun 2019, Ini artinya setiap petugas mewakili 1 RT. Selain keanggotaan LINMAS Kabupaten Sidoarjo memiliki cara dengan menghidupkan Poskamling di setiap RT dengan mencapai sebesar 100%. Lihat tabel 2.25. di bawah berikut.



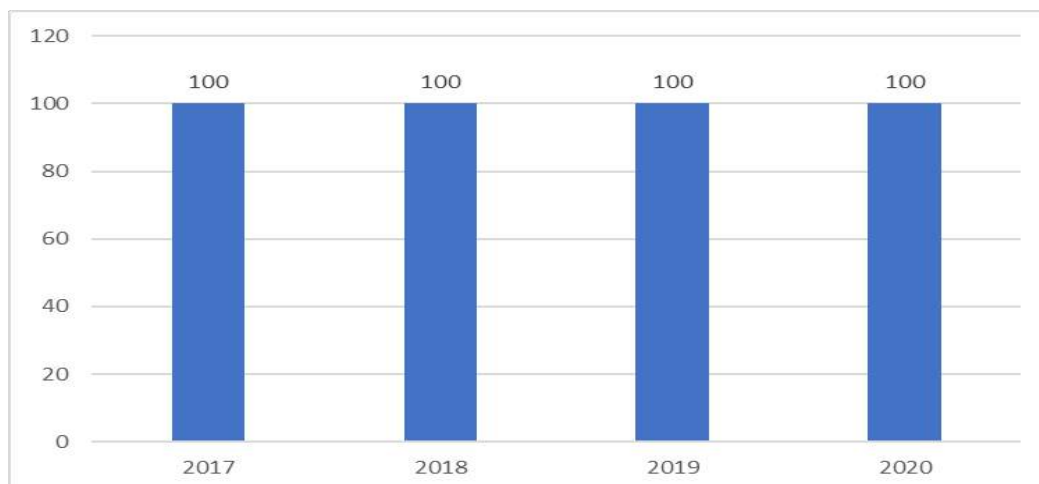
**Tabel 2.25. Rasio Jumlah Anggota Linmas terhadap Jumlah RT dan Prosentase Poskamling yang Aktif**

INDIKATOR KINERJA	2017		2018		2019		2020	
	Rasio	%	Rasio	%	Rasio	%	Rasio	%
Rasio Jumlah anggota linmas terhadap jumlah RT	1: 0.9	102	1:0.94	98.9	1:1	100	1:1.1	100
Persentasi Poskamling yang aktif	N/A	N/A	32%	107%	33%	103%	32%	100

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo, 2021

Pencapaian target dilakukan dengan kegiatan Pembinaan Potensi Masyarakat. Secara eksplisit kegiatan dimaksud berupa sosialisasi terhadap warga masyarakat perihal urgensi keberadaan dan partisipasi Satlinmas dalam pengendalian keamanan lingkungan, ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan tanggap bencana. Sasaran utama *locus* sosialisasi ditujukan pada Desa/Kelurahan yang masih minim jumlah personil satlinmasnya.

**Gambar 2.56. Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Ditangani Tahun 2017-2020**



Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo, 2021

Ruang lingkup penegakan peraturan daerah salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan





setiap terjadinya pelanggaran peraturan daerah dengan langkah penindakan represif yustisial. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan hal maksimal dalam penegakan peraturan daerah dengan dibuktikannya dari penanganan kasus mencapai 100% dan ini konsisten dari tahun 2017 hingga tahun 2020.

**Tabel 2.26. Rekap Data Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Pelanggar Protokol Kesehatan yang Bertempat di Gor Sidoarjo Tahun 2020**

No	Tanggal	Lokasi Sidang Tipiring	Jumlah Pelanggar Keseluruhan		Pelanggar yang mengikuti sidang		Pelanggar yang hadir sidang namun belum membayar denda	Jumlah Pelanggar yang tidak hadir sidang (verstek)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	14 September 2020	Depan Poslantas Waru Jl. Raya Waru Sidoarjo	27	Orang	27	Orang	-	-
		Taman Asean Jl. Raya Pagerwojo Buduran	35	Orang	35	Orang	-	-
2	15 September 2020	Depan Ruko Square Garden Sidodadi	60	Orang	60	Orang	-	-
3	17 September 2020	Lapangan Tennis Graha Tirta Waru	105	Orang	105	Orang	-	-
4	21 September 2020	Kantor Kelurahan Kajijaben Kecamatan Taman	8	Orang	8	Orang	-	-
5	24 September 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	789	Orang	488	Orang	-	301 orang
6	1 Oktober 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	719	Orang	419	Orang	-	300 orang
7	8 Oktober 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	387	Orang	173	Orang	-	214 orang
8	15 Oktober 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	367	Orang	188	Orang	-	179 orang
9	22 Oktober 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	704	Orang	323	Orang	-	381 orang
10	5 November 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	912	Orang	442	Orang	-	470 orang
11	12 November 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	509	Orang	196	Orang	-	313 orang
12	19 November 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	574	Orang	247	Orang	-	327 orang
13	26 November 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	618	Orang	288	Orang	-	330 orang
14	3 Desember 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	562	Orang	284	Orang	-	278 orang
15	17 Desember 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	128	Orang	47	Orang	-	81 orang
16	14 Januari 2021	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	595	Orang	287	Orang	-	308 orang
17	28 Januari 2021	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	2.376	Orang	1.347	Orang	9 orang	1.020 orang
18	4 Februari 2021	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	1.333	Orang	653	Orang	21 orang	680 orang
<b>Jumlah Pelanggar</b>			<b>10,808</b>	<b>Orang</b>	<b>5,617</b>	<b>Orang</b>	<b>30 orang</b>	<b>5,182 orang</b>

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo, 2021



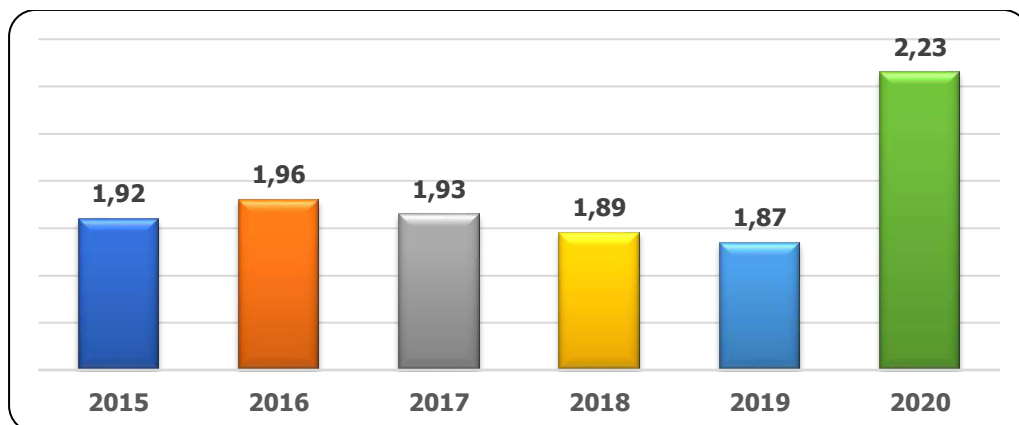
Bentuk pelaksanaannya diimplementasikan dengan penyelenggaraan Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) bagi pelaku pelanggaran peraturan daerah. Jumlah penyelesaian pelanggaran keseluruhan peraturan daerah melalui proses sidang tipiring COVID-19 pada tahun 2020 sebanyak 10.808 pelanggar.

### 2.3.1.6 Sosial

Pemantauan perkembangan jumlah PMKS dapat digunakan sebagai salah satu indikator sosial ekonomi. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Untuk menilai perlindungan dan penanganan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tanggung jawab untuk mengurangi jumlah PMKS.

Indikator ini menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengentaskan PMKS. Pengurangan PMKS dilakukan melalui upaya untuk memberdayakan masyarakat yang masuk kategori PMKS dan mengurangi faktor penyebab meningkatnya PMKS.

**Gambar 2.57. Persentase PMKS terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2020**

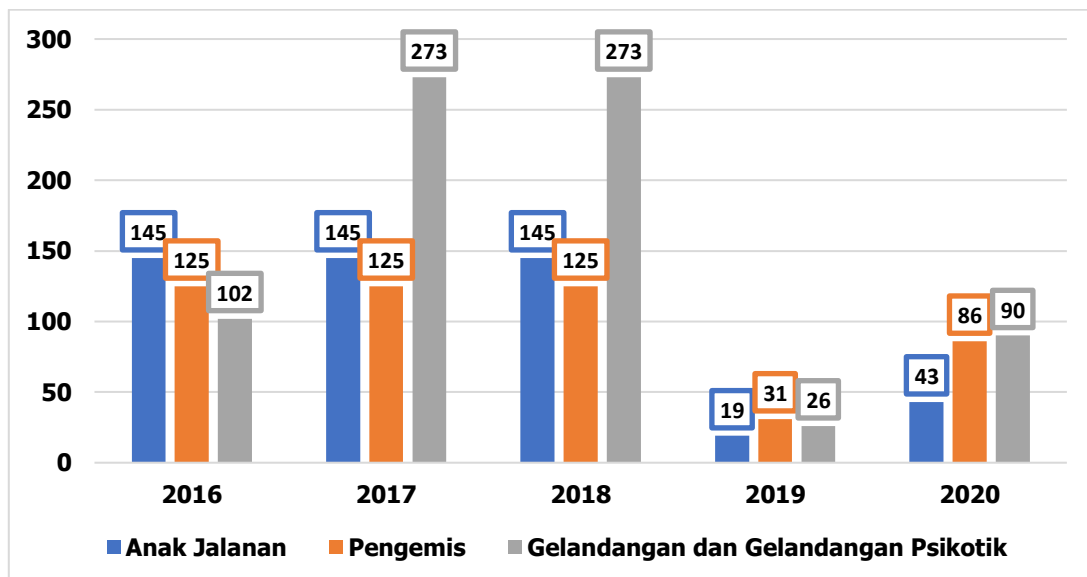


Sumber: Dinas Sosial, diolah, 2021



Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi sebesar 1,96% kemudian mengalami penurunan pada dua tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2017 menjadi 1,93%, pada tahun 2018 menjadi 1,89%, tahun 2019 menjadi 1,87%, dan naik pada tahun 2020 menjadi 2,23%. Hal ini berarti dari 100 orang penduduk terdapat dua orang PMKS. Kenaikan jumlah PMKS ini disebabkan oleh adanya bencana *Covid-19*.

**Gambar 2.58. Jumlah PMKS terlantar Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020**



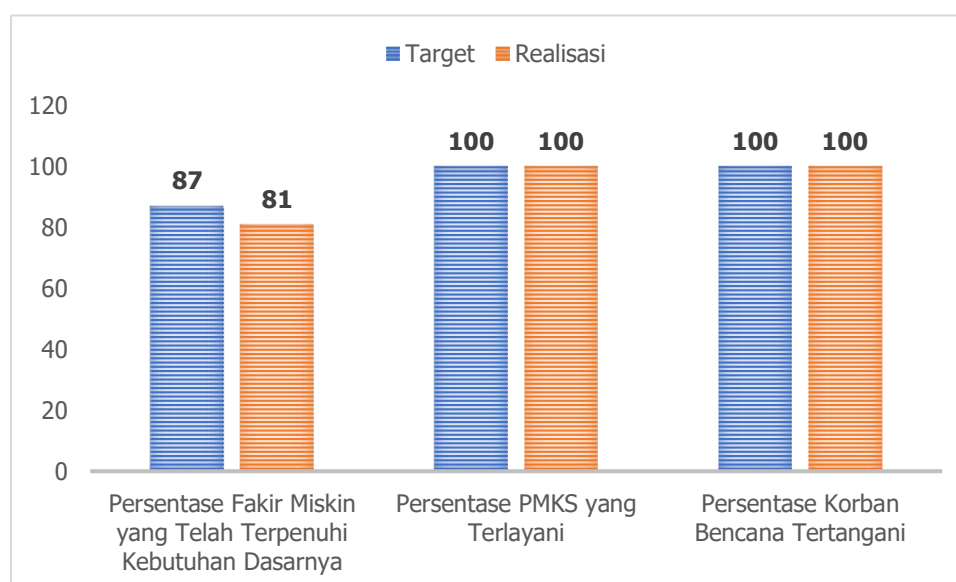
Sumber: Dinas Sosial, diolah, 2021

Sedangkan untuk PMKS terlantar terdiri atas anak jalanan, pengemis, dan gelandangan. Secara umum PMKS terlantar jumlahnya terus menurun sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami sedikit kenaikan karena disebabkan oleh Pandemi *Covid-19*. Untuk menurunkan jumlah PMKS di Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Sosial telah melaksanakan beberapa program yaitu pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada sebanyak 5.000 KPM per bulan dan bantuan sembako kepada 135.572 KRT. Selain itu untuk menangani korban bencana alam maupun bencana sosial lainnya pemerintah juga mengucurkan



bantuan dalam bentuk pemberian nasi kotak pasien dalam pengawasan (PDP) *Covid-19* sebanyak 806.954 kotak, Bantuan Tunai Pengganti Permakanan PDP *Covid-19* sebanyak 502 orang, bantuan permakanan untuk pasien isolasi OTG sebanyak 258 orang, bantuan tunai korban PHK sebanyak 5.000 orang, dan bantuan korban banjir sebanyak 754 KK. Berikut data detail capaian Kinerja penanganan PMKS dan korban bencana di Kabupaten Sidoarjo:

**Gambar 2.59. Persentase Penanganan PMKS dan Korban Bencana Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020**



Sumber: Dinas Sosial, diolah, 2021

### 2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

#### 2.3.2.1 Tenaga Kerja

Penduduk usia kerja adalah semua orang berumur 15 tahun ke atas. Jumlah penduduk usia kerja di Sidoarjo pada Agustus 2020 sebanyak 1,78 juta orang, naik 30,02 ribu orang dibandingkan Agustus 2019. Penduduk usia kerja cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Dari total penduduk usia kerja pada Agustus 2020 tersebut, 1,19 juta orang diantaranya merupakan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 di Sidoarjo mengalami kenaikan 2,00 persen atau sekitar 23,50 ribu dibandingkan Agustus 2019. Komponen



pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2020, Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Sidoarjo juga meningkat. TPAK pada Agustus 2020 tercatat sebesar 67,17 persen, meningkat 0,19 persen poin dibanding setahun yang lalu. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja. Kenaikan TPAK ini utamanya disebabkan oleh kenaikan jumlah penganggur dan jumlah absolut penduduk bekerja yang terserap di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Lebih lengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.27. Penduduk Usia Kerja Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2018-2020**

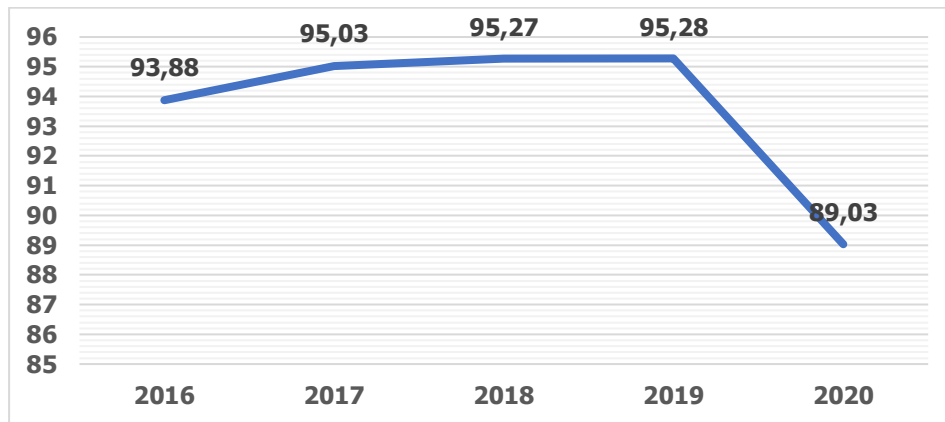
Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2018	Agustus 2019	Agustus 2020	Perubahan 1 tahun (Agustus 2019-Agustus 2020)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Ribu orang	Ribu orang	Ribu orang	Ribu orang	Persen
Penduduk Usia Kerja	1 723,81	1 753,75	1 783,77	30,02	1,71
Angkatan Kerja	1 118,55	1 174,73	1 198,23	23,50	2,00
Bekerja	1 066,83	1 120,48	1 066,79	-53,69	-4,79
Pengangguran	51,72	54,25	131,44	77,19	142,29
Bukan Angkatan Kerja	605,26	579,02	585,53	6,51	1,12
	Persen	Persen	Persen		Persen Poin
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,62	4,62	10,97		6,35
Laki-laki			11,65		
Perempuan			9,91		
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,89	66,98	67,17		0,19
Laki-laki			81,55		
Perempuan			52,78		

Sumber: BPS Sidoarjo, diolah

Penduduk Sidoarjo yang terserap pada 9 (Sembilan) sektor tenaga kerja secara persentasenya mencapai angka di atas 90 persen dan cenderung mengalami kenaikan. Satu-satunya penurunan hanya terjadi pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi *Covid-19*. Berikut adalah grafik kenaikan tenaga kerja Sidoarjo yang terserap dalam 9 sektor:



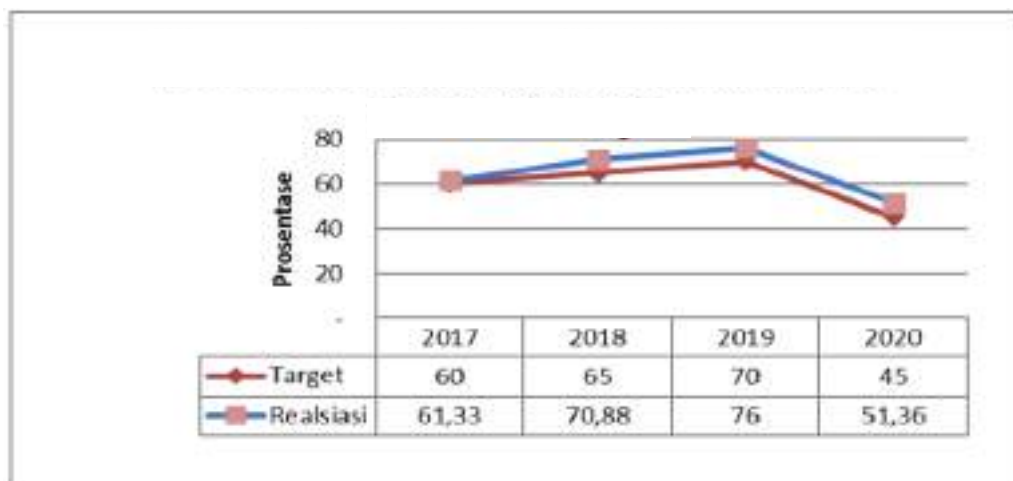
**Gambar 2.60. Persentase Tenaga Kerja Terserap di 9 Sektor Tahun 2016-2020**



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo, diolah

Sementara itu dalam kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2020 lulusan pelatihan yang bekerja cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 persentase peserta pelatihan yang bekerja sebesar 60 persen, kemudian mengalami kenaikan sebesar 5 persen pada tahun 2018 menjadi 65 persen. Pada tahun 2019 dari 384 orang peserta pelatihan, sebanyak 290 orang dinyatakan bekerja atau capaiannya sebesar 76 persen. Tahun 2020, dengan adanya pandemic *Covid-19* penetrasi peserta pelatihan yang bekerja mengalami penurunan. Lebih lengkapnya bisa dilihat dalam gambar 2.61 di bawah ini.

**Gambar 2.61. Persentase Lulusan Pelatihan Yang Telah Bekerja Tahun 2017-2020**



Sumber: Disnaker Kab. Sidoarjo, diolah



Pada gambar di atas, dapat dijelaskan terjadi tren peningkatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 19,6 persen atau 20 PB dari 102 dan pada tahun 2020 terdapat peningkatan jumlah perselisihan hubungan industrial menjadi 148 namun yang terselesaikan dengan PB sebanyak 37 kasus perselisihan hubungan industrial yang dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja. Namun dengan banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial tersebut, semua perselisihan hubungan industrial dapat tertangani atau diselesaikan selain selesai melalui PB (Perjanjian Bersama) juga diselesaikan dengan anjuran tertulis oleh Mediator Hubungan Industrial.

**Gambar 2.62. Persentase Kasus PHI Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Tahun 2017-2020**



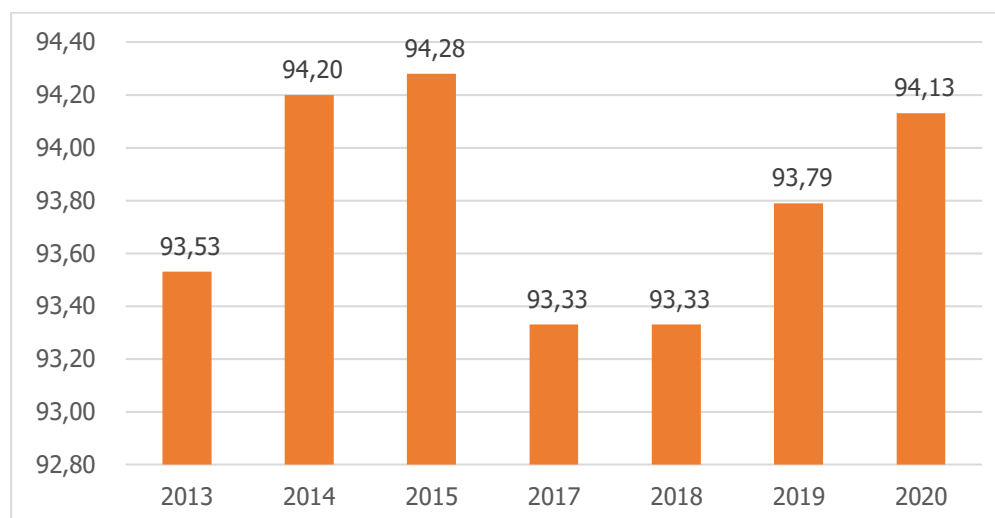
Sumber: Disnaker Kab. Sidoarjo, diolah

### 2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak.



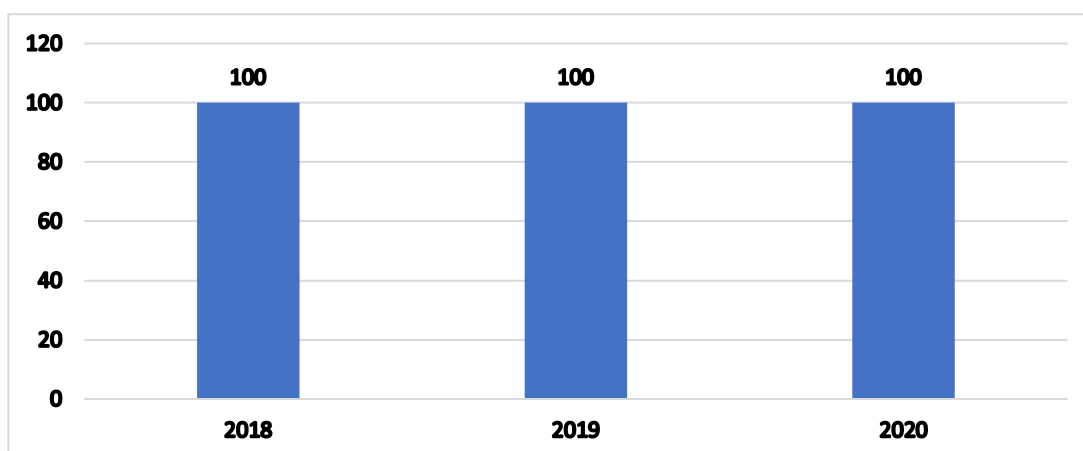
**Gambar 2.63. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2020**



Sumber: DP3AKB Sidoarjo 2020

Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Perkembangan pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo mengalami fluaktuasi setiap tahunnya, namun tingkat pembangunan gender masih terbilang tinggi yakni sebesar 94% ke atas. Secara rinci kinerja pembangunan kesetaraan gender baik dari sisi kebijakan pemerintah melalui pengarusutamaan gender (PUG) maupun peran Lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan terangkum dalam data gambar di bawah ini:

**Gambar 2.64. Capaian Kinerja Pembangunan Gender Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020**



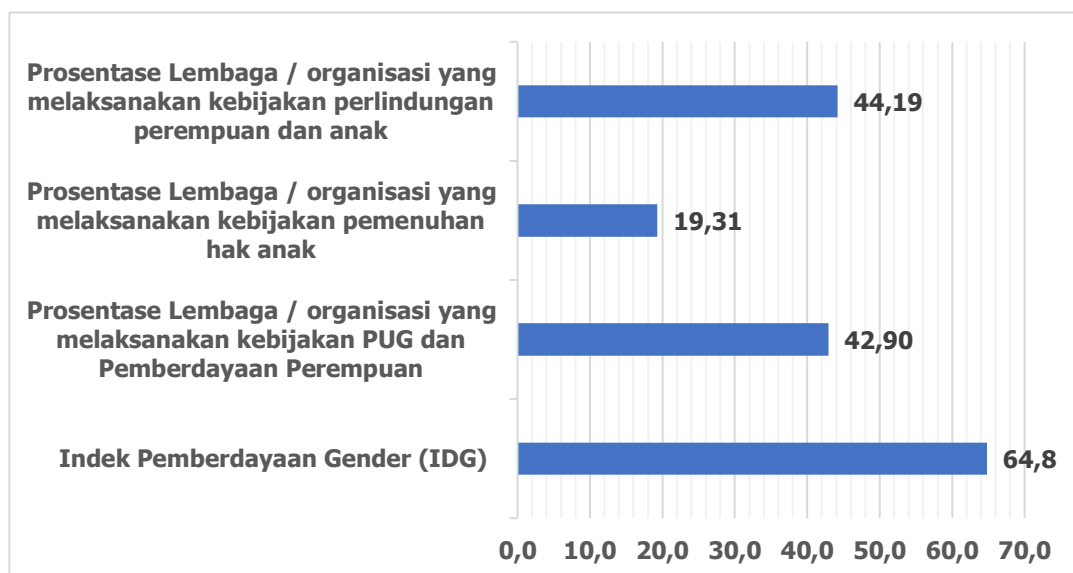
Sumber: DP3AKB Sidoarjo





Peran perempuan dalam kancah dunia kerja maupun dalam dunia perpolitikan, akan membuat perempuan sebagai bahan pelampiasan kekerasan maupun pelecehan. Hal positif yang terjadi pada Kabupaten Sidoarjo adalah terus berupaya dalam menangani maksimal terselesaikannya kasus tindak kekerasan dan *trafficking* perempuan dan anak dari tahun 2018 hingga tahun 2020.

**Gambar 2.65. Persentase Kasus Kekerasan dan Trafficking Perempuan dan Anak yang diselesaikan Tahun 2018-2020**



Sumber: DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, 2020

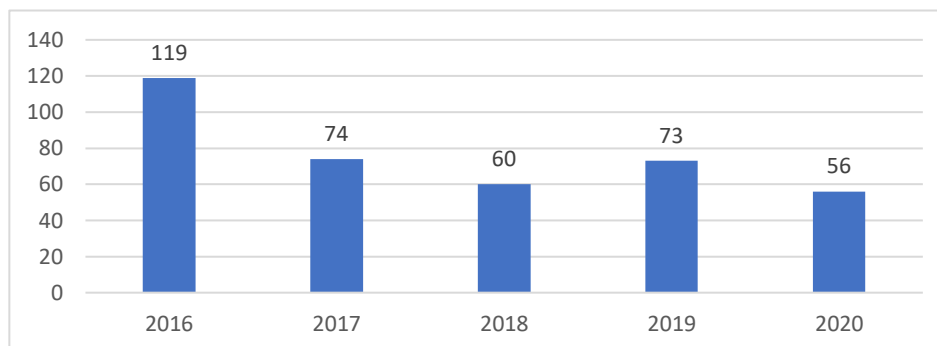
Bentuk-bentuk kekerasan yang berbasis gender menjadi beberapa agenda Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Permasalahan berbasis gender akan merugikan perkembangan fisik maupun non fisik terhadap korban dalam mencapai generasi SDM yang unggul. Pencapaian SDM Unggul menjadi prioritas nasional. Sehingga permasalahan berbasis gender harus segera ditekan hingga tanpa kasus.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah



tangga. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga, lihat gambar 2.61, kasus dari tahun 2016 berjumlah 119 hingga tahun 2020 menjadi 56 kasus. Perlu adanya upaya ekstra pemerintah daerah untuk menuju *zero case*.

**Gambar 2.66. Jumlah Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2016-2020**

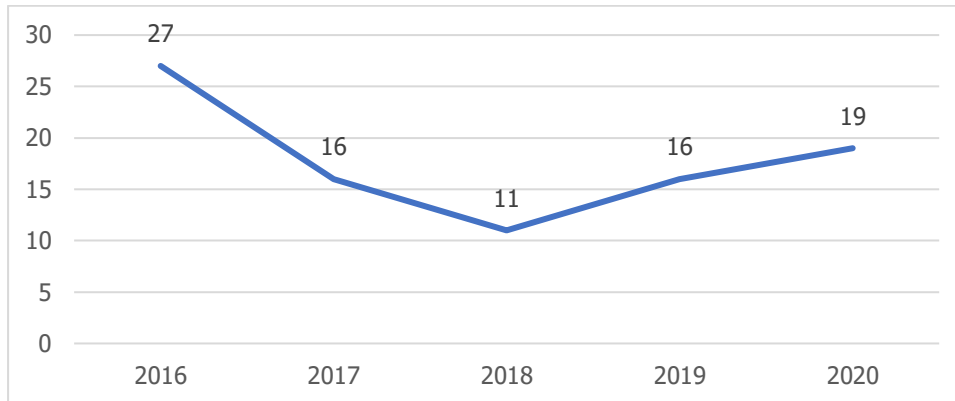


Sumber: DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, 2020

Selain kasus kekerasan dalam rumah tangga, terdapat kasus kekerasan pada anak yang juga harus diselesaikan demi mewujudkan SDM Unggul. Kekerasan terhadap anak bisa berupa kekerasan fisik, psikologis, verbal, eksploitasi, penjualan anak, hingga penelantaran atau pengabaian terhadap kesejahteraannya. Hal ini rentan terjadi di rumah, sekolah, maupun dalam komunitas masyarakat. Efek kekerasan pada anak dapat menjerumuskan dalam bahaya alkohol dan penyalahgunaan narkoba pada korban kekerasan. Pekerjaan rumah yang penting untuk segera diselesaikan, menurut data pada gambar 2.62. Jumlah kasus kekerasan pada tahun 2016 hingga 2018 terus menurun dan pada tahun 2019 hingga tahun 2020 malah terjadi kenaikan. Pada tahun 2021 dan seterusnya pemerintah daerah harus lebih ekstra dalam melakukan pencegahan kasus kekerasan pada anak.



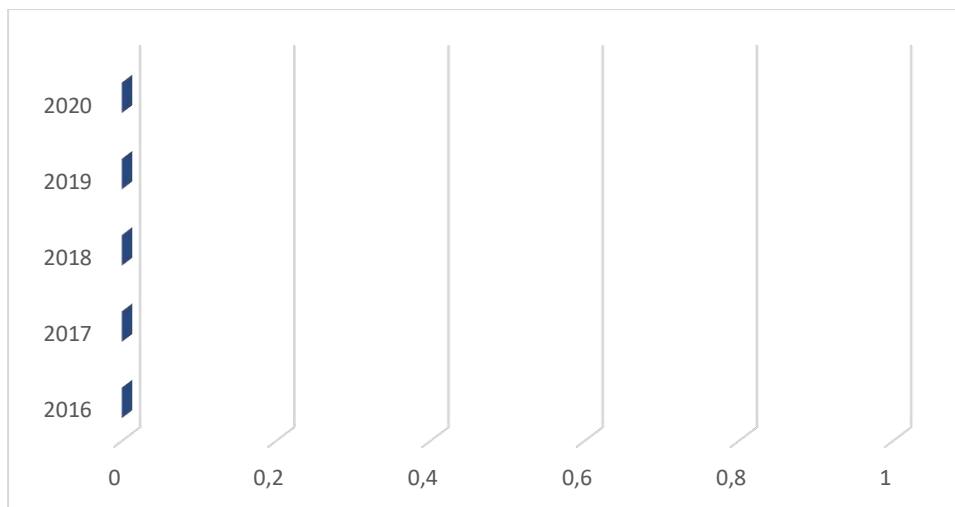
**Gambar 2.67. Jumlah Kekerasan terhadap Anak Tahun 2016-2020**



Sumber: DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, 2020

Sebuah pencapaian yang baik, kasus kekerasan dalam Kerja di Kabupaten Sidoarjo tidak terjadi (*zero cases*) selama tahun 2016-2020. Penanggulangan dan antisipasi dalam kasusu ini harus menjadi bahan evaluasi dan pengembangan pada kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Lihat gambar 2.68 berikut.

**Gambar 2.68. Jumlah Kekerasan dalam Kerja Tahun 2016-2020**

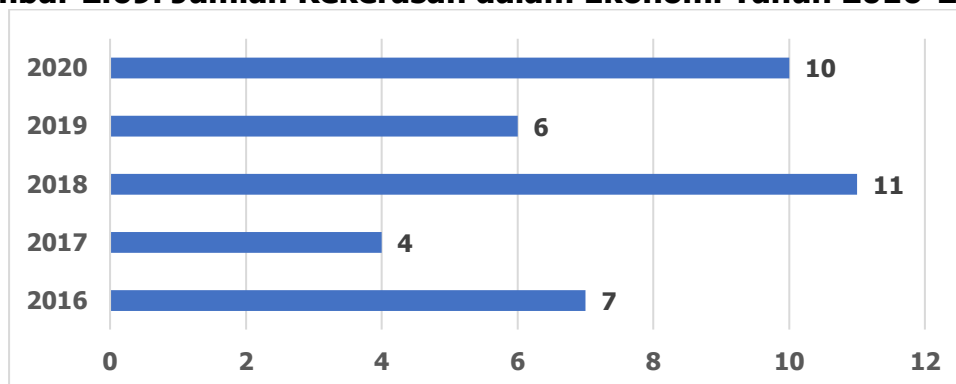


Sumber: DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, 2020

Kekerasan ekonomi atau *financial abuse* adalah kondisi di mana seseorang dibatasi kebebasannya, diintimidasi, dan dikendalikan lewat hal-hal yang berhubungan dengan finansial. Kasusk kekerasan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo tidak lebih dari 11 kasus pada tahun 2016-2021. Lihat gambar 2.69. berikut.



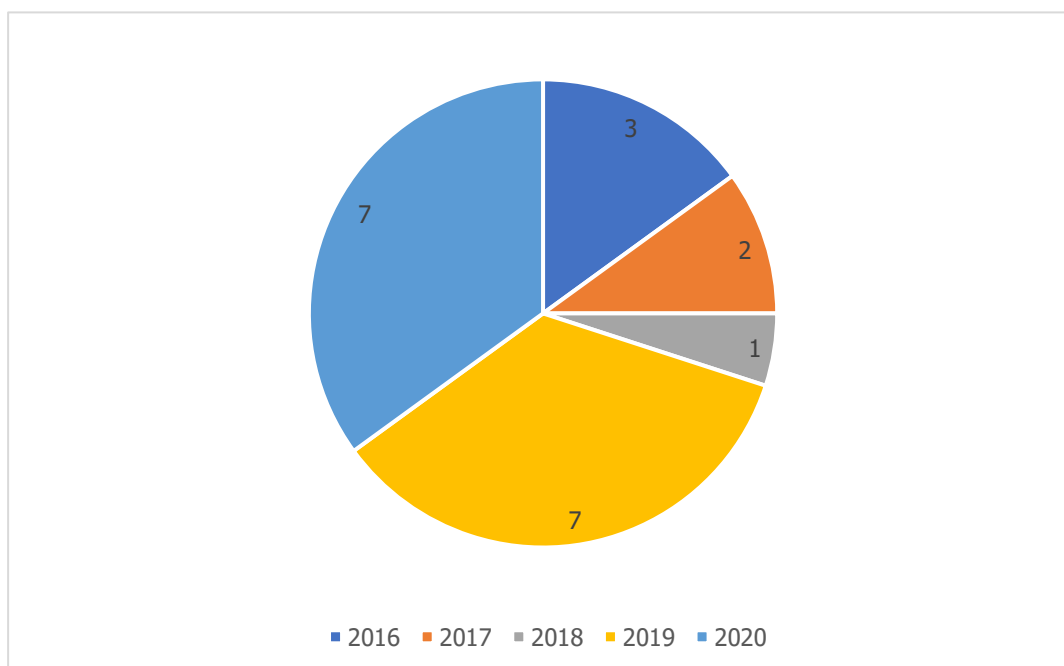
**Gambar 2.69. Jumlah Kekerasan dalam Ekonomi Tahun 2016-2020**



Sumber: DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, 2020

Perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Dampak pelecehan seksual dapat berakibat pada tekanan mental dan depresi yang sangat mendalam. Sehingga, akan mengganggu Kesehatan fisik maupun mental. Perlu adanya Pendidikan usia dini dan budaya lapor bagi keluarga korban untuk menjadi pelajaran pada masyarakat luas. Kasus yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo tidak lebih 7 kasus pada kurun tahun 2016-2020. Lihat gambar 2.70

**Gambar 2.70. Jumlah Pelecehan Seksual Tahun 2016-2020**

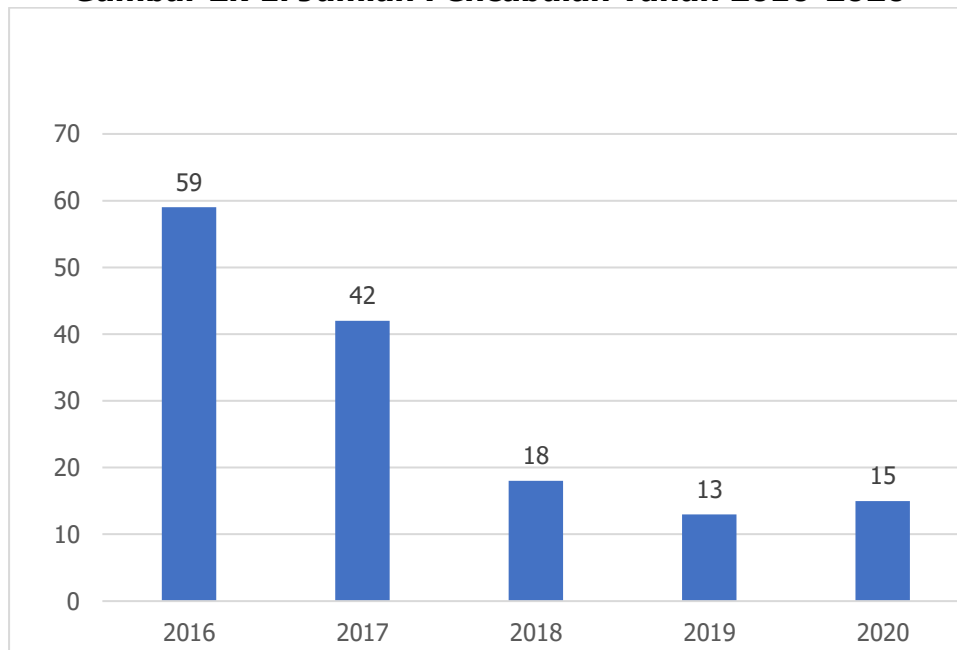


Sumber: DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, 2020



Kasus parah kejahatan seksual adalah kasus pencabulan dan pemerkosaan. Sepanjang tahun 2016-2020 terjadi kasus pencabulan dan kekerasan di Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2016 kasus pencabulan sebanyak 56 kasus dan terus menurun hingga tahun 2019 menjadi 13 kasus, namun pada tahun 2020 meningkat 2 kasus menjadi 15 kasus dibandingkan tahun 2019. Kasus pemerkosaan pada tahun 2016-2020 tidak lebih dari 2 kasus, lebih jelasnya lihat gambar 2.67 dan 2.68. Dampak akibat pencabulan dan pemerkosaan sangat parah pada tumbuh kembang pribadi korban, antara lain hilangnya semangat hidup, depresi, dan bunuh diri. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menanggulangi kasus tersebut yaitu pendidikan seksual harus diperkenalkan sejak usia dini, menindak tegas kasus pelecehan seksual, dan memberikan rasa aman dan tentram untuk lingkungan.

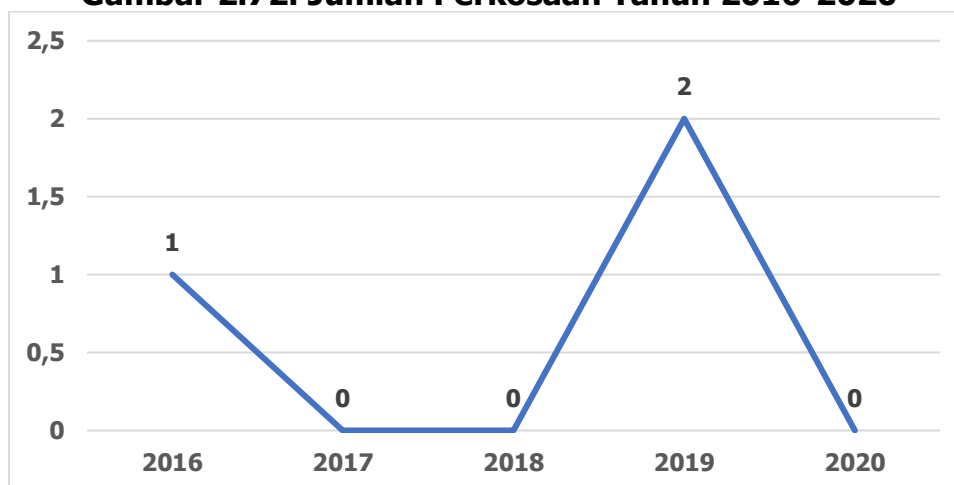
**Gambar 2.71. Jumlah Pencabulan Tahun 2016-2020**



*Sumber: DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, 2020*



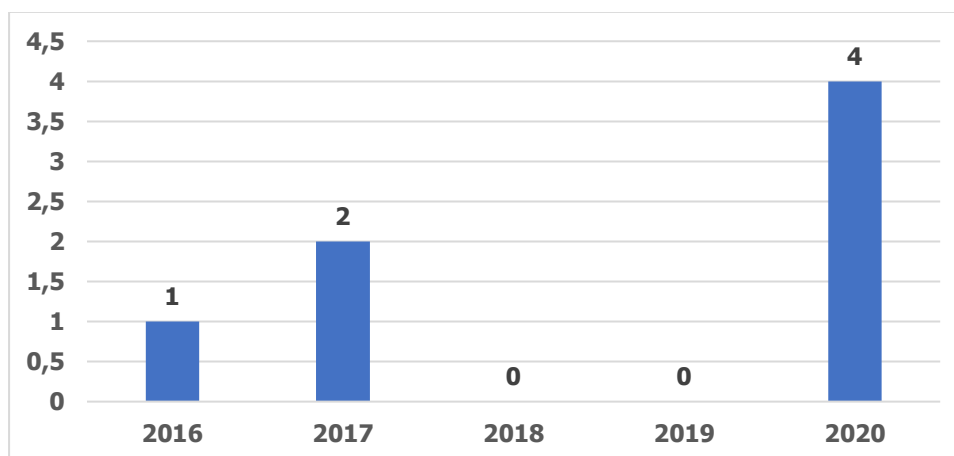
**Gambar 2.72. Jumlah Perkosaan Tahun 2016-2020**



Sumber: DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, 2020

Ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia, seperti bekerja tanpa dibayar, dan yang paling populer adalah eksploitasi seksual. Biasanya anak atau perempuan dijanjikan pekerjaan tertentu, tetapi akhirnya mereka malah dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Kasus *Human Trafficking* terjadi berakar pada masalah ekonomi pada masyarakat, sehingga dimanfaatkan oleh oknum tertentu demi keuntungan pribadi atau kelompok. Upaya penanggulangan dan antisipasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menekan kasus ini terus diupayakan, sehingga kasus yang terjadi dalam kurun waktu 2016-2020 tidak lebih dari 4 kasus. Lihat gambar 2.69. berikut.

**Gambar 2.73. Jumlah *Human Trafficking* Tahun 2016-2020**

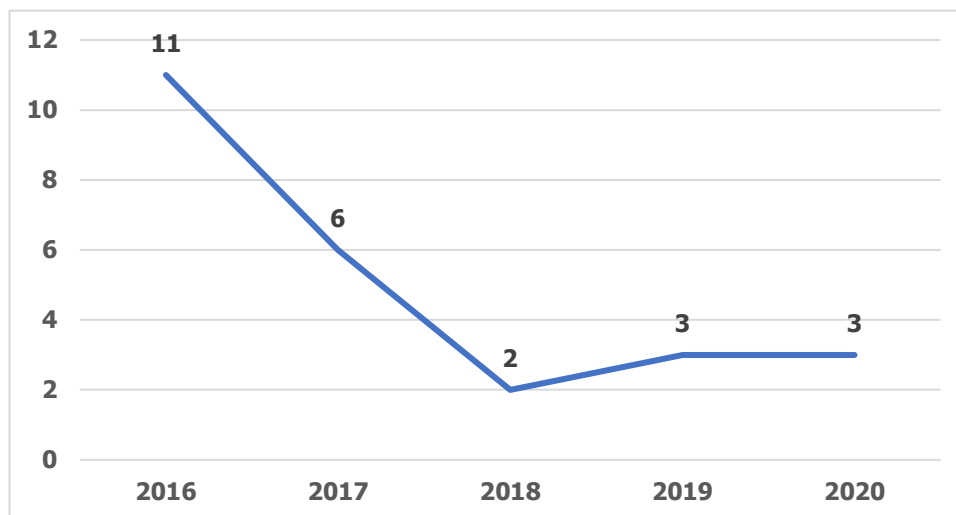


Sumber: DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, 2020



Kasus penganiayaan yang melukai bagian anggota tubuh tertentu merupakan bentuk kriminalitas yang akan mengganggu ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat. Jumlah penganiayaan di Kabupaten Sidoarjo terus berkurang dari tahun 2016 berjumlah 11 kasus turun menjadi 2 kasus pada tahun 2018, pada tahun 2019 dan 2020 kasus penganiayaan terjadi 3 kasus. Lihat gambar 2.74 berikut.

**Gambar 2.74. Jumlah Penganiayaan Tahun 2016-2020**



Sumber: DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, 2020

### 2.3.2.3 Pangan

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mendapatkannya. Sebuah daerah dikatakan memiliki ketahanan pangan jika masyarakatnya tidak dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Penilaian ketahanan pangan dibagi menjadi keswadayaan atau keswasembadaan perorangan dan ketergantungan eksternal yang membagi serangkaian faktor resiko. Ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui produksi, distribusi, dan pertukaran.

Produksi pangan ditentukan oleh berbagai jenis faktor termasuk kepemilikan lahan dan penggunaannya, produksi tanaman pangan pertanian



bukanlah suatu kebutuhan yang mutlak bagi suatu daerah untuk mencapai ketahanan pangan.

**Tabel 2.28. Persentase Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019-2020**

Nama Komoditas	Produktivitas Tahun 2019 (Kw/Ha)	Produktivitas Tahun 2020 (Kw/Ha)	Selisih	%
1	2	3	4= 3-2	4/2 x 100%
<b>Tanaman Pangan meliputi :</b>				
1. padi	68,9	68,79	-0,11	-0,2%
2. jagung	66,9	82,85	15,95	23,8%
3. kacang hijau	14,7	18,96	4,26	29,0%
4. kedelai	17,1	16,47	-0,63	-3,7%
<b>Hortikultura meliputi :</b>				
1. sawi	101,07	105,12	4,04	4,0%
2. bayam	88,09	91,23	3,15	3,6%
3. kangkung	63,67	61,30	-2,37	-3,7%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, 2020

Tabel 2.28, menunjukkan produktivitas tanaman pangan meliputi padi, jagung, kacang hijau dan kedelai. Produktivitas Padi dan kedelai mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya karena adanya serangan OPT yang menyebabkan puso atau gagal panen. Produktivitas hortikultura meliputi sawi, bayam dan kangkung. Produktivitas kangkung menurun karena kondisi iklim tahun 2020 yang kurang mendukung dan berkurangnya ketersediaan air di pertengahan tahun sehingga produktivitasnya kurang maksimal. Untuk mengoptimalkan kinerja ke depannya akan dilakukan berbagai scenario upaya-upaya peningkatan produktivitas dari komoditas tanaman pangan dan hortikultura.

Selain tanaman pangan dan hortikultura, hal penting kesediaan pangan yang harus tercukupi bagi masyarakat adalah produksi komoditas pangan hewani yang berasal dari jenis ternak yang dihasilkan dari peternakan. Produksi komoditas pangan hewani di Kabupaten Sidoarjo ada beberapa komoditas mengalami penurunan pertumbuhan produktivitas seperti produksi daging, sedangkan produksi telur dan susu terus meningkat. Lihat tabel 2.29. berikut.





**Tabel 2.29. Produksi Komoditas Pangan Hewani di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2020**

No	Jenis Ternak	Produksi Daging (Kg)			Produksi Telur (Kg)			Produksi Susu (Kg)		
		Tahun 2019	Tahun 2020	Pertumb. (%)	Tahun 2019	Tahun 2020	Pertumb. (%)	Tahun 2019	Tahun 2020	Pertumb. (%)
1	Sapi Potong	9.074.047	8.098.552	(11)						
2	Sapi Perah	-	-					9.744.391	11.315.815	16
5	Kambing	3.382.714	2.954.436	(13)				9.918	10.168	3
6	Domba	29.016	29.328	1						
7	Ayam Buras	2.829.286	2.827.540	(0)	226.159	227.349	1			
8	Ayam Ras Petelur	361	110	(70)	492.604	508.556	3			
9	Ayam Ras Pedaging	13.696.676	20.834.844	52						
10	Itik	503.983	511.017	1	1.952.990	1.963.525	1			
11	Entok	95.590	95.495	(0)	7.834	8.154	4			
14	Puyuh	-	-		20.116	21.569	7			
		29.611.672	35.351.322		2.699.703	2.729.154		9.754.309	11.325.983	

Sumber: Badan Pusat Statistik Sidoarjo

Untuk mengoptimalkan kinerja ke depan maka upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut: 1. Melakukan koordinasi dan pendampingan secara terus menerus sehingga input data pelaporan di dalam aplikasi iSIKHNAS dapat dilakukan secara tertib. 2. Segera mengkomunikasikan dengan pihak propinsi dan pusat apabila terjadi aplikasi *error*.

Upaya – upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja kedepannya antara lain : 1. Melakukan KIE ke masyarakat tentang penanganan mutu produk hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH). 2. Melakukan operasi bersama dengan aparat terkait untuk mentertibkan pemotongan illegal. 3. Menambah anggaran kegiatan 4. Penataan personil di tingkat Kecamatan

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut diamanatkan oleh UndangUndang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam perhitungan dan pencapaian skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan dihitung



berdasarkan produksi, cadangan dan pasokan pangan dari daerah lain yang dituangkan dalam Neraca Bahan Makan (NBM). Skor PPH tingkat ketersediaan berdasarkan Neraca Bahan Makanan tahun 2020 menunjukkan skor 89,87, apabila dibandingkan dengan mengalami peningkatan sebesar 0,8% dari skor 89,41. hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di kabupaten Sidoarjo sudah cukup beragam. Perkembangan realisasi pola pangan harapan ketersediaan tahun 2020 terlihat pada data berikut :

**Gambar 2.75. Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Tahun 2016-2020**

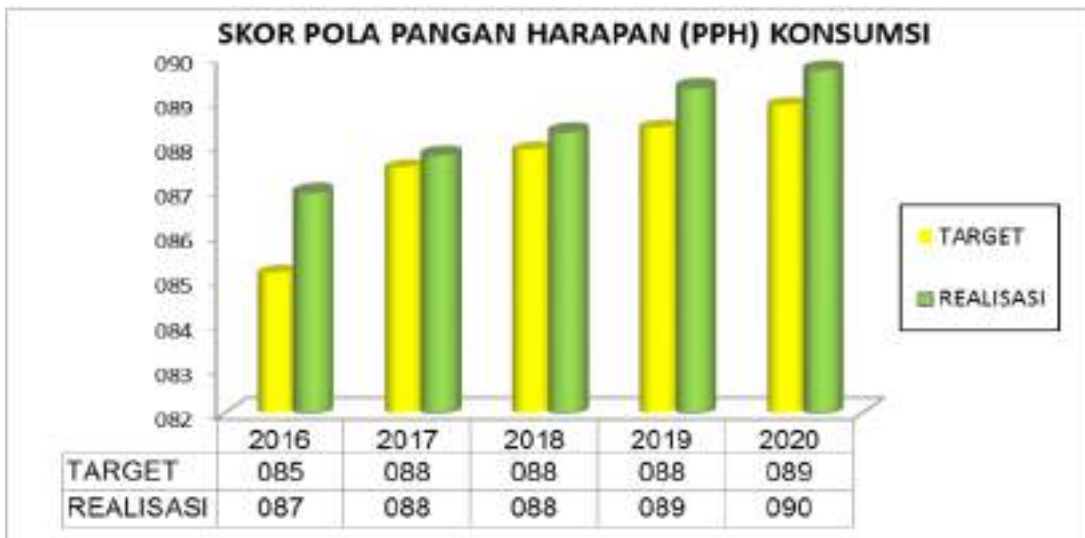


Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi adalah nilai capaian yang mencerminkan tingkat konsumsi pangan masyarakat dibanding tingkat konsumsi pangan ideal yang memenuhi kaidah pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). Kondisi ini dapat dilihat dari aspek kuantitatif dan kualitatif. Dari aspek kuantitatif digunakan untuk mengetahui cukup tidaknya jumlah konsumsi pangan yang dikonsumsi, sedang kualitatif digunakan untuk mengetahui keseimbangan gizi dari aneka ragam pangan yang dikonsumsi penduduk. PPH Konsumsi pada lebih jelasnya dilihat dalam gambar di bawah ini:



**Gambar 2.76. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Tahun 2016-2020**



Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

#### 2.3.2.4 Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan/Vegetasi (IKTL).

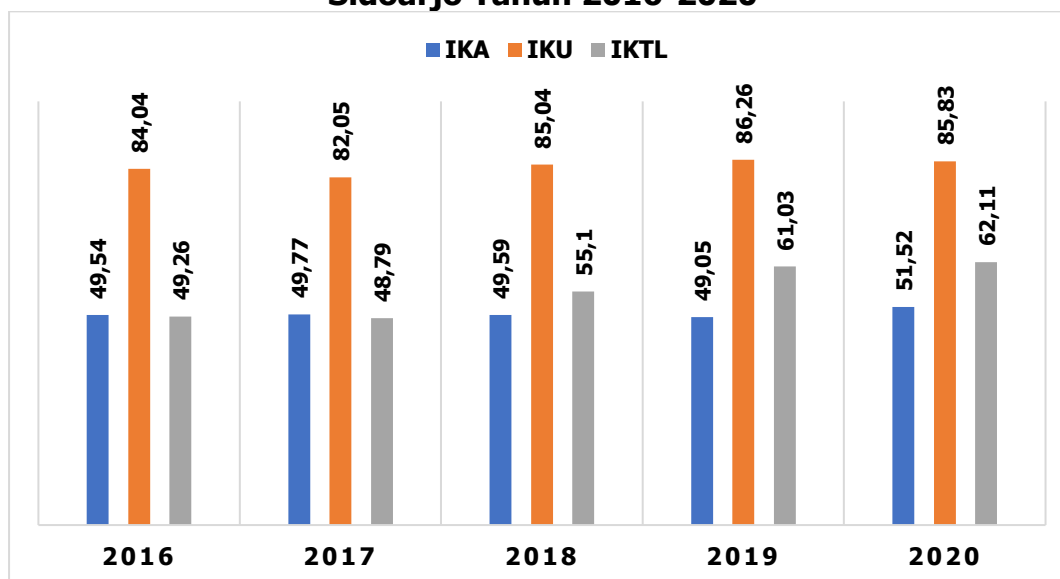
IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Fokus IKLH meliputi media lingkungan air, udara dan lahan/hutan. Indeks kualitas air merupakan hasil dari penjumlahan nilai status mutu air. Indeks kualitas udara merupakan rerata IEU SO<sub>2</sub> dan IEU NO<sub>2</sub> yang selanjutnya dikonversi melalui persamaan indeks kualitas udara. Sementara indeks tutupan lahan/vegetasi merupakan hasil pembagian luas tutupan lahan di Sidoarjo dan luas wilayahnya yang selanjutnya dikonversi melalui persamaan indeks tutupan lahan/vegetasi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sidoarjo berdasarkan nilai komposit yang terealisasi lebih tinggi dari yang telah



ditargetkan pada tahun 2020. Data lengkap capaian IKLH menurut masing-masing komposit seperti tertera pada gambar di bawah ini:

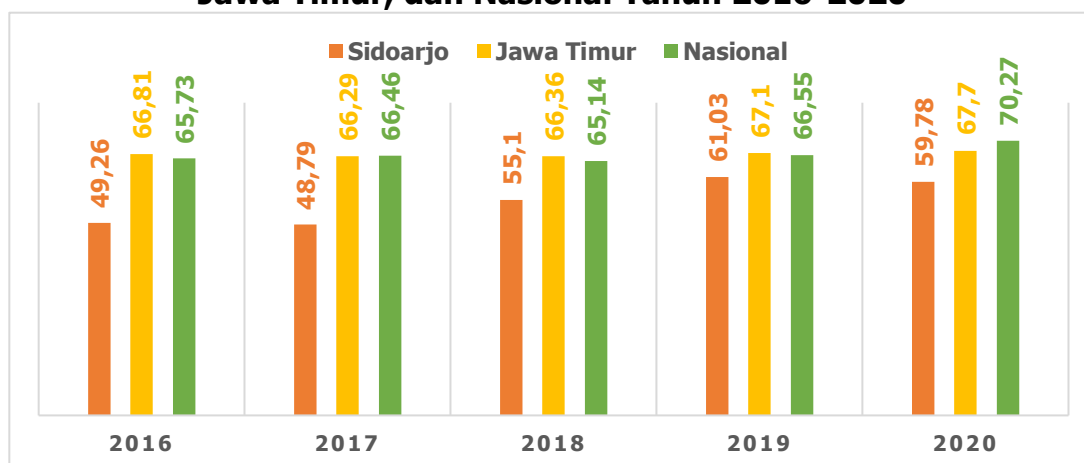
**Gambar 2.77. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020**



Sumber: Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan Sidoarjo 2020

Capaian IKLH Sidoarjo dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuasi, namun secara agregat bisa dikatakan meningkat. Pada tahun 2016 IKLH Kabupaten Sidoarjo sebesar 49,26 menjadi 59,78 pada tahun 2020. Begitu pun capaian indeks kompositnya (IKA, IKU, dan IKTL) juga mengalami fluktuasi.

**Gambar 2.78. Perbandingan IKLH Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016-2020**



Sumber: Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan Sidoarjo 2020



Berdasarkan data gambar di atas, perkembangan IKLH Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2020 masih berada di bawah capaian Jawa Timur dan Nasional. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Timur tahun 2020 meningkat sebesar 0,6 poin dari angka 67,1 pada tahun 2019 menjadi 67,70 pada tahun 2020 (berkategori sedang). Peningkatan IKLH tahun 2020 tersebut dikarenakan ada peningkatan pula pada Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Secara rinci nilai masing-masing indikator yang mendukung dalam pencapaian IKLH, antara lain:

1. Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2020 mencapai angka 84,59 yakni mengalami peningkatan sebesar 1,27 poin dibanding tahun 2019;
2. Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2020 mencapai angka 56,13 yakni menunjukkan angka yang tetap/bertahan dibanding tahun 2019;
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2020 mencapai angka 63,72 yakni mengalami peningkatan sebesar 0,56 poin dibanding tahun 2019.

Sedangkan, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia tahun 2020 meningkat sebesar 3,72 poin dari angka 66,55 pada tahun 2019 menjadi 70,27 pada tahun 2020 (berkategori baik). Peningkatan IKLH Nasional tahun 2020 tersebut dikarenakan ada peningkatan pula pada Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air (IKA). Selain itu, adanya perubahan pembobotan dalam rumus perhitungan IKLH untuk tahun 2020 juga berpengaruh dalam peningkatan IKLH. Secara rinci nilai masing-masing indikator yang mendukung dalam pencapaian IKLH, antara lain:

1. Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2020 mencapai angka 87,21 yakni mengalami peningkatan sebesar 0,65 poin dibanding tahun 2019. Capaian IKU tahun 2020 secara nasional tersebut telah memenuhi target yang telah ditetapkan;
2. Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2020 mencapai angka 53,53 yakni mengalami peningkatan sebesar 0,91 poin dibanding tahun 2019. Namun kenaikan tersebut belum memenuhi target RPJMN sebesar 55,1



dikarenakan adanya parameter utama pencemaran domestik yaitu BOD, DO, dan Fecal Coli yang belum memenuhi target;

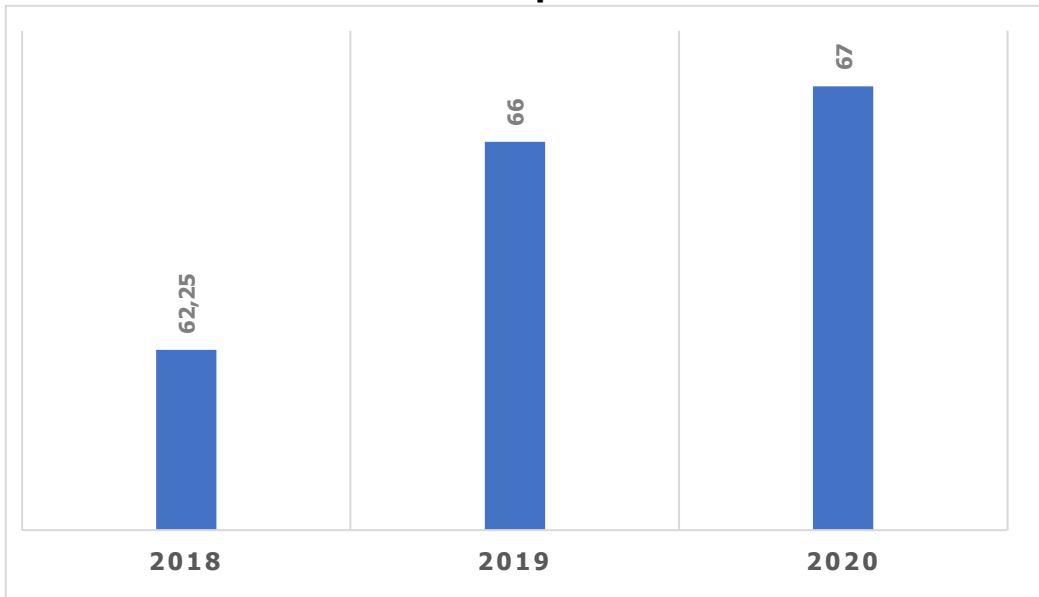
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2020 terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). IKTL tahun 2020 mencapai angka 60,74 yakni mengalami penurunan sebesar 1,26 poin dibanding tahun 2019. Penyebab turunnya nilai IKTL adalah adanya penurunan tutupan belukar, hutan lahan kering sekunder dan hutan tanaman yang cukup besar menjadi perkebunan, pertanian lahan kering, dan campuran atau kebun campuran. Hasil analisis IKEG tahun 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 9 provinsi di Indonesia memenuhi target dan 10 provinsi tidak memenuhi target. Secara keseluruhan, nilai IKL tahun 2020 adalah sebesar 59,54.

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) tahun 2020 mencapai angka 68,94 (berkategori baik) dan telah memenuhi target RPJMN yang sebesar 58,5 (berkategori cukup baik). Pemantauan kualitas air laut untuk mendapatkan nilai IKAL dilakukan pada 801 titik yang tersebar di 34 provinsi. Lokasi yang dipilih mewakili aktivitas di daerah pesisir yaitu wisata bahari, wilayah konservasi, pemukiman, pelabuhan penumpang, pelabuhan barang, kawasan industri, tempat pelelangan ikan dan muara sungai. Hasil analisis terhadap IKAL tahun 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 13 provinsi telah memenuhi target dan 21 provinsi belum memenuhi target, yakni sebanyak 16 provinsi berkategori baik dan 18 provinsi berkategori cukup baik.

Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa dari jumlah timbulan sampah di Kabupaten Sidoarjo, 67% dari jumlah timbulan sampah dilakukan pengelolaan oleh DLHK yaitu antara lain di TPST, TPST 3R dan TPST Kawasan serta TPA. Selain pengelolaan yang dilakukan DLHK, 33% dari jumlah timbulan sampah dilakukan pengelolaan sampah oleh masyarakat secara mandiri.



**Gambar 2.79. Persentase Sampah Terkelola Tahun 2018-2020**



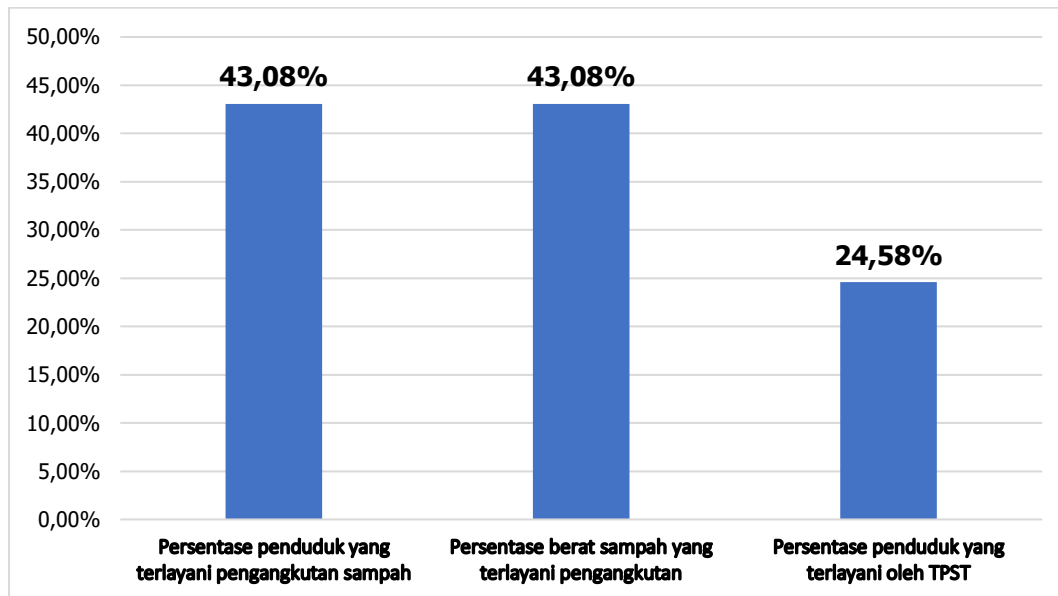
Sumber: Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan Sidoarjo 2020

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa dari 67% timbulan sampah yang dikelola belum secara keseluruhan terkelola dari sumber, dan masih ada sekitar 33% dari jumlah timbulan sampah yang belum tertangani oleh pemerintah sehingga memungkinkan pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat secara mandiri diperkirakan masih ada pengelolaan sampah dengan cara dibakar ataupun pembuangan sampah secara langsung di sungai. Sehingga permasalahan tersebut memang masih memerlukan penyelesaian secara terpadu. Berikut adalah persentase penanganan sampah yang terkelola dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Pengelolaan sampah di TPA dan TPST di Kabupaten Sidoarjo hingga saat ini masih mampu melayani 43,08 persen penduduk atau sebanyak 886.752 orang dengan total volume sampah sebesar 1.934.196 m<sup>3</sup>. Berat sampah yang terlayani selama tahun 2020 sebesar 187.610.000 kg sampah atau 43,08 persen dari total timbulan sampah. Simak gambar berikut:



**Gambar 2.80. Persentase Volume Sampah yang Terlayani di TPA/TPST Tahun 2020**



Sumber: Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan Sidoarjo 2020

Selain pengelolaan sampah rumah tangga, setiap tahun DLHK juga melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Sidoarjo dan penanganan pencemaran lingkungan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat. Pada tahun 2020 telah dilakukan penanganan pencemaran lingkungan (termasuk penanganan terhadap limbah industri) terhadap 69 permasalahan berdasarkan pengaduan masyarakat. Selain itu, telah dilakukan pengawasan terhadap 84 pelaku usaha dan/atau kegiatan dari 2.816 pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL dan Amdal). Dengan demikian Persentase pengawasan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh DLHK adalah sebesar 3%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masih ada sekitar 97% pelaku usaha dan/atau kegiatan yang perlu diawasi. Untuk data lengkapnya bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:





**Tabel 2.30. Capaian Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Tahun 2020**

Indikator Kinerja Penanganan Limbah	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Perentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air (%)	23,00	25,58	28,28	43,00	46,00

*Sumber: Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan Sidoarjo 2020*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan peningkatan capaian BOD sesuai baku mutu air, yang dilakukan pengukuran pada 13 (tigabelas) sungai di Kabupaten Sidoarjo. Pengambilan sampling dengan masing-masing sungai diambil 5 sampai 7 titik sampling pada semester I dan semester II setiap tahun. BOD merupakan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan (mengoksidasi) hampir semua zat organik yang terlarut dan sebagian zat organik yang tersuspensi dalam air. Meskipun terjadi peningkatan capaian nilai BOD, namun perlu ditingkatkan karena menyangkut kebersihan air dari limbah dan menentukan derajat Kesehatan masyarakat. Cakupan BOD sebesar 46,00 % di tahun 2020 masih menjadi permasalahan lingkungan, dan perlu ditingkatkan hingga menjangapi lebih dari 65% di tahun periode RPJMD 2021-2026.

#### **2.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PAD secara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik. Data penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada tabel 2.31 berikut.



**Tabel 2.31. Persentase Penduduk Ber-KTP Elektronik dan Ber-KK Kabupaten Sidoarjo 2016-2020**

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2016 (%)		TAHUN 2017 (%)		TAHUN 2018 (%)		TAHUN 2019 (%)		TAHUN 2020 (%)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Persentase penduduk yang ber-KTP elektron	78	82,37	85	84,01	90	90,5	95	95,79	100 %	97,80
2. Persentase penduduk berKartu Keluarga (KK)	95	95,80	97	98,03	99	99,2	100	99,21	100 %	100
3. Persentase penduduk berakta kelahiran jumlah penduduk usia 0-18 tahun	70	74	80	80,01	90	89,34	100	91,59	100%	93,80

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo, 2020

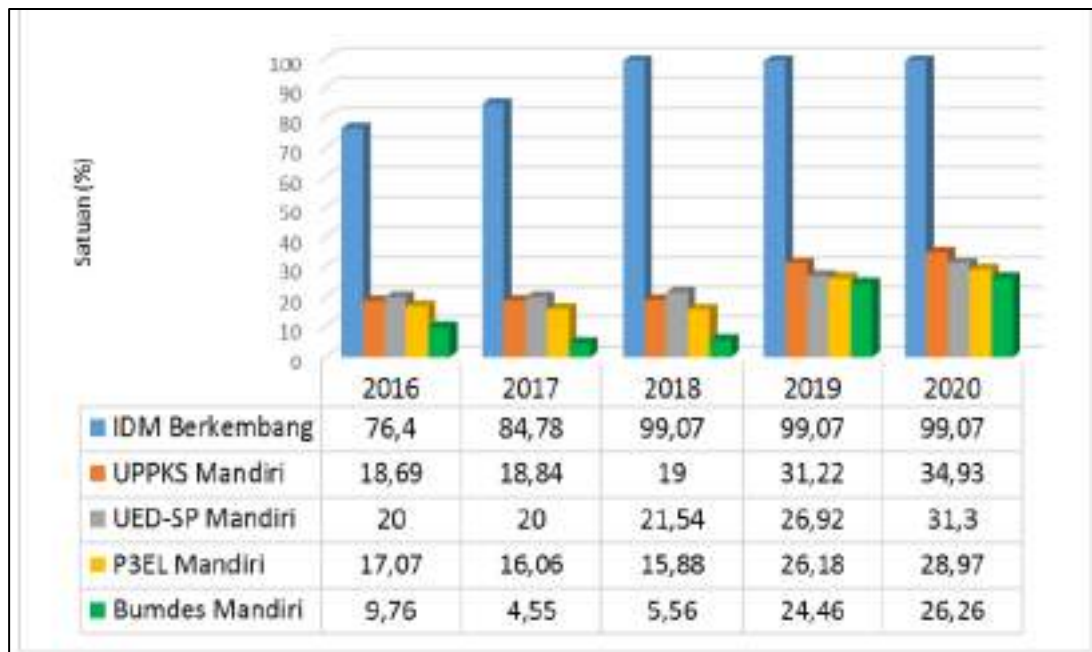
Dari data di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP yang salah satunya disebabkan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.

### **2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam menjalankan program pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun sumber daya manusianya. Setiap tahun desa mendapatkan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Desa (DD) dan alokasi anggaran dari Pemerintah Kabupaten berupa Anggaran Dana Desa (ADD). Realisasi penggunaan DD dan ADD selama tahun 2016 sampai tahun 2020 terangkum dalam data gambar di bawah ini:



**Gambar 2.81. Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Tahun 2016-2020**



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sidoarjo, 2020

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target, hal ini dikarenakan realisasi tahun 2020 sebesar 99,07% yaitu 319 desa atau tercapai 138,70% dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 sebesar 71,43%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 tidak mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan capaian tahun 2019 sebesar 99,07% yaitu 319 desa. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 137,50% dari target tahun 2021 sebesar 72,05%, hal ini diupayakan dengan melakukan koordinasi TPP P3MD (Tim Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap pemerintahan desa dalam pembaruan data IDM 2021.



**Gambar 2.82. Perkembangan IDM dengan Kategori Minimal Berkembang Tahun 2016-2020**



*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sidoarjo, 2020*

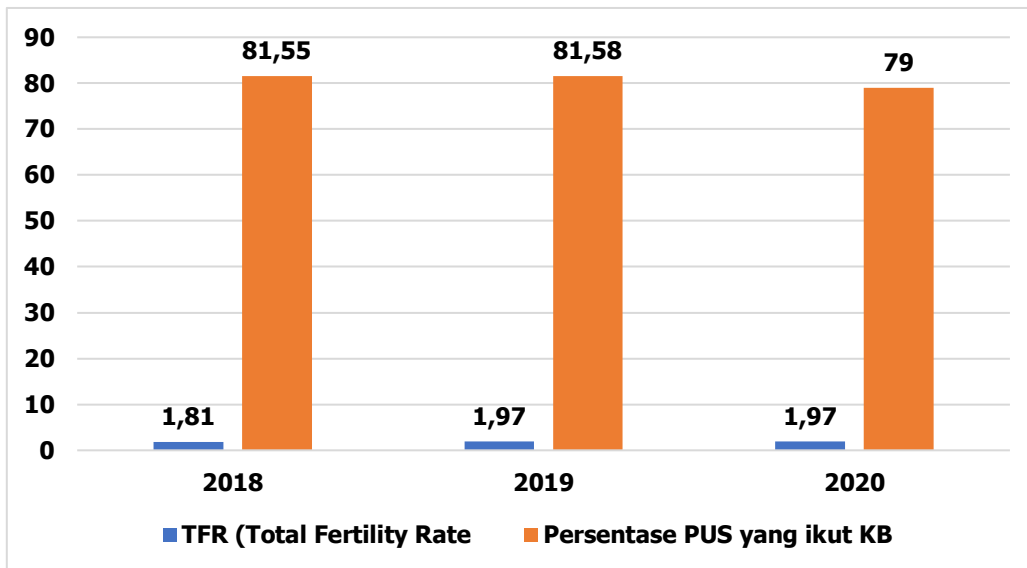
### **2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi).

Sebagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran secara intensif.



**Gambar 2.83. Persentase Peserta KB pada Pasangan Usia Subur Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020**



Sumber: Dinas P3A KB Kabupaten Sidoarjo 2020

Pengendalian angka kelahiran diwujudkan dengan kampanye kepesertaan KB pada Pasangan Usia Subur (PUS). Semakin tinggi pasangan yang mengikuti program KB maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pengendalian penduduk. Persentase pasangan usia subur yang mengikuti KB pada tahun 2020 sebesar 79%. Capaian TFR / *Total Fertility Rate* atau angka kelahiran total Kabupaten Sidoarjo 2016-2020 tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 2.32 Capaian TFR Kabupaten Sidoarjo 2016-2020**

Tahun				
2016	2017	2018	2019	2020
1.80	2,18	2,18	2,06	2,02

Sumber: DP3AKB Sidoarjo

### 2.3.2.8 Perhubungan

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya dalam menyediakan/mendukung sarana dan prasarana perhubungan yang layak sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sarana merupakan segala sesuatu yang diperlukan sebagai alat dalam mencapai



maksud dan tujuan yang dalam hal ini adalah angkutan umum yang dimaksudkan dapat memperlancar arus angkutan. Sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik usaha, pembangunan maupun proyek.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perhubungan mendata jumlah moda angkutan darat dan sungai yang beroperasi secara reguler, yang terdiri dari Mode angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP), Mode angkutan barang, mode angkutan umum dan mode angkutan kereta api.

Selain menunjang moda transportasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga melaksanakan program realisasi keselamatan angkutan darat yang rawan terjadi kecelakaan. Keseriusan program tersebut dibuktikannya dengan persentase keselamatan angkutan darat sebesar 96% dari Tahun 2018-2020.

**Tabel 2.33. Persentase Realisasi Keselamatan Angkutan Darat Tahun 2018-2020**

Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Prosentase Keselamatan angkutan darat	70	96	26	75	96	21	83	96	13

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, 2020*

Selain menyediakan sarana prasarana yang berhubungan dengan perhubungan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga telah memastikan kecukupan jumlah alat kelengkapan jalan apakah dapat berfungsi dengan baik dan dalam jumlah yang cukup. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengurangi titik-titik kemacetan di wilayah perkotaan maupun kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Alat kelengkapan jalan yang dimaksud adalah yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan yang meliputi:

- a) Alat pemberi isyarat;
- b) Rambu lalu lintas;
- c) Marka jalan;

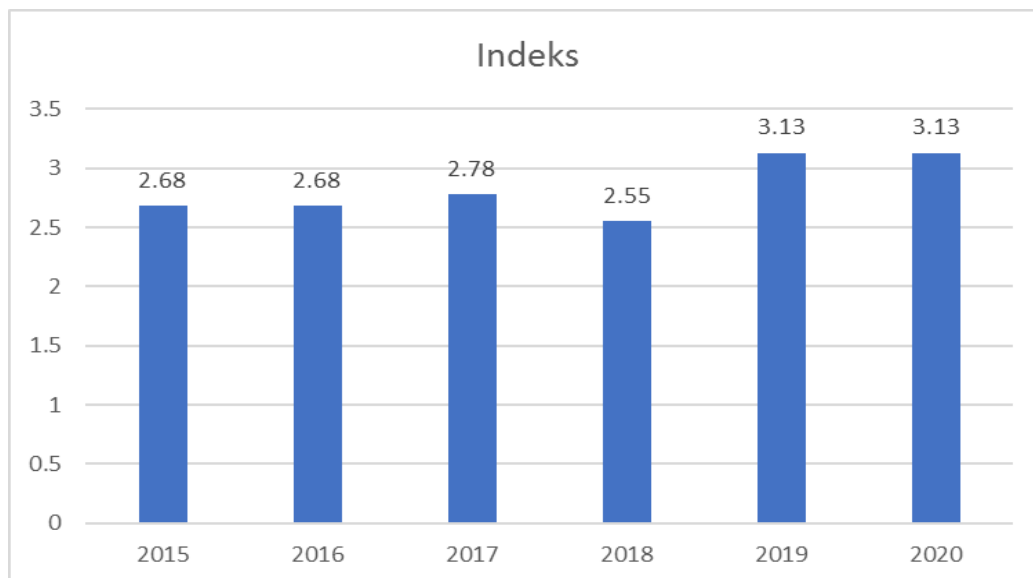


- d) Alat penerangan jalan;
- e) Alat pengendali pemakai jalan yang terdiri alat pembatas kecepatan dan alat pembatas tinggi-lebar kendaraan;
- f) CCTV pemantau lalu lintas dan revitalisasi CC Room.

### 2.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

Saat ini penyelenggaraan layanan publik yang handal dan cepat tanggap merupakan sesuatu yang menjadi keharusan bagi setiap Pemerintah Daerah sehingga adanya dukungan teknologi informasi sebagai pengungkit kinerja menjadi kebutuhan utama. Salah satu indikator dalam menilai kematangan Pemerintah Daerah di bidang pemanfaatan teknologi pada tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik adalah indeks SPBE.

**Gambar 2.83. Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo 2015-2020**



Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo 2020

Gambar 2.69. diatas menunjukkan hasil Capaian Indeks SPBE pada tahun 2020 masih sama pada tahun 2019, hasil yang diraih yaitu **3,13** dengan predikat **Baik**. Evaluasi hasil ini dinilai berdasarkan Evaluasi Mandiri yang dilakukan oleh Evaluator Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Karena Pada tahun



2020 Evaluasi SPBE secara nasional dilakukan random dan Kabupaten Sidoarjo tidak masuk dalam daftar penilaian evaluasi SPBE maka hasil yang didapatkan masih sama dengan Tahun 2019, disarankan oleh Evaluator Kemenpan-RB agar Kabupaten Sidoarjo mempersiapkan diri melakukan evaluasi mandiri di Tahun 2021 dengan komponen penilaian yang baru sehingga diharapkan nantinya akan mendapat hasil yang lebih baik.

### 2.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

#### 1. Jumlah Koperasi Aktif

Kekuatan ekonomi suatu daerah bisa dilihat dari seberapa tahan daerah tersebut terhadap guncangan ekonomi yang menerpanya. Salah satu contohnya adalah kasus bencana sosial kesehatan covid-19. Aktivitas ekonomi riil merupakan salah satu aktivitas penopang utama ketahanan ekonomi daerah. Strategi dalam menumbuhkan aktivitas ekonomi riil di masyarakat adalah dengan pemberdayaan pada koperasi, usaha mikro dan kecil. Di Sidoarjo koperasi yang statusnya aktif pada tahun 2019 sebesar 90,49 persen atau berjumlah 1.323 dari 1.462 total jumlah koperasi yang terdaftar. Pengembangan dan pemberdayaan koperasi memiliki potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Pengembangan koperasi sebagai organisasi secara berkualitas akan berdampak pada kesejahteraan anggotanya dan kemanfaatan kepada masyarakat yaitu dapat meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat.

**Tabel 2.34. Pertumbuhan Koperasi Berkualitas dan Pertumbuhan Usaha Mikro Mandiri Tahun 2016-2020**

INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Persentase Pertumbuhan Koperasi yang Berkualitas	N/A	N/A	N/A	0,96%	0,96%	100%	1,14%	1,14%	100%	1,32%	1,37%	100%	1,50%	1,51%	100,07%
Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang Mandiri	N/A	N/A	N/A	0,15%	0,15%	100%	0,17%	0,17%	100%	0,20%	0,23%	115%	0,24%	0,25%	104%

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, 2020





Pada Tabel 2.34, menggambarkan capaian pertumbuhan koperasi berkualitas sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Sampai dengan tahun 2020, jumlah koperasi di Kabupaten Sidoarjo sebesar 1.470 koperasi. Pada tahun 2020, indeks pertumbuhan koperasi berkualitas ditargetkan sebesar 1,50% atau 507 koperasi namun pada realisasinya indeks persentase pertumbuhan koperasi yang berkualitas di tahun 2020 mencapai sebesar 1,51% atau sebesar 511 koperasi.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian indeks persentase pertumbuhan koperasi tercapai sebesar 100,97%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, maka terjadi pertumbuhan koperasi berkualitas sebesar 15 koperasi yaitu yang semula di tahun 2019 1,37% atau 496 koperasi, pada tahun 2020 meningkat menjadi 1,51% atau 511 koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi berkualitas di Kabupaten Sidoarjo tumbuh cukup baik.

Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat, bahkan dimasa krisis Usaha Mikro mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mendorong usaha mikro untuk terus tumbuh sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja. Usaha Mikro diharapkan semakin berperan dalam menekan angka pengangguran.

Sampai dengan tahun 2020, jumlah usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo sebesar 176.425 usaha mikro. Pada tahun 2020, indeks pertumbuhan usaha mikro mandiri ditargetkan sebesar 1,75% atau 3.087 usaha mikro. Realisasi indeks persentase pertumbuhan usaha mikro mandiri di tahun 2020 tercapai sebesar 1,83% atau sebesar 3.228 usaha mikro. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indeks persentase pertumbuhan koperasi ercapai sebesar 100,97%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, maka ada pertumbuhan usaha mikro sebesar 544 usaha mikro yaitu yang semula di tahun 2019 terdapat 0,23% atau 1.180 usaha mikro maka ditahun 2020 menjadi 0,25% atau 1.724 usaha mikro. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo cukup baik.



## 2. Jumlah Koperasi Sehat Berkualitas

Salah satu indikator dalam penilaian status koperasi adalah koperasi sehat dan berkualitas. Hal dilakukan dalam rangka mengukur adanya aktivitas riil yang memiliki dampak positif bagi masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial. Dari 1.323 koperasi aktif pada tahun 2019, koperasi yang dinyatakan sehat sebanyak 600 koperasi dan dinilai berkualitas sebanyak 556 koperasi. Adanya kesenjangan yang lebar antara jumlah koperasi dengan koperasi berkualitas. Namun jumlah tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami peningkatan. Jumlah koperasi berkualitas pada tahun 2015 sebesar 455 menjadi 556 pada tahun 2019 dan 591 pada tahun 2020.

**Gambar 2.84. Perkembangan Koperasi Sehat dan Berkualitas Kabupaten Sidoarjo 2016-2020**



Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, 2020

Koperasi sehat adalah suatu kondisi koperasi yang usahanya memenuhi tujuh aspek penilaian kesehatan yaitu : Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, Jatidiri Koperasi. Berdasarkan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi maka koperasi wajib dinilai kesehatannya setiap



tahunnya. Adapun penilaian kesehatan koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut :

1. Permodalan
2. Kualitas Aktiva Produktif
3. Manajemen
4. Efisiensi
5. Likuiditas
6. Kemandirian dan Pertumbuhan
7. Jatidiri Koperasi

Koperasi sehat mendukung parameter koperasi berkualitas dari sisi aspek usaha koperasi, aspek keuangan koperasi, aspek manfaat koperasi terhadap anggota, aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat.

### **3. Perkembangan Modal dan Volume Usaha Koperasi**

Perkembangan modal dan volume usaha koperasi di Sidoarjo terus mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dalam data tabel yang menunjukkan adanya peningkatan modal dari Rp. 659.145.816.000 pada tahun 2015 menjadi Rp. 800.545.000.000 di tahun 2019. Sedangkan jumlah volume usaha di tahun 2015 sebesar Rp. 498.436.204.000 tahun 2015 meningkat menjadi RP. 978.800.757.000 pada tahun 2019. Peningkatan ini menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang cukup besar pada koperasi sehat dan berkualitas di Sidoarjo.

### **4. Usaha Mikro**

Selain koperasi, pengungkit daya tahan ekonomi daerah adalah adanya aktivitas usaha mikro yang terus berkembang. Dorongan pemerintah dalam membuka usaha baru melalui usaha mikro merupakan langkah yang tepat. Jumlah usaha mikro terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ini. Jumlah usaha mikro pada tahun 2015 sebesar 154.892 meningkat menjadi 207.664 atau ada peningkatan sebesar 25,41 persen dalam 5 (lima) tahun.

Usaha Mikro Mandiri merupakan usaha yang berkemampuan berdiri sendiri dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara



berinisiatif dan bekerja keras dalam mengurus dan mengembangkan organisasi usaha, menyediakan modal, menghitung resiko, mengambil keputusan dan mempertanggung jawabkannya berdasarkan percaya kepada kemampuan diri sendiri.

**Gambar 2.85. Perkembangan Usaha Mikro Tahun 2017-2020**



Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, 2020

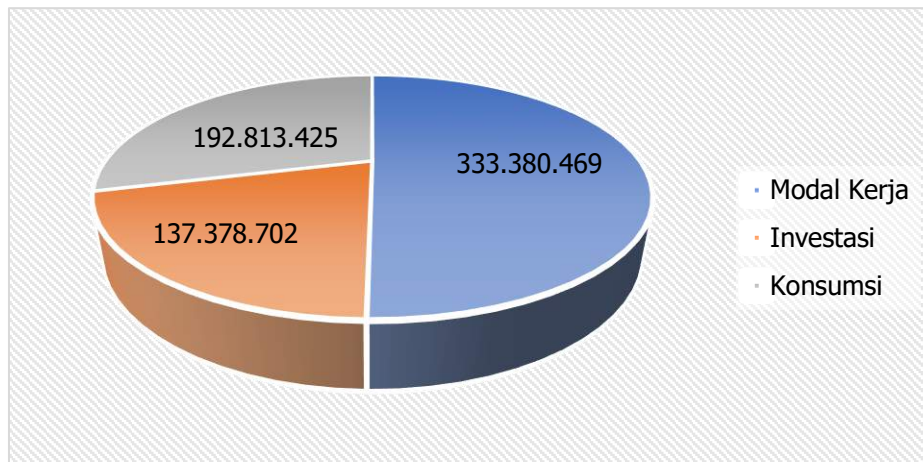
Gambar 2.85 diatas, Jumlah usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2020 sebanyak 176.425 usaha mikro. Realisasi Presentase Usaha Mikro yang mandiri tahun 2020 tercapai sebesar 1,83% atau 3.228 usaha mikro dari target yang ditetapkan 1,75% atau 3.087 usaha mikro maka capaian kinerja tahun 2020 telah tercapai sebesar 104,5%. Bila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 sebesar 1,53% atau 2.684 maka realisasi tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,3% atau sebesar 544 usaha mikro. Berdasarkan tabel/grafik pencapaian kinerja di tahun 2020 mengalami peningkatan.

## 5. Permodalan UMKM

Dukungan permodalan oleh perbankan pada iklim wirausaha di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sangat besar. Hal ini tercermin dari volume kredit permodalan yang dikucurkan oleh bank umum ke UMKM Sidoarjo yang mencapai rata-rata 5 (lima) trilyun rupiah setiap tahun. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan besaran modal kredit yang dikucurkan oleh perbankan pada tahun 2020.



**Gambar 2.86. Perkembangan Besar Kredit Modal Kepada UMKM Tahun 2020**



Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, 2020

Perkembangan besar kredit modal kepada UMKM tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo ditunjukkan pada Gambar 2.72. Modal kerja yang diberikan untuk menstimulus perkembangan UMKM sebesar Rp. 333.380.469, Modal Konsumsi sebesar Rp. 192.813.425, dan modal peruntukan Investasi UMKM sebesar Rp. 137.378.702.

### 2.3.2.11 Penanaman Modal

Iklm investasidi Kabupaten Sidoarjomenunjukkan perkembangan yang terus membaik. Posisi Kabupaten Sidoarjo yang strategis dan memiliki akses transportasi dan ketersediaan tenaga kerja yang besar mampu menjadi tujuan investasi yang menarik bagi para investor, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

**Gambar 2.87. Jumlah Investor PMA dan PMDN (Unit) Tahun 2016-2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik Sidoarjo 2021



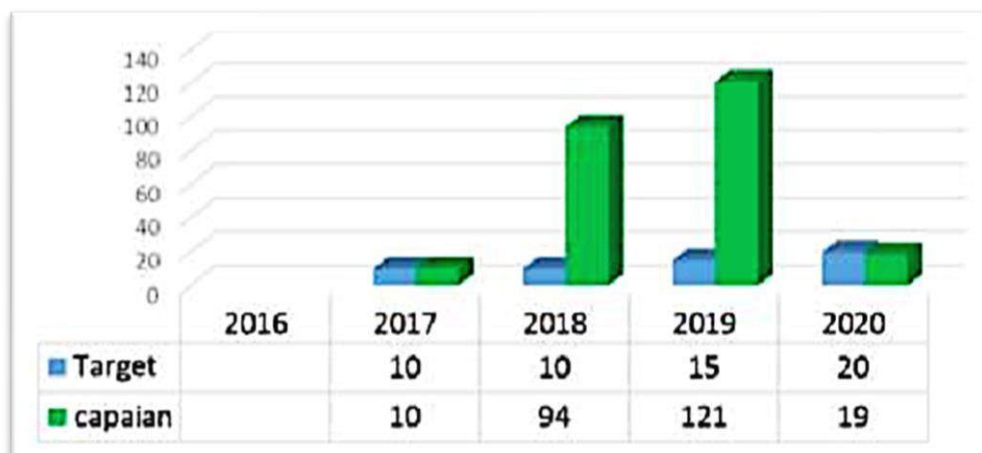
Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa jumlah investor PMA dan PMDN di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2016 sebesar 5.442 kemudian mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2017 menjadi 7.628, tapi pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 5.741 setelah itu terus mengalami kenaikan berturut-turut 6.367 pada tahun 2019 dan 7.025 tahun 2020.

### 2.3.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumberdaya manusia dan tulang punggung bangsa serta penerus cita-cita bangsa, disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya, mulai dari tingkat pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatannya.

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemuda lah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

**Gambar 2.88. Perkembangan Jumlah Prestasi Pemuda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020**

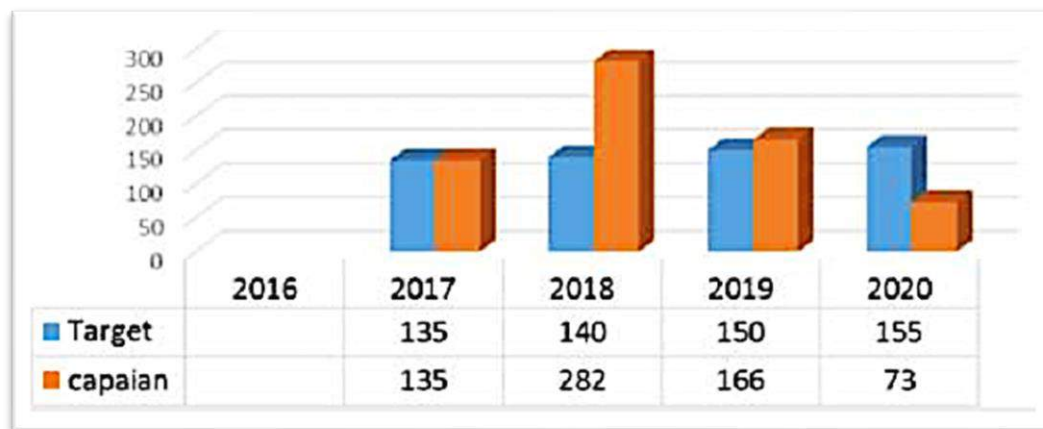


Sumber: Disporapar Kab. Sidoarjo 2020



Dari gambar di atas kita dapat melihat adanya peningkatan pada prestasi pemuda Sidoarjo di tingkat nasional dan internasional dalam rentang waktu 4 (empat) tahun. Dimana pada tahun 2017 hanya berjumlah 10 orang menjadi 19 orang pada tahun 2020.

**Gambar 2.89. Perkembangan Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2020**



*Sumber: KLPJ Bupati Kabupaten Sidoarjo 2020*

Seirama dengan perkembangan prestasi pemuda, prestasi di bidang olahraga juga terjadi peningkatan di tingkat nasional dan internasional. Jumlah prestasi olahraga pada tahun 2019 sebesar 166 atau lebih kecil daripada tahun 2018 yang berjumlah 282, Namun jika dibandingkan dengan tahun dasar pada 2017 yang sebesar 135 maka jumlah prestasi olahraga pada tahun 2020 yang sebesar 73 saja dikarenakan ada pandemi Covid 19, tapi secara umum bisa dikatakan meningkat.

Saat ini ada 16 sarana prasarana yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata yang tersebar di seluruh Sidoarjo. Ke depan jumlah sarpras olahraga ini akan terus ditambah dan diperbaiki melalui PSU Perumahan yang telah diserahkan kepada pemerintah. Berikut adalah daftar sarpras olahraga yang saat ini dikelola oleh Disporapar.



**Tabel 2.35. Daftar Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020**

No	Uraian
1	Stadion Gelora Delta
2	Gedung Serba Guna (Basket, Futsal, Volly Indor, Hand Ball)
3	Kolam Renang GOR
4	Lapangan Tenis Outdoor dan Indoor
5	Aula Tenis
6	Lapangan Voli Pantai
7	Stadion Jenggolo (termasuk Panahan)
8	Lapangan Sepak Bola Pucang
9	Lap. Voli, Lap. Sepak Takraw, Lap. Petanque (Jl. Sultan Agung)
10	Kolam Renang dan Lap. Tenis Mutiara Regency
11	Lap. Basket dan Voli Permata Regency Tanggulangin
12	Lapangan Tenis Pondok Jati
13	Lapangan Tenis Juanda Harapan Permai
14	Sirkuit Sepatu Roda GOR
15	Lapangan Futsal Wonocolo Taman
16	Lap. Futsal dan Lap. Bulutangkis sepanjang Town House Taman

Sumber: *Disporapar Kabupaten Sidoarjo 2020*

### 2.3.2.13 Statistik

Dalam hal penyusunan dan pengumpulan dokumen statistik ini selain dilakukan secara mandiri oleh bidang statistik juga dilaksanakan Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik dan pihak terkait. Data-data yang dihasilkan oleh bidang statistik digunakan untuk berbagai keperluan di antaranya penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tahun 2020 Bidang Statistik mengumpulkan dan mengolah sebanyak 20 dokumen meliputi :

#### A. Dokumen hasil publikasi BPS:

1. Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2020
2. Kecamatan Dalam Angka 2020
3. PDRB menurut lapangan Usaha dan PDRB menurut pengeluaran
4. Statistik Kesejahteraan Rakyat
5. Statistik Daerah
6. IPM

#### B. Dokumen yang dikerjasamakan dengan BPS atau pihak ketiga:

1. Analisa Data Proyeksi IKU





2. Penyusunan dan pengumpulan data sectoral lanjutan(kecamatan)
3. Penyusunan Indeks Harga Konsumen

C. Dokumen yang disusun mandiri:

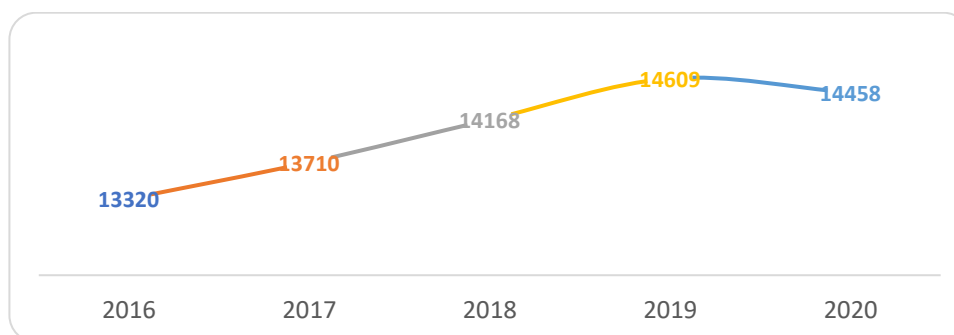
1. Indikator Tenaga Kerja
2. Indikator Sosial
3. Analisa Gender
4. Indikator ekonomi
5. ICOR
6. Profil Pendidikan
7. Profil Kesehatan
8. Profil Perikanan
9. Profil Desa
10. Buku Saku Statistik
11. Literasi Media

#### **2.3.2.14 Kebudayaan**

Eksistensi kelompok seni dan budaya yang ada di masyarakat harus dijaga untuk menunjang pelestarian seni dan budaya daerah. Pada tahun 2017, adat budaya yang dilestarikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo ada 4 jenis budaya, antara lain: Macapat, Aqiqah, Ruwatan dan Lelang Bandeng. Untuk melestarikan seni budaya, peran kelompok seni budaya di masyarakat sangat besar. Kelompok seni budaya terbagi dalam beberapa bidang seni yaitu Ludruk, Wayang Kulit, Reog Ponorogo, Patrol, Jaranan/Bantengan, Musik, Kentrung, Tari, Teater, Karawitan, Campursari dan Mocapat. Jumlah kesenian dan budaya daerah yang dilestarikan pada Tahun 2016 sebanyak 13.320, setiap tahun terus meningkat pada Tahun 2019 menjadi 14.609 dan turun pada Tahun 2020 menjadi 14.458.



**Gambar 2.90. Jumlah Group Kesenian Kabupaten Sidoarjo  
Tahun 2016-2020**



*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, 2020*

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya.

### **2.3.2.15 Perpustakaan**

Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar. Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis, secara langsung atau pun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Hal ini, terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dan dengan adanya perbaikan metode belajar-mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara



profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis, secara langsung atau pun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan serta rekreasi yang tidak hanya mencerdaskan namun juga memberdayakan masyarakat sehingga memberikan manfaat dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas dan taraf hidup.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya mengembangkan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat dengan:

1. Menyediakan layanan perpustakaan di Kecamatan, Desa, Kelurahan, Sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas, yang tersebar secara merata;
2. Melaksanakan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi
3. Menyelenggarakan perpustakaan keliling dengan menggunakan sarana angkutan yang melayani di sekolah dan desa;
4. Melaksanakan promosi budaya gemar membaca dengan mengadakan penyebaran informasi melalui brosur/leaflet, spanduk, banner, media cetak dan elektronik;
5. Melaksanakan kerjasama dan jaringan antar perpustakaan;
6. Melaksanakan bimbingan teknis kepada tenaga pengelola perpustakaan.
7. Membangun dan memelihara Sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan Daerah.

Selain Perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, terdapat perpustakaan yang bukan milik Pemerintah Kabupaten yang diselenggarakan masyarakat dan Perguruan Tinggi. Sampai dengan tahun 2020, terdapat 944 layanan baca yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Data yang tercatat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 2.36 Jumlah Perpustakaan Kabupaten Sidoarjo  
Tahun 2016–2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perpustakaan Milik Pemda	422	426	470	470	477
2	Perpustakaan Bukan Milik Pemda	367	370	444	457	467
3	Total	789	796	914	927	944

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020*

Selain itu, keberhasilan pembangunan dan pengembangan perpustakaan ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan. Sejak tahun 2016 hingga 2019 jumlah pengunjung perpustakaan selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun dengan adanya pandemi Covid 19 di tahun 2020 mengalami penurunan jumlah pengunjung perpustakaan sebesar 47,23 %. Pengunjung perpustakaan tersebut sangat beragam yaitu Pelajar, mahasiswa, Guru, Pegawai negeri, Pegawai swasta, TNI/POLRI, dll. Data selengkapnya mengenai jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 2.37 Jumlah Pengunjung di Perpustakaan Daerah  
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016–2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	140.297	48.958	152.475	210.736	111.201

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020*

Kemudian, dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan manusia Kabupaten Sidoarjo, salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan memberikan penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca, melaksanakan



kegiatan pengembangan Literasi berbasis Inklusi Sosial, dan Pemilihan Duta baca tingkat Kabupaten.

Barometer keberhasilan perpustakaan dapat dilihat dari hasil pelaksanaan gerakan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Kabupaten dan tingkat kepuasan layanan perpustakaan yang berkualitas, tepat guna, sesuai prosedur-prosedur di dalam perpustakaan sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik.

**Tabel 2.38 Barometer Keberhasilan di Perpustakaan  
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Minat Baca Masyarakat	-	42,95	69	71,42	71,79
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perpustakaan	81,42	81,54	80,94	87,38	90,09

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020

### 2.3.2.16 Kearsipan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT. Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam bidang Kearsipan salah satunya dapat diukur dari indikator seperti tabel berikut.



**Tabel 2.39 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2020**

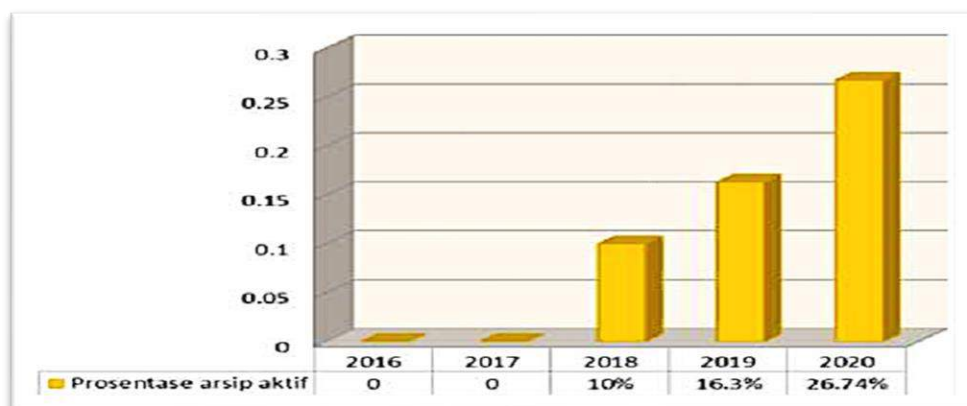
Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Prosentase lembaga yang menyelenggarakan kearsipan secara baku	14,73 %	17,63 %	20,05 %	22,46 %	25,12 %
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Kearsipan	79,95	80,19	80,13	-	85,95

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020

Dalam rangka penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah, maka dilaksanakan juga pengelolaan arsip statis, yaitu proses pengolahan khasanah arsip statis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan pendataan dan penataan arsip statis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pada tahun 2017, jumlah arsip statis yang didata dan ditata sebanyak 853 berkas, pada tahun 2018 jumlah arsip statis yang didata dan ditata sebanyak 2.478 berkas, pada tahun 2019 jumlah arsip statis yang didata dan ditata sebanyak 2.611 berkas, dan pada tahun 2020 jumlah arsip statis yang didata dan ditata sebanyak 3.729 berkas.

**Gambar 2.91. Perkembangan Jumlah Pemanfaat Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020**

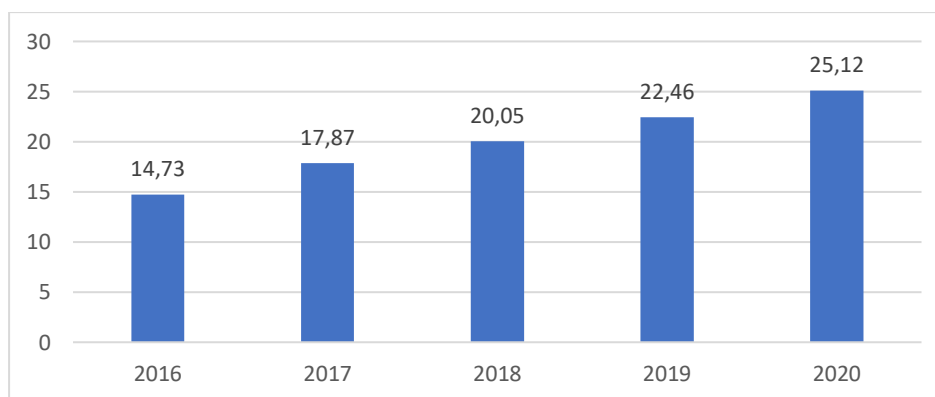


Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Berdasarkan gambar 2.91 diatas, dapat disampaikan bahwa Prosentase arsip aktif yang terkelola dengan baik tahun 2020 sebanyak 26,74%, total jumlah arsip aktif yang terkelola dengan baik sebanyak 1337 Berkas, total jumlah arsip aktif terkelola yang ada di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 5000 berkas sehingga Prosentase arsip aktif yang terkelola dengan baik tahun 2020 sebanyak 26,74%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 16,3%, maka realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 10,44% atau 64,05%. Sedang target tahun 2020 Prosentase arsip aktif yang terkelola dengan baik sebesar 15%, maka capaian target tahun 2020 sebesar 178,26%.

**Gambar 2.92. Persentase Lembaga Yang Menyelenggarakan Arsiparis Kabupaten Sidoarjo 2016-2020**



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jumlah Lembaga yang telah menyelenggarakan kearsipan secara baku tahun 2020 sebanyak 104 Lembaga, total jumlah lembaga yang ada di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 414 Lembaga sehingga Prosentase Lembaga yang telah menyelenggarakan kearsipan secara baku tahun 2020 sebesar 25,12%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 93 lembaga, maka realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 11 lembaga atau 11,82%. Sedang target tahun 2020 Prosentase Lembaga yang telah menyelenggarakan kearsipan secara baku sebesar 25,12%, maka capaian target tahun 2020 sebesar 100%.



## 2.3.3 Layanan Urusan Pilihan

### 2.3.3.1 Pertanian

Pertanian merupakan satu-satunya sector primer yang tidak terdampak oleh Pandemi *Covid-19*. Disaat yang lain tumbuh minus, pertanian justru sebaliknya, yaitu tumbuh di kisaran 2 (dua) persen. Pertanian di Kabupaten Sidoarjo kontribusinya terhadap PDRB terbilang kecil, yakni sekitar 2 (dua) persen.

**Tabel 2.40. Perkembangan Produksi Pertanian  
Kabupaten Sidoarjo 2016-2020**

Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1. padi	2.059.105,9	2.044.800	99,3%	2.059.312	1.982.761	96%	1.974.362	1.944.938	98,51%
2. jagung	11.789,20	12.905	109,5%	11.790	21.475	182%	11.792	25.848	219,20%
3. kacang hijau	15.705,60	21.455	136,6%	15.707	26.912	171%	10.742	14.341	133,50%
4. kedelai	9.717,00	6.020	62,0%	9.718	6.157	63%	1.703	1.713	100,59%
5. sawi	52.025,20	70.194	134,9%	52.030	73.379	141%	52.036	62.334	119,79%
6. bayam	42.576,30	40.588	95,3%	42.576,30	51.619	121%	42.585	43.792	102,83%
7. kangkung	43.321,30	46.809	108,1%	43.581	54.184	124%	43.330	50.392	116,30%
8. tebu	2.946.093,6	3.257.662	110,6%	2.946.388	3.508.624	119%	2.946.683	3.233.461	109,73%
9. daging	23.890.560	27.640.811	115,7%	24.129.466	28.611.672	123%	24.370.760	35.351.442	145,06%
10. telur	2.634.085	2.647.150	100,5%	2.660.426	2.699.702	101%	2.687.030	2.729.155	101,57%
11. susu	7.822.911	8.267.863	105,7%	7.801.140	9.754.309	123%	7.960.151	11.325.983	141,93%

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa produksi tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2020 rata-rata mengalami penurunan, hal ini karena musim hujan dan kemarau yang tidak dapat diprediksi sehingga mengakibatkan perubahan tata tanam dan pola tanam, yang mana biasanya pertanaman padi selesai bulan Desember tetapi mundur sampai bulan Januari sampai Februari hal ini berakibat pada pertanaman padi berikutnya terjadi pada musim kemarau yang mana terjadi kekurangan air dan terjadi serangan OPT yang cukup tinggi. Perubahan pola tanam tersebut juga berakibat pada pertanaman komoditas lain. Komoditas jagung mengalami kenaikan sebesar

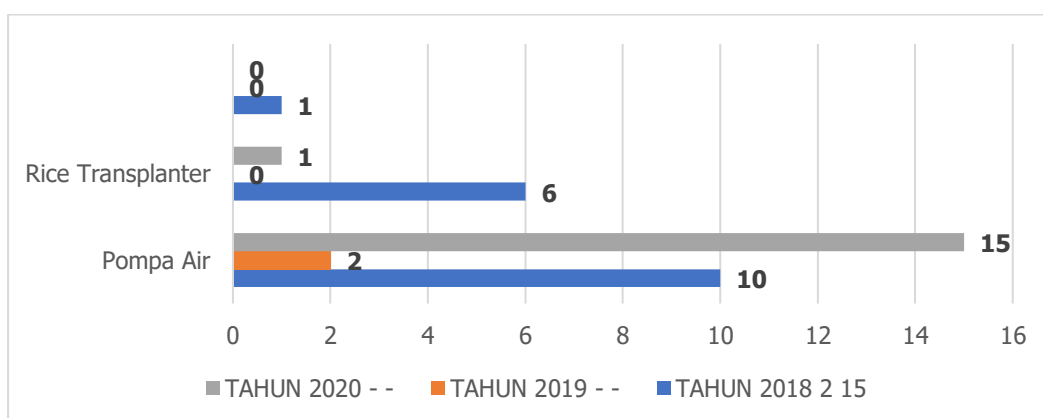




20,4 % atau sebanyak 4.373 Kw dari 21.475 kw menjadi 25.848 kw, hal ini disebabkan bertambahnya luas panen karena adanya peralihan tanam dari semula padi menjadi jagung. Selain itu, tahun 2020 banyak komoditas jagung yang dipanen dengan kondisi panen tua (bentuk pipilan) bukan jagung untuk konsumsi sayur. Dukungan yang diperoleh dari kegiatan APBN berupa bantuan benih unggul juga memberikan pengaruh peningkatan produksi tersebut. Apabila dibandingkan dengan target yang sudah ditentukan pada tahun 2020 produksi jagung sudah mencapai target yang ditentukan. Komoditas padi mengalami penurunan sebesar 37.823 kw atau 1,9% dari 1.982.761,00 Kw menjadi 1.944.938,00 Kw, hal ini disebabkan oleh luas lahan yang menurun, ketersediaan air yang kurang sehingga petani tidak bisa tanam padi, serta adanya serangan OPT yang menyebabkan puso atau gagal panen. Penurunan yang paling signifikan terjadi pada komoditas kedelai sebesar 72,2% atau sebanyak 4.444 Kw dari 6.157 Kw menjadi 1.713 Kw. Hal ini disebabkan banyak petani yang beralih menanam dari komoditas kedelai menjadi kacang hijau. Harga kedelai yang rendah dan pemeliharaan yang sulit disaat kondisi cuaca yang terjadi pada tahun 2020, menyebabkan petani beralih menanam kacang hijau.

Sedangkan bantuan alat mesin pertanian bagi kelompok Tani Sidoarjo masih minim. Hal ini terlihat dari bantuan alsintan yg terealisasi dari tahun 2018-2020 yang jumlahnya sangat minim.

**Gambar 2.93. Bantuan Alat Mesin Pertanian Tahun 2018-2020**



Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian



### 2.3.3.2 Perdagangan

Perdagangan Kabupaten Sidoarjo ditunjukkan oleh nilai ekspor dan impor Ke 9 (sembilan) negara. Perdagangan merupakan sektor terbesar kedua penyumbang PDRB Kabupaten Sidoarjo. Kontribusi perdagangan terhadap PDRB selalu cenderung bergerak naik pada setiap tahunnya. Hal tersebut tergambarkan dalam data gambar dibawah ini.

**Gambar 2.94. Pertumbuhan Persentase PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2016-2020**



Sumber: Sidoarjo Dalam Angka 2021

### 2.3.3.3 Perindustrian

Sektor industri merupakan sektor yang paling banyak memberikan kontribusi pada PDRB, yaitu mencapai 47,8 persen pada tahun 2020. Persentase kontribusi PDBR dari sektor industri dalam 3 (tiga) tahun ini terus mengalami kenaikan. Untuk lebih jelasnya bisa disimak dalam gambar 2.95 berikut ini.



**Gambar 2.95. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan**



Sumber: Sidoarjo Dalam Angka 2021

#### 2.3.3.4 Kelautan Perikanan

Hasil Perikanan Laut meningkat dari tahun ke tahun, dapat dilihat dari tahun 2018 realisasi melebihi target dengan kenaikan 162.400 Kg, sedangkan di tahun 2019 kenaikan sebesar 196.400 Kg, pada tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 124.100 Kg. Rincian lebih lanjut terkait Realisasi Perikanan Laut dari tahun ke tahun sebagai berikut :

**Tabel 2.41. Produksi Perikanan Laut Tahun 2016-2020**

Perikanan Laut					
No	Tahun	Target	Realisasi	Kenaikan	Persentase
1.	2016	14.900.000 kg	14.908.760 kg	8.760 kg	0,058%
2.	2017	15,050,000 kg	15.057.400 kg	148.640 kg	0,99%
3.	2018	15.200.000 Kg	15.219.800 Kg	162.400 kg	1,07%
4.	2019	15.400.000 Kg	15.416.200 Kg	196.400 kg	1,29%
5.	2020	15. 600.000 Kg	15.540.300 Kg	124.100 kg	0,80 %

Sumber: Dinas Perikanan Sidoarjo, 2020

Realisasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan perikanan laut. Sedangkan realisasi tahun 2020 bila dibandingkan dengani target 2020 mengalami penurunan sebesar 59.700 kg.



hal tersebut dikarenakan oleh terhambatnya aktivitas penjualan hasil tangkapan nelayan karena pandemi Covid- 19 dan lock down di mana-mana sehingga banyak kapal yang tidak melaut. Realisasi produksi perikanan umum daratan (PUD) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, produksi perikanan umum daratan (PUD) tahun 2018 sebesar 536.100 kg dan mengalami kenaikan sebesar 6.100 Kg, sedangkan tahun 2019 sebesar 547.800 kg mengalami kenaikan sebesar 11.700 kg, dan tahun 2020 sebesar 553.200 kg mengalami kenaikan sebesar 5.400 kg . Dapat dilihat dalam tabel Perikanan Umum Daratan (PUD) sebagai berikut :

**Tabel 2.42. Produksi Perikanan Umum Daratan**

Perikanan Umum Daratan (PUD)					
No	Tahun	Target	Realisasi	Kenaikan	Persentase
1.	2016	525.000 kg	525.050 kg	3.340 kg	0,64%
2.	2017	530.000 kg	530.000 kg	4.950 kg	0,94%
3.	2018	536.000 Kg	536.100 Kg	6.100 Kg	1,15%
4.	2019	543.000 Kg	547.800 Kg	11.700 Kg	2,18%
5.	2020	550.000 Kg	553.200 kg	5.400 kg	0,98%

*Sumber: Dinas Perikanan Sidoarjo, 2020*

Dan itulah yang akan kami selesaikan dalam rangka mengatasi supaya kedepannya lebih optimal dengan solusi sebagai berikut :

- Melaksanakan pendataan hasil tangkap yang disesuaikan waktunya dengan datangnya nelayan dari laut serta memberikan logbook kepada nelayan agar selalu mencatat hasil tangkapannya didampingi penyuluh selain itu pendataan statistik perikanan tangkap juga dilakukan melalui via whatsapp, telepon maupun fasilitas daring.
- Memasang papan larangan menangkap ikan yang dilarang di wilayah yang rawan penangkapan ikan serta melakukan pengawasan lingkungan perairan secara rutin / patroli.
- Diusulkan anggaran untuk dilakukan perbaikan sarana prasarana perikanan tangkap supaya lebih memahami permasalahan nelayan dan



memotivasi mereka<sup>398</sup> serta memberikan wawasan atau ketrampilan baru yang bisa menambah penghasilan.

Peningkatan produksi perikanan air tawar target di tahun 2020 sebesar 21.479.900 kg realisasi sebesar 22.135.975 kg dengan penambahan peningkatan produksi perikanan air tawar sebesar 642.795 kg sedangkan tahun 2019 peningkatan produksi perikanan air tawar target di tahun 2019 sebesar 21.479.883 kg, realisasi sebesar 21.493.180 kg dengan penambahan peningkatan produksi perikanan air tawar sebesar 839.446 kg. Sedangkan di tahun 2018 target 20.389.932 kg, realisasi sebesar 20.653.734 kg dengan penambahan peningkatan produksi perikanan air tawar sebesar 857.684 kg. Perkembangan peningkatan perikanan air tawar dari tahun 2018 – 2020 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 2.43. Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar**

Perikanan Budidaya Air Tawar					
No	Tahun	Target	Realisasi	Kenaikan	Persentase
1.	2016	18,186,396 kg	19,718,950 kg	1.586.950 kg	8,75%
2.	2017	18,691,970 kg	19.796.050 kg	77.100 kg	0,39%
3.	2018	20.389.932 Kg	20,653,734 Kg	857.684 Kg	4,33%
4.	2019	21.479.883 Kg	21.493.180 Kg	839.446 Kg	4,06%
5	2020	21.479.900 Kg	22.773.775 Kg	1.280.595 Kg	5,95%

Sumber: Dinas Perikanan Sidoarjo, 2020

Realisasi tahun 2018 terus meningkat dari tahun 2017 dan untuk tahun 2019 mengalami kenaikan realisasinya melebihi target 2019. Realisasi peningkatan perikanan air tawar di tahun 2019 sebesar 4,06% (realisasi 2019 – realisasi 2018) : realisasi 2018, melebihi target yang ditetapkan sebesar 4% (target 2019). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target, hal ini dikarenakan sudah banyak para pembudidaya yang menerapkan CBIB dan CPIB Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan hal ini dikarenakan sudah banyak para pembudidaya yang menerapkan CBIB dan CPIB adanya penyediaan sarana prasarana budidaya



yang menunjang aktivitas para pembudidaya serta pengawasan pemakaian OIKB (Obat Ikan Kimia dan Biologi), Penggunaan probiotik, sebagian pembudidaya telah menerapkan Pembinaan / pelatihan dari Dinas Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 119 % dari target, hal ini diupayakan dengan : Pemberian hibah kepada pembudidaya berupa kolam, benih, pakan dan pupuk; Penyediaan sarana prasarana budidaya; Pengawasan pemakaian OIKB (Obat Ikan Kimia dan Biologi); Penerapan CBIB (Cara Budidaya Ikan Baik); Penggunaan probiotik; Pembinaan / pelathan terhadap pembudidaya air payau dan air tawar; Layanan Posikandu (Pos kesehatan ikan terpadu) membantu pembudidaya dalam menangani permasalahan terhadap kesehatan ikan, pengambilan sampel residu ( ikan / udang dan tanah), pelayanan vaksinasi, jasa konsultasi, maupun pusat informasi baik yang sifatnya aktif maupun pasif.

Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Sidoarjo terdiri dari budidaya air payau dan budidaya air tawar. Target peningkatan perikanan air payau tahun 2019 sebesar 76.236.179 kg dengan realisasi 76.568.500 kg, sehingga mengalami penambahan realisasi sebesar 332.321 kg. Untuk tahun 2018 target perikanan air payau sebesar 75.877.437 kg dengan realisasi 75.932.450 kg, sehingga di tahun 2018 mengalami penambahan sebesar 55.013 kg. target peningkatan perikanan air payau pada tahun 2020 sebesar 76.617.359 kg dengan realisasi 79.819.030 kg sehingga mengalami penambahan realisasi sebesar 3.250.530 kg. Perkembangan peningkatan perikanan air payau dari tahun 2018 – 2020 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

**Tabel 2.44. Produksi Perikanan Budidaya Air Payau**

Perikanan Budidaya Air Payau					
No	Tahun	Target	Realisasi	Kenaikan	Persentase
1.	2016	75,311,057 kg	74,884,800 kg	426,257 kg	0,57%
2.	2017	75,574,645 kg	75,719,740 kg	834,940 kg	1,11%
3.	2018	75,877,437 Kg	75,932,450 Kg	212,710 Kg	0,28%
4.	2019	76,236,179 Kg	76,568,500 Kg	636,050 Kg	0,83%
5.	2020	76,617,359 Kg	78,750,800 Kg	2,182,300 kg	2,85%

Sumber: Dinas Perikanan Sidoarjo, 2020



Realisasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan produksi perikanan budidaya air payau. Realisasi peningkatan perikanan air payau di tahun 2018 sebesar 0,83% (realisasi 2019 – realisasi 2018) : realisasi 2018, melebihi target yang ditetapkan sebesar 0,4% (target 2019 – target 2018) : target 2018. Realisasi peningkatan perikanan air payau di tahun 2020 sebesar 2,85% (realisasi 2020-realisasi 2019) : realisasi 2019, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 0,5% (target 2020-target 2019): target 2019. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 mencapai target, hal ini dikarenakan sudah banyak para pembudidaya yang menerapkan CBIB dan CPIB. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan hal ini dikarenakan sudah banyak para pembudidaya yang menerapkan CBIB dan CPIB adanya penyediaan sarana prasarana budidaya yang menunjang aktivitas para pembudidaya serta pengawasan pemakaian OIKB (Obat Ikan Kimia dan Biologi), Penggunaan probiotik, sebagian pembudidaya telah menerapkan Pembinaan / pelatihan dari Dinas. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 570 % dari target, hal ini diupayakan dengan:

Pemberian hibah kepada pembudidaya berupa kolam, benih, pakan dan pupuk; Penyediaan sarana prasarana budidaya; Pengawasan pemakaian OIKB (Obat Ikan Kimia dan Biologi); Penerapan CBIB (Cara Budidaya Ikan Baik); Penggunaan probiotik; Pembinaan / pelathan terhadap pembudidaya air payau dan air tawar; Layanan Posikandu (Pos kesehatan ikan terpadu) membantu pembudidaya dalam menangani permasalahan terhadap kesehatan ikan, pengambilan sampel residu ( ikan / udang dan tanah), pelayanan vaksinasi, jasa konsultasi, maupun pusat informasi baik yang sifatnya aktif maupun pasif. Namun demikian masih ada beberapa masalah yang masih bisa di atasi dalam rangka optimalisasi ke depan yakni

**Permasalahan :** Berdasarkan pemantauan dengan penyuluh perikanan dan



penyuluh bantu masih ada Pembudidaya masih belum menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB). Persebaran serangan penyakit ikan sangat cepat dan tidak dapat diprediksi. Belum semua pembudidaya memahami tentang penggunaan obat ikan yang dilarang. Menurunnya kualitas air sungai sebagai sumber air kolam/tambak yang dipengaruhi oleh pencemaran limbah industri dan limbah rumah tangga. Sarana dan prasarana budidaya kurang memadai. Dan itulah yang akan kami selesaikan dalam rangka mengatasi supaya kedepannya lebih optimal dengan **solusi sebagai berikut** :

1. Bekerjasama dengan penyuluh perikanan dan penyuluh bantu melalui via telepon/wa dalam rangka pendampingan ke para pembudidaya guna penerapan CBIB.
2. Melaksanakan monev rutin terkait lingkungan budidaya , serangan penyakit , control managemen kualitas air .
3. Pengawasan OIKB.
4. Melanjutkan kegiatan normalisasi saluran.
5. Melanjutkan pembangunan plengsengan/bronjong.
6. Pemberian layanan Posikandu. Layanan Posikandu (Pos kesehatan ikan terpadu) membantu pembudidaya dalam menangani permasalahan terhadap ikan, pengambilan sampel residu ( ikan / udang dan tanah), pelayanan vaksinasi, jasa konsultasi, maupun pusat informasi baik yang sifatnya aktif maupun pasif.

### **2.3.4 Layanan Penunjang Urusan**

#### **2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.





Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program.

Kabupaten Sidoarjo telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga dengan ditetapkan dokumen perencanaan tersebut dalam peraturan daerah, Pemerintah kabuapten telah memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.45. berikut.

**Tabel 2.45. Dokumen Perencanaan Kabupaten Sidoarjo  
Tahun 2016 – 2020**

No.	Jenis Dokumen	2016	2017	2018	2019	2020
1	RPJPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

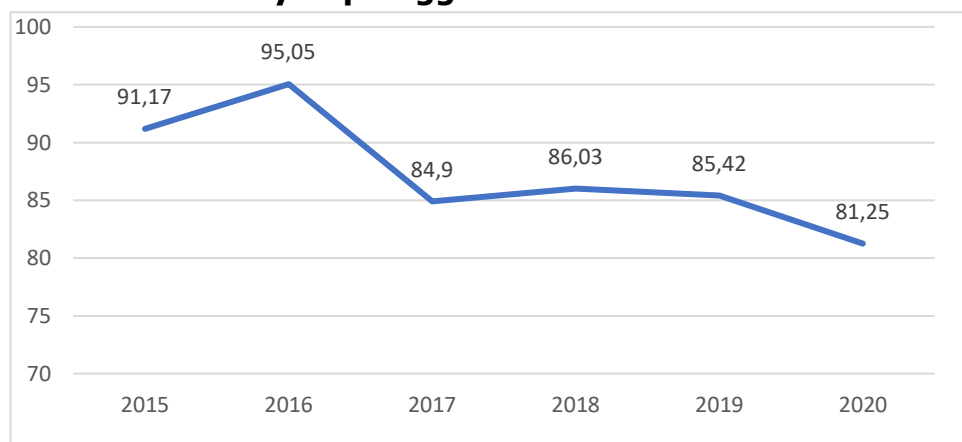
*Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, 2020.*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui program pembangunan daerah.



Salah satu unsur pembentuk tata kelola pemerintah adalah terkait tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat ditunjukkan dari tingkat capaian keberhasilan program dan rata-rata penyerapan anggaran kegiatan, sehingga diperlukan upaya untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih efektif dan efisien.

**Gambar 2.96. Persentase Kemampuan Perangkat Daerah Dalam Menyerap Anggaran Tahun 2015-2020**



*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sidoarjo, 2020*

Kemudian untuk rata-rata penyerapan anggaran di pertengahan tahun 2020 ini mencapai 81.25 persen. Rendahnya serapan tersebut banyak dipengaruhi oleh tender tidak terlaksana karena keterbatasan waktu, Adanya efisiensi dari hasil pengadaan barang dan jasa terhadap pagu anggaran.

#### **2.3.4.2 Keuangan**

Unsur penunjang keuangan di Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pelayanan Pajak Daerah. BPKAD berwenang dalam perencanaan alokasi anggaran pembangunan dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Sedangkan Badan Pelayanan Pajak Daerah tupoksinya adalah menggali potensi penerimaan daerah dari sektor pajak daerah untuk menunjang pembangunan. Secara umum, kinerja keuangan sangat baik. Hal ini terlihat dari realisasi



kinerja yang rata-rata melampaui target. Berikut ini adalah rangkuman keberhasilan indikator kinerja keuangan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

**Tabel. 2.46. Capaian Kinerja Urusan Keuangan 2018-2020**

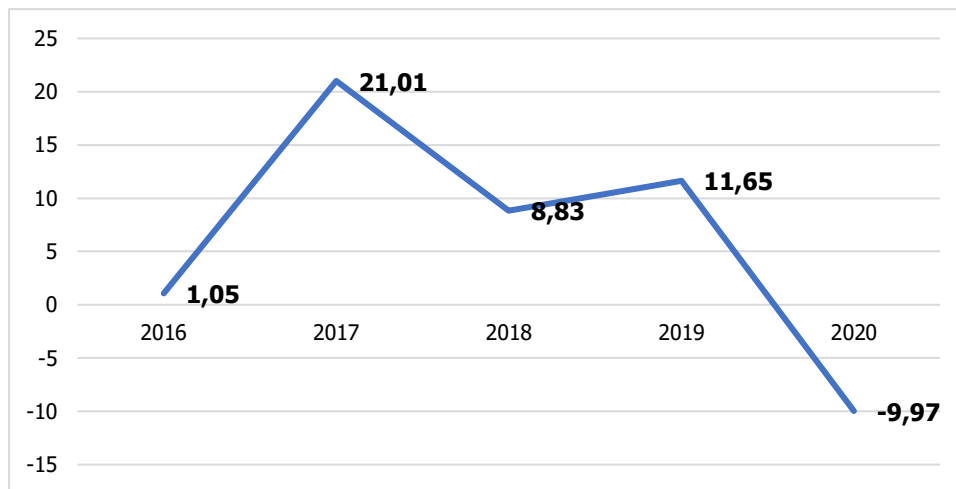
INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1. Persentase kepatuhan OPD dalam Penyusunan RAPBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang ditetapkan	93,75%	85,11%	90,77%	100%	85,42%	85,42%	100%	81,25%	81,25%
3. Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal	99,73%	99,812%	100,08%	99,74%	98,73%	98,99%	99,745%	99,483%	99,74%
4. Persentase OPD yang terlibat dalam Kelola Barang Milik Daerah	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah*)	36,21%	39,12%	108,04%	37,93	38,14	100,54%	33%	40,92%	124%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sidoarjo, 2020

Selain indikator kinerja di atas, pajak termasuk indikator kinerja primer yang keberhasilan kerjanya berpengaruh langsung terhadap kapasitas keuangan daerah. Persentase penerimaan pajak sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi. Penerimaan pajak pada tahun 2016 sebesar 1,5 persen, kemudian pada tahun 2017 meningkat signifikan menjadi 21,01 persen. Tahun 2018 mengalami penurunan persentase penerimaan menjadi 8,83 persen dan naik Kembali pada tahun 2019 menjadi 11,65 persen. Pada tahun 2020 persentase penerimaan pajak tumbuh negative, yaitu -9,97 persen. Hal ini dikarenakan banyaknya wajib pajak yang tutup usaha karena pandemi *Covid-19*. Lebih detailnya bisa dilihat dalam gambar di bawah ini:



**Gambar 2.97. Persentase Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020**

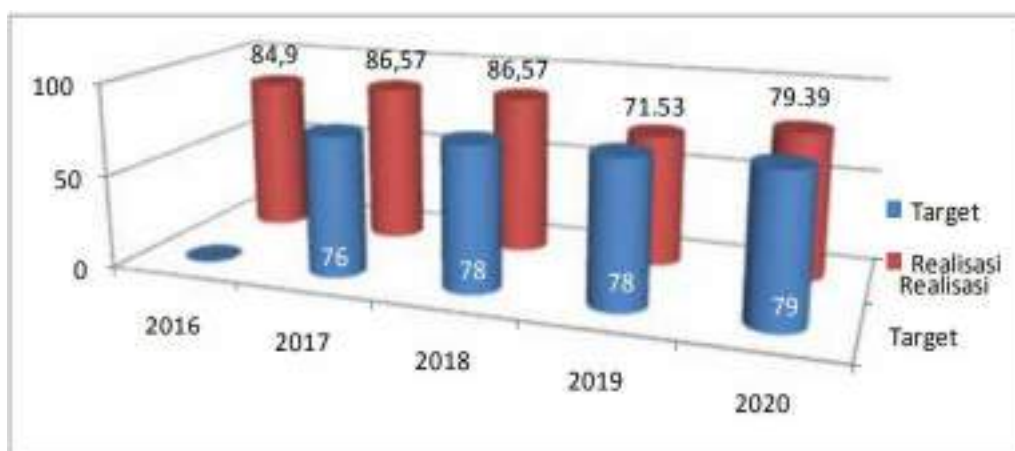


Sumber: BPPD Kab. Sidoarjo

### 2.3.4.3 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Unsur penunjang kepegawaian di Kabupaten Sidoarjo menjadi tugas dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo. Indikator kinerja di urusan kepegawaian adalah Indeks Profesionalisme ASN. Adapun capaian indeks profesionalisme ASN dapat dilihat dalam gambar 2.84 berikut:

**Gambar 2.98. Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2016-2020**



Sumber: BKD Kab. Sidoarjo

Indeks Profesionalisme ASN dalam kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung mengalami penurunan. Indeks pada tahun 2016 sebesar 84,9 kemudian turun menjadi 79,39 pada tahun 2020.



#### **2.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan**

Salah satu unsur penting dalam pembangunan daerah adalah kejelian Pemerintah Daerah dalam memetakan permasalahan dan isu strategis terkait pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah didasarkan pada setiap permasalahan dan isu strategis yang telah ditentukan. Salah satu alat dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam pembangunan daerah adalah inovasi pemerintah daerah. Inovasi merupakan cara meningkatkan kinerja daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri setiap tahun merilis Indeks Inovasi Daerah.

Dalam pengukurannya, indeks inovasi daerah mengacu pada 35 indikator. Jumlah ini terbagi ke dalam dua aspek, yaitu 14 indikator merujuk pada satuan pemerintah daerah, serta 21 indikator satuan inovasi. Indikator satuan pemerintah daerah bersifat umum, yaitu berisi data visi misi, kelembagaan, jumlah inovasi dan sebagainya. Sedangkan indikator satuan inovasi, lebih mengarah pada pengukuran kualitas serta dampak inovasi yang dilakukan daerah, seperti adanya payung hukum, agenda bimbingan teknis, informasi mengenai layanan, jajak pendapat masyarakat, dan beberapa data lainnya.

Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 masuk dalam kategori sangat inovatif dengan skor 17.650 atau berada di peringkat 20 Kabupaten/Kota di Indonesia. Capaian tersebut dilanjutkan pada tahun 2020 yaitu kabupaten yang sangat inovatif dengan skor 3.983. Namun capaian ini perlu menjadi evaluasi di internal karena terjadi penurunan skor yang sangat signifikan.



### 2.3.4.5 Pengawasan

#### Opini BPK

Selain peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat, diperlukan pula unsur pengawasan internal guna mendisiplinkan aparatur. Sanksi disiplin aparatur mengalami fluktuasi tiap periodenya karena itu, diperlukan optimalisasi pengawasan internal agar aparatur lebih disiplin sehingga mengurangi jumlah sanksi yang harus dijatuhkan. Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah.

**Tabel 2.47. Kinerja Pengawasan Tahun 2020**

INDIKATOR KINERJA TUJUAN	2018		2019		2020	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Maturitas SPIP	terdefinisi	terdefinisi	terdefinisi	terdefinisi	terdefinisi	terdefinisi
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: inspektorat, 2021

Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan dari level berkembang menjadi terdefinisi, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian yang telah dikomunikasikan secara memadai serta telah diimplementasikan pada seluruh kegiatan. Selanjutnya, pada opini BPK atas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendapatkan penilaian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Predikat WTP berarti informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern telah dijalankan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan dalam tataran wajar.



## Nilai SAKIP

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Penilaian evaluasi SAKIP dapat dilihat pada tabel 2.44. berikut.

**Tabel 2.48. Penilaian Evaluasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo  
Tahun 2016–Triwulan II 2020**

No.	Uraian	201	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Evaluasi SAKIP	B	B	BB	A	BB	BB

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo 2020

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang berorientasi hasil, adalah dengan dilakukan suatu evaluasi terhadap implementasi SAKIP, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimana evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2020 masih belum direlease, sehingga masih menggunakan angka capaian di tahun 2019 yang memperoleh kategori **BB (Sangat Baik)**. Hasil tersebut masih belum memenuhi target yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah yakni kategori **A (Memuaskan)**.

## Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui upaya pemerintah untuk mencapai *good and clean governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem



penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut delapan area perubahan, yang meliputi Organisasi, Tata Laksana, Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Peraturan Perundang – Undangan, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Aparatur Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun IRB Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Untuk lebih lengkapnya simak gambar 2.95 di bawah ini:

**Gambar 2.99. Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2020**



Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian PAN RB

Indikator keberhasilan urusan pemerintahan lainnya adalah Indeks Pelayanan Publik dan Kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Nilai IPP dan LPPD Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dikategorikan baik. Untuk lebih jelasnya bisa disimak dalam tabel berikut:

**Tabel 2.49. Penilaian IPP, LPPD, dan IID Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016–Triwulan II 2020**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	NA	NA	B	B	A
Status Kinerja LPPD	ST	ST	NA	ST	ST
Indek Inovasi Daerah	NA	NA	NA	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif





Selain itu menurut penilaian Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Sidoarjo juga termasuk dalam kategori Kabupaten yang sangat inovatif dalam 2 (dua) tahun terakhir.

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

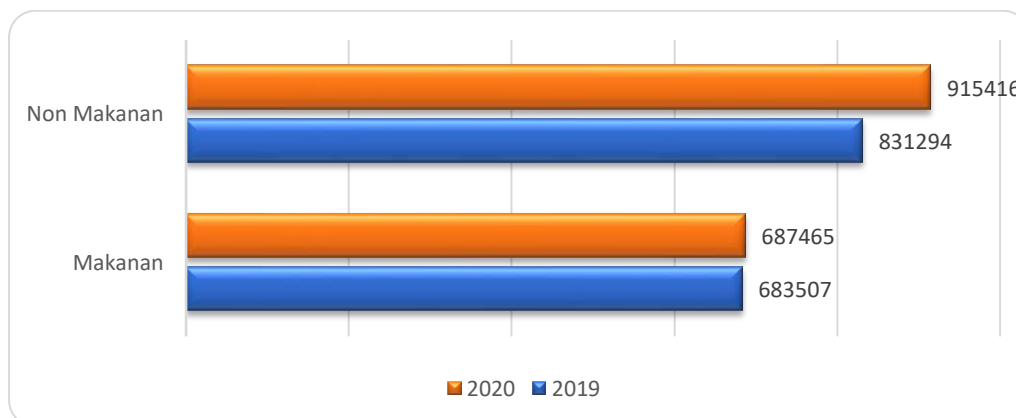
Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator variable aspek daya saing daerah terdiri dari:

### 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

#### A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

**Gambar 2.100. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah) Tahun 2019-2020**



Sumber: BPS Sidoarjo dalam Angka 2021

Konsumsi Rumah tangga setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Jika diuraikan berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase terbesar pada kelompok non makanan. Semakin besarnya proporsi konsumsi non makanan



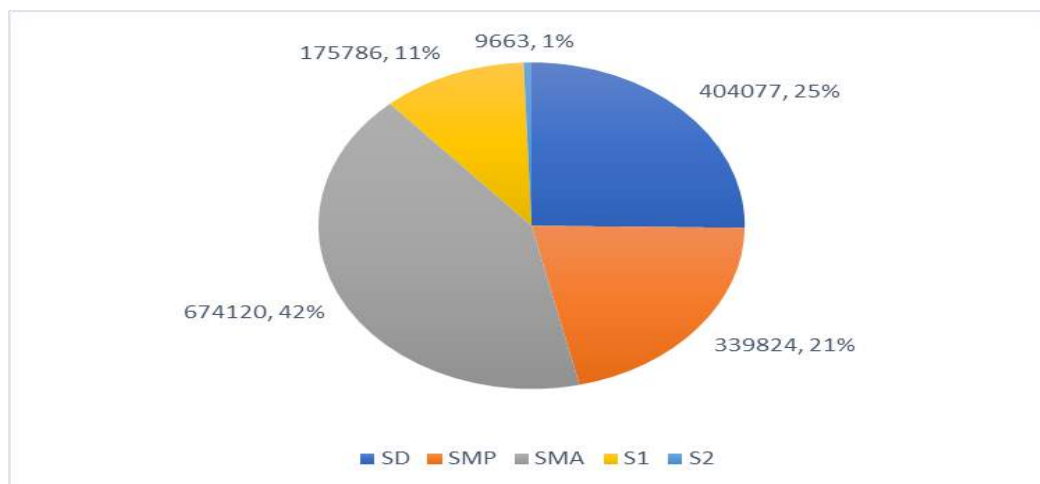
disbanding konsumsi makanan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo meningkat. Produktivitas ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang tercermin sebagaimana di atas.

## 2.4.2 Fokus Sumber Daya Manusia

### A. Ketenagakerjaan

Salah satu factor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait rasio lulusan D4/S1/S2/S3 Kabupaten Sidoarjo sebagaimana gambar 2.101 berikut.

**Gambar 2.101. Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016– Triwulan II 2020**



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, 2020

### B. Rasio Ketergantungan

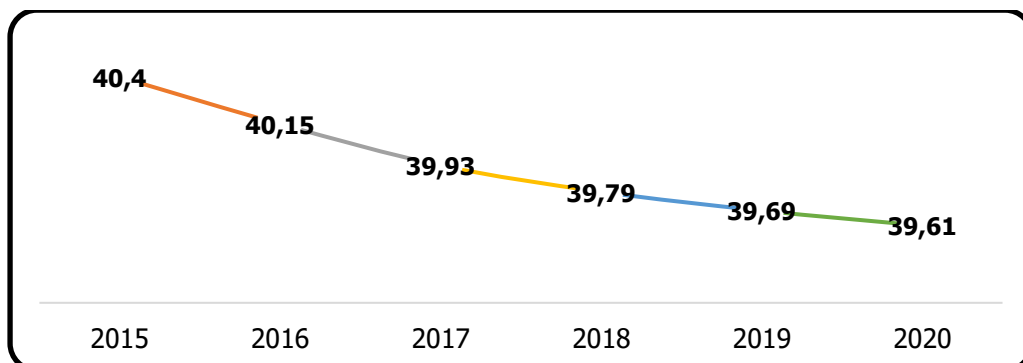
Angka Beban Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan gambaran seberapa besar beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Penduduk produktif secara ekonomi adalah mereka yang berada pada umur 15 – 64 tahun, yang dianggap memiliki potensi ekonomi. Sedangkan penduduk usia 0-14 tahun dianggap belum produktif karena



secara ekonomi masih tergantung kepada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Dan penduduk usia 65 tahun keatas juga dianggap tidak produktif karena pada usia tersebut sudah tidak bekerja lagi.

Angka beban ketergantungan diperoleh dengan membandingkan penduduk tidak produktif dengan penduduk yang produktif. Semakin tinggi angka beban ketegantungan, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif; begitu pula sebaliknya. Jumlah angka ketergantungan selama beberapa tahun menunjukkan tren yang selalu menurun dari Tahun 2015 sebesar 40,4% turun menjadi 39,61% pada Tahun 2020.

**Gambar 2.102. Rasio Ketergantungan Penduduk Menurut Umur Tahun 2015 - 2020**



Sumber: BPS Jawa Timur, 2021

### 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

#### A. Keamanan dan Ketertiban

Ketentraman masyarakat dapat diukur menggunakan indeks rasa aman. Indeks rasa aman Kabupaten Sidoarjo semakin meningkat dari tahun ke tahun. Puncaknya indeks rasa aman dirasakan pada tahun 2020 dengan indeks rasa aman sebesar 76.03%. lihat gambar 2.103. berikut



**Gambar 2.103. Perkembangan Indeks Rasa Aman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020**



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo 2020

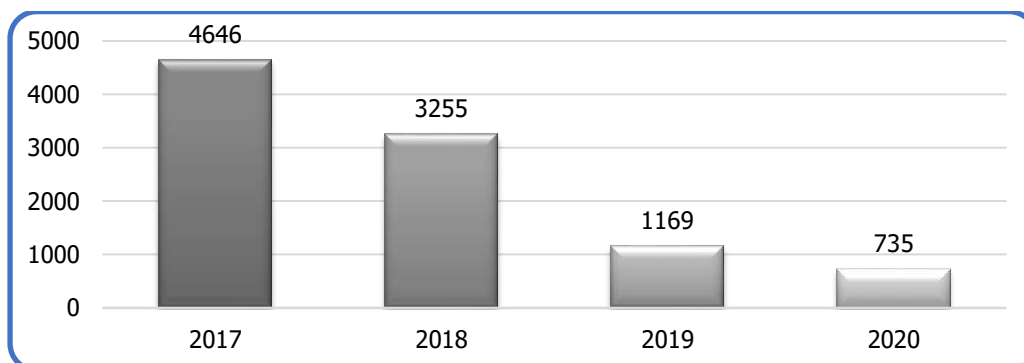
Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 tidak tercapai, Capaian kinerja yang tidak sepenuhnya optimal dikarenakan pada tahun 2020 adalah tahun politik dengan terselenggaranya pilihan Kepala Daerah dan Kepala Desa serentak se-Kabupaten Sidoarjo sangat mempengaruhi hasil survei terhadap indeks rasa aman yang ada di kabupaten Sidoarjo, disamping itu pandemi covid 19 masih menjadi tantangan besar bagi warga Sidoarjo sampai dengan penghujung Tahun 2020. Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin dalam upaya penanganan covid 19 dengan berbagai macam kebijakan strategis seperti pemberlakuan PSBB, *New Normal*, PPKM serta edukasi 3M (Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) terus dilakukan untuk menekan penyebaran virus tersebut. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 pada angka stagnasi, capaian angka tersebut sudah cukup baik sebagai ukuran tingkat rasa aman/nyaman/ketentraman yang dirasakan warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari.

Berdasarkan indeks rasa aman dan indeks toleransi yang semakin tahun meningkat hal ini dibuktikan dengan jumlah kejahatan yang dilaporkan semakin turun dari tahun ke tahun. Berawal kasus tindak kejahatan sebanyak 4.646 turun secara drastis pada tahun 2019 menjadi sebesar 1.169 kasus yang dilaporkan dan menurun lagi pada tahun 2020 menjadi 735 kasus yang



dilaporkan. Hal ini merupakan hal positif untuk masyarakat menjadi tenang tinggal di daerahnya sendiri. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.104 berikut.

**Gambar 2.104. Jumlah Kejahatan Dilaporkan Tahun 2017-2020**



*Sumber: Badan Pusat Statistik Sidoarjo 2021*

Salah satu faktor penurunan tindak kejahatan adalah sikap disiplin dan bertanggung jawab antara masyarakat serta penegak hukum yang tegas dalam menindak setiap pelaku kriminalitas. Hal ini dapat dilihat pada penyelesaian tindak kejahatan yang dilakukan penegak hukum di lingkungan Kabupaten Sidoarjo dengan kasus penyelesaian tertinggi terjadi pada Tahun 2020 yang mencapai 76.03 persen kasus diselesaikan.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo selama 2016-2020 terangkum dalam tabel di bawah ini.



**Tabel 2.50.**

**Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan  
Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo 2016-2020**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>									
1	PDRB Perkapita	Juta	74.411	79.810	85.385	90.697	86,425	86,801	Belum Tercapai
2	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	Tahun	14,13	14,34	14,75	14,91	14,93	14,45	Melampaui
3	Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,22	10,23	10,24	10,25	10,5	10,8	Belum Tercapai
4	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73,67	73,71	73,83	73,98	74,04	73,69	Melampaui
5	Opini atas Audit BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sesuai
6	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Predikat	N/A	N/A	B/Baik	B/Baik	A	B/Baik	Melampaui
					3,79	4,16			
7	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Predikat	B/Baik	B/Baik	B/Baik	B/Baik	A	B/Baik	Melampaui
			78,96	79,89	84,93	86,612			
8	Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan	%	1,56	1,57	1,47	1,41	1,56	1,41	Melampaui
9	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	46	46,08	46,12	46,62	51,17	46,13	Melampaui



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
10	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	15,78	16,01	16,15	16,3	16,02	16,27	Belum Tercapai
11	Persentase Pencari kerja yang telah membuka usaha secara mandiri	%	2,7	4,21	5,26	6,75	8	7	Melampaui
12	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah	%	36,4	41,31	39,12	38,14	42,45	38,42	Melampaui
13	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	86,4	86,57	86,57	71,53	79,39	79	Melampaui
14	Nilai SAKIP Kabupaten	kategori	B	BB	A	BB	BB	A	Belum Tercapai
15	Tingkat Maturitas SPIP	kategori	N/A	berkembang	terdefinisi	terdefinisi (Level 3)	terdefinisi	terdefinisi	Sesuai
16	Nilai PPD (Perencanaan Pembangunan Daerah)	kategori	N/A	N/A	Baik	Baik (5,34)	*)	Baik	-
17	Status Kinerja LPPD	kategori	ST	ST	N/A	ST	ST	ST	Sesuai
<b>A</b>	<b>Layanan Urusan Wajib Dasar</b>								
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>								
	<b>Pendidikan Dasar</b>								
18	Rata-rata Nilai UN SD/MI	Nilai	8,2	8,32	8,39	8,57	*)	8,4	-
19	APM SD/MI	%	95,37	94,42	98,35	99,21	99,29	97,43	Melampaui
20	APK SD/MI	%	107,12	107,71	107,97	108,98	109,96	108,64	Melampaui
	<b>Pendidikan Menengah</b>								
21	Rata-rata Nilai UN SMP/MTs	Nilai	7,06	6,25	5,16	5,64	*)	6,89	-
22	APM SMP/MTs	%	74,95	79,58	84,03	84,15	84,42	79,71	Melampaui



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
23	APK SMP/MTs	%	98,51	98,85	99,01	99,28	99,46	99,45	Melampaui
<b>2 Kesehatan</b>									
24	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	66,34	82,67	64,13	52,11	53,1	71,2	Melampaui
25	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	4,3	5,45	4,38	4,14	3,8	6,5	Melampaui
26	Persentase balita stunting	%	28,2	27,2	25,9	14,9	8,8	24,2	Melampaui
27	Persentase Desa/Kel <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	86	87	98,02	97,5	92	90	Melampaui
28	Persentase orang terinfeksi HIV positif mendapatkan ARV	%	53	70	93	75	90	90	Sesuai
29	Status akreditasi Rumah Sakit		Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Progres Menuju Status Akreditasi Internasional	Progres Menuju Status Akreditasi Internasional	Sesuai
30	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat RSUD	Kategori	B	A	A	A	A	A	Sesuai
31	Persentase Pasien Keluar Hidup	kategori	93,4	93,5	93,91	93,7	93,41	93	Tercapai
<b>3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>									
32	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	%	95,3	95,9	93,06	91,48	82	90	Belum Tercapai





No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
33	Persentase luas sawah yang terlayani irigasi	%	82,8	83,81	85,73	83	85,38	86	Belum Tercapai
34	Persentase penurunan luas wilayah rawan genangan	%	40	42	50	55,25	61,61	65	Belum Tercapai
35	Persentase Bangunan ber-IMB	%	60,05	60,5	61	148	64,5	64,5	Sesuai
36	Persentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	%	N/A	N/A	63	136	65	65	Sesuai
<b>3 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>									
37	Persentase luasan kawasan kumuh	%	0,42	0,35	0,33	0,04	0,029	0,24	Melampaui
38	Persentase peningkatan rumah layak huni	%	N/A	N/A	100	100	100	100	Sesuai
39	Persentase prasarana sanitasi yang disediakan sesuai target	%	N/A	N/A	94,01	93	95,9	94,5	Melampaui
40	Persentase masyarakat yang menggunakan air bersih melalui perpipaan	%	N/A	0,65	2	4,07	5,49	5	Melampaui
<b>4 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>									
41	Indeks Rasa Aman	Poin	N/A	72,44	73,77	76,01	76,03	76,87	Belum Tercapai
42	Indeks Resiko Bencana	Poin	N/A	126,75	128,6	117,95	112,82	113,7	Melampaui



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
43	Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se-Kabupaten Sidoarjo) sesuai SPM	%	24,8	25,19	44,49	35,31	41,54	50	Belum Tercapai
<b>5 Sosial</b>									
44	Persentase penurunan PMKS terhadap penduduk	%	1,96	1,93	1,89	1,83	2,23	1,84	Belum Tercapai
<b>B Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>									
<b>1 Tenaga Kerja</b>									
45	Persentase tenaga kerja yang terserap di 9 sektor	%	93,88	95,03	95,27	95,28	89,03	94,63	Belum Tercapai
46	Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan	%	58	61	61,99	71,8	51,4	50	Melampaui
<b>2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>									
47	Indeks Pembangunan Gender	Poin	N/A	93,33	93,33	93,79	94,13	94,65	Belum Tercapai
48	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	N/A	64,65	64,46	67,13	*)	64,8	-
49	Persentase kasus kekerasan dan Traficking terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
	<b>3</b>	<b>Pangan</b>							
50	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	angka	86,95	87,78	88,30	89,30	89,7	88,9	Melampaui
51	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	angka	87,27	89,32	88,72	89,41	89,87	89,59	Melampaui
	<b>4</b>	<b>Pertanahan</b>							
52	Persentase pengadaan tanah yang terfasilitasi sesuai prosedur	%	N/A	0	100	100	100	100	Sesuai
	<b>5</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>							
53	Indeks Kualitas Air	Poin	49,54	49,77	49,59	49,05	51,52	49,05	Melampaui
54	Indeks Kualitas Udara	Poin	84,04	82,05	85,04	86,26	85,14	86,26	Belum Tercapai
55	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	Poin	22,97	23,11	36,77	51,09	52,26	31,04	Melampaui
56	Persentase sampah yang terkelola	%	58,70	60,70	62,28	66,00	67,00	72,28	Belum Tercapai
	<b>6</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>							
57	Persentase penduduk yang ber-KTP Elektronik	%	82,37	84,01	90,5	93,51	97,8	100	Belum Tercapai
58	Persentase penduduk yang ber-Kartu Keluarga (KK)	%	95,97	98,03	99,2	99,22	100	100	Sesuai



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
59	Persentase penduduk usia 0 s.d. 18 tahun yang ber-akta kelahiran	%	74,04	80,01	89,54	91,59	98,8	100	Belum Tercapai
<b>7</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>								
60	Persentase Usaha Ekonomi masyarakat pedesaan BUMDES Mandiri	%	9,76	4,55	5,56	24,46	26,26	26	Melampaui
61	Persentase Desa Maju	%	17,7	20,49	12,73	32,92	42,55	31,68	Melampaui
<b>8</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan KB</b>								
62	CBR ( Crude Birt Rate ): Kelahiran hidup pada pertengahan tahun	per 1000 KH	10,6	15,7	17,116	12,98	12,944	16	Belum Tercapai
63	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut KB	%	83,11	83,61	81,55	81,58	79	81,61	Belum Tercapai
<b>9</b>	<b>Perhubungan</b>								
64	Persentase Keselamatan Angkutan Darat	%	90,85	90,26	88,27	96,63	89,1	90	Belum Tercapai
<b>10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>								



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanguan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
65	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Poin	N/A	N/A	2,55	3,13	3,13	2,65	Melampaui
<b>11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>									
66	Persentase usaha mikro yang mandiri	%	N/A	0,5	1,05	1,53	1,83	1,75	Melampaui
67	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	N/A	16,48	18,15	20,31	20,7	20,5	Melampaui
<b>12 Penanaman Modal</b>									
68	Persentase Pertumbuhan nilai investasi	%	1,02	1,06	1,33	1,6	0,81	1	Belum Tercapai
69	Jumlah investor	unit usaha	5437	7628	5741	5035	7025	3247	Melampaui
<b>13 Kepemudaan dan Olahraga</b>									
70	Jumlah prestasi pemuda yang diperoleh ditingkat regional, nasional, dan internasional.	prestasi	10	10	10	43	12	5	Melampaui
71	Jumlah prestasi olahraga tingkat Regional, Nasional dan Internasional	prestasi	135	135	250	166	73	75	Belum Tercapai
<b>14 Statistik</b>									



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
72	Persentase data statistik yang diolah dan dianalisa	%	N/A	N/A	48	60	80	80	Sesuai
	<b>15</b>	<b>Persandian</b>							
73	Persentase jaringan OPD dan Kecamatan yang terintegrasi	%	N/A	N/A	68,75	88,89	91,67	81	Melampaui
	<b>16</b>	<b>Kebudayaan</b>							
74	Jumlah seni dan budaya daerah yang dilestarikan	kelompok	1	1	2	3	3	4	Belum Tercapai
	<b>17</b>	<b>Perpustakaan</b>							
75	Indeks Minat Baca Masyarakat	Poin	N/A	42,95	69	71,42	71,79	70	Melampaui
	<b>18</b>	<b>Kearsipan</b>							
76	Persentase lembaga yang menyelenggarakan kearsipan secara baku	%	14,73	17,87	20,05	22,46	25,12	25,12	Sesuai
	<b>C</b>	<b>Layanan Urusan Pilihan</b>							
	<b>1</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>							



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
77	Persentase peningkatan produksi budidaya air payau	%	9,26	1,1	0,2	0,83	2,85	0,5	Melampaui
78	Persentase peningkatan produksi budidaya air tawar	%	8,75	0,39	4,3	4,06	5,95	5	Melampaui
<b>2 Pariwisata</b>									
79	Rata - rata lama tinggal wisatawan	Hari	1	1	1	2	2	1	Melampaui
80	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	1.848.622	1.942.079	1.990.903	1.998.200	844.072	870.060	Belum Tercapai
<b>3 Pertanian</b>									
81	Produksi pertanian, perkebunan dan peternakan :								
	a. Padi	Kw	2.186.310	2.058.900	2.044.800	1.982.761	1.944.938	2.059.518	Belum Tercapai
	b. Tebu	Kw	3.721.064	3.086.659	3.257.662	3.508.624	3.233.461,1	2.946.388	Melampaui
	c. Daging	Kg	20.201.285	24.796.016	27.640.811	29.611.672	35.351.442	24.370.760	Melampaui
<b>4 Perdagangan</b>									
82	Nilai ekspor non migas	\$	1.748.281	1.740.212	1.753.114	1.818.590.740	1.237.624.295	500.000.000	Melampaui



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
	<b>5 Perindustrian</b>								
83	Persentase pertumbuhan usaha industri	%	0,42	0,72	0,45	0,78	0,86	0,77	Melampaui
	<b>6 Transmigrasi</b>								
84	Persentase transmigran yang berhasil (bekerja sendiri/membuka lapangan usaha atau ke orang lain)	%	35	45	60	80	100	60	Melampaui
	<b>D PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>								
	<b>1 Inspektorat</b>								
85	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	%	97,33	99,73	94,24	102,63	100	99,5	Melampaui
	<b>2 Perencanaan</b>								
86	Persentase program pembangunan PD dengan tingkat capaian hasil (outcome) $\geq$ 76%	%	84	95,8	93,7	97,92	93,75	90	Melampaui
87	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	30	59,5	64,5	72,54	90	55	Melampaui
	<b>3 Keuangan</b>								





No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
88	Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan	%	95,08	84,9	86,03	85,42	81,25	100	Belum Tercapai
89	Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal	%	99,82	99,805	99,812	98,73	99,483	99,745	Belum Tercapai
90	Persentase peningkatan Penerimaan pajak daerah	%	1,05	21,01	8,83	11,65	-9,97	-15,89	Melampaui
91	Persentase Realisasi Piutang	%	90,19	89,69	92,44	92,94	90,97	76,05	Melampaui
<b>4 Kepegawaian</b>									
92	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya	%	63,8	69,7	70,29	73,85	77,35	69	Melampaui
<b>5 Pendidikan dan Pelatihan</b>									
93	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya	%	N/A	10	25,48	12	18	18	Sesuai
<b>6 Penelitian dan Pengembangan</b>									
94	Persentase dokumen Penelitian/kajian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan pembangunan daerah	%	58	61	69	73,6	77	75	Melampaui
<b>E PENDUKUNG</b>									



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
	<b>1</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>							
95	Persentase rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
96	Persentase rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pembangunan b. Bidang Perekonomian c. Bidang Kesra d. Bidang PBJ e. Bidang Organisasi f. Bidang Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
	<b>2</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>							
97	Persentase penyelesaian produk hukum yang masuk dalam Prolegda	%	66,67	43,48	43,56	60	26	72	Belum Tercapai
	<b>F</b>	<b>Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>							
98	Indeks Toleransi	Poin	N/A	72,25	72,84	75,19	77,62	76,67	Melampaui
	<b>G</b>	<b>Kewilayahan</b>							



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
99	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan / PATEN (18 Kecamatan)	Nilai	83,54	80,07	83,38	86,49	89,817	84,6	Melampaui

Sumber: Bappeda kabupaten Sidoarjo



## Bab

# Gambaran Umum Keuangan Daerah

## III

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;



- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasikan program-program yang dicanangkan.

Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber penerimaan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo maka akan dilakukan analisis terhadap kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Analisis ini diperlukan dalam rangka menerjemahkan Visi, Misi, dan Prioritas Pembangunan Kepala Daerah ke dalam perencanaan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya alokasi anggaran tersebut akan diturunkan ke dalam dokumen Renja Perangkat



Daerah untuk mendukung program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan skala prioritas dan target capaiannya.

### **3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020).

APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Analisis terhadap APBD dilakukan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan untuk pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum komponen APBD terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pembahasan berikutnya terkait kinerja pelaksanaan APBD dan kebijakan masa lalu, dibagi dalam kinerja penerimaan daerah, yang terdiri dari Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, dan kinerja pengeluaran daerah, yang terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.



### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

#### **3.1.1.1 Kinerja Realisasi Penerimaan Daerah**

Penerimaan Daerah dalam APBD terdiri atas pendapatan dan penerimaan pembiayaan. Dalam subbab ini akan dianalisis kinerja realisasi penerimaan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Analisis ini dimaksudkan untuk mendapat informasi tentang kinerja pemerintah dalam mengelola penerimaan sehingga dalam proses membaca potensi penerimaan daerah ke depan juga akan komprehensif.

#### **Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah dikelompokkan atas tiga komponen pendapatan diantaranya: a) Pendapatan Asli Daerah; b) Pendapatan Transfer; dan c) Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Berikut merupakan data target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara rinci dapat disajikan dalam bentuk Tabel 3.1 berikut.



**Tabel 3.1. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo selama 5 Tahun Terakhir dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020**

No	Keterangan	Tahun					Rata-Rata Perumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	(%)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.668.041.957.746</b>	<b>4.045.685.362.111</b>	<b>4.347.740.625.234</b>	<b>4.444.626.346.623</b>	<b>4.422.599.399.218,15</b>	<b>4,87</b>
<b>1,1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1.335.283.958.792</b>	<b>1.671.806.819.695</b>	<b>1.700.721.306.613</b>	<b>1.689.953.213.261</b>	<i>1.809.832.433.911,15</i>	<b>8,34</b>
01.01.01	- Pajak Daerah	735.767.679.182	925.569.237.852	961.840.717.556	1.032.160.117.012	929.261.529.986,45	6,76
01.01.02	- Retribusi Daerah	106.606.736.349	80.087.712.759	93.100.506.077	72.709.215.824	58.931.135.490,00	-12,37
01.01.03	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.888.797.901	29.304.699.967	34.760.702.313	37.034.170.234	37.626.054.550,00	8,94
01.01.04	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	466.020.745.360	636.845.169.117	595.856.740.199	548.049.710.191	784.013.713.884,70	16,31
<b>1,2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.690.087.946.119</b>	<b>1.708.887.132.594</b>	<b>1.793.474.341.790</b>	<b>1.779.140.856.326</b>	<b>1.711.271.242.511,00</b>	<b>0,36</b>
01.02.01	Bagi Hasil Pajak	136.262.834.205	101.260.404.599	116.128.549.335	106.152.634.261	173.396.948.566,00	10,94
01.02.02	Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	21.185.296.251	18.518.868.976	69.683.433.462	78.935.493.725		44,24
01.02.03	- Dana Alokasi Umum	1.225.261.302.000	1.203.737.401.000	1.191.856.625.000	1.265.114.331.000	1.149.801.473.000,00	-1,43
01.02.04	- Dana Alokasi Khusus	307.378.513.663	385.370.458.019	415.805.733.813	328.938.397.340	388.072.820.945,00	7,59
<b>1,3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>642.670.052.835</b>	<b>664.991.409.822</b>	<b>853.544.976.831</b>	<b>975.532.277.036</b>	<b>901.495.722.796,00</b>	<b>9,63</b>
01.03.01	- Pendapatan Hibah	6.471.000.000	-	143.491.880.000	148.319.960.000	162.996.436.500,00	6,63
01.03.02	- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya	337.206.831.360	381.915.672.306	400.883.304.725	489.288.344.479	339.339.055.996,00	2,41
01.03.03	- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	243.578.494.975	268.220.391.016	292.400.305.606	324.541.207.057	386.155.714.800,00	12,28





No	Keterangan	Tahun					Rata-Rata Perumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	(%)
01.03.04	- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	55.413.726.500	14.855.346.500	16.769.486.500	13.382.765.500	13.004.515.500,00	-20,83
01.03.05	- Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-

Sumber: LRA Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, diolah



Berdasarkan data di atas selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 perkembangan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat diketahui tingkat peningkatan maupun penurunannya, dimana hampir semua sumber pendapatan mengalami kenaikan kecuali pada 3 (tiga) sumber pendapatan diantaranya: 1) retribusi daerah dengan rata-rata pertumbuhan minus 12,37% per tahun; 2) Dana Alokasi Umum 1,43%; 3) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dengan rata-rata pertumbuhan minus 20,83%.

**Tabel 3.2. Komposisi Pendapatan Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2020**

KOMPONEN PENDAPATAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN ASLI DAERAH	36,40%	41,32%	38,90%	38,02%	40,92%
DANA PERIMBANGAN	46,08%	42,24%	41,40%	40,03%	38,69%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17,52%	16,44%	19,70%	21,95%	20,38%

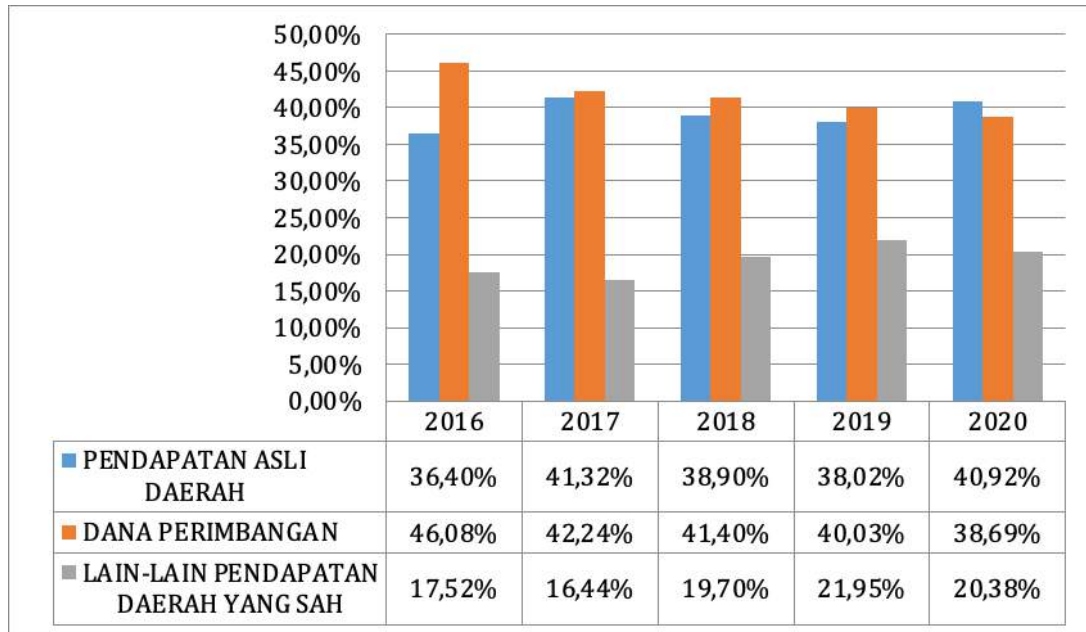
Sumber: LRA Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, diolah

Berdasarkan data di atas pendapatan asli daerah kinerjanya masih fluktuatif. Pada tahun 2017 sempat mengalami peningkatan sebesar 4,92 persen dari kinerja tahun 2016 yang sebesar 36,40 persen kemudian naik menjadi 41,32 persen. Sedangkan pada 2 (dua) tahun berikutnya mengalami penurunan berturut-turut hingga berada pada angka 38,02 persen. Perbaikan pendapatan daerah kembali terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 40,92 persen. Dengan demikian ke depan diperlukan kebijakan keuangan yang mendorong PAD untuk lebih stabil dan memiliki kecenderungan meningkat. Sedangkan dana perimbangan dalam periode tahun 2016-2020 proporsinya terhadap pendapatan daerah cenderung mengalami penurunan. Hal ini tergambar dari dana perimbangan tahun 2016 sebesar 46,08 persen menjadi 38,69% pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan adanya kemandirian atau kinerja yang terus membaik dari sisi pendapatan asli daerah. Sementara itu fluktuasi kinerja sumber pendapatan juga terjadi pada pos lain-lain



pendapatan daerah yang sah. Akan tetapi menuju arah yang positif dengan kecenderungan meningkat pada 2 (dua) tahun terakhir.

**Gambar 3.1. Proporsi PAD Kabupaten Sidoarjo**

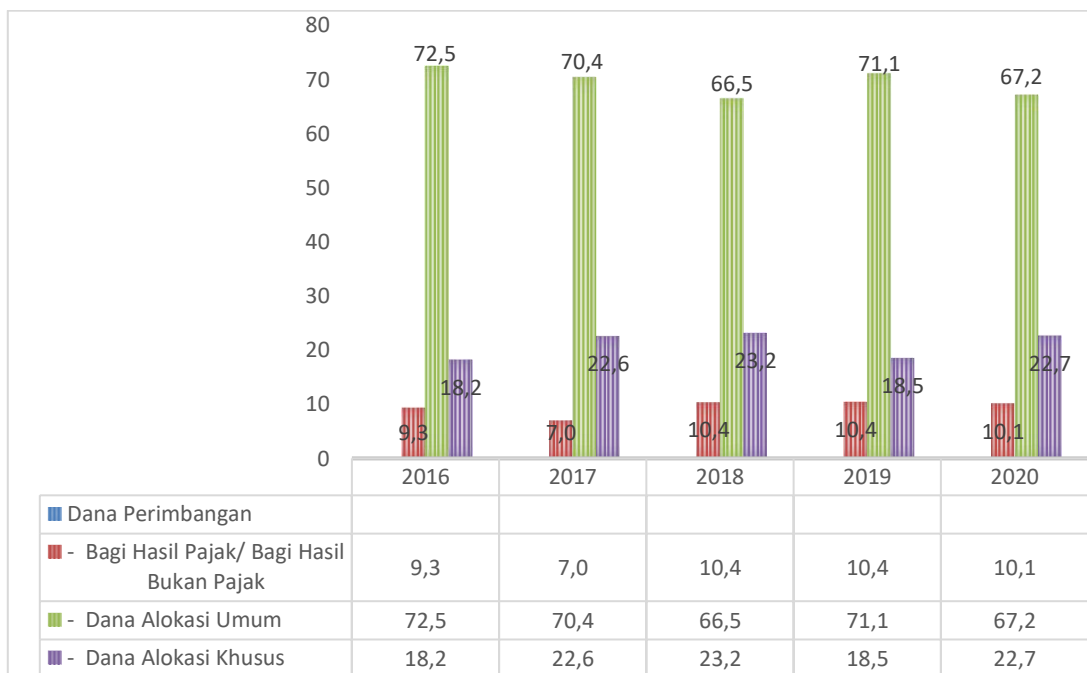


Sumber: LRA Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, diolah

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo komposisi paling besar ditopang oleh pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016-2019 secara umum terus mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan karena Covid-19. Hal ini menunjukkan kebijakan di bidang pajak sudah berada pada jalur yang positif. Sedangkan pada lain-lain PAD yang sah walaupun memiliki proporsi yang juga besar dalam komposisi pendapatan daerah secara kinerja masih fluktuatif.



**Gambar 3.2. Proporsi Dana Perimbangan Kabupaten Sidoarjo  
2016-2020**

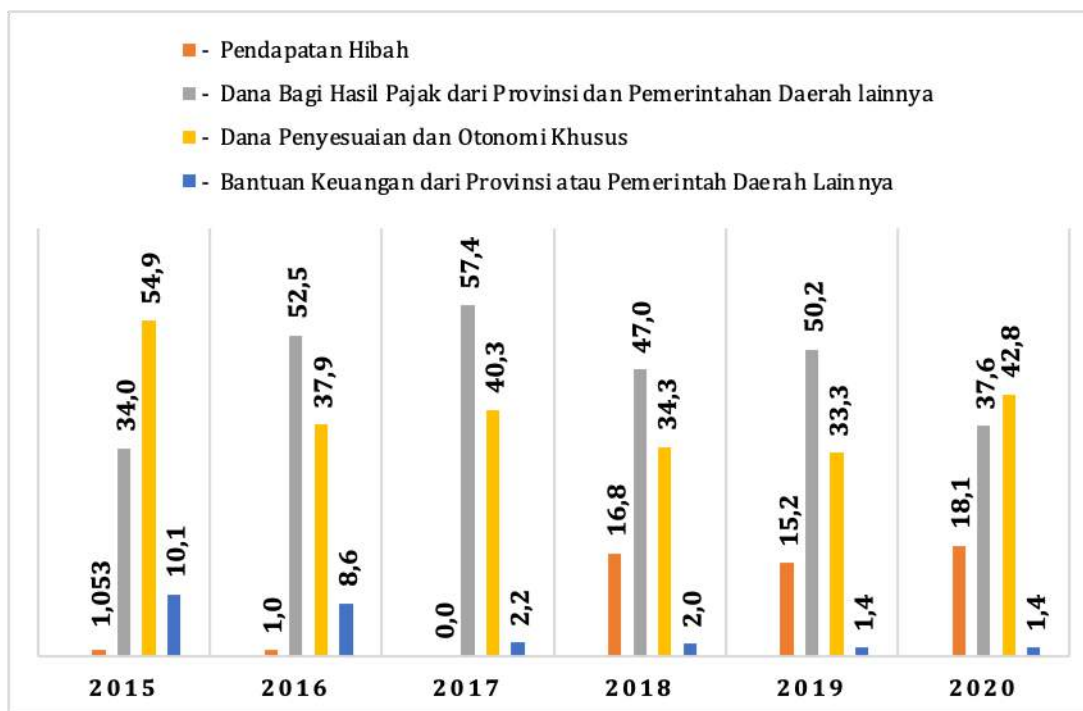


*Sumber: LRA Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, diolah*

Dana perimbangan yang merupakan komponen terbesar kedua dalam sumber pendapatan daerah. Bahkan kontribusi rata-rata dana perimbangan pada setiap tahun mencapai sekitar 40 persen dari total pendapatan daerah. Komposisi dana perimbangan dalam kurun waktu 2016-2020 terbesar disumbang oleh DAU dengan proporsi rata-rata per tahun sebesar 69,5 persen per tahun. Proporsi terbesar kedua disumbang oleh DAK dengan rata-rata 21 persen tiap tahun. Sementara itu Dana Bagi Hasil hanya memberikan proporsi rata-rata 9,4 persen per tahun.



**Gambar 3.3 Proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Sidoarjo 2015-2020**



Sumber: LRA Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, diolah

Sedangkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah, kontribusi terbesar berasal dari dana bagi hasil pajak dan dana penyesuaian otonomi khusus. Untuk pendapatan hibah dan bantuan keuangan dari provinsi memiliki kontribusi yang sangat kecil.

### 3.1.1.2 Kinerja Realisasi Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah terbagi menjadi belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Meskipun demikian, dalam sistematika APBD, pengeluaran pembiayaan masuk dalam pembiayaan daerah, bersama penerimaan pembiayaan. Secara garis besar, sistematika APBD tersusun dari pendapatan dikurangi belanja menghasilkan surplus dan defisit. Surplus dan defisit tersebut kemudian dimanfaatkan atau ditutup dengan pembiayaan sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA).



SILPA akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) yang masuk dalam penerimaan pembiayaan tahun berikutnya.

### **Belanja Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Dengan klasifikasi tersebut, maka penganggaran ke depan akan sama klasifikasinya dengan pelaporannya sehingga akan dapat diperbandingkan dan ditingkatkan kualitas informasi yang disajikan.



**Tabel 3.6. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	2	4	5	6	7	8	
	<b>BELANJA DAERAH</b>						
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>2.409.470.834.574</b>	<b>2.605.737.934.080</b>	<b>2.866.852.815.459</b>	<b>2.992.646.451.371</b>	<b>3.193.867.954.697</b>	<b>5,6</b>
	Belanja Pegawai	1.408.072.999.732	1.392.636.416.375	1.419.778.097.769	1.518.049.219.076	1.561.467.836.809	1,9
	Belanja Barang dan Jasa	821.320.659.095	1.018.408.325.491	1.200.045.203.424	1.230.594.387.495	1.287.762.203.916	11,7
	Belanja Hibah	132.100.932.100	145.911.030.742	189.370.311.602	175.282.849.800	258.306.138.972	5,0
	Belanja Bantuan Sosial	46.763.307.000	47.732.025.000	57.659.202.664	68.719.995.000	86.331.775.000	10,1
	Belanja Bantuan Keuangan	1.212.936.647	1.050.136.472	-	-	-	(31,19)
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>809.997.501.057</b>	<b>565.233.558.274</b>	<b>810.565.148.331</b>	<b>800.179.139.420</b>	<b>519.252.871.399</b>	<b>(0,4)</b>
	Belanja Tanah	45.145.480.619	13.925.175.416	111.445.578.574	102.592.173.458	21.840.061.455	159,0
	Belanja Peralatan dan Mesin	192.829.180.737	238.015.700.677	261.843.486.939	219.302.537.869	253.616.544.255	3,7
	Belanja Gedung dan Bangunan	154.811.189.816	131.448.158.786	178.090.821.546	210.285.515.035	105.322.853.162	8,7
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	387.696.216.367	179.512.077.430	255.926.019.047	263.657.865.714	135.395.341.859	(8,4)
	Belanja Aset Tetap Lainnya	28.598.403.865	1.924.114.075	2.790.480.025	3.280.525.684	749.086.218	13,2
	Belanja Aset Lainnya	917.029.653	408.331.890	468.762.200	1.060.521.660	2.328.984.450	3,9
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>2.853.921.413</b>	<b>872.826.534</b>		<b>73.224.000</b>	<b>131.517.638.794</b>	<b>875,81</b>
	Belanja Tidak Terduga	2.853.921.413	872.826.534	-	73.224.000	131.517.638.794	875,81



No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbu- han (%)
1	2	4	5	6	7	8	
4	<b>Transfer</b>	<b>429.296.994.484</b>	<b>576.468.803.167</b>	<b>511.119.847.119</b>	<b>551.823.579.193</b>	<b>586.023.483.275</b>	<b>17,0</b>
	Bagi Hasil Pajak	68.314.922.944	87.531.335.316	99.656.453.091	106.436.353.351	84.722.265.404	12,6
	Bagi Hasil Retribusi	15.354.413.632	13.790.115.843	8.303.392.065	8.222.736.963	7.808.972.934	-15,4
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	345.627.657.908	475.147.352.008	403.160.001.963	437.164.488.879	493.492.244.937	20,4
	<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>	<b>3.651.619.251.528</b>	<b>3.748.313.122.055</b>	<b>4.188.537.810.909</b>	<b>4.344.722.393.984</b>	<b>4.430.661.948.165</b>	<b>4,5</b>

Sumber: LRA Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, diolah





Berdasarkan tabel 3.6 dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun rata-rata pertumbuhan realisasi belanja operasi sebesar 7,46 persen per tahun. Di sisi lain untuk belanja modal mengalami rata-rata pertumbuhan minus 14,15 persen per tahun. Untuk belanja tidak terduga dalam 5 (lima) tahun terakhir bergerak fluktuatif, bahkan di tahun 2018 tidak terjadi transaksi belanja tidak terduga. Selanjutnya belanja untuk transfer mengalami rata-rata pertumbuhan yang terus naik setiap tahunnya yaitu sebesar 17,27 persen.

Dari postur realisasi belanja operasi kita dapat melihat bahwa belanja hibah rata-rata pertumbuhannya paling tinggi yaitu sebesar 20 persen disusul kemudian oleh belanja bantuan sosial sebesar 16,92 persen berbanding dengan belanja pegawai yang rata-rata pertumbuhannya hanya 2,66 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja operasional Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah semakin efisien. Sedangkan pada belanja modal, walaupun dalam kurun waktu 2016-2020 terjadi pertumbuhan rata-rata minus 14,15 persen dalam 5 (lima) periode anggaran. Namun jika dilihat lebih dalam dibalik pertumbuhan yang minus, terjadi rata-rata pertumbuhan yang cukup tinggi pada belanja tanah yaitu sebesar 200 persen. Rata-rata pertumbuhan positif juga terjadi pada belanja untuk transfer yaitu sebesar 10,30 persen per tahun.

Dari segi kebijakan alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, terlihat bahwa belanja operasi mendapat alokasi paling besar dari total belanja dengan proporsi mencapai rerata 72 persen di tiap tahunnya. Belanja pegawai masih menjadi belanja operasional yang terbesar yaitu 53 persen dari total belanja operasi disusul kemudian oleh belanja barang jasa yang rata-rata proporsinya sebesar 38 persen. Hal ini bisa diartikan dengan rata-rata pertumbuhan dan proporsi yang cukup besar pada belanja barang jasa bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya memperbaiki kualitas belanjanya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang semakin baik yaitu dengan menekan belanja pegawai dan terus meningkatkan belanja barang jasa dan bantuan sosialnya. Upaya peningkatan



layanan publik juga bisa dilihat dari proporsi belanja jalan, irigasi, dan jaringan yang mencapai 40 persen dari total belanja modal. Untuk lebih detail lengkapnya bisa dilihat dalam tabel 3.7 di bawah ini:

**Tabel 3.7 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Periode 2015-2020**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>BELANJA DAERAH</b>						
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>66%</b>	<b>66%</b>	<b>70%</b>	<b>68%</b>	<b>69%</b>	<b>83%</b>
	Belanja Pegawai	58%	58%	53%	50%	51%	49%
	Belanja Barang dan Jasa	33%	34%	39%	42%	41%	41%
	Belanja Hibah	6%	5%	6%	7%	6%	8%
	Belanja Bantuan Sosial	2%	2%	2%	2%	2%	3%
	Belanja Bantuan Keuangan	0,04%	0,05%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>26%</b>	<b>22%</b>	<b>15%</b>	<b>19%</b>	<b>18%</b>	<b>(35,11)%</b>
	Belanja Tanah	4%	6%	2%	14%	13%	(78,71)%
	Belanja Peralatan dan Mesin	21%	24%	42%	32%	27%	15,65%
	Belanja Gedung dan Bangunan	17%	19%	23%	22%	26%	(49,91)%
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	55%	48%	32%	32%	33%	(48,65)%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	1,66%	3,53%	0,34%	0,34%	0,41%	(77,17)%
	Belanja Aset Lainnya	0,33%	0,11%	0,07%	0,06%	0,13%	119,61%
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,002%</b>	<b>3,0%</b>
	Belanja Tidak Terduga	100%	100%	100%	0%	1,0	100%
<b>4</b>	<b>Transfer</b>	<b>9%</b>	<b>12%</b>	<b>15%</b>	<b>12%</b>	<b>13%</b>	<b>6,20%</b>
	Bagi Hasil Pajak	21%	16%	15%	19%	19%	(20,40)%
	Bagi Hasil Retribusi	5%	4%	2%	2%	1%	(5,03)%
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	73%	81%	82%	79%	79%	12,88%
	<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber: LRA Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, diolah

### 3.1.1.3 Kinerja Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah Kabupaten Sidoarjo dalam 5 (lima) tahun



terakhir selalu mengalami peningkatan. Penerimaan pembiayaan pada tahun 2016 sebesar Rp. 567.569.496.654 meningkat menjadi Rp. 1.125.220.244.892 pada tahun 2020.



**Tabel 3.8 Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertum- buhan (%)
1	2	4	5	6	7	8	
	<b>PEMBIAYAAN</b>						
<b>A</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>582.812.496.654</b>	<b>592.688.501.521</b>	<b>890.462.835.762</b>	<b>1.034.646.419.105</b>	<b>1.131.115.244.892</b>	<b>19,4</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	574.241.435.045	583.992.202.843,00	883.050.741.575	1.028.218.009.620	1.128.475.371.744	<b>19,8</b>
	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	
	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	8.571.061.609	8.696.298.678	7412094187	6.428.409.485	2.639.873.149	<b>(21,4)</b>
<b>B</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>15.243.000.000</b>	<b>7.010.000.000</b>	<b>6.285.000.000</b>	<b>6.075.000.000</b>	<b>5.895.000.000</b>	<b>(17,7)</b>
	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	15.243.000.000	7.010.000.000	6.285.000.000	6.075.000.000	5.895.000.000	<b>(17,7)</b>
	Pembiayaan Netto	<b>567.569.496.654</b>	<b>585.678.501.521</b>	<b>884.177.835.762</b>	<b>1.028.571.419.105</b>	<b>1.125.220.244.892</b>	<b>20,0</b>

Sumber: LRA Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, diolah



Dari tabel di atas tercermin bahwa besaran penerimaan pembiayaan semakin tahun semakin meningkat. Hal ini berbanding terbalik dengan pengeluaran pembiayaan yang memiliki kecenderungan menurun dalam kurun waktu lima tahun ini.

### **3.1.2 Neraca Daerah**

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan dan informasi mengenai fleksibilitas keuangan. Pemberian informasi tersebut merupakan upaya dan tindakan Pemerintah Daerah untuk menjalankan *good government governance* dan bentuk pertanggungjawaban atas posisi kekayaan daerah. Berikut ini tabel 3.9 perkembangan Neraca Daerah selama 5 tahun terakhir dan rata-rata pertumbuhannya.



**Tabel 3.9 Neraca Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2020**

	U R A I A N	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	Tahun 2020	Rata-Rata Perumbuhan (%)
	1	3	4	5	6	7	
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>7.428.890.575.851,89</b>	<b>15.770.942.197.245,20</b>	<b>17.377.441.188.340,00</b>	<b>20.794.692.034.467,40</b>	<b>21.264.200.469.428,10</b>	<b>30,8</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>901.610.350.760,14</b>	<b>1.331.699.649.220,30</b>	<b>1.353.850.275.099,76</b>	<b>1.552.183.861.973,44</b>	<b>1.518.344.311.363,68</b>	<b>11,6</b>
<b>1.1.1</b>	<b>KAS</b>	<b>585.683.651.226,09</b>	<b>882.961.741.575,52</b>	<b>1.028.129.009.620,28</b>	<b>1.128.386.371.743,57</b>	<b>1.106.084.911.309,32</b>	<b>15,3</b>
	Kas di Kas Daerah	517.282.891.028,14	816.712.936.637,55	907.898.755.914,84	1.073.882.258.471,28	881.685.233.040,29	13,4
	Kas di Bendahara Pengeluaran	146.152.051,23	115.961.263,40	-	-	-	-20,2
	Kas di Bendahara Penerimaan	16.134.519,00	57.734.500,00	-	2.107.000,00	458.743.500,00	71,5
	Kas di BLU	66.458.025.245,27	64.535.069.175,72	118.613.392.019,12	45.186.558.656,75	222.523.907.333,99	30,8
	Kas di Bendahara JKN	-	-	-	-	-	0,0
	Kas In Transit	-	-	-	-	-	0,0
	Kas di Bosreg	-	1.540.039.998,85	1.616.861.686,32	9.315.447.615,54	1.389.389.841,54	-17,9
	Kas Lainnya	1.780.448.382,45	-	-	-	27.637.593,50	-7,7
<b>1.1.2</b>	<b>PIUTANG</b>	<b>201.316.660.569,00</b>	<b>321.271.486.399,04</b>	<b>259.461.670.021,46</b>	<b>366.370.496.919,92</b>	<b>337.407.922.635,60</b>	<b>13,5</b>
	Piutang Pajak	318.214.632.697,54	340.991.567.938,99	380.978.853.143,25	413.172.989.739,83	460.003.048.517,78	9,1
	Penyisihan Piutang Pajak	-169.316.266.466	-179.348.184.870	-197.788.774.204	-216.600.114.974	-239.578.570.210	13,7
	Piutang Retribusi	3.569.401.239,00	6.327.566.540,00	6.221.281.050,00	6.178.098.000,00	6.107.034.840,00	20,2
	Penyisihan Piutang Retribusi	-2.057.210.412	-3.687.805.364	-4.949.977.196	-4.675.311.297	-4.769.580.696	27,0
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah	3.551.966.536,00	3.669.293.356,00	3.569.001.176,00	3.529.569.796,00	37.149.000,00	-1880,3
	Penyisihan Piutang TGRD	-3.515.266.536	-3.526.818.548	-3.515.266.536	-3.515.609.799	-3.515.366.536	0,0
	Piutang Lain-Lain	60.830.962.956,28	164.904.681.283,32	75.783.387.387,30	169.273.418.770,84	120.465.275.168,57	44,2
	Penyisihan Piutang Piutang Lain-Lain	-9.961.559.446	-8.058.813.937	-836.834.799	-992.543.316	-4.856.433.985	11,6
<b>1.1.3</b>	<b>PERSEDIAAN</b>	<b>114.007.796.540,88</b>	<b>127.115.051.862,40</b>	<b>65.990.868.490,19</b>	<b>57.328.593.660,70</b>	<b>74.613.856.503,41</b>	<b>-9,6</b>



	U R A I A N	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	Tahun 2020	Rata-Rata Perumbuhan (%)
	1	3	4	5	6	7	
	<b>BEBAN DI BAYAR DIMUKA</b>	<b>602.242.424,17</b>	<b>351.369.383,34</b>	<b>268.726.967,83</b>	<b>98.399.649,25</b>	<b>237.620.915,35</b>	<b>-11,7</b>
	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>481.006.363.793,63</b>	<b>511.405.920.724,60</b>	<b>532.297.356.695,86</b>	<b>541.767.510.262,90</b>	<b>553.266.692.773,61</b>	<b>3,5</b>
	<b>INVESTASI NON PERMANEN</b>	<b>8.839.946.040,59</b>	<b>9.771.976.676,79</b>	<b>8.209.560.390,36</b>	<b>7.366.351.445,50</b>	<b>5.608.325.013,31</b>	<b>-16,0</b>
	Investasi Non Permanen Lainnya	17.821.868.602,37	21.656.275.341,20	20.529.181.153,35	20.175.771.668,08	15.490.804.413,58	-4,0
	Penyisihan Investasi Non Permanen Tak Tertagih	-8.981.922.562	-11.884.298.664	-12.319.620.763	-12.809.420.223	-9.882.479.400	14,9
	<b>INVESTASI PERMANEN</b>	<b>472.166.417.753,04</b>	<b>501.633.944.047,81</b>	<b>524.087.796.305,50</b>	<b>534.401.158.817,40</b>	<b>547.658.367.760,30</b>	<b>3,9</b>
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	472.166.417.753,04	501.633.944.047,81	524.087.796.305,50	534.401.158.817,40	547.658.367.760,30	3,9
<b>1.2</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>5.509.241.185.482,53</b>	<b>13.603.007.190.205,70</b>	<b>15.043.881.929.663,10</b>	<b>18.253.241.778.383,70</b>	<b>18.740.252.557.669,80</b>	<b>39,1</b>
<b>1.2.1</b>	<b>TANAH</b>	<b>2.293.689.356.851,56</b>	<b>10.270.009.034.121,60</b>	<b>11.324.315.633.264,60</b>	<b>14.201.226.851.378,60</b>	<b>14.496.605.723.736,60</b>	<b>78,9</b>
<b>1.2.2</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>347.693.909.765,47</b>	<b>392.253.779.299,77</b>	<b>430.449.076.636,99</b>	<b>448.260.109.066,64</b>	<b>1.711.092.291.788,57</b>	<b>22,7</b>
	Harga Perolehan	1.109.650.475.015,38	1.285.622.436.737,30	-	-	-	9,3
	Akumulasi Penyusutan	-761.956.565.250	-893.368.657.438	-	-	-	10,6
	Alat alat Berat	-	-	72.942.638.946,67	86.977.855.308,66		4,8
	Akumulasi Penyusutan Alat alat Berat	-	-	-35.270.798.830	-41.306.518.044		4,3
	Alat Angkutan	-	-	240.432.182.581,50	250.016.292.031,69		1,0
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	-	-	-150.980.219.325	-167.410.421.267		2,7
	Ukur	-	-	10.776.696.311,00	10.986.002.994,00		0,5
	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-7.776.626.853	-8.490.393.630		2,3
	Alat Pertanian dan Peternakan	-	-	2.459.167.566,00	2.457.343.816,00		0,0
	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian dan Peternakan	-	-	-2.261.093.066	-2.339.496.566		0,9
	Alat -Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	426.838.298.788,21	427.190.023.304,08		0,0



	U R A I A N	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	Tahun 2020	Rata-Rata Perumbuhan (%)
	1	3	4	5	6	7	
	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-319.083.203.934	-320.260.178.387		0,1
	Alat -Alat Studio dan Komunikasi	-	-	56.180.573.982,22	55.677.918.596,43		-0,2
	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Studio dan Komunikasi	-	-	-39.245.948.430	-42.112.674.353		1,8
	Alat-Alat Kedokteran	-	-	350.616.622.175,93	381.500.319.959,28		2,2
	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Kedokteran	-	-	-262.214.327.986	-303.908.298.426		4,0
	Alat-Alat Laboratorium	-	-	46.289.098.182,14	47.342.243.970,03		0,6
	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Laboratorium	-	-	-26.528.639.157	-28.577.903.722		1,9
	Alat Keamanan/Persenjataan	-	-	350.957.000,00	435.907.000,00		6,1
	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan/Persenjataan	-	-	-327.046.500	-354.157.000		2,1
	Komputer	-	-	106.050.450.017,57	163.016.486.346,45		13,4
	Akumulasi Penyusutan Komputer	-	-	-58.508.347.263	-91.009.661.550		13,9
	Alat Eksplorasi	-	-	-	-	-	0,0
	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	-	-	-	-	-	0,0
	Alat Pengeboran	-	-	-	-	-	0,0
	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran	-	-	-	-	-	0,0
	Alat Produksi dan Pemurnian	-	-	-	-	-	0,0
	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi dan Pemurnian	-	-	-	-	-	0,0
	Alat Produksi dan Pemurnian	-	-	-	-	-	0,0
	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-	-	0,0





	U R A I A N	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	Tahun 2020	Rata-Rata Perumbuhan (%)
	1	3	4	5	6	7	
	Alat Keselamatan Kerja	-	-	21.707.500,00	333.128.500,00		358,7
	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-	-	-20.764.500	-79.920.200		71,2
	Alat Peraga	-	-	266.609.800,00	303.422.300,00		3,5
	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	-	-	-26.660.980	-57.003.210		28,5
	Peralatan Proses Produksi	-	-	-	-	-	0,0
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses Produksi	-	-	-	-	-	0,0
	Rambu – Rambu	-	-	24.524.615.279,38	32.921.484.204,10		8,6
	Akumulasi Penyusutan Rambu – Rambu	-	-	-5.349.519.850	-5.632.721.869		1,3
	Peralatan Olah Raga	-	-	368.809.600,00	889.306.100,00		35,3
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olah Raga	-	-	-76.154.420	-248.277.140		56,5
<b>1.2.3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>1.337.641.018.143,21</b>	<b>1.379.079.877.605,62</b>	<b>1.667.702.843.875,79</b>	<b>1.844.812.279.649,53</b>	<b>3.344.958.999.089,21</b>	<b>17,6</b>
	Bangunan dan Gedung	2.585.493.395.906,13	2.655.455.671.493,53	2.960.100.317.445,27	3.171.765.408.652,08		6,8
	Akumulasi Penyusutan Bangunan dan Gedung	-1.247.852.377.763	-1.276.375.793.888	-1.299.520.236.280	-1.338.593.682.400		2,5
	Bangunan Monumen	-	-	6.498.119.032,00	9.083.597.142,50		9,9
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen	-	-	-743.188.122	-938.048.469		6,6
	Bangunan Menara	-	-	-	276.000.000,00		0,0
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	-	-	-	-11.040.000		0,0
	Tugu/Titik Kontrol	-	-	1.402.310.000,00	3.331.145.840,56		34,4
	Akumulasi Penyusutan Tugu/Titik Kontrol	-	-	-34.478.200	-101.101.117		48,3
<b>1.2.4</b>	<b>JALAN , IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>1.339.121.676.271,79</b>	<b>1.317.777.830.285,77</b>	<b>1.482.482.416.718,93</b>	<b>1.633.675.860.417,33</b>	<b>4.182.312.718.864,58</b>	<b>20,9</b>
	Jalan dan Jembatan	1.950.379.128.374,69	2.017.424.429.372,05	2.067.085.532.768,29	2.322.316.637.933,75		6,2



	U R A I A N	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	Tahun 2020	Rata-Rata Perumbuhan (%)
	1	3	4	5	6	7	
	Akumulasi Penyusutan Jalan&Jembatan	-1.447.404.035.801,84	-1.527.981.626.923,94	-1.451.831.792.189,67	-1.593.612.892.249,38		3,8
	Instalasi	36.354.219.351,20	43.833.552.040,20	60.775.393.610,20	67.500.966.042,14		18,2
	Akumulasi Penyusutan Instalasi	-10.371.606.144,22	-12.143.308.151,58	-14.456.486.557,41	-17.171.329.871,35		17,8
	Jaringan	224.297.191.813,24	224.821.591.163,24	226.905.368.083,24	233.444.508.211,53		2,9
	Akumulasi Penyusutan Jaringan	-52.492.458.900,39	-61.430.660.554,30	-70.376.708.468,81	-79.637.981.740,11		16,3
	Irigasi	1.164.985.249.342,49	1.212.141.875.517,54	1.289.378.635.715,44	1.371.322.909.644,16		10,5
	Akumulasi Penyusutan Irigasi	-526.626.011.763,38	-578.888.022.177,44	-624.997.526.242,35	-670.486.957.553,41		9,1
<b>1.2.5</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>92.901.448.749,50</b>	<b>81.918.052.753,50</b>	<b>56.079.044.130,74</b>	<b>56.507.549.494,38</b>	<b>67.895.504.378,52</b>	<b>4,3</b>
	Buku Perpustakaan	41.653.253.739,50	42.863.415.904,50	39.828.994.731,00	18.048.301.391,52		<b>22,7</b>
	Barang bercorak kesenian/kebudayaan	12.784.991.203,00	11.940.638.038,00	11.673.009.403,00	12.022.806.653,00		9,3
	Akumulasi Penyusutan Barang bercorak kesenian/kebudayaan	-	-8.936.782.666,00	-8.706.572.896,60	-9.886.653.647,14		2,7
	Hewan /Ternak dan Tumbuhan	37.253.041.642,00	37.260.943.642,00	60.500.000,00	192.750.000,00		30,1
	Biota Perairan	-	-	-	-	-	0,0
	Tanaman	-	-	36.361.860.658,00	36.130.345.097,00		-0,2
	Barang Koleksi Non Budaya	-	-	11.700.000,00	-	-	0,0
	Akumulasi Penyusutan Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-4.680.000,00	-	-	0,0
	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	-	-	0,0
	<b>KONTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>98.193.775.701,00</b>	<b>161.968.616.139,49</b>	<b>82.852.915.036,08</b>	<b>68.759.128.377,25</b>	<b>85.520.722.657,72</b>	<b>244,8</b>
	Konstruksi dalam pengerjaan	98.193.775.701,00	161.968.616.139,49	82.852.915.036,08	68.759.128.377,25	85.520.722.657,72	244,8
<b>1.3</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>537.032.675.815,59</b>	<b>324.829.437.094,55</b>	<b>447.411.626.881,31</b>	<b>447.498.883.847,42</b>	<b>452.336.907.621,00</b>	<b>-0,5</b>



	U R A I A N	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	Tahun 2020	Rata-Rata Perumbuhan (%)
	1	3	4	5	6	7	
	<b>TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH</b>		<b>41.870.220,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.592.000,00</b>	-	<b>-32,6</b>
	<b>KEMITRAAN DENGAN FIHAK KETIGA</b>	<b>493.062.648.000,00</b>	<b>300.373.648.000,00</b>	<b>300.373.648.000,00</b>	<b>300.373.648.000,00</b>	<b>-27.895.893.998,75</b>	<b>227,5</b>
	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Fihak Ketiga	<b>-14.129.611.440,00</b>	<b>-17.662.014.300,00</b>	<b>-21.194.417.160,00</b>	<b>-24.726.820.020,00</b>	<b>-27.895.893.998,75</b>	21,3
	<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>	<b>26.786.357.415,83</b>	<b>27.691.260.165,83</b>	<b>29.269.552.048,83</b>	<b>30.295.539.998,83</b>	<b>33.014.152.698,83</b>	<b>8,0</b>
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	<b>-20.747.526.071,13</b>	<b>-23.003.018.500,43</b>	<b>-24.689.918.953,83</b>	<b>-26.907.490.277,23</b>	<b>-29.308.970.695,63</b>	10,7
	<b>ASET LAIN-LAIN</b>	<b>97.856.957.136,16</b>	<b>77.981.623.234,86</b>	<b>574.786.471.842,37</b>	<b>653.051.949.146,02</b>	<b>639.893.022.459,78</b>	<b>117,5</b>
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	<b>-45.796.149.225,27</b>	<b>-40.593.931.725,71</b>	<b>-411.136.208.896,06</b>	<b>-484.589.535.000,20</b>	<b>-459.515.545.843,23</b>	171,5
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>7.428.890.575.851,89</b>	<b>15.770.942.197.245,20</b>	<b>17.377.441.188.340,00</b>	<b>20.794.692.034.467,40</b>	<b>21.264.200.469.428,10</b>	<b>30,8</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>98.389.960.560,54</b>	<b>53.579.701.935,00</b>	<b>73.148.175.290,88</b>	<b>93.372.824.436,79</b>	<b>104.662.963.145,48</b>	<b>34,3</b>
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>98.389.960.560,54</b>	<b>53.579.701.935,00</b>	<b>73.148.175.290,88</b>	<b>93.372.824.436,79</b>	<b>104.662.963.145,48</b>	<b>34,3</b>
	Utang Pihak Ke Tiga	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>
	Utang Bunga	-	-	-	-	-	0,0
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-	0,0
	Utang Jangka Pendek Lainnya	91.495.250.843,00	46.666.314.504,00	63.950.062.287,00	71.125.319.724,00	84.037.823.786,46	<b>33,8</b>
	Pendapatan diterima dimuka	6.894.709.717,54	6.913.387.431,01	9.198.113.003,88	22.247.504.712,79	20.625.139.359,02	<b>46,9</b>
<b>2.2</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>
	Utang Bunga	-	-	-	-	-	0,0
	Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-	0,0
<b>3</b>	<b>EKUITAS DANA</b>	<b>7.330.500.615.291,35</b>	<b>15.717.362.495.310,20</b>	<b>17.304.293.013.049,10</b>	<b>20.701.319.210.030,70</b>	<b>21.159.537.506.282,60</b>	<b>31,0</b>



	U R A I A N	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	Tahun 2020	Rata-Rata Perumbuhan (%)
	1	3	4	5	6	7	
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>	-	-	-	-	-	0,0
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	-	-	-	-	0,0
	Pendapatan Ditangguhkan	-	-	-	-	-	0,0
	Cadangan Piutang	-	-	-	-	-	0,0
	Cadangan Persediaan	-	-	-	-	-	0,0
	Dana yang Harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek	-	-	-	-	-	0,0
<b>3.2</b>	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-	-	0,0
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	-	-	-	-	-	0,0
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	-	-	-	-	-	0,0
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>7.428.890.575.851,89</b>	<b>15.770.942.197.245,20</b>	<b>17.377.441.188.340,00</b>	<b>20.794.692.034.467,40</b>	<b>21.264.200.469.428,10</b>	<b>30,8</b>

Sumber: Buku Saku Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 2019, diolah



Perkembangan jumlah aset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengalami perkembangan, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 30,8 persen. Aset tersebut terdiri atas aset lancar (kas, piutang dan persediaan, dan beban dibayar di muka), investasi jangka panjang (investasi non permanen dan investasi permanen), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan), dana cadangan, aset lainnya (tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak kedua, aset tak berwujud, aset lainnya), semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.



**Tabel 3.10 Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo  
dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020**

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>Rasio Likuiditas</b>					
	Aset Lancar	901.610.350.760	1.331.699.649.220	1.353.850.275.100	1.552.183.861.973	1.518.344.311.364
	Persediaan	114.007.796.541	127.115.051.862	65.990.868.490	57.328.593.661	74.613.856.503
	Kewajiban Jangka Pendek	98.389.960.561	53.579.701.935	73.148.175.291	93.372.824.437	104.662.963.145
1	Rasio Lancar	9	25	19	17	15
2	Rasio Quick	8	22	18	16	14
<b>B</b>	<b>Rasio Solvabilitas</b>					
	Total Aset	7.428.890.575.852	15.770.942.197.245	17.377.441.188.340	20.794.692.034.467	21.264.200.469.428
	Total Hutang	98.389.960.561	53.579.701.935	73.148.175.291	93.372.824.437	104.662.963.145
	Total Ekuitas	7.330.500.615.291	15.717.362.495.310	17.304.293.013.049	20.701.319.210.031	21.159.537.506.283
1	DAR	1,32	0,34	0,42	0,45	0,49
2	DER	1,34	0,34	0,42	0,45	0,49
<b>C</b>	<b>Rasio Aktivitas</b>					
	Pendapatan Daerah	3.668.041.957.746	4.045.685.362.111	4.332.577.984.586	4.444.626.346.623	4.411.615.214.582
	Saldo Awal Piutang	212.901.526.143	201.316.660.569	321.271.486.399	259.461.670.021	366.370.496.920
	Saldo Akhir Piutang	201.316.660.569	321.271.486.399	259.461.670.021	366.370.496.920	337.407.922.636
1	Rata-Rata Umur Piutang	20,6	23,6	24,5	25,7	29,1
	Nilai Persediaan (Beban Persediaan)	852.776.523.038	1.005.301.070.170	1.232.548.401.622	1.239.256.662.325	1.270.476.941.073
	Saldo Awal Persediaan	145.463.660.483	114.007.796.541	127.115.051.862	65.990.868.490	57.328.593.661
	Saldo Akhir Persediaan	114.007.796.541	127.115.051.862	65.990.868.490	57.328.593.661	74.613.856.503
2	Rata-Rata Umur Persediaan	55,5	43,8	28,6	18,2	19,0

Sumber: Buku Saku Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 2019, diolah



Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa analisis terhadap kinerja Neraca Daerah yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan keuangan daerah adalah analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas dilakukan untuk menganalisis kemampuan kas Pemerintah Daerah dalam memenuhi operasional pemerintahan dan hutang jangka pendeknya. Analisis solvabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan aset dan ekuitas daerah dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah di masa mendatang. Terakhir, analisis rasio aktivitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat piutang daerah dan persediaan dapat dikonversi menjadi kas atau pelayanan.

Rasio likuiditas dianalisis menggunakan analisis rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Tabel di atas menunjukkan bahwa baik rasio lancar maupun rasio cepat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih fluktuatif. Kedua rasio tersebut jauh masih di atas 1, yang artinya kinerja kedua rasio tersebut menunjukkan tidak adanya gejala tekanan keuangan (*financial distress*) yang serius dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan, analisis rasio solvabilitas dilakukan dengan menghitung analisis rasio Debt to Assets Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER). DAR bertujuan untuk melihat dan menganalisis kemampuan aset dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Sedangkan, DER bertujuan untuk melihat dan menganalisis komposisi sumber pendanaan entitas dan kemampuan ekuitas dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Hasil analisis DAR dan DER menunjukkan nilai di sekitar 1%, bahkan di bawah 1 per 100, yang menggambarkan bahwa aset sangat mampu untuk memenuhi dan menutup kewajiban di masa mendatang, serta komposisi sumber pendanaan entitas hampir seluruhnya dari ekuitas. Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dilihat dari kinerja Neraca Daerah, sangat sehat.

Rata-rata Umur Piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Jika dilihat dari rasio rata-rata umur piutang, adanya kecenderungan penurunan,



hal ini berarti terjadi perbaikan kinerja piutang menjadi kas untuk operasional Pemerintah Daerah (antara 20-25 hari), dan pada tahun 2019 terjadi penurunan umur piutang. Jika dilihat dari besaran umur piutang, konversi piutang daerah menjadi kas relatif cukup rendah dan ini menunjukkan indikasi kinerja keuangan yang cukup baik.

Sedangkan, rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Dari analisis neraca menunjukkan adanya peningkatan rata-rata umur persediaan, hal ini menunjukkan adanya penurunan konversi persediaan untuk memenuhi pelayanan publik, jika dilihat dari umur persediaan (antara 7-38 hari). Hal ini menunjukkan perlu adanya kebijakan anggaran belanja persediaan yang lebih efisien. Secara keseluruhan kinerja keuangan dari analisis rasio Neraca menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki rasio keuangan yang cukup sehat dan kuat.

### **3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa kebijakan masa lalu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan analisis lebih lanjut atas hasil kinerja pelaksanaan APBD selama 5 tahun terakhir dan perkembangan Neraca Daerah. Kebijakan anggaran dan keuangan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir kemudian dapat menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Berikut analisis kedua kebijakan tersebut akan dijelaskan.

#### **3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran**

Dalam subbab ini dibahas mengenai proporsi belanja rutin pegawai terhadap total belanja dalam satu tahun anggaran. Hal ini dilakukan dalam rangka mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk operasional rutin aparatur dan kebijakan apa yang sekiranya perlu dilakukan dalam





melakukan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur. Seperti data yang tercermin dalam tabel 3.11 di bawah tentang proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran belanja, dimana proporsinya cenderung menurun meskipun terjadi kenaikan pada tahun 2019 dan 2020. Namun dalam lima tahun terakhir trendnya menurun. Proporsi pada tahun 2016 sebesar 38,40 persen kemudian turun menjadi 35,11 persen pada tahun 2020.

**Tabel 3.11. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Sidoarjo selama 2016-2020**

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
1	2016	1.408.072.999.732	3.666.862.251.528	38,40
2	2017	1.392.636.416.375	3.755.323.122.055	37,08
3	2018	1.419.778.097.769	4.194.822.810.909	33,85
4	2019	1.518.049.219.076	4.350.797.393.984	34,89
5	2020	1.561.467.836.809	4.447.568.370.395	35,11

Sumber data: BPKAD, diolah



### 3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah. Hal ini akan dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Dari tabel di bawah terlihat bahwa defisit hanya terjadi di tahun 2020 sebesar 24 Milyar. Sedangkan tahun 2016-2019 anggaran daerah Kabupaten Sidoarjo mengalami Surplus dengan surplus tertinggi berada di tahun 2017 sebesar 290 Milyar.

**Tabel 3.12. Analisis Realisasi Surplus (Defisit) Riil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>Realisasi Pendapatan Daerah</b>	3.668.041.957.746	4.045.685.362.111	4.332.577.984.586	4.444.626.346.623	4.422.599.399.218
Dikurangi realisasi:					
<b>Belanja Daerah</b>	3.651.619.251.528	3.748.313.122.055	4.188.537.810.909	4.344.722.393.984	4.441.673.370.395
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	15.243.000.000	7.010.000.000	6.285.000.000	6.075.000.000	5.895.000.000
<b>Surplus (Defisit) Riil</b>	<b>1.179.706.218</b>	<b>290.362.240.056</b>	<b>137.755.173.677</b>	<b>93.828.952.639</b>	<b>(24.968.971.177)</b>



**Tabel 3.13. Komposisi Penutup Defisit Riil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama 2016-2020**

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	98,53%	98,53%	99,17%	99,38%	99,77%
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1,47%	1,47%	0,83%	0,62%	0,23%
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Besarnya surplus riil dalam APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga berpengaruh terhadap kecenderungan SiLPA yang terus meningkat di setiap tahunnya. Proporsi SiLPA dalam menutup defisit riil berada di kisaran 98-99 persen di tiap tahunnya. Jumlah SiLPA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung mengalami kenaikan. Untuk mewujudkan komitmen penggunaan anggaran bagi terciptanya pelayanan publik yang maksimal dan terwujudnya kesejahteraan rakyat Sidoarjo maka kinerja ke depan harus diperbaiki, salah satunya dengan menurunkan angka SiLPA.

**Tabel 3.14. Realisasi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Sidoarjo selama 2016-2020**

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah SiLPA	<b>574.241.435.046</b>	<b>583.992.202.844</b>	<b>883.050.741.576</b>	<b>1.028.218.009.620</b>	<b>1.128.386.371.744</b>
2	Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	-	-
3	Pelampauan Dana Perimbangan	-	-	-	-	-
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-	-
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	-	-	-	-	-
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	-	-	-	-	-
	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Sidoarjo, diolah



### **3.3. Kerangka Pendanaan**

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja periodik wajib dan mengikat, serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan daerah setelah dikurangi dengan kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

#### **3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja**

Penetapan angka pertumbuhan untuk menentukan proyeksi pendapatan dilakukan dengan hanya mengakui angka pertumbuhan sebesar 50%, hal ini mempertimbangkan informasi-informasi kebijakan Pemerintah dan kondisi terkini terkait adanya dampak wabah Covid-19. Penyesuaian terhadap target Pajak dan Retribusi Daerah juga telah dilakukan serta penurunan dan relaksasi terhadap penerimaan dari Pendapatan Transfer juga perlu dipertimbangkan. Penurunan bagi hasil pajak/bukan pajak dari Pemerintah serta bagi hasil pajak provinsi juga harus diperhitungkan. Penerimaan dana transfer dari pusat dalam beberapa waktu ke depan kenaikannya juga akan dibatasi sebesar 10-20% dari realisasi Tahun Anggaran 2020. Hal ini sesuai dengan arahan pemerintah dalam menghadapi situasi pandemi *Covid-19*.



Selain itu, tahun dasar menggunakan anggaran pendapatan Tahun Anggaran 2020 setelah dilakukan penyesuaian APBD akibat adanya wabah Covid-19 yang tertuang dalam Perubahan APBD TA 2020. Adanya wabah nasional dan dunia berupa pandemi *covid-19* (virus corona) yang menyebabkan terjadinya bencana kesehatan dunia dan nasional, telah berdampak pada kondisi ekonomi dunia dan nasional yang sedang mengalami krisis yang sangat berat dan secara otomatis juga berdampak pada penurunan kapasitas fiskal. Sehingga perlu kejelian dan kehati-hatian dalam rangka menyusun proyeksi kebijakan keuangan daerah.

### **Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Otonomi daerah yang diamanatkan pada UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menuntut semua daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengelola sumber keuangannya sendiri. Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak potensi yang dapat dipergunakan untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan, terutama dari segi optimalisasi pendapatan. Pagu pendapatan dapat didorong melalui penggalan potensi PAD, dan perbaikan kinerja pemerintah untuk merencanakan besaran pagu DAU dan DAK yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat. Secara umum struktur pendapatan daerah setelah otonomi, sumber penerimaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten berasal dari (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pos pendapatan pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan, (3) Dana Alokasi Umum (DAU), (4) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan (5) Bagi Hasil Pajak dan Batuan Keuangan dari Propinsi.

Secara umum peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan pendekatan:

- 1) Intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo;



- 2) Ekstensifikasi pendapatan daerah yaitu menggali sumber-sumber pendapatan dengan melihat kemungkinan-kemungkinan terhadap pemungutan akan sumber-sumber pendapatan daerah yang belum ada selama ini, atau dengan kata lain menggali sumber-sumber pendapatan baru.
- 3) Optimalisasi penarikan pendapatan pajak dan retribusi dilakukan melalui pemanfaatan *information and communication technology* (ICT).
- 4) Proyeksi atas perhitungan pendapatan daerah harus berdasarkan pada pemetaan potensi dan kajian akademik.
- 5) Penyelesaian pajak dan retribusi terutang dioptimalkan melalui penagihan secara terus menerus dan disertai kajian mengenai cleansing data.

Sebagai upaya untuk mencapai target pendapatan daerah yang lebih baik maka perlu ditetapkan kebijakan peningkatan pendapatan daerah. Kebijakan tersebut berfokus pada peningkatan dan optimalisasi PAD khususnya pada penerimaan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat. PAD sebagai sumber penerimaan daerah merupakan indikator kekuatan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah sesuai misi Kabupaten Sidoarjo.

### **Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian layanan umum. Otonomi daerah menuntut daerah untuk bisa mengelola secara efisien dan efektif belanja daerah untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja, sebagai upaya meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah dan mengalokasikan belanja secara efisien serta merencanakan anggaran secara transparan dan akuntabilitas. Pendekatan anggaran kinerja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan



memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Secara konsep, kebijakan anggaran belanja daerah harus mendukung target capaian pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Pada jenis belanja yang bersifat strategis dengan nilai yang besar dapat dimungkinkan dengan menetapkan belanja dengan model pelaksanaan *multi-years* dan atau model pembayaran dengan *turn-keys*, yang pengalokasian dananya disepakati oleh DPRD dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan belanja untuk program dan kegiatan diarahkan untuk akselerasi pencapaian misi Kabupaten Sidoarjo sebagaimana berikut:

1. Melakukan efisiensi terhadap belanja operasional, antara lain belanja pegawai dan overhead cost di setiap Perangkat Daerah secara proporsional.
2. Belanja Daerah difokuskan pada urusan wajib pelayanan dasar dan 17 (tujuh belas) program prioritas yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi misi pembangunan kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026,
3. Kebijakan selektif dalam pembangunan infrastruktur, yang akan diprioritaskan pada pemenuhan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.
4. Kebijakan matching program lintas Perangkat Daerah maupun dengan pihak swasta.

### **Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Sedangkan Arah Kebijakan Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada sisi penerimaan pembiayaan akan diarahkan kepada beberapa hal sebagai berikut :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu



Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu merupakan estimasi selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah dan didefinisikan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Silpa yang ditimbulkan oleh adanya keggalan penyerapan anggaran akan ditekan seminimal mungkin untuk memastikan APBD di tahun berkenaan dapat terserap dengan baik sesuai target yang telah ditentukan. Sedangkan Silpa yang diperoleh atas keberhasilan efisiensi anggaran yang tidak berdampak pada pengurangan target pembangunan apat terus dilakukan.

b. Penerimaan kembali pengembalian Dana Bergulir

Penerimaan kembali pengembalian dana bergulir digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang berasal dari pengembalian angsuran pokok pinjaman dana bergulir. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada jenis-jenis penerimaan pembiayaan daerah.

c. Alternatif Pendanaan Non APBD

Untuk menunjang kinerja pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memiliki opsi alternatif pendanaan pembangunan daerah melalui beberapa kebijakan sebagai berikut;

**1) Pinjaman Daerah**

Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah. Pinjaman daerah bersumber dari :





- I. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri;
- II. Pemerintah Daerah lain;
- III. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- IV. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalkan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI); dan
- V. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

## **2) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/PPP)**

KPBU merupakan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dengan tujuan untuk **kepentingan umum** yang **sebagian** atau **seluruh** modalnya menggunakan sumber dari badan usaha dengan sebuah **pembagian risiko antar para pihak**. keterlibatan swasta bukan hanya akan mempercepat pembangunan infrastruktur, tapi juga meningkatkan efisiensi operasional serta menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih tinggi bagi pengguna akhir.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Pada saat ini telah diregulasi melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan



Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor 4 tahun 2015 tentang pelaksanaan KPBU, melalui alternative skema pembiayaan ini, diharapkan terjadi percepatan dalam pembangunan di Jawa Timur, khususnya bidang infrastruktur publik.

### **3) Obligasi Pemerintah Daerah.**

Obligasi daerah adalah salah satu sumber pinjaman daerah jangka menengah dan/atau jangka panjang yang bersumber dari Masyarakat, penerbitan obligasi daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang rupiah, namun efek yang diterbitkan tidak dijamin oleh Pemerintah. *Revenue Bond* adalah salah satu jenis obligasi pendapatan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan digunakan hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah.

### **4) Corporate Social Responsibility (CSR)**

Kinerja pembangunan yang telah dicapai tidak terlepas dari dukungan semua pihak, termasuk Dunia Usaha melalui pelaksanaan pelaksanaan Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) atau i (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Peran Pemerintah daerah dalam kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah memberikan data-data pembangunan pada bidang-bidang yang dapat menjadi item pilihan swasta untuk menyalurkan dana PKBL dan CSR-nya, sehingga pelaksanaan CSR/PKBL akan sangat membantu dalam pembiayaan program pembangunan pemerintah daerah. Oleh karena itu, peran tim fasilitasi CSR/PKBL harus lebih ditingkatkan, baik pada level provinsi maupun Kabupaten/kota. Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP), sebagai salah satu bentuk



kontribusi dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena kontribusi ini lebih didasarkan kepada kesukarelaan dan fasilitasi yang di berikan oleh pemerintah daerah diarahkan untuk memperluas dan mempercepat pencapaian target-target pembangunan daerah melalui penyediaan data base, sinergi dan sinkronisasi program, joint monitoring, dan pembinaan teknis.

#### **5) Kemitraan dengan Lembaga Internasional/NGO**

Pada pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri. Kerjasama daerah ini merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan daerah, terdiri atas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, dan promosi potensi daerah, serta objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Internasional disebut juga dengan 'NGO' (*Non Governmental Organization*) merupakan organisasi/lembaga internasional kegiatannya bertujuan memberikan bantuan atau pelayanan pada masyarakat secara sukarela. Keterlibatan Lembaga Internasional dalam proses pembangunan sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah keterbatasan sumberdaya yang dimiliki pemerintah, yaitu ketersediaan anggaran dalam menyediakan layanan publik serta bentuk partisipasi mitra pembangunan dalam kontribusinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan manfaat dari mitra kerjasama ini



diantaranya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjangkau daerah yang sulit dan belum terjangkau oleh program pemerintah daerah, *Transfer of knowledge*, inovasi pemberdayaan masyarakat, dan hasil baik dapat direplikasikan ke daerah lain.

## **6) PINA**

Pemerintah mengembangkan skema investasi yang murni tidak melibatkan Dana dari Pemerintah melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA), namun dapat berkolaborasi dengan proyek KPBU dalam pembangunan infrastruktur.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 diarahkan pada;

1. Penutupan defisit riil anggaran tahun berjalan, dimana pengeluaran pembiayaan ini banyak ditopang di komponen SILPA,
2. Pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi belanja yang urgent di masa depan, antara lain antisipasi Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan pada tahun 2024.
3. Penyertaan Modal pada badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kabupaten Sidoarjo. Dimana penyertaan modal ini bertujuan untuk memberikan stimulus kepada berkembangnya BUMD agar dapat memberikan peran yang lebih besar bagi penguatan ekonomi masyarakat.



**Tabel 3.15. Analisis Proyeksi Pendapatan, Penerimaan Pembiayaan, dan Penerimaan Daerah  
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama 2021-2026**

NO	URAIAN AKUN	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.210.818.676.819</b>	<b>4.551.523.575.104</b>	<b>4.756.204.499.021</b>	<b>4.964.444.926.657</b>	<b>5.176.575.896.156</b>	<b>5.392.961.607.769</b>
<b>1,1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.609.820.835.819</b>	<b>1.886.252.523.810</b>	<b>1.964.521.422.328</b>	<b>2.043.972.732.440</b>	<b>2.124.748.343.539</b>	<b>2.207.007.171.741</b>
1.1.1	Pajak Daerah	953.962.000.000,00	1.051.987.668.259,67	1.087.981.893.401,08	1.123.976.118.542,48	1.159.970.343.683,89	1.195.964.568.825,31
1.1.2	Retribusi Daerah	73.314.210.960,00	82.111.916.275,20	91.965.346.228,22	103.001.187.775,61	115.361.330.308,68	129.204.689.945,73
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.251.300.720,00	37.549.542.730,67	38.915.312.011,10	40.281.081.291,52	41.646.850.571,95	43.012.619.852,38
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	552.293.324.139,00	714.603.396.544,13	745.658.870.687,42	776.714.344.830,71	807.769.818.973,99	838.825.293.117,28
<b>1,2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.450.517.541.000</b>	<b>2.492.186.051.295</b>	<b>2.602.155.001.693</b>	<b>2.712.938.952.092</b>	<b>2.824.578.652.491</b>	<b>2.937.116.890.390</b>
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.014.317.541.000,00	2.166.186.051.294,53	2.259.855.001.693,31	2.353.523.952.092,09	2.447.192.902.490,84	2.540.861.852.889,62
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	436.200.000.000,00	326.000.000.000,00	342.300.000.000,00	359.415.000.000,00	377.385.750.000,00	396.255.037.500,00
<b>1,3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>150.480.300.000</b>	<b>173.085.000.000</b>	<b>189.528.075.000</b>	<b>207.533.242.125</b>	<b>227.248.900.127</b>	<b>248.837.545.639</b>
1.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	150.480.300.000,00	173.085.000.000,00	189.528.075.000,00	207.533.242.125,00	227.248.900.126,88	248.837.545.638,93
<b>2</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.123.000.000.000</b>	<b>851.532.477.952</b>	<b>793.188.845.262</b>	<b>743.747.232.557</b>	<b>698.312.000.811</b>	<b>648.004.864.488</b>
2,1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	1.122.500.000.000,00	844.507.477.951,90	785.637.595.261,81	735.168.420.056,51	688.704.247.686,24	637.366.723.706,97
2,2	Penerimaan Piutang Daerah		6.500.000.000,00	7.000.000.000,00	8.000.000.000,00	9.000.000.000,00	10.000.000.000,00
2,3	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	500.000.000,00	525.000.000,00	551.250.000,00	578.812.500,00	607.753.125,00	638.140.781,25
	<b>TOTAL PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>5.333.818.676.819</b>	<b>5.403.056.053.056</b>	<b>5.549.393.344.283</b>	<b>5.708.192.159.214</b>	<b>5.874.887.896.967</b>	<b>6.040.966.472.257</b>

Sumber: BPKAD Sidoarjo, diolah



Sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negerii No 86 Tahun 2017 Tabel T-B.10 dijelaskan bahwa pengeluaran dan belanja wajib mengikat dan prioritas utama terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan serta Insentif Pimpinan Daerah), Belanja Bunga, Belanja Subsidi, dan Belanja Bagi Hasil. Ditambah lagi dengan Pengeluaran Pembiayaan terutama untuk pembentukan Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Hutang dan Penyertaan Modal. Maka dengan itu tabel di bawah ini adalah tabel yang menggambarkan tentang realisasi belanja wajib mengikat dalam kurun waktu 2015-2020.



**Tabel 3.16. Rata-rata Pertumbuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama  
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama 2015-2020**

No	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>Total Belanja Wajib dan Mengikat</b>	<b>1,493,746,917,575</b>	<b>1,491,742,336,308</b>	<b>1,493,957,867,534</b>	<b>1,527,737,942,925</b>	<b>1,632,708,309,390</b>	<b>2.147.491.320.083</b>	<b>8,14</b>
	Belanja Pegawai	1,409,353,897,552	1,408,072,999,732	1,392,636,416,375	1,419,778,097,769	1,518,049,219,076	1.561.467.836.809	2,11
	Belanja Bunga			-	-	-		
	Belanja Subsidi			-	-	-	-	
	Belanja Bagi Hasil Pajak	67,203,416,123	68,314,922,944	87,531,335,316	99,656,453,091	106,436,353,351	493.492.244.936	82,82
	Belanja Bagi Hasil Retribusi	17,189,603,900	15,354,413,632	13,790,115,843	8,303,392,065	8,222,736,963	92.531.238.338	192,74
<b>B</b>	<b>Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>43,197,000,000</b>	<b>15,243,000,000</b>	<b>7,010,000,000</b>	<b>6,285,000,000</b>	<b>6,075,000,000</b>	<b>5.895.000.000</b>	<b>(27,07)</b>
	Pembentukan Dana Cadangan			0,00	0,00	0,00		



No	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	43,197,000,000	15,243,000,000	7,010,000,000	6,285,000,000	6,075,000,000	5.895.000.000	(27,07)
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri			-	-	-		
	Pemberian Pinjaman			0,00	0,00	0,00		
	Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga			0,00	-	-		
	<b>Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama</b>	<b>1,536,943,917,575</b>	<b>1,506,985,336,308</b>	<b>1,500,967,867,534</b>	<b>1,534,022,942,925</b>	<b>1,638,783,309,390</b>	<b>2.153.386.320.083</b>	<b>7,62</b>

Sumber: BPKAD Sidoarjo, diolah.





Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa belanja wajib mengikat mengalami kenaikan setiap tahun dengan besaran rata-rata 8,14 persen. Sedangkan di sisi pembiayaan Pemerintah kabupaten Sidoarjo hanya melakukan belanja pembiayaan pada penyertaan modal Pemerintah Daerah yang nilainya cenderung menurun di tiap tahunnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bahasan penentuan proyeksi pendapatan, khusus untuk proyeksi perlu mempertimbangkan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tertuang dalam Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 sebagai tahun dasar, setelah adanya penyesuaian kebijakan anggaran akibat adanya dampak wabah Covid-19. Dampak Covid-19 ini diperkirakan akan memakan waktu sampai dengan 2 tahun ke depan, atau sampai dengan tahun 2022. Informasi tersebut tentu akan berdampak pada perkiraan alokasi anggaran belanja pada tahun 2 tahun pertama, yaitu tahun 2021 dan tahun 2022.

Baru kemudian, pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 untuk menentukan proyeksi belanja tidak langsung dilakukan dengan mengkalikan proyeksi terakhir dengan pertumbuhan yang ditetapkan. Sedangkan, proyeksi realisasi pengeluaran pembiayaan yang kemungkinan dari penyertaan modal, dianggarkan berdasarkan kewajiban penyertaan modal daerah sesuai dengan Perda penyertaan modal. Dengan demikian proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat disajikan sebagaimana tabel 3.17 di bawah ini.



**Tabel 3.17. Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama  
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama 2021-2026**

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>Total Belanja Wajib dan Mengikat</b>	<b>1.741.025.675.133</b>	<b>1.909.398.369.848</b>	<b>1.923.572.024.057</b>	<b>1.938.923.676.364</b>	<b>1.954.574.208.416</b>	<b>1.970.632.017.192</b>
	Belanja Pegawai	1.635.778.054.037	1.802.551.699.126	1.813.123.268.079	1.824.130.659.347	1.835.296.404.148	1.846.657.218.582
	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	2.520.000.000	2.570.400.000	2.621.808.000	2.674.244.160	2.727.729.043	2.782.283.624
	Belanja Bagi Hasil	102.727.621.096	104.276.270.722	107.826.947.978	112.118.772.857	116.550.075.225	121.192.514.986
<b>B</b>	<b>Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>
	Pembentukan Dana Cadangan			-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.500.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri			-	-	-	-
	Pemberian Pinjaman			-	-	-	-
	Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga			-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.745.525.675.133</b>	<b>1.914.398.369.848</b>	<b>1.928.572.024.057</b>	<b>1.943.923.676.364</b>	<b>1.959.574.208.416</b>	<b>1.975.632.017.192</b>

Sumber: BPKAD, diolah



### **3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan**

Dalam kerangka pendanaan ini bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan yang berakhir tahun 2026, serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengetahui kapasitas fiskal daerah adalah dengan menghitung proyeksi pendapatan daerah dikurangi pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dikurangi belanja tertentu sehingga menghasilkan proyeksi kapasitas fiskal daerah selama 5 tahun mendatang.

Berikut perhitungan kapasitas fiskal daerah untuk pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 s.d tahun 2026 disajikan pada tabel 3.18 berikut



**Tabel 3.18. Proyeksi Kapasitas Fiskal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama 2021-2026**

NO	URAIAN AKUN	PROYEKSI KAPASITAS FISKAL					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I</b>	<b>Penerimaan</b>	<b>5.333.818.676.819</b>	<b>5.165.295.504.468</b>	<b>5.362.037.023.591</b>	<b>5.566.123.437.754</b>	<b>5.772.742.825.850</b>	<b>5.977.099.492.043</b>
	Proyeksi Pendapatan Daerah	4.210.818.676.819	4.515.295.504.468	4.702.037.023.591	4.891.123.437.754	5.082.742.825.850	5.277.099.492.043
	Proyeksi Penerimaan Pembiayaan	1.123.000.000.000	650.000.000.000	660.000.000.000	675.000.000.000	690.000.000.000	700.000.000.000
<b>II</b>	<b>Pengurangan</b>						
	Pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya:	2.639.735.685.242	2.815.236.173.432	2.832.879.164.288	2.851.875.171.763	2.871.353.849.827	2.891.432.816.462
	a. Pendapatan BLUD	875.611.889.000	872.924.553.128	875.674.553.128	878.562.053.128	881.593.928.128	884.777.396.878
	b. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	15.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000
	c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	55.000.000.000	55.000.000.000	57.750.000.000	60.637.500.000	63.669.375.000	66.852.843.750
	d. Dana Desa	298.963.136.000	298.963.136.000	298.963.136.000	298.963.136.000	298.963.136.000	298.963.136.000
	c. Pendapatan Hibah BOS Reguler	150.480.300.000	173.085.000.000	173.085.000.000	173.085.000.000	173.085.000.000	173.085.000.000
	d. DAK	356.168.453.000	327.876.417.128	327.876.417.128	327.876.417.128	327.876.417.128	327.876.417.128
	<b>Belanja Tertentu</b>	<b>1.764.123.796.242</b>	<b>1.942.311.620.304</b>	<b>1.957.204.611.160</b>	<b>1.973.313.118.635</b>	<b>1.989.759.921.699</b>	<b>2.006.655.419.584</b>
	a. Belanja Pegawai (ASN dan Non ASN)	1.528.796.417.046	1.707.612.171.557	1.718.183.740.510	1.729.191.131.778	1.740.356.876.579	1.751.717.691.013
	b. Belanja Bagi Hasil	102.727.621.096	104.276.279.722	107.826.947.978	112.118.772.857	116.550.075.225	121.192.514.986
	c. Alokasi Dana Desa	132.599.758.100	130.423.169.025	131.193.922.672	132.003.214.000	132.852.969.895	133.745.213.585
<b>III</b>	<b>Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Sidoarjo</b>	<b>2.694.082.991.577</b>	<b>2.350.059.331.036</b>	<b>2.529.157.859.303</b>	<b>2.714.248.265.991</b>	<b>2.901.388.976.023</b>	<b>3.085.666.675.581</b>

Sumber: BPKAD Sidoarjo, diolah



Penghitungan Proyeksi Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Sidoarjo ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Tabel 3.18 di atas menginformasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp.112.778.111.953,-. Situasi ini terjadi karena masih adanya dampak pandemic *Covid-19*. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan pendapatan daerah pada tahun 2022 yang cukup dalam. Namun dari tahun 2022 hingga tahun 2026 Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Sidoarjo diprediksi terus mengalami perbaikan.

Sedangkan untuk alokasi pendanaan, dibagi menjadi 3 prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Prioritas I adalah dialokasikan untuk pengeluaran untuk program-program pelayanan dasar;
- b. Prioritas II adalah dialokasikan untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih (Janji Politik) diluar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar; dan
- c. Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD.

Kebijakan alokasi anggaran untuk ketiga prioritas di atas tergambar dalam table di bawah ini:



**Tabel 3.16. Rencana Penggunaan Kapasitas Fiskal Pemerintah  
Kabupaten Sidoarjo selama 2021-2026**

No	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kapasitas Riil Keuangan/Kapasitas Fiskal	2.694.082.991.577	2.350.059.331.036	2.529.157.859.303	2.714.248.265.991	2.901.388.976.023	3.085.666.675.581
2	Prioritas I	1.347.041.495.789	1.175.029.665.518	1.264.578.929.652	1.357.124.132.996	1.450.694.488.012	1.542.833.337.791
	Prioritas II	808.224.897.473	705.017.799.311	758.747.357.791	814.274.479.797	870.416.692.807	925.700.002.674
	Prioritas III	538.816.598.315	470.011.866.207	505.831.571.861	542.849.653.198	580.277.795.205	617.133.335.116



# Bab

---

# Permasalahan dan Isu Strategis

# IV

Pada bagian ini akan disampaikan Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Tahun 2021-2026. Rumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Pembangunan Kabupaten Sidoarjo merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data *existing condition*, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

## 4.1 Permasalahan Pembangunan

Penetapan permasalahan pembangunan Kabupaten Sidoarjo dilakukan terhadap beberapa urusan penyelenggaraan pemerintahan yang terpilih. Identifikasi permasalahan dilakukan dalam *Forum Group Discussion* (FGD) Perangkat Daerah dan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan urusan serta dielaborasi dengan berbagai permasalahan riil yang dihadapi Perangkat Daerah. Permasalahan pembangunan adalah perbedaan/kesenjangan (*gap*) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi saat ini. Secara umum, permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut, disajikan pada tabel di bawah ini :



**Tabel 4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo  
Berdasarkan Urusan Pokok**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PERMASALAHAN</b>
1	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kualitas sarana dan prasarana Pendidikan belum merata di setiap sekolah,</li><li>- Perlu adanya pemerataan kualitas guru baik di tingkat SD sederajat maupun SMP sederajat.</li><li>- Angka partisipasi Murni (APM) tingkat SD Sederajat dan SPM Sederajat masih perlu ditingkatkan,</li></ul>
2	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Masih diperlukan upaya optimal untuk menekan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu secara berkelanjutan,</li><li>- Implementasi pelayanan BPJS Kesehatan masih perlu ditingkatkan dan menjangkau seluruh masyarakat miskin.</li><li>- Masih terbatasnya aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama bagi kelompok penduduk miskin, tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular,</li><li>- Perlunya peningkatan jangkauan penanganan gizi buruk dan upaya terpadu penanggulangan stunting</li><li>- Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap perlu ditingkatkan.*</li></ul>
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peningkatan kualitas jalan, jembatan dan dalam kondisi baik masih perlu ditingkatkan,</li></ul>





NO	URUSAN	PERMASALAHAN
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Masih relatif tingginya alih fungsi lahan pada areal persawahan / lahan produktif lainnya,</li><li>- Cakupan layanan irigasi masih dibawah kebutuhan</li><li>- Ketersediaan kapasitas jalan yang memadai perlu ditingkatkan untuk mendukung aktivitas perekonomian dan pengembangan kawasan,</li><li>- Implementasi RTRW yang perlu diimbangi dengan komitmen dan pengawasan,</li><li>- Penurunan luas genangan banjir di permukiman relatif lambat, sehingga masih diperlukan penataan secara komprehensif.</li><li>- Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum diimplementasikan secara optimal*</li><li>- Jumlah Jaringan Informasi Sumber Daya Air yang dibentuk*</li></ul>
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah sarana air bersih belum menjangkau seluruh permukiman masyarakat.</li><li>- Terjadinya penurunan kualitas permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan.</li><li>- Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan perlu ditingkatkan*.</li></ul>
5	Ketentraman, Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"><li>- Masih perlu peningkatan upaya mitigasi bencana di Kabupaten Sidoarjo.</li></ul>



NO	URUSAN	PERMASALAHAN
	dan Perlindungan Masyarakat	- Masih tingginya pelanggaran terhadap Perda Ketenteraman dan Ketertiban.
6	Sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah PMKS yang terus mengalami peningkatan,</li><li>- Distribusi kemiskinan tersebar baik di pelosok desa maupun di wilayah perkotaan</li><li>- Masih diperlukan validasi dan keterpaduan data kemiskinan secara dinamis <i>by name by address</i> lintas Perangkat Daerah (PD).</li></ul>
7	Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang meningkat tajam dari 4,72% di tahun 2019 menjadi 10,97% di tahun 2020 akibat dampak Pandemi Covid-19.</li><li>- Masih ada perusahaan yang belum membentuk / membuat sarana hubungan industrial.</li></ul>
8	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>- Upaya pengarusutamaan gender (PUG) pada level kebijakan dan penganggaran perlu ditingkatkan,</li><li>- Perlu penguatan PUG kepada masyarakat</li><li>- Jumlah kejadian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat,</li></ul>
9	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"><li>- Masih diperlukan upaya pengelolaan sampah terpadu dan berbasis masyarakat secara berkelanjutan</li><li>- Pengawasan dan penanganan limbah industri masih perlu ditingkatkan</li><li>- Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau masih relatif rendah.*</li></ul>



NO	URUSAN	PERMASALAHAN
10	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"><li>- Masih banyak masyarakat yang belum melakukan update atau perubahan data kependudukan</li><li>- Masih terdapat warga yang tinggal di Kabupaten Sidoarjo namun belum seluruhnya dilengkapi dengan surat keterangan pindah domisili (SKPWNI).</li><li>- Kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih rendah.</li></ul>
11	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"><li>- Masih terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum menjadi peserta KB aktif (akseptor).</li><li>- Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin masih relative rendah.*</li><li>- Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang KP perlu ditingkatkan, khususnya pada masyarakat miskin.</li></ul>
12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perlu penguatan kapasitas institusional desa untuk mendorong menjadi desa maju</li><li>- Sebaran program pembangunan desa masih didominasi oleh pembangunan, perlu didorong agar berorientasi pada pemberdayaan masyarakat</li></ul>
13	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Masih terjadinya kemacetan di berbagai titik akibat peningkatan aktivitas masyarakat,</li><li>- Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas yang meningkat</li></ul>



NO	URUSAN	PERMASALAHAN
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Turunnya jumlah penumpang yang diangkut oleh angkutan umum mengindikasikan kurang memadainya sarana transportasi umum dan meningkatnya jumlah kendaraan pribadi sebagai sumber kemacetan.</li></ul>
14	Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemanfaatan TIK dalam mendukung kualitas dan inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal.</li><li>- Masih adanya kesenjangan pemanfaatan Teknologi Informasi (<i>Digital Divide</i>) antara Desa dan Kota menyebabkan belum optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat</li></ul>
15	Koperasi dan Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"><li>- Masih relatif rendahnya koperasi yang berlandaskan jati diri koperasi, sehingga perlu pembinaan intensif,</li><li>- Kapasitas kelembagaan usaha mikro masih perlu ditingkatkan</li><li>- Perlu penguatan promosi produk local halal melalui berbagai media digital.</li></ul>
16	Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"><li>- Implementasi kemudahan berinvestasi di Kabupaten Sidoarjo perlu ditingkatkan melalui daya saing daerah,</li><li>- Investasi belum sepenuhnya diarahkan pada pendorong pertumbuhan ekonomi inklusif (Penyerapan tenaga kerja),</li></ul>
17	Kepemudaan dan Olah Raga	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peran pemuda dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan, melalui peningkatan prestasi kepemudaan,</li></ul>



NO	URUSAN	PERMASALAHAN
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Daya dukung sarana dan prasarana olahraga perlu ditingkatkan untuk mendorong prestasi dan aktivitas olahraga masyarakat.</li></ul>
18	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah,</li><li>- Pelestarian nilai-nilai budaya masih belum optimal dalam penyelamatan aset budaya,</li></ul>
19	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keberadaan kelembagaan petani yang masih bersifat formalitas dan belum menjadi pendorong sektor pertanian.</li><li>- Terbatasnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan</li><li>- Semakin rendahnya bahan organik tanah, serta masih terjadinya alih fungsi lahan pertanian.</li><li>- Infrastruktur pertanian yang belum menjangkau seluruh kecamatan di Sidoarjo.</li><li>- Aspek daya saing produk pertanian relatif masih rendah.</li><li>- Masih terbatasnya RPH modern yang berstandar SNI,</li><li>- Petugas Lapangan Pertanian belum memiliki peran yang dominan.</li><li>- Masih belum optimalnya Perlindungan usahatani</li><li>- Tingginya harga pakan ternak bagi petani.</li><li>- Peningkatan ketahanan pangan masih perlu dioptimalkan.</li></ul>
20	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Daya dukung sarana dan prasaranan Pasar Tradisional perlu ditingkatkan,</li></ul>



NO	URUSAN	PERMASALAHAN
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Perlu pengelolaan antara pasar modern dengan pasar tradisional, agar usaha sektor informal masyarakat dapat dilindungi,</li><li>- Belum optimalnya integrasi pemasaran hasil usaha mikro maupun home industri berbasis ekonomi digital,</li><li>- Optimalisasi Kerjasama antar daerah dan nasional untuk peningkatan promosi produk unggulan daerah.</li></ul>
21	Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perlunya penguatan komitmen pelaksanaan industri bersih (minimal polusi)</li><li>- Perlunya dukungan dan pembinaan bagi tumbuhkembang industri kreatif khususnya di kalangan pemuda</li></ul>
22	Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Produksi perikanan tangkap (Perairan Umum) cenderung stagnan di kisaran 383,780 kg maka diperlukan peningkatan SDM nelayan agar memiliki kapasitas meningkatkan nilai tambah hasil produksinya.</li><li>- Belum optimalnya sosialisasi kepada nelayan untuk menerapkan sistem penangkapan atau budidaya yang tidak merusak lingkungan.</li><li>- Belum tersedianya data yang memadai karena masih belum optimalnya sistem informasi basis data terutama data saluran tambak.</li></ul>
23	Penunjang Urusan pemerintahan (tatakelola)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nilai Indeks SPBE perlu ditingkatkan untuk menunjang perencanaan dan pengambilan keputusan.</li><li>- Perlunya peningkatan inovasi pelayanan publik</li></ul>



NO	URUSAN	PERMASALAHAN
		- Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah mengalami penurunan, sehingga tingkat kemandirian daerah dan derajat desentralisasi fiskal menjadi berkurang.

Sumber: Bappeda Kabupaten Sidoarjo (data diolah)

\*) Permasalahan penyelarasan dengan dokumen KLHS

## 4.2. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis daerah mencerminkan dinamika yang akan terjadi antara lain berbagai permasalahan yang muncul, sekaligus dapat menangkap peluang yang membantu pencapaian pembangunan Kabupaten Sidoarjo untuk jangka waktu 2021-2026. Terkait dengan hal tersebut maka isu-isu strategis di Kabupaten Sidoarjo diidentifikasi dari permasalahan di tingkat urusan terpilih dan sekaligus bersumber dari hasil telaah terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025; RPJMN Tahun 2020-2024; RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Agar lebih komprehensif, juga dilakukan telaah terhadap isu strategis internasional, isu strategis nasional dan isu strategis regional Jawa Timur.

### 4.2.1. Penelaahan Isu-Isu Strategis Internasional

Hasil telaah terhadap Isu-Isu Strategis berskala internasional yang erat kaitannya dengan pembangunan Kabupaten Sidoarjo di masa mendatang sebagaimana disajikan dalam paparan berikut ini.

#### A. Pengarusutamaan *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Konsep *Sustainable Development Goals (SDGs)* dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan *Millennium Development Goals (MDGs)* yang belum tercapai. Tujuan *MDGs* yang belum tercapai tersebut antara lain:



1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua;
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Meningkatkan kesehatan ibu;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG'S, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Tahun 2016-2030 antara lain:

- 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
- 3) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
- 4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- 6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan airdan sanitasi untuk semua;
- 7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;





- 8) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- 9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- 10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara;
- 11) Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- 12) Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- 13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragamanhayati;
- 16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

## **B. Adanya Kesenjangan Global dalam Pembangunan Manusia (*Global Inequality Human Development*)**

Paradigma baru dan pemahaman mengenai kesenjangan dalam pembangunan manusia (*human development*) merupakan salah satu hal utama yang ditekankan dalam laporan "*Human Development Report 2019*" oleh PBB. Lebih lanjut lagi diperlukan perspektif yang lebih menyeluruh dan luas terkait pemahaman kesenjangan dalam pembangunan manusia.

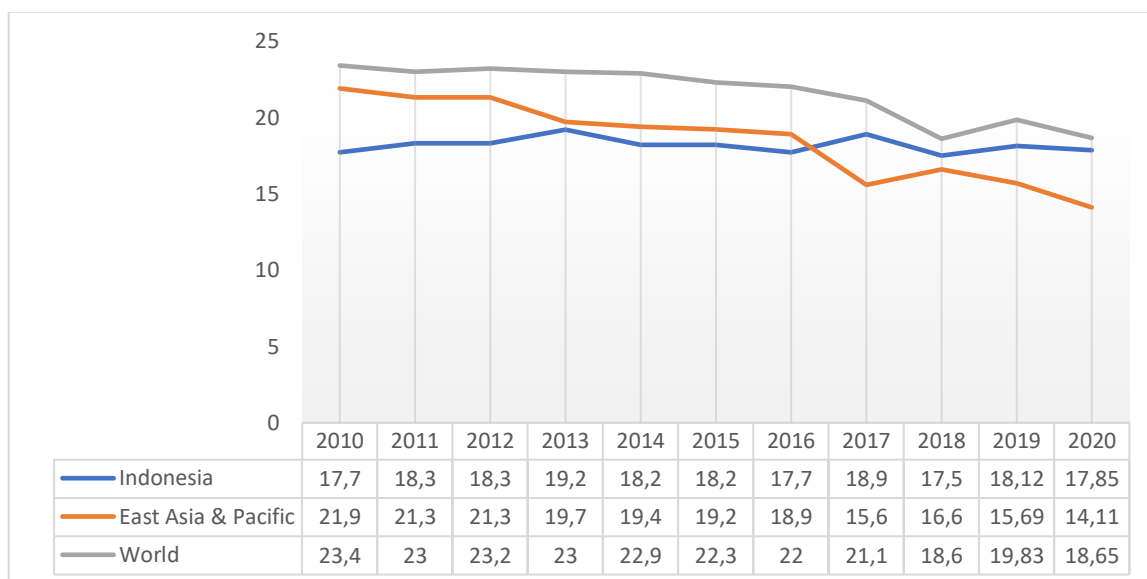


Kesenjangan diharapkan tidak lagi dilihat hanya sebagai indikator yang hanya memiliki dimensi tunggal. Kerangka pikir terbaru dalam melihat kesenjangan mengharuskan pemangku kepentingan melihat kesenjangan. *Pertama*, lebih dari sekedar melihat kesenjangan pendapatan (ekonomi) sebagai indikator utama. *Kedua*, kesenjangan arus dilihat lebih dari hanya sekedar angka jauh tidaknya dari nilai rata-rata kondisi umum. Sedangkan *ketiga*, kesenjangan tidak bisa dilihat dari sudut pandang statik yang didasari kondisi saat ini, tetapi harus mulai dilihat dengan sudut pandang dinamik, utamanya dampak perubahan-perubahan yang terjadi dimasa depan dan pengaruhnya terhadap upaya penanganan kesenjangan (*Human Development Reports, 2020*).

Pemahaman yang tepat terkait masalah kesenjangan akan sangat membantu kemajuan yang diterima sebagai hasil dari proses pembangunan. Laporan terakhir dari PBB menunjukkan bahwa, secara global, kemajuan pembangunan manusia terhambat sebesar hampir 20% sebagai akibat berbagai kesenjangan yang ada. Kesenjangan tersebut antara lain : pelayanan pendidikan yang tidak merata, pelayanan kesehatan yang tidak merata, serta kesenjangan dalam kualitas standar hidup. Selain itu laporan tersebut juga memprediksi bahwa dengan cara penanganan kesenjangan seperti saat ini maka setidaknya diperlukan waktu 100 tahun agar terwujud kesetaraan gender.



**Gambar 4.1 Persentase Perbandingan Hilangnya Pencapaian Nilai HDI Akibat Kesenjangan**



*Sumber: Human Development Reports, Diolah. 2020*

Secara umum, hingga tahun 2020, dampak kesenjangan di Indonesia terhadap berkurangnya nilai *Human Development Index* (HDI) masih lebih baik bila dibanding dengan rata-rata dunia. Akan tetapi bila dilihat dari tren jangka panjang terlihat bahwa tren yang terjadi di Indonesia dalam satu dekade terakhir relatif stagnan sedangkan tren dunia mengalami penurunan. Selain itu di kawasan Asia Timur dan Pasifik, secara rata-rata, terlihat tren yang terus menurun dengan signifikan dan bahkan sejak tahun 2017 mampu menunjukkan hasil yang lebih baik daripada kondisi di Indonesia. Dalam konteks persaingan global tentunya hal ini perlu mendapat perhatian serius bagi pemerintah Indonesia dan khususnya daerah-daerah di Indonesia yang berencana untuk bersaing secara global dan menjadi bagian dalam perekonomian global seperti Kabupaten Sidoarjo.



### C. Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 didefinisikan sebagai perubahan yang revolusioner berdasarkan berbagai teknologi terkini, dimana salah satu teknologi terkini yang sangat menonjol penerapannya saat ini adalah teknologi informatika. Oleh karena itu revolusi industri 4.0 bisa diartikan sebagai perubahan revolusioner yang terjadi ketika teknologi informasi diterapkan pada semua Industri. Di dalam revolusi industri ini yang terjadi adalah proses otomatisasi berkelanjutan dari praktik manufaktur dan industri tradisional dengan menggunakan teknologi pintar (*smart*) modern. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan terjadinya komunikasi mesin ke mesin (M2M) dalam skala besar dan aplikasi *internet of things* (IoT) yang terintegrasi untuk meningkatkan otomatisasi, meningkatkan komunikasi dan proses monitoring otomatis (*self monitoring*), serta produksi mesin pintar yang dapat menganalisis dan mendiagnosis masalah tanpa perlu campur tangan manusia (Moore, 2019).

Menurut schwab (2015) dalam revolusi industri ke-4 ini ditandai dengan penggabungan antara; perangkat keras, perangkat lunak, dan biologi (sistem fisik siber). Selain itu terjadi kemajuan yang signifikan dalam komunikasi dan konektivitas. Secara umum era ini ditandai dengan terobosan dalam teknologi baru di bidang-bidang seperti robotika, kecerdasan buatan, nanoteknologi, komputasi kuantum, bioteknologi, *internet of things*, industri *internet of things*, desentralisasi konsensus, teknologi nirkabel generasi kelima, percetakan 3 dimensi (3D) , dan kendaraan otonom penuh (*fully autonomous vehicles*).

Terdapat empat prinsip desain yang diidentifikasi sebagai bagian integral dari revolusi industri 4.0, yaitu; Pertama, "interkoneksi" yang menunjukkan kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui *Internet of things* (IoT), atau *internet of people* (IoP). Kedua, "transparansi informasi" dimana transparansi yang diberikan oleh teknologi Industri 4.0 memberi operator informasi yang komprehensif untuk menginformasikan keputusan.



Inter-konektivitas yang memungkinkan operator untuk mengumpulkan data dan informasi dalam jumlah besar dari semua titik dalam proses manufaktur, mengidentifikasi area utama yang dapat mengambil manfaat dari perbaikan untuk meningkatkan fungsionalitas. Ketiga adalah "asistensi teknis" yang berupa fasilitas teknologi dalam bentuk sistem untuk membantu manusia dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, serta kemampuan untuk membantu manusia dengan tugas-tugas yang sulit atau tidak aman/berbahaya. Dan, terakhir adalah "keputusan terdesentralisasi" yang merupakan kemampuan sistem fisik dunia maya untuk membuat keputusan sendiri dan untuk melakukan tugas mereka se-otonom mungkin (Gronau et al, 2016).

Revolusi Industri 4.0 memiliki tingkat kecepatan perubahan yang tidak pernah ada pada dalam sejarah revolusi industri sebelumnya. Revolusi Industri 4.0 memiliki kecepatan eksponensial, yaitu bergerak sedemikian dengan kelipatan yang luar biasa sehingga memiliki efek "disruption" industri di setiap negara pada keseluruhan sistem. *Disruption* ini terjadi secara meluas, mulai dari pemerintahan, ekonomi, hukum, politik, sampai penataan kota, konstruksi, pelayanan kesehatan, pendidikan, kompetisi bisnis dan juga hubungan-hubungan sosial. Pada bidang ekonomi pengaruh *disruption* ini sangat jelas terlihat. Bidang pekerjaan baru bermunculan dan sebagian pekerjaan lama berangsur hilang. Banyak pekerjaan biasanya dilakukan oleh tenaga manusia mulai digantikan oleh tenaga mesin atau robot, yang berakibat kepada hilangnya sumber penghidupan manusia pada bidang-bidang tersebut. Akan tetapi disisi lain memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru yang belum ada sebelumnya.

Pada saat ini sudah mulai bermunculan pekerjaan baru seperti : *data miner*, analisis *big data*, ilmuwan kecerdasan buatan (artificial intelligence), *cyber security*, *application designer*, *gene designer*, dan lain lain. Pada bidang organisasi dan institusi publik, *disruption* ini memaksa bidang tersebut untuk memikirkan ulang dan beradaptasi terkait bagaimana seharusnya mereka beroperasi di era ini. Pada masa revolusi industri sebelumnya, seorang



pengambil keputusan baik pada pemerintahan maupun organisasi bisnis dan sosial memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dan menganalisa sebuah masalah yang muncul dan memutuskan respon yang diperlukan. Hal tersebut tidak berlaku lagi untuk era revolusi industri 4.0. Dalam era ini respon serta pengambilan keputusan harus cepat, sehingga perlu memiliki integrasi data, kemampuan analisa *big data* dan perlu bantuan dari kecerdasan buatan.

Pada bidang sosial kemasyarakatan revolusi industri 4.0 memunculkan beberapa fenomena baru yang perlu diantisipasi agar tidak membawa efek negatif. Revolusi industri 4.0 mengharuskan masyarakat mampu untuk disatu sisi, menyerap, menampung dan menerima modernitas baru tetapi disisi lain, tetap bisa mengamalkan kepercayaan dan nilai-nilai luhur yang mereka percayai. Hal ini berdampak pada munculnya kegalauan tersendiri bagi masyarakat/komunitas tertentu. Fenomena lain yang muncul dalam era ini sebagai dampak dari proses digitalisasi adalah "*me-centered emergency*" (berfokus dan mementingkan diri sendiri) dalam masyarakat. Secara lebih luas dampak dari revolusi industri terlihat pada perubahan tingkah laku, pola komunikasi dan sosialisasi, pola belajar, privasi, kepemilikan, konsumsi, waktu bekerja, waktu istirahat, gaya hidup, dan sebagainya.

Bila disikapi dengan positif maka era ini sebenarnya membawa harapan, peluang dan juga tantangan. Peluang terbesar secara makro ekonomi adalah proses otomatisasi dan digitalisasi berpeluang meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang akan membuka pasar baru dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi salah satu tantangan terbesar dari sisi makro ekonomi terkait dengan masalah ketenagakerjaan, terutama karena akan hilangnya bebrbagai jenis pekerjaan tradisional karena digantikan dengan sistem, aplikasi dan mesin/robot. Hal ini tentunya harus mulai dipikirkan dan diantisipasi agar mampu meredam dampak negatif yang timbul.



## 4.2.2 Isu Kebijakan Nasional

### A. RPJMN Tahun 2020-2024

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yaitu *"TERWUJUDNYA INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"*. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional dalam Pembangunan Tahun 2020-2024 beserta isu strategisnya sebagai berikut.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
  - a. Keberlanjutan Sumber Daya Alam
  - b. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi
  - c. Transformasi Strukturan Berjalan Lambat
  - d. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.



Ketimpangan Antarwilayah, yang ditandai dengan tingginya kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia; ketimpangan pendapatan; terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia terutama Pulau Jawa; terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan Kawasan pedesaan, Kawasan transmigrasi, dan Kawasan perbatasan; dan belum optimalnya pengembangan ekonomi local di daerah tertinggal, desa dan Kawasan pedesaan, Kawasan transmigrasi, dan Kawasan perbatasan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
  - a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan
  - b. Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
  - c. Pemenuhan layanan dasar
  - d. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
  - e. Pengentasan kemiskinan
  - f. Peningkatan produktivitas dan daya saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
  - a. Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa
  - b. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia
  - c. Belum mantapnya Pendidikan karakter dan budi pekerti
  - d. Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama
  - e. Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan
  - f. Belum optimalnya peran keluarga
  - g. Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
  - a. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
  - b. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman
  - c. Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan
  - d. Keselamatan dan keamanan transportasi





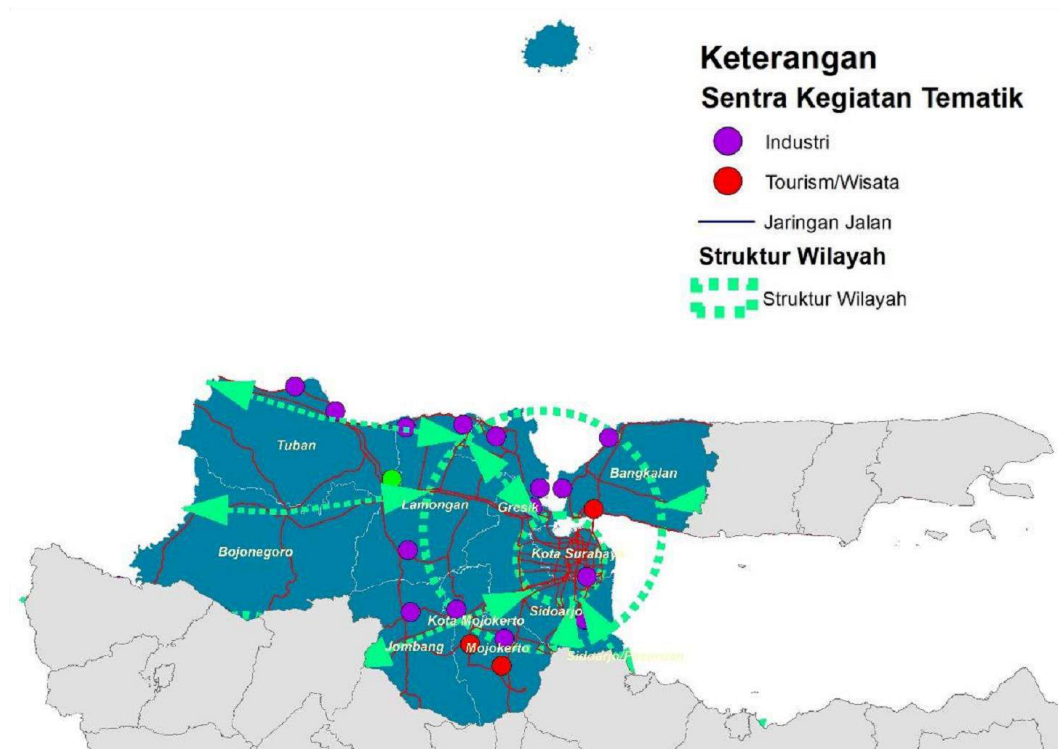
- e. Ketahanan kebencanaan infrastruktur
  - f. Waduk multiguna dan modernisasi irigasi
  - g. Konektivitas jalan, kereta api, laut, udara, dan darat
  - h. Infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, energi dan ketenagalistrikan, infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan, penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
  - i. Energi dan ketenagalistrikan meliputi keberlanjutan penyediaan, akses serta keterjangkauan dan kecukupan penyediaan
  - j. Transformasi digital meliputi penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta fasilitas pendukung transformasi digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
  - b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
  - c. Pembangunan rendah karbon
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- a. Konsolidasi demokrasi
  - b. Optimalisasi kebijakan luar negeri
  - c. Penegakan hukum nasional
  - d. Reformasi birokrasi dan tata kelola
  - e. Menjaga stabilitas keamanan nasional
- B. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya -Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.**



## Kawasan Prioritas Gerbangkertokusila

Kawasan Prioritas Gerbangkertokusila merupakan bentuk wilayah dari segi nodalitas (titik) dimana wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara kawasan pusat (inti) dan kawasan penyangganya (hinterland). Kawasan Prioritas Gerbangkertokusila terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya. Luas Kawasan Prioritas Gerbangkertokusila yang terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota adalah sekitar 10.841,99 km<sup>2</sup> dengan luas Kabupaten/Kota yang tertinggi berada di Kabupaten Bojonegoro, dan terendah di Kota Mojokerto.

**Gambar 4.2. Peta Kawasan prioritas Gerbangkertokusila**



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2019 dan Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018



Guna mendukung konektivitas antar wilayah di lingkup Gerbangkertosusila dan sekitarnya, maka sesuai dengan Perpres No. 80 Tahun 2019 terdapat beberapa proyek nasional yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

<b>NO</b>	<b>PROGRAM / PROYEK</b>	<b>ESTIMASI NILAI INVESTASI (Rp. MILIAR)</b>	<b>SUMBER DANA</b>
1	Pengembangan Bandara Internasional Juanda (Terminal 3)	9.140	BUMN
2	Pembangunan Fly Over Aloha	438	APBN
3	Pembangunan Frontage Road (FR) Gedangan – Waru.	270	APBN
4	Peningkatan Lingkar Timur Sidoarjo	278	APBN
5	Pembangunan Frantage Jalan Akses Bandara Juanda (Sidoarjo)	83	APBN
6	Pembangunan PLTSa di Kab. Sidoarjo	1.300	KPBU
7	Pembangunan Dam (muara laut) sungai Sidokare dan Sungai Pucang	170	APBN
8	Pembangunan Dam (muara laut) sungai Buntung	140	APBN
9	Pembangunan Fly Over Gedangan	480	APBN
10	Pembukaan Akses Tol ke Pasar Induk Puspa Agro	200	KPBU

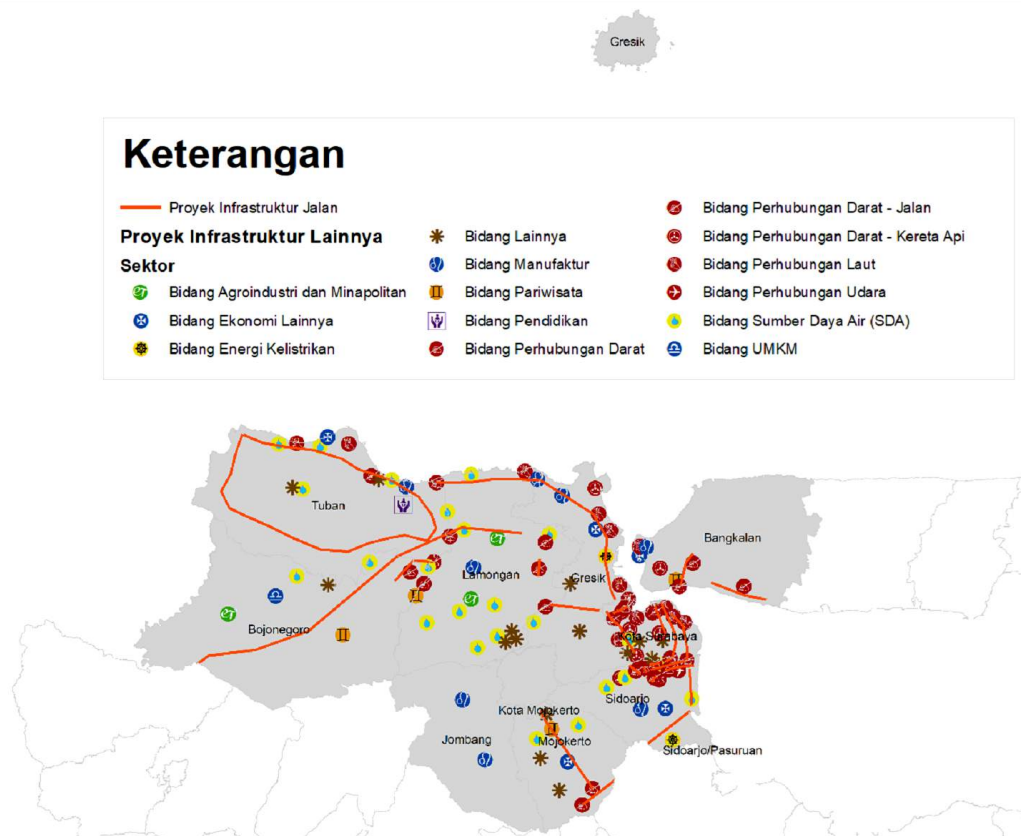
Sumber : Perpres 80 tahun 2019

Kebijakan, program / kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka percepatan Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila dalam kegiatan pengembangan infrastruktur yang dapat dilakukan seperti Transportasi Publik di Gerbangkertosusila, Pembangunan Jalan Tol Ngawi – Bojonegoro – Tuban – Lamongan – Manyar – Bunder, Pengembangan Jalan Tol Bandara Juanda –



Tanjung Perak (SERR), Pengendalian Banjir Kali Lamong, Pengembangan Bandara Internasional Juanda (Terminal 3), Pembangunan PLTSa di Kabupaten Sidoarjo.

**Gambar 4.3. Peta Lokasi Program di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila**



Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019

Prioritas utama pemicu percepatan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila adalah terbangunnya Klaster Migas dan Kondensat terutama dengan berdirinya Refinery Kilang Minyak dan Petrochemical di Tuban. Sebelumnya telah berdiri Oil Tank Terminal di Kabupaten Lamongan dan TTPI di Kabupaten Tuban. Dengan terbangunnya Industrialisasi Migas dan kondensat serta petrokimia tersebut, akan memicu berdirinya Kawasan-Kawasan Industri baik yang sudah dalam bentuk kawasan (dikelola oleh Pengembang Industrial Estate), maupun rencana-rencana



kawasan industri baru yang terdaftar di Kementerian Perindustrian. Sedangkan kegiatan ekonomi lain yang dikemas dalam Program Agropolitan/Minapolitan meliputi:

1. Pengembangan Agropolitan dan Penataan Pasar Lamongan – Kabupaten Lamongan;
2. Pengembangan Minapolitan Lamongan – Kabupaten Lamongan; dan
3. Pengembangan Agropolitan Bojonegoro – Kabupaten Bojonegoro.

Pengembangan wilayah Kabupaten Sidoarjo ke depan, harus berpijak pada kebijakan Perpres Nomor 80 tahun 2019 dan menjadi bagian penting dalam percepatan pembangunan daerah maupun regional Jawa Timur.

### **C. Dampak Covid-19 dan Kebijakan Pemerintah tentang Normal Baru (*New Normal*)**

Pandemi COVID-19 telah menyebar ke hampir semua negara di dunia dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun demikian waktu penyebaran dan lama pandemi, tingkat gangguan, serta kemampuan negara-negara didunia untuk meresponsnya sangat bervariasi. Negara yang lebih besar dan maju umumnya memiliki sumber daya dan infrastruktur yang lebih lengkap untuk menghadapi pandemi sehingga memberikan kemampuan *recovery* yang lebih cepat. Namun bagi negara-negara sedang berkembang, termasuk negara berkembang ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) memulai pandemi dengan fasilitas infrastruktur kesehatan yang kurang memadai dan hal ini menambah tingkat resiko serta dampaknya terhadap bidang kesehatan, sosial dan ekonomi.

Survei yang dilakukan kepada 100 eksekutif ASEAN menunjukkan bahwa 40 persen responden mempercayai bahwa akan ada serangan kedua virus covid19 yang berdampak pada pertumbuhan jangka panjang yang lambat serta pemulihan ekonomi dunia yang terjadi perlahan. Pada skenario ini intervensi ekonomi dipercaya akan efektif dalam menopang konsumsi utama tetapi kemungkinan serangan kedua virus Covid-19 akan mengarah ke



*lockdown* putaran kedua (McKinsey 2020). *Lockdown* putaran kedua ini yang dipercaya akan memperburuk kondisi ekonomi global serta memperlambat upaya pemulihan ekonomi secara global.

Berdasarkan prediksi berdasarkan skenario tersebut diatas, maka tingkat pertumbuhan ekonomi global akan menjadi minus 11,1% dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan Q4 2019. Beberapa negara berkembang ASEAN diprediksi akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam. Misalkan, Thailand (-13%), Malaysia (-13,5%), dan Filipina (-13,6%). Sementara itu, perekonomian Indonesia diperkirakan mengalami penurunan sebesar minus 10,3%, sedikit lebih bagus dibanding rata-rata penurunan ekonomi global. Pada akhir 2020 semua negara ini diprediksi akan mengalami pertumbuhan PDB tahunan yang lebih rendah dibandingkan dengan krisis keuangan global 2008, yaitu minus 11,5% hingga minus 5,3% untuk tahun 2020 dibandingkan dengan minus 2,2% pada 2008 dan menjadi 4,5% pada tahun 2009 (McKinsey 2020 & OECD 2010). Dari sisi perdagangan dunia negara-negara di Asia juga terdampak sangat parah. Perdagangan *intra-Asia* diperkirakan turun 13% dari 2019 hingga 2020. Sedangkan perdagangan dari Asia ke Barat turun sekitar 20%.

Pada hampir semua negara, upaya menangani pandemi covid-19 sedang berlangsung. Sejumlah besar intervensi kesehatan masyarakat telah diterapkan. Pada banyak negara, diberlakukan sistem perawatan kesehatan seperti dalam kondisi perang, seperti untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur, persediaan, dan pekerja terlatih. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk mengatasi kekurangan pasokan medis yang sangat dibutuhkan. Perang melawan COVID-19 adalah hal yang harus dimenangkan terlebih dahulu saat ini jika kita ingin merencanakan arah yang tepat secara ekonomi dan sosial menuju kondisi normal baru. Kondisi normal baru adalah realitas baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah tercapai kondisi normal baru maka dipastikan akan terjadi restrukturisasi dramatis terhadap tatanan ekonomi dan sosial.



Keberlangsungan bisnis dan keselamatan karyawan merupakan tantangan utama saat ini. Metode *work from home* atau pekerjaan jarak jauh menjadi metode utama dimasa ini. Hampir semua lini bisnis mengalami perlambatan dalam aktivitas mereka. Dalam dunia pendidikan institusi pendidikan beralih ke sistem belajar online sebagai upaya agar proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun ruang kelas fisik ditutup. Pada sisi lain, dunia usaha dan pemerintah dipaksa untuk memenuhi permintaan di area kritis yang mencakup makanan, persediaan rumah tangga, dan barang medis.

Pandemi Covid-19 telah berdampak sangat serius terhadap perekonomian dengan memunculkan krisis ekonomi dan sistem keuangan yang tidak terduga sebelumnya. Di sisi moneter Bank sentral diseluruh dunia menghadapi tantangan likuiditas dan solvabilitas bagi hampir semua sektor industri yang ada di negara masing-masing. Hal ini menjadi fokus bank sentral dan pemerintahan hampir diseluruh dunia agar sistem keuangan masing-masing negara tetap berfungsi dengan baik. Guncangan terhadap mata pencaharian atau ketenagakerjaan sebagai akibat besarnya tenaga kerja yang di PHK bisa menjadi yang terbesar dalam hampir satu abad (*McKinsey Global Institute, 2020*)

Menghadapi tantangan tersebut, ketahanan merupakan kebutuhan vital. Masalah jangka pendek pengelolaan kas untuk likuiditas dan solvabilitas jelas merupakan hal yang terpenting. Tetapi segera setelah itu, bisnis perlu bertindak berdasarkan rencana ketahanan yang lebih luas karena guncangan mulai meningkatkan struktur industri yang sudah mapan, mengatur ulang posisi kompetitif selamanya. Sebagian besar penduduk akan mengalami ketidakpastian dan tekanan keuangan pribadi. Pimpinan sektor publik, swasta, dan sosial perlu membuat keputusan "melalui siklus" yang sulit yang menyeimbangkan keberlanjutan ekonomi dan sosial, mengingat kohesi sosial sudah berada di bawah tekanan berat dari populisme dan tantangan lain yang ada sebelum pandemi Covid-19.

Ketika memasuki era normal baru maka tantangan pertama adalah mengembalikan bisnis ke operasional setelah penghentian atau penurunan



drastis dalam operasi mereka, dan ini tidak mudah. Pengalaman dari negara-negara yang telah recovery dan memasuki normal baru lebih awal, seperti China, menunjukkan bahwa banyak rantai pasokan input (*supply chain*) yang belum sepenuhnya siap melayani kebutuhan industri. Selain itu perlu waktu bagi pekerja dan karyawan untuk mencapai tingkat produktivitas tenaga kerja sebelumnya.

Pada konteks ini peran pemerintah pada masing-masing negara sangat penting untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Bagi negara berkembang seperti Indonesia permasalahan terkait upaya recovery pada dunia usaha menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Selain keterbatasan sumber daya dan dana bagi intervensi juga besarnya ketergantungan impor terhadap barang modal dan bahan baku industri. Kondisi dimana masih banyak rantai pasokan (*supply chain*) dari pihak luar negeri yang belum *recovery* sepenuhnya tentu perlu dipikirkan dengan baik cara mengatasinya agar industri dalam negeri bisa segera berangsur-angsur beroperasi dengan normal dan penyerapan tenaga kerja kembali normal.

Meskipun demikian, negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia masih memiliki beberapa potensi bagi percepatan *recovery* ekonomi mereka. Setidaknya terdapat lima sektor di Kabupaten Sidoarjo yang sangat berpotensi, yaitu; (1) Sebagai pusat manufaktur; (2) Infrastruktur hijau; (3) investasi dan pengembangan Usaha Mikro dan Koperasi berbasis digital; (4) Pelatihan kapasitas SDM, dan (5) Industri makanan bernilai tinggi. Potensi ini bila mampu dimanfaatkan dengan baik, maka tidak hanya dapat mempercepat pemulihan ekonomi tetapi juga meletakkan dasar untuk pertumbuhan yang berkelanjutan bagi Kabupaten Sidoarjo setelah era normal baru.

#### **4.2.3. Isu Strategis Jawa Timur**

##### **A. RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024**

Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan yaitu "*TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL,*





*SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG-ROYONG*". Visi tersebut diwujudkan melalui 4 (empat) misi yaitu :

1. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah.
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan.
3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan.
4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong-royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.

Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Timur berdasarkan RPJMD Tahun 2019-2024 meliputi :

1. Kualitas sumber daya manusia berbasis keagamaan dan kebudayaan;
  - a. Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, yang juga merupakan komponen variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan.
  - b. Penetapan sistem pendidikan yang baku bisa memberikan kepastian bagi setiap pengajar dan sekolah. Kelengkapan fasilitas serta pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap warga negara, khususnya daerah-daerah yang jauh dari pusat kota menjadi fokus Pemerintah



Provinsi Jawa Timur dimana banyak sekali masyarakat yang tidak memperoleh hak mereka dalam memperoleh pendidikan. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Rata-rata Lama Sekolah di Jawa Timur berada di posisi ke 2 (dua) terendah. Tentunya hal tersebut membutuhkan peningkatan upaya yang intensif.

- c. Perbaikan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Timur dimulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidiknya, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi para guru dan kepala sekolah, sehingga mereka mampu menjadi tenaga pendidik yang berkualitas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan bagi para siswanya. Peran guru sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan SDM yang handal tidak hanya pada sisi akademik namun juga memiliki karakter religius, memegang nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
- d. Selanjutnya pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Timur adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.
- e. Disamping itu kasus jumlah balita status gizi buruk meskipun telah mengalami penurunan tetap menjadi isu penting dikarenakan tingkat prevalensi *stunting* di Jawa Timur (32,7%) secara nasional berada di posisi ke-11 (sebelas) dan diatas angka nasional.

2. Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat
  - a. Secara umum, Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional selama periode 2016 s.d. 2020 cenderung melambat, dengan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur berada di atas Pertumbuhan



Ekonomi Nasional. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur pada tahun 2020 mencapai -2,39%. Sementara itu, Pertumbuhan Ekonomi Nasional tahun 2020 mencapai -2,07%.

- b. Isu kemiskinan masih menjadi isu penting yang belum dapat terselesaikan sampai dengan saat ini. Kemiskinan seringkali dipahami sebagai rendahnya tingkat kesejahteraan, padahal kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multi dimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan perkembangan persentase penduduk miskin di Jawa Timur, selama tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan dari 10,2 persen dengan jumlah penduduk miskin 4.056.000 jiwa pada tahun 2019 terus meningkat hingga menjadi 11,46 persen pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk miskin 4.585.970 jiwa, persentase dimaksud menunjukkan bahwa angka masih tergolong tinggi secara nasional dengan *progress* penurunannya cenderung lambat.
- c. Isu disparitas, dimana dari 7.721 desa di Jawa Timur pada Tahun 2018, masih terdapat 88 Desa Sangat Tertinggal, 1.569 Desa Tertinggal, 5.006 Desa Berkembang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen PPMD Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.
- d. Angka TPT Jawa Timur pada tahun 2020 mencapai 5,84 % sedangkan TPT Nasional mencapai 7,07 % hal ini menunjukkan terjadinya penurunan TPT di Jawa Timur. Kenaikan persentase TPT dimaksud disebabkan oleh pandemi Covid-19, perkembangan global antara lain bonus demografi, revolusi industri 4.0, serta dimungkinkan terjadinya perubahan jenis pekerjaan yang berbasis pada teknologi, pengurangan tenaga kerja manusia diganti peralatan atau mesin elektronika. Hal ini tentunya membutuhkan peningkatan upaya



penyiapan tenaga kerja yang kompetitif agar tantangan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

### 3. Tata Kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi

a. Kepala Daerah diharapkan memberikan perhatian untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil.

Adapun arahan Presiden RI terkait permasalahan efisiensi birokrasi:

- *E-Government*, dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat dapat mengakses dokumen-dokumen pemerintah, dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik;
- *Money Follow Program*, alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya: infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan pemerintahan berorientasi hasil);
- *Stop Pemborosan Anggaran*, seberapa pun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis, tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai;
- Fokus Kinerja bukan SPJ, ASN jangan terlalu menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurus SPJ.

b. Evaluasi tiap tahun perlu dilakukan untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di instansi pemerintah (pusat dan daerah) guna efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintah. Keberhasilan dalam implementasi SAKIP sangat berdampak pada efisiensi dalam penggunaan anggaran. SAKIP yang selama ini dianggap sebagai kumpulan dokumen semata ternyata mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara yang pada hakikatnya adalah dana yang terkumpul dari rakyat.



- c. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan tantangan kepada pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk :
  - Pengelolaan dan penataan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang efektif dan efisien;
  - Pembinaan ASN yang melayani, disiplin dan bersih;
  - Pengelolaan keuangan daerah dengan prioritas pemenuhan pelayanan dasar secara efektif, efisien dan akuntabel.
4. Demokrasi kewargaan
  - a. Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak belum menjadi dasar/prioritas pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur;
  - b. Masih belum terpenuhinya Jaminan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Perempuan dan Anak;
  - c. Rendahnya Komitmen dan Pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang;
  - d. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur Tahun 2017 Data Statistik sebesar 0,56%;
  - e. Masih rendahnya kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen kependudukan (eKTP, Akte Kelahiran dan Akte Kematian);
  - f. Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2019 sudah harus serentak di berlakukan; serta Peningkatan Pelayanan dengan Go-Digital – Tanda Tangan Elektronik (TTE).
5. Pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
  - a. Tantangan pengembangan wilayah di Jawa Timur adalah aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan potensi di Kawasan Lingkar Wilis, Lingkar Bromo, Lingkar Ijen, Gerbangkertosusila, Koridor Maritim Jawa Madura, dan



Koridor Maritim Selatan Jawa. Di wilayah Mataraman, potensi pariwisata dan industri berbasis agro dan maritim di pesisir selatan, belum didukung dengan ketersediaan akses pelabuhan barang dan bandara.

- b. Pada penyediaan infrastruktur sumber daya air adalah percepatan pembangunan waduk dan tampungan air baku skala besar sebagai upaya penyediaan air baku untuk kegiatan pertanian, industri maupun rumah tangga. Infrastruktur sumber daya air merupakan bagian penting dalam upaya mendukung ketahanan pangan, sehingga perlu integrasi pengelolaan sumber air permukaan dari hulu sampai dengan hilir yang meliputi jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier pada semua kewenangan Daerah Irigasi (DI).
- c. Pemenuhan cakupan layanan dasar perumahan dan permukiman antara lain penyediaan air minum regional, penyediaan system pengelolaan air limbah perkotaan, dan Pembangunan TPA Regional. Disisi lain pemenuhan *Backlog* rumah yang masih terbatas dan penanganan kawasan kumuh masih belum optimal, hal ini dikarenakan penanganan Kawasan kumuh belum dilaksanakan secara terintegrasi.
- d. Pemenuhan cakupan pelayanan infrastruktur dalam rangka mengurangi kemiskinan dan ketimpangan wilayah terkendala oleh keterbatasan sumber pendanaan pemerintah, untuk itu diperlukan upaya alternative dalam penyediaan sumber pendanaan non APBD.
- e. Kejadian bencana sering menimbulkan dampak yang begitu besar bagi masyarakat dikarenakan masih rendahnya kesadaran terhadap resiko dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

### **4.3. Isu-Isu Strategis Kabupaten Sidoarjo**

Mengacu pada permasalahan pembangunan yang telah disampaikan di atas, selanjutnya berpijak pada hasil penelaahan isu-isu strategis tingkat internasional, nasional dan lokal, maka dapat dirumuskan isu startegis pembangunan Kabupaten Sidoarjo lebih komprehensif. Isu Strategis



Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026, sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Isu-isu Strategis pembangunan Kabupaten Sidoarjo merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi dengan dinamika isu-isu strategis di level internasional, nasional dan regional Jawa Timur. Isu Strategis merupakan acuan yang menggerakkan dan mengarahkan pembangunan Kabupaten Sidoarjo pada pencapaian visi pembangunan lima tahun ke depan. Ketepatan dalam perumusan Isu Strategis sangat menentukan dalam penentuan Arah Kebijakan RPJMD. Isu Strategis Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

**1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.**

- a. Mewujudkan *good governance* melalui pengelolaan pemerintahan yang Tangkas, Transparan, Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
- b. Penguatan komitmen ASN, penyederhanaan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik melalui inovasi berbasis *Information and Communication Technology* (ICT).
- c. Pengembangan kualitas ASN secara *merit system* serta berkelanjutan.
- d. Pemantapan sistim informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas serta mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- e. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan investasi.
- f. Meningkatkan kualitas tatakelola dan kemandirian Desa.

**2. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Ekonomi, Pengembangan Investasi, Perluasan Lapangan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan.**

- a. Menciptakan kebijakan perekonomian yang kondusif bagi percepatan pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19, utama sektor informal dan usaha mikro,



- b. Memperluas Lapangan Kerja melalui kemitraan dengan swasta dan penciptaan wirausaha.
- c. Penguatan Sinergi *Pentahelix* (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, Lembaga Pendidikan dan media) dalam menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
- d. Mengembangkan nilai tambah (*value added*) komoditas unggulan lokal yang halal dan mampu berdaya saing serta berkelanjutan.
- e. Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk halal lokal berbasis *on line* yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen.
- f. Mendorong kemudahan investasi baru, berkembangnya ekonomi digital melalui *start up* bisnis dan industry kreatif.
- g. Peningkatan performa BUMD sebagai badan usaha profit yang juga dapat memberikan support bagi ekonomi masyarakat.
- h. Pengembangan pariwisata dan penunjang pariwisata perkotaan, yang mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi tumbuhkembangnya ekonomi lokal dan Usaha Mikro.
- i. Pengembangan pertanian berbasis teknologi dan penguatan sistim ketahanan pangan daerah.

### **3. Pemantapan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing dan Berkarakter.**

Pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) mendasari isu ini, mengingat investasi pada sumberdaya manusia memiliki dampak positif yang besar dalam jangka Panjang pada seluruh aspek secara berkelanjutan. Berbagai variable yang dapat mengilustrasikan isu ini bagi kabupaten Sidoarjo antara lain;

- a. Mendorong peningkatan kualitas dan pemerataan Pendidikan yang memiliki daya saing regional dan memiliki kharakter budi pekerti yang baik.
- b. Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka stunting.





- c. Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah dan tenaga pendidik di seluruh wilayah.
- d. Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata.
- e. Pengelolaan potensi dan peningkatan peran pemuda yang mampu berperan dalam semua sektor pembangunan.
- f. Cakupan layanan jaminan Pendidikan dan Kesehatan, kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi secara sistem bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat terdampak Pandemi Covid-19.
- g. Prioritas implementasi pencapaian target SDGs pada indikator 1 sampai dengan nomor 9 dan dan nomor 11, yaitu menyangkut, kemiskinan, sanitasi lingkungan dan tatakota.
- h. Meningkatkan kestaraan dan kehidupan yang inklusif bagi disabilitas dan seluruh elemen masyarakat.

#### **4. Penataan Kota, Implementasi Sistik Transportasi Terpadu dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.**

- a. Penyediaan sarana prasarana umum antara lain; RTH, Tempat Olah Raga, Balai Pertemuan, Tempat Ibadah, dan ruang publik lainnya.
- b. Pengembangan transportasi massal bagi orang dan barang yang dapat mengatasi kemacetan.
- c. Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan.
- d. Pengembangan sistem sanitasi perkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan 100% sanitasi,
- e. Sistik pengelolaan persampahan dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang efektif dan efisien serta berkelanjutan.
- f. Pengembangan eco-energi untuk sarana prasarana publik.



**5. Pemenuhan Infrastruktur Dasar, Pengembangan Wilayah Berbasis Keterkaitan antar Daerah yang Mendukung Percepatan Sektor Strategis.**

- a. Pemantapan infrastruktur pendukung kualitas permukiman, jalan, kegiatan ekonomi, pariwisata, Industri, perdagangan dan Jasa,
- a. Optimalisasi kebijakan penataan ruang wilayah perkotaan dan perdesaan Kabupaten Sidoarjo guna menguatkan konektivitas pembangunan antar wilayah,
- b. Integrasi pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan investasi untuk mendukung pemantapan Sektor Utama yaitu Perdagangan dan Industri,
- c. Integrasi pengembangan wilayah, dan investasi untuk mendukung percepatan Sektor Strategis, yaitu pariwisata, pertanian modern, perikanan dan jasa.
- d. Pengembangan jaringan air bersih dan manajemen pengelolaan air yang baik sebagai wujud ketahanan air yang berkelanjutan.
- e. Percepatan pengembangan jaringan irigasi teknis pendukung sector pertanian dan perikanan.

**6. Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat dan Harmoni Sosial yang berbasis Kesetaraan, Keamanan dan Ketentraman.**

- a. Peningkatan kapasitas dan mendorong kesadaran masyarakat untuk tanggap pencegahan dan mitigasi bencana.
- b. Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana penanganan bencana antara lain *command center*, jaringan pemadam kebakaran, pos tanggap darurat dll.
- c. Penanganan terhadap dampak bencana geologi lumpur Sidoarjo, antara lain penurunan tanah, banjir dan dampak lain yang ditimbulkan.
- d. Menumbuhkan budaya inklusif, ramah, perlindungan terhadap kaum disabilitas, antidiskrimasi SARA, gotong-royong, kebebasan politik dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal.



- e. Mengarusutamakan kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan dan anak.
- f. Membangun sistem keamanan yang efektif, mendukung dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban.



## Bab

# V

## Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini menyajikan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Rumusan Visi dan Misi pada dokumen RPJMD ini berdasarkan pada Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu **H. Ahmad Muhdlor, S.I.P.**, dan **H. Subandi, S.H.**, yang telah dilantik secara sah menjadi Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 26 Februari 2021 di Surabaya oleh Gubernur Jawa Timur Dra., Hj. Khofifah Indar Parawansa. Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Visi, Misi dan Program Strategis yang merupakan komitmen yang harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD) agar dapat diwujudkan secara konsisten selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya, Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran dengan memperhatikan Permasalahan Pembangunan Daerah serta Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Proses elaborasi antara gagasan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan kondisi empiris permasalahan pembangunan dan Isu Strategis Daerah tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 ini merupakan kunci untuk mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Sidoarjo.



### 5.1. Visi

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap visi RPJPD yang diemban Kabupaten Sidoarjo dalam jangka waktu 20 tahun yakni ***Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera dan Madani***. Visi jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025 tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal Sidoarjo, yang sangat dinamis, dan mengalami pergeseran-pergeseran pada beberapa sektor, oleh karena itu, penyusunan Visi Jangka Menengah, selain didasarkan pada Visi Jangka Panjang, juga tidak terlepas, atau memiliki irisan dengan konteks masa kini, atau merupakan cerminan dari kondisi masyarakat saat ini.

Berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Sidoarjo dimasa depan. Cita-cita tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masa depan yang sejahtera, maju, adil, makmur, dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokratis, agamis, dan memiliki tingkat estetika yang tinggi serta berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka cita-cita pembangunan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu **H. Ahmad Muhdlor, S.I.P.**, dan **H. Subandi, S.H.**, sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya menjadi rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah;

***"Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju,  
Berkarakter dan Berkelanjutan"***

Agar rumusan Visi di atas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka perlu dijabarkan pada pokok-pokok visi berikut penjelasannya



sebagaimana dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1. Pokok-pokok Visi Kabupaten Sidoarjo**

<b>VISI</b>	<b>POKOK- POKOK VISI</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b><i>Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”</i></b>	<b><i>Sidoarjo Sejahtera</i></b>	Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ( <i>growth</i> ) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan ( <i>equality</i> ). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
	<b><i>Sidoarjo Maju</i></b>	Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi “menjemput Perubahan”. Segala sumberdaya pemerintahan dan sumber daya alam akan dikelola



VISI	POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN
		<p>dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna “terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya”. Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.</p>
	<b><i>Sidoarjo Berkarakter</i></b>	<p>Unsur penting dari konsep pembangunan <i>People Centered Development</i> atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (<i>value</i>) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar</p>



VISI	POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN
		bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.
	<b><i>Pembangunan Berkelanjutan</i></b>	Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan ( <i>sustainable development</i> ). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Keempat pokok Visi di atas, selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Misi pembangunan akan memperjelas dan mempertegas kemana pembangunan akan diprioritaskan dan diarahkan selama lima tahun mendatang.

## 5.2. Misi

Berdasarkan pada penjabaran Visi ke dalam pokok-pokok Visi di atas, berikut akan disajikan bagaimana keterkaitan antara Visi dengan Misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun ke depan. Adapun keterkaitan tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.





**Tabel 5.2. Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo  
Tahun 2021-2026**

<b>VISI</b>	<b>POKOK-POKOK VISI</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b><i>Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”</i></b>	<b><i>Sidoarjo Sejahtera</i></b>	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
	<b><i>Sidoarjo Maju</i></b>	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.
	<b><i>Sidoarjo Berkarakter</i></b>	Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya. Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.



VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN
	<b><i>Pembangunan Berkelanjutan</i></b>	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.

Pemetaan sebagaimana dilakukan pada tabel di atas, hanya pendekatan logis untuk memastikan keterkaitan antara Visi dengan Misi. Namun secara substansial keterkaitan tersebut meliputi dimensi yang sangat luas, dimana sebuah misi dapat mendukung ke banyak pokok visi, dan antara pokok visi satu dengan pokok visi lain masih memiliki hierarki tertentu dimana tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. Merujuk pada hasil pemetaan Misi berdasarkan pokok-pokok Visi di atas, maka dihasilkan lima misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2021-2026 sebagai berikut.

***Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.***

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting *good governance*. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.



***Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.***

Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sector potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luasi khususnya sub sector perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal daerah.

***Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.***

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan social yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolis Gerbangkertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagi



kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo.

**Misi 4: *Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.***

Pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (*human resources*) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih jelas.

**Misi 5: *Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.***

Nilai (*value*) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada *value* tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib,



tentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

### 5.3. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan ketentuan Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017, maka rumsan Misi Kepala Daerah di atas, kemudian dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah. Secara rinci rumusan Tujuan dan Sasaran berdasarkan misi sebagaimana disajikan di bawah ini.

Pada Misi satu, dijabarkan ke dalam satu tujuan dan dua sasaran. Fokus pada misi ini adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, yang menjadi prasyarat dasar bagi percepatan pembangunan di kabupaten Sidoarjo.

Misi 1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.	
	Tujuan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha.
	Sasaran 1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital.
	Sasaran 2	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha.

Pada Misi dua, difokuskan pada percepatan dan pemulihan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru dan dapat menanggulangi kemiskinan. Upaya ini dilakukan melalui kebijakan simultan berupa penguatan sektor strategis dan pengembangan sektor



ekonomi rakyat yaitu Usaha Mikro, Koperasi dan Pertanian serta Perikanan. Misi dua dijabarkan dalam dua tujuan dan empat sasaran.

Misi 2	Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.		
	Tujuan 1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan.	
		Sasaran 1	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan.
		Sasaran 2	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa.
	Tujuan 2	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan.	
		Sasaran 3	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran.
Sasaran 4		Menurunnya Penduduk Miskin.	

Pada Misi tiga, dijabarkan dalam satu tujuan dan dua sasaran. Misi ini difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung ekonomi dan sosial. Kawasan Sidoarjo yang berada pada pusat pertumbuhan ring satu Jawa timur (Aglomerasi) bersama dengan Kota Surabaya dan Gresik, menuntut penyediaan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan terpadu. Hal ini akan diwujudkan melalui implementasi misi ini.



Misi 3	Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.	
Tujuan	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.	
Sasaran 1	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata.	
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana.	

Pada Misi keempat, dijabarkan dalam satu tujuan dan tiga sasaran. Misi ini fokus pada pembangunan kualitas sumberdaya manusia yang unggul, utamanya aspek Pendidikan dan Kesehatan. Mengingat dua hal tersebut merupakan modal dasar bagi terwujudnya kesejahteraan secara spiritual maupun material.

Misi 4	Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.	
Tujuan	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya.	
Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat.	
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat.	
Sasaran 3	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat	

Pada Misi kelima ini difokuskan pada penguatan karakteristik masyarakat Sidoarjo memiliki watak dasar yang lugas, terus terang, pantang menyerah, namun demikian tetap ramah dan toleran. Ikhtiar ini dilakukan



melalui internalisasi nilai-nilai budaya dan agama serta mendorong tumbuh berkembangnya nilai toleransi dalam masyarakat. Melalui berbagai kebijakan tersebut, maka kerukunan, keamanan, ketentraman dan kenyamanan akan dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Misi 5	Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.
Tujuan	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat.
Sasaran 1	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat.
Sasaran 2	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram.

Setelah dirumuskan Tujuan dan Sasaran berdasarkan Misi sebagaimana disajikan di atas, maka tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi Indikator Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo. Indikator Tujuan berfungsi sebagai gambaran untuk mengetahui capaian Tujuan Pembangunan selama periode perencanaan RPJMD, yaitu Tahun 2026. Sehingga target capaian indikator tujuan merupakan patokan bagi penyusunan target indikator sasaran di akhir periode perencanaan. Indikator Tujuan juga merupakan pijakan untuk merumuskan program RPJMD beserta target capaian selama lima tahun yang akan datang. Indikator Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.





**Tabel 5.3. Indikator Tujuan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo  
Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun ke						Kondisi Akhir	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha.	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-3,69	1,00	1,36	2,89	4,23	5,01	5,53	5,53	
		Indeks Gini	Indeks	0,340	0,365	0,359	0,347	0,345	0,343	0,340	0,340	0,340
3	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan.	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	Persen	10,97	10,54	10,39	10,09	9,76	9,44	9,14	9,14	
		Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,59	5,71	6,00	5,40	5,30	5,20	5,00	5,00	
4	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.	Indeks Infrastruktur	Indeks	0,747	0,755	0,762	0,772	0,780	0,788	0,796	0,796	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	59,78	59,79	59,80	59,81	59,82	59,83	59,84	59,84	
5	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80,29	80,41	80,77	80,92	81,17	81,40	81,62	81,62	
6	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam Masyarakat.	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	*	82,01	82,77	85,00	87,30	89,66	92,08	92,08	

Sumber: BPS dan hasil Pengolahan

Keterangan: \* Data belum dilakukan pengukuran



Indikator Tujuan di atas berfungsi untuk menggambarkan target tahunan dan tujuan akhir pembangunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026. Target akhir periode RPJMD tersebut juga menggambarkan ketercapaian Visi dan Misi pembangunan daerah berdasarkan sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo sekaligus dengan mempertimbangkan berbagai hambatan dan tantangan. Capaian tahunan indicator tujuan akan disampaikan dalam target Indikator Kinerja Utama. Keterkaitan logis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sangat penting, karena menjadi dasar atau menggambarkan arsitektur utama perencanaan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026. Arsitektur perencanaan tersebut sebagaimana disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Guna menjamin rumusan sasaran memiliki keterkaitan yang logis dengan rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, maka penjabaran rumusan Sasaran disajikan dalam tabel 5.4.



**Tabel 5.4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	Target						KONDISI AKHIR 2026
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>MISI – 1:</b>	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha;	Indeks Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital.	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	BB	A	A	A	A	A	AA	AA
Opini Atas Laporan BPK				Kriteria	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Survey Eksternal Persepsi Korupsi				Indeks	3,71	3,73	3,76	3,81	3,85	3,91	3,95	3,95	
Status Kinerja LPPD				Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)				Indeks	3,13	3,25	3,35	3,45	4,00	4,10	4,25	4,25	
Indeks Inovasi Daerah				Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	
Tingkat Maturitas SPIP				Kategori	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	
Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Mendukung Kemudahan Berusaha.				Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kategori	A-Sangat Baik	A-Sangat Baik	A-Sangat Baik	A-Sangat Baik	A-Sangat Baik	A-Sangat Baik	A-Sangat Baik	A-Sangat Baik



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	Target						KONDISI AKHIR 2026
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>MISI – 2:</b>				Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Persen	16,02	16,09	16,17	16,22	16,24	16,33	16,75	16,75
MEMBANGKITKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN FOKUS PADA KEMANDIRIAN LOKAL BERBASIS USAHA MIKRO, KOPERASI, PERTANIAN, PERIKANAN, SEKTOR JASA DAN INDUSTRI UNTUK MEMBUKA LAPANGAN PEKERJAAN DAN MENGURANGI KEMISKINAN;	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.	Pertumbuhan Ekonomi	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	Persen	51,17	51,73	52,29	52,81	53,19	53,45	54,21	54,21
				Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	Persen	2,75	2,55	2,77	2,82	2,95	3,11	3,25	3,25
				Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	Persen	0,81	0,85	0,92	1,25	1,29	1,33	1,52	1,52
				Persentase Usaha Mikro Mandiri	Persen	1,83	1,87	1,93	1,98	2,04	2,10	2,15	2,15
	Indeks Gini	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa.	Persentase Koperasi Berkualitas	Persen	20,7	21,84	23,20	24,69	26,39	28,30	30,34	30,34	
			Persentase Desa Mandiri	Persen	0,62	10,25	12,42	13,98	15,53	17,08	18,63	18,63	
			Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran	Persen	89,03	89,17	89,61	89,91	90,24	90,56	90,86	90,86	
	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	89,03	89,17	89,61	89,91	90,24	90,56	90,86	90,86		
		Prosentase Penduduk Miskin	Persen	94,41	93,78	94,00	94,60	94,70	94,80	95,00	95,00		



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	Target						KONDISI AKHIR 2026
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>MISI – 3:</b>	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.	Indeks Infrastruktur	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	0,742	0,748	0,754	0,760	0,766	0,772	0,777	0,777
Indeks Infrastruktur Pendidikan				Indeks	80,49	82,53	84,56	86,60	88,64	90,67	92,71	92,71	
Indeks Infrastruktur Kesehatan				Indeks	70,82	71,13	71,13	72,32	72,32	72,59	72,59	72,59	
MEMBANGUN INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN SOSIAL YANG MODERN DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN;		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana.	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,51	51,52	51,53	51,54	51,55	51,56	51,57	51,57
				Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,13	85,14	85,15	85,16	85,17	85,18	85,19	85,19
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	27,09	27,10	27,11	27,12	27,13	27,14	27,15	27,15
				Indeks Resiko Bencana	Indeks	112,82	99,12	98,44	92,53	86,98	81,76	76,86	76,86
<b>MISI – 4:</b>	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya.	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,93	15,01	15,22	15,41	15,89	16,12	16,44	16,44
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)			Tahun	10,50	10,33	10,79	11,23	11,56	12,09	13,11	13,11		
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat.			Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,04	73,69	74,77	75,19	75,98	76,31	76,81	76,81	
Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Masyarakat			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,13	94,32	94,53	94,95	95,37	95,77	96,25	96,25	



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	Target						KONDISI AKHIR 2026
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>MISI – 5:</b>	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat.	Indeks Kesalehan Sosial	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	Indeks Toleransi	Indeks	77,62	77,64	78,68	80,22	81,76	83,3	84,84	84,84
Indeks Pelestarian Budaya				Indeks	60,23	60,32	60,55	63,58	66,76	70,09	73,60	73,60	
Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram.			Indeks Rasa Aman	Persen	76,03	76,48	77,92	78,97	80,02	81,07	82,12	82,12	

Sumber: BPS dan hasil Pengolahan

Keterangan: \* Data belum dilakukan pengukuran



# Bab

# Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

# VI

Bagian ini menyajikan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. Rumusan strategi menjelaskan cara dan/atau tahapan implementasi, bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan memperhatikan dinamika kondisi internal dan eksternal daerah. Sedangkan arah kebijakan menjelaskan waktu pelaksanaan (*Timeline*) dari strategi yang telah ditentukan dalam kurun waktu lima tahun periode RPJMD. Penentuan Arah Kebijakan yang tepat diharapkan dapat menentukan Tema Pembangunan Tahunan dalam RKPD. Oleh karena itu, strategi yang diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan yang tepat dapat menjelaskan keterkaitan logis kontribusi setiap urusan/program terhadap pencapaian Visi dan Misi RPJMD. Selanjutnya akan dibahas secara terperinci strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

## 6.1. Strategi Pembangunan

Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 terdiri atas Strategi Umum dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. Strategi Umum sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan.



Sedangkan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD. Adapun rumusan Strategi sebagaimana dimaksud disajikan sebagai berikut :

#### **6.1.1. Strategi Umum**

Secara umum, strategi pembangunan adalah cara/pendekatan/kebijakan/ tahapan yang dirasa paling tepat untuk dilakukan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, rumusan strategi pembangunan selanjutnya dijadikan dasar untuk merumuskan Arah Kebijakan pembangunan tahunan selama lima tahun periode RPJMD. Dengan demikian, agar dapat dihasilkan Arah Kebijakan Pembangunan tahunan tersebut, perlu disusun **Strategi Umum**, yang menggambarkan mengenai cara/ pendekatan/ kebijakan/ tahapan yang dirasa paling tepat untuk dilakukan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dan menjamin tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah.

**Strategi Umum** RPJMD Kabupaten Sidoarjo terdiri atas lima poin sebagai pengejawantahan dari semangat Visi dan Misi pembangunan jangka menengah. Adapun lima Strategi Umum tersebut sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini :





**Gambar 6.1 Strategi Umum RPJMD Kabupaten Sidoarjo**



Kelima strategi umum pembangunan Kabupaten Sidoarjo di atas menjadi pijakan dalam pelaksanaan program Perangkat Daerah. Adapun penjelasan secara detil sebagai berikut.

**1. Penguatan Tatakelola Pemerintah dan Inovasi Pelayanan Publik.**

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi syarat wajib bagi lancarnya roda pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, maka strategi



ini menjadi poin penting dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026. Penguatan tata kelola pemerintahan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya inovasi pelayanan publik yang berkualitas.

## **2. Penguatan Ekonomi Sektor Strategis Simultan dengan Percepatan Ekonomi Kerakyatan.**

Menyadari posisi Kabupaten Sidoarjo dalam konstelasi pembangunan nasional dan Jawa Timur, diperlukan strategi pembangunan yang tepat. Struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo yang ditopang oleh Sektor Perdagangan, Industri dan Jasa di satu sisi, perlu di dukung oleh sektor primer serta ekonomi rakyat lainnya. Level sektor dengan kontribusi besar dan kecil ini tidak dapat diposisikan sendiri-sendiri. Namun perlu dikelola secara simultan agar memiliki daya ungkit yang besar pada peningkatan ekonomi masyarakat. Pada titik inilah, strategi ini menemukan relevansinya dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026.

## **3. Pemenuhan Infrastruktur Tata Kota Terintegrasi dengan Pengembangan Wilayah dan Sistem Transportasi Terpadu.**

Aglomerasi ekonomi dan perdagangan semakin kuat menarik Sidoarjo dalam pusat pertumbuhan ekonomi (*center of growth*). Pada konteks ini tuntutan ketersediaan infrastruktur tata kota yang handal dan terintegrasi menjadi sangat penting. Konektivitas antar wilayah di sekitar titik pertumbuhan memberikan banyak tantangan, antara lain aspek penataan kota dan penataan transportasi terpadu. Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu daerah yang masuk dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Gerbangkertosusila perlu menyiapkan segala sesuatunya. Terkait dengan hal tersebut maka strategi ini menjadi kunci untuk mendorong kebijakan pada pengembangan infrastruktur tata kota, pengembangan wilayah dan transportasi terpadu.



#### **4. Pembangunan Berpusat pada Manusia (*people centered development*).**

Pemahaman tentang paradigma pembangunan yang berpusatkan pada manusia / rakyat (*People Centered Development*), diawali dengan pemahaman tentang Ekologi Manusia, yang menjadi pusat perhatian pembangunan. Ekologi manusia dalam ekosistem merupakan salah satu kajian dari Ekologi. Soerjani (1992:12) menyatakan bahwa ekosistem dikaji oleh Ekologi, Ekologi Manusia menjadi landasan berkembangnya paradigma pembangunan yang berpusatkan pada masyarakat. Pembangunan yang berpusat pada manusia memiliki dampak strategis, dalam jangka pendek dapat menstimulus masyarakat untuk dapat secara mandiri menyelesaikan permasalahannya dan dalam jangka Panjang sumberdaya manusia (*human resources*) merupakan unsur utama pendukung kemajuan daerah.

#### **5. Nilai-nilai Agama dan Budaya sebagai Spirit Pembangunan.**

Unsur penting pembentuk karakter masyarakat tidak lepas dari nilai (*value*) yang mendasarinya. Sejarah telah membuktikan bahwa negara yang besar adalah negara yang berpijak pada akar nilai budaya dan tradisi yang telah membentuknya dalam kurun waktu yang lama. Demikian pula dengan daerah. Keberhasilan mengidentifikasi nilai-nilai budaya dan tradisi akan menjadi petunjuk jalan bagi pengembangan dan kemajuan daerah. Terkait dengan hal tersebut maka pemerintah kabupaten Sidoarjo menempatkan nilai-nilai agama dan budaya sebagai spirit pembangunan.

#### **6.1.2. Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran**

Kabupaten Sidoarjo juga merumuskan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran**, yaitu cara/pendekatan/kebijakan/ tahapan yang dirasa paling tepat untuk dilakukan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dan menjamin tercapainya Tujuan dan Sasaran RPJMD. Strategi Umum



memiliki lingkup tingkat daerah, sedangkan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran memiliki lingkup tingkat Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya Strategi Umum ini menjadi dasar dalam perumusan Strategi Tujuan dan Sasaran.

Sedangkan rumusan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran disajikan secara detail dalam Tabel 6.1.

**Tabel 6.1 Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>
<b>Misi 1</b> : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.		
<b>Tujuan 1</b> : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha.	<b>Sasaran 1.1</b> : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital.	<b>Strategi 1.1.1.</b> Penguatan kapasitas dan kapabilitas ASN secara bertahap.
		<b>Strategi 1.1.2.</b> Penyusunan dan implementasi SOP secara konsekuen dan berkelanjutan.
		<b>Strategi 1.1.3.</b> Penguatan Inovasi penyelenggaraan pemerintahan melalui Pemanfaatan <i>Information and Communication Technology</i> (ICT)
	<b>Sasaran 1.2</b> : Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka	<b>Strategi 1.2.1.</b> Peningkatan jangkauan pelayanan publik terpadu (Mall Pelayanan Publik)
		<b>Strategi 1.2.2.</b>



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Mendukung Kemudahan Berusaha.	Inovasi pelayanan publik terintegrasi berbasis teknologi digital.  <b>Strategi 1.2.3.</b> Percepatan Pelayanan melalui Pemangkasan birokrasi dan tahapan ijin usaha untuk kemudahan investasi.
<b>Misi 2 :</b> Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.		
<b>Tujuan 1 :</b> Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.	<b>Sasaran 1.1 :</b> Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan.	<b>Strategi 1.1.1.</b> Penyusunan Regulasi Daerah yang mendukung berkembangnya sektor strategis yaitu perdagangan, industri dan jasa.  <b>Strategi 1.1.2.</b> Intensifikasi Pertanian dan Perikanan berbasis teknologi tepat guna.
	<b>Sasaran 1.2:</b> Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa.	<b>Strategi 1.2.1.</b> Kebijakan Stimulus untuk mendorong berkembangnya Usaha Mikro dan koperasi.
		<b>Strategi 1.2.2.</b> Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Aparatur Desa dan Kapasitas Kelembagaan



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		secara berkelanjutan untuk mendorong pengelolaan potensi desa secara optimal.
<b>Tujuan 2 :</b> Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan.	<b>Sasaran 2.1 :</b> Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran.	<b>Strategi 2.1.1.</b> Kemitraan dengan perusahaan bidang Ketenagakerjaan yang mendorong penyerapan Angkatan Kerja lokal.
	<b>Sasaran 2.2:</b> Menurunnya Penduduk Miskin	<b>Strategi 2.1.2.</b> Perluasan jangkauan pembinaan wirausaha baru bagi pemuda, kelompok perempuan dan disabilitas.
		<b>Strategi 2.2.1.</b> Integrasi Program Lintas Urusan secara tepat sasaran melalui implementasi 17 Program Prioritas
<b>Misi 3 :</b> Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.		
<b>Tujuan 1 :</b> Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip	<b>Sasaran 1.1 :</b> Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata.	<b>Strategi 1.1.1.</b> Pemenuhan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan pendukung percepatan kegiatan ekonomi dan sosial,
		<b>Strategi 1.1.2.</b> Pengelolaan tata kota, perumahan dan permukiman



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Pembangunan Berkelanjutan.		sehat, dan sistim transportasi terpadu.
		<b>Strategi 1.1.3.</b> Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas dan merata.
	<b>Sasaran 1.2 :</b> Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana.	<b>Strategi 1.2.1.</b> Pembangunan ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan utilitas ruang publik yang berkualitas.
		<b>Strategi 1.2.2.</b> Normalisasi Sungai-sungai berbasis masyarakat secara berkelanjutan.
		<b>Strategi 1.2.3.</b> Edukasi masyarakat secara berkelanjutan untuk penanganan bencana, penciptaan dan pemeliharaan Kawasan vegetasi untuk meningkatkan rasio keterpenuhan RTH.
	<b>Strategi 1.2.4.</b> Sistim Pengelolaan Sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan pelibatan peran serta masyarakat.	



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<p><b>Misi 4 :</b> Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.</p>		
<p><b>Tujuan 1 :</b> Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya.</p>	<p><b>Sasaran 1.1 :</b> Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat.</p>	<p><b>Strategi 1.1.1.</b> Peningkatan kesejahteraan dan kapasitas tenaga kependidikan secara bertahap,</p>
		<p><b>Strategi 1.1.2.</b> Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan secara merata,</p>
		<p><b>Strategi 1.1.3.</b> Inovasi penyelenggaraan Pendidikan berbasis teknologi.</p>
	<p><b>Sasaran 1.2 :</b> Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat.</p>	<p><b>Strategi 1.2.1.</b> Peningkatan kesejahteraan dan kapasitas tenaga kesehatan secara bertahap,</p>
		<p><b>Strategi 1.2.2.</b> Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Kesehatan secara merata,</p>
		<p><b>Strategi 1.2.3.</b> Inovasi penyelenggaraan layanan Kesehatan berbasis teknologi.</p>
	<p><b>Sasaran 1.3 :</b> Meningkatnya</p>	<p><b>Strategi 1.3.1.</b> Penguatan komitmen secara afirmatif berupa</p>





TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Kesetaraan Gender dalam Masyarakat.	<p>pengarusutamaan gender di seluruh Perangkat daerah.</p> <p><b>Strategi 1.3.2.</b> Penguatan pemahan dan kesadaran mengenai kesetaraan gender kepada masyarakat melalui KIE KG berbasis Masyarakat.</p>
<b>Misi 5 :</b> Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.		
<p><b>Tujuan 1 :</b> Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat.</p>	<p><b>Sasaran 1.1 :</b> Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat.</p>	<p><b>Strategi 1.1.1.</b> Promosi nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi melalui berbagai media strategis.</p>
	<p><b>Sasaran 1.2 :</b> Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram.</p>	<p><b>Strategi 1.1.2.</b> Penyelenggaraan event seni dan budaya secara berkala.</p>
		<p><b>Strategi 1.1.3.</b> Sosialisasi nilai-nilai budaya, agama dan toleransi sejak dini melalui integrasi dengan kurikulum sekolah.</p>
		<p><b>Strategi 1.2.1.</b> Penciptaan ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat.</p>
<p><b>Strategi 1.2.2.</b></p>		



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Peningkatan Kerjasama dan pola hubungan lintas agama, lintas etnis secara berkelanjutan.

Strategi dan Arah Kebijakan ini menjelaskan pilihan tindakan/kebijakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat mendukung capaian Tujuan dan Sasaran RPJMD.

## 6.2. Arah Kebijakan

Strategi pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 di atas, menjadi pijakan utama dalam penetapan dan pelaksanaan Arah Kebijakan guna setiap misi pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Perumusan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sidoarjo didasarkan pada Strategi Umum sebagaimana diilustrasikan dalam gambar di bawah ini.

**Tabel 6.2 Keterkaitan Strategi Umum dan Arah Kebijakan Umum**

STRATEGI UMUM DAN STRATEGI BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>PENGUATAN TATAKELOLA PEMERINTAH DAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK.</b>	■	■	■	■	■
<b>Strategi 1.1.1.</b>					
Penguatan kapasitas dan kapabilitas ASN secara bertahap.	◆	◆	◆	◆	◆
<b>Strategi 1.1.2.</b>					
Penyusunan dan implementasi SOP secara konsekuen dan berkelanjutan.	◆	◆	◆	◆	◆



STRATEGI UMUM DAN STRATEGI BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Strategi 1.1.3.</b> Penguatan Inovasi penyelenggaraan pemerintahan melalui Pemanfaatan <i>Information and Communication Technology</i> (ICT)	♦	♦	♦	♦	♦
<b>Strategi 1.2.1.</b> Peningkatan jangkauan pelayanan publik terpadu (Mall Pelayanan Publik)	♦	♦	♦	♦	♦
<b>Strategi 1.2.2.</b> Inovasi pelayanan publik terintegrasi berbasis teknologi digital.	♦	♦	♦	♦	♦
<b>Strategi 1.2.3.</b> Percepatan Pelayanan melalui Pemangkas birokrasi dan tahapan izin usaha untuk kemudahan investasi.	♦	♦	♦	♦	♦
<b>PENGUATAN EKONOMI SEKTOR STRATEGIS SIMULTAN DENGAN PERCEPATAN EKONOMI KERAKYATAN.</b>	■	■	■		
<b>Strategi 1.1.1.</b> Penyusunan Regulasi Daerah yang mendukung berkembangnya sektor strategis yaitu perdagangan, industri dan jasa.	♦	♦	♦		
<b>Strategi 1.1.2.</b> Intensifikasi Pertanian dan Perikanan berbasis teknologi tepat guna.	♦	♦	♦		
<b>Strategi 1.2.1.</b>	♦	♦	♦		



STRATEGI UMUM DAN STRATEGI BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	2022	2023	2024	2025	2026
Kebijakan Stimulus untuk mendirikan berkembangnya usaha mikro dan koperasi.					
<b>Strategi 1.2.2.</b>					
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Aparatur Desa dan Kapasitas Kelembagaan secara berkelanjutan untuk mendorong pengelolaan potensi desa secara optimal.	◆	◆	◆		
<b>Strategi 2.1.1.</b>					
Kemitraan dengan perusahaan bidang Ketenagakerjaan yang mendorong penyerapan Angkatan Kerja local.	◆	◆	◆		
<b>Strategi 2.1.2.</b>					
Perluasan jangkauan pembinaan wirausaha baru bagi pemuda, kelompok perempuan dan disabilitas.	◆	◆	◆		
<b>Strategi 2.2.1.</b>					
Integrasi Program Lintas Urusan secara tepat sasaran melalui implementasi 17 Program Prioritas	◆	◆	◆		
<b>PEMENUHAN INFRASTRUKTUR TATA KOTA TERINTEGRASI DENGAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SISTEM TRANSPORTASI TERPADU.</b>	■	■	■		
<b>Strategi 1.1.1.</b>					
Pemenuhan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan	◆	◆	◆		



STRATEGI UMUM DAN STRATEGI BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	2022	2023	2024	2025	2026
pendukung percepatan kegiatan ekonomi dan sosial, <b>Strategi 1.1.2.</b>					
Pengelolaan tata kota, perumahan dan permukiman sehat, dan sistim transportasi terpadu. <b>Strategi 1.1.3.</b>	♦	♦	♦		
Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan merata. <b>Strategi 1.2.1.</b>	♦	♦	♦		
Pembangunan ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan utilitas ruang Public yang berkualitas. <b>Strategi 1.2.2.</b>	♦	♦	♦		
Normalisasi Sungai-sungai berbasis masyarakat secara berkelanjutan <b>Strategi 1.2.3.</b>	♦	♦	♦		
Edukasi masyarakat untuk penanganan bencana, secara berkelanjutan untuk penciptaan dan pemeliharaan Kawasan vegetasi untuk meningkatkan rasio keterpenuhan RTH.  <b>Strategi 1.2.4</b>	♦	♦	♦		
Sistim Pengelolaan Sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan pelibatan peran serta masyarakat.	♦	♦	♦		

**PEMBANGUNAN BERPUSAT PADA MANUSIA (*PEOPLE CENTERED DEVELOPMENT*).**





STRATEGI UMUM DAN STRATEGI BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Strategi 1.1.1.</b>  Peningkatan kesejahteraan dan kapasitas tenaga kependidikan secara bertahap,			♦	♦	♦
<b>Strategi 1.1.2.</b>  Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan secara merata,			♦	♦	♦
<b>Strategi 1.1.3.</b>  Inovasi penyelenggaraan Pendidikan berbasis teknologi.			♦	♦	♦
<b>Strategi 1.2.1.</b>  Peningkatan kesejahteraan dan kapasitas tenaga kesehatan secara bertahap,			♦	♦	♦
<b>Strategi 1.2.2.</b>  Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Kesehatan secara merata,			♦	♦	♦
<b>Strategi 1.2.3.</b>  Inovasi penyelenggaraan layanan Kesehatan berbasis teknologi.			♦	♦	♦
<b>Strategi 1.3.1.</b>  Penguatan komitmen secara afirmatif berupa pengarusutamaan gender di seluruh Perangkat daerah.			♦	♦	♦
<b>Strategi 1.3.2.</b>  Penguatan pemahan dan kesadaran mengenai kesetaraan gender kepada masyarakat melalui KIE KG berbasis			♦	♦	♦



STRATEGI UMUM DAN STRATEGI BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA SEBAGAI SPIRIT PEMBANGUNAN.</b>	■	■	■	■	■
<b>Strategi 1.1.1.</b> Promosi nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi melalui berbagai media strategis.	◆	◆	◆	◆	◆
<b>Strategi 1.1.2.</b> Penyelenggaraan event seni dan budaya secara berkala.	◆	◆	◆	◆	◆
<b>Strategi 1.1.3.</b> Sosialisasi nilai-nilai budaya, agama dan toleransi sejak dini melalui integrasi dengan kurikulum sekolah.	◆	◆	◆	◆	◆
<b>Strategi 1.2.1.</b> Penciptaan ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat.	◆	◆	◆	◆	◆
<b>Strategi 1.2.2.</b> Peningkatan Kerjasama dan pola hubungan lintas agama, lintas etnis secara berkelanjutan.	◆	◆	◆	◆	◆
	Arah Kebijakan 2022	Arah Kebijakan 2023	Arah Kebijakan 2024	Arah Kebijakan 2025	Arah Kebijakan 2026

Arah Kebijakan Tahunan RPJMD merupakan Elaborasi antara Strategi Umum dengan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran, sesuai dengan perkiraan waktu Implementasinya. Mengacu pada rencana fokus pembangunan RPJMD sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, maka dapat dirumuskan Arah Kebijakan Umum Daerah Tahunan, yang dapat dijadikan sebagai tema pembangunan tahunan. Namun demikian mengingat bahwa dinamika isu



pembangunan dan perencanaan tahunan pemerintah pusat dan provinsi relatif cepat, maka selanjutnya masih membutuhkan penyesuaian.





**Gambar 6.2 Arah Kebijakan Umum RPJMD**



Arah Kebijakan Umum di atas yang merupakan manifestasi dari Strategi Umum, dapat dijadikan sebagai *Milestone* pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2022-2026. *Milestone* yang berangkat dari Arah Kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan tahapan besar pembangunan bagi perencanaan tahunan di tingkat daerah maupun di tingkat Perangkat Daerah. Pada tahap implementasinya, arah kebijakan di atas diselaraskan dengan tema pembangunan tahunan nasional dan provinsi Jawa Timur.

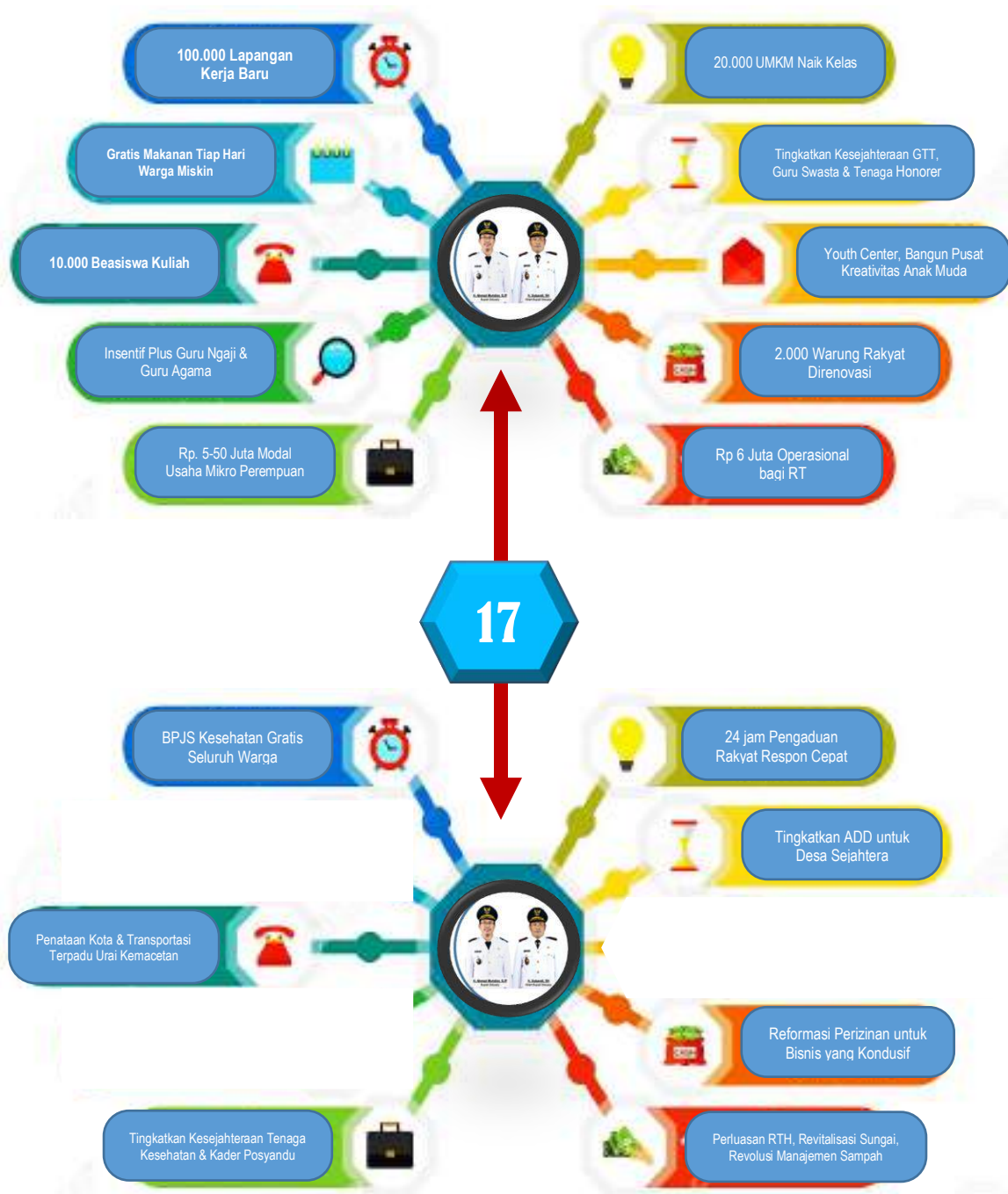
### **6.3. Program Pembangunan Daerah**

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, berdasarkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo periode tahun 2021-2026.

Sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang Maju, Aman dan Sejahtera, maka disusun 17 (tujuh belas) Program Strategis yang merupakan komitmen Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2021-2026. Selanjutnya 17 Agenda Pokok tersebut diturunkan dalam program prioritas Perangkat Daerah. Seluruh agenda pokok tersebut diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut :



**Gambar 6.3 Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Sidoarjo**





Keterkaitan antara 17 Program Strategis dengan program sesuai nomenklatur Urusan dan Perangkat Daerah sangat penting. Hal ini bertujuan agar seluruh janji politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dapat diwujudkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Oleh sebab itu, maka pada uraian selanjutnya disajikan bagaimana keterkaitan antara 17 Program Strategis dengan program pembangunan dan penanganan urusanpembangunan disesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 6.3 Keterkaitan Antara 17 Program Strategis Kepala Daerah**

<b>PROGRAM PRIORITAS 1: 100.000 LAPANGAN KERJA BARU</b>		
<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	
Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Pangan	Program Peningkatan Diverisifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan dan Pertanian
Pertanian	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
	Program Penyuluhan Pertanian	
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian
Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan



	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	

<b>PROGRAM PRIORITAS 2: BPJS KESEHATAN GRATIS SELURUH WARGA</b>		
<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

<b>PROGRAM PRIORITAS 3: GRATIS MAKANAN TIAP HARI WARGA MISKIN</b>		
<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

<b>PROGRAM PRIORITAS 4: 10.000 BEASISWA KULIAH</b>		
<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
Kepemudaaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata
Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah

<b>PROGRAM PRIORITAS 5: INSENTIF PLUS GURU NGAJI DAN GURU AGAMA</b>		
<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

<b>PROGRAM PRIORITAS 6: RP. 5 JUTA-50 JUTA MODAL USAHA MIKRO PEREMPUAN</b>		
<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro



<b>PROGRAM PRIORITAS 7: RP. 6 JUTA OPERASIONAL BAGI RT</b>		
<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
Kewilayahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Sidoarjo
		Kecamatan Porong
		Kecamatan Krian
		Kecamatan Taman
Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

<b>PROGRAM PRIORITAS 8: 20.000 UMKM NAIK KELAS</b>		
<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
Perdagangan	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	

<b>PROGRAM PRIORITAS 9: PENATAAN KOTA DAN TRANSPORTASI TERPADU URAI KEMACETAN</b>		
<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PU Bina Marga Dan SDA
Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

<b>PROGRAM PRIORITAS 10: TINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAGA KESEHATAN DAN KADER POSYANDU</b>		
<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan



<b>PROGRAM PRIORITAS 11: TINGKATKAN KESEJAHTERAAN GTT, GURU SWASTA, DAN TENAGA HONORER</b>		
<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

<b>PROGRAM PRIORITAS 12: YOUTH CENTER, BANGUN PUSAT KREATIVITAS ANAK MUDA</b>		
<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata
Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata
Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Keseniaan Tradisional	

<b>PROGRAM PRIORITAS 13: 2.000 WARUNG RAKYAT DIRENOVASI</b>		
<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Program Pengembangan UMKM	

<b>PROGRAM PRIORITAS 14: TINGKATKAN ADD UNTUK DESA SEJAHTERA</b>		
<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



<b>PROGRAM PRIORITAS 15: 24 JAM PENGADUAN RAKYAT RESPON CEPAT</b>		
<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
Komunikasi dan Informatika	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Program Aplikasi Informatika	
Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah

<b>PROGRAM PRIORITAS 16: REFORMASI PERIJINAN UNTUK BISNIS YANG KONDUSIF</b>		
<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Komunikasi dan Informatika	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

<b>PROGRAM PRIORITAS 17: PERLUASAN RTH, REVITALISASI SUNGAI, REVOLUSI MANAJEMEN SAMPAH</b>		
<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
	Program Pengelolaan Persampahan	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	



Berbagai program Perangkat Daerah yang telah disesuaikan dengan 17 Program Prioritas pembangunan sesuai Janji Politik Kepala Daerah Terpilih sebagaimana disampaikan di atas merupakan Program Prioritas guna mendukung Visi dan Misi RPJMD. Selanjutnya, tabel Program setiap Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Tujuan dan Sasaran sebagaimana ketentuan Permendagri No. 86 Tahun 2017 akan disajikan dalam tabel 6.4 di bawah ini.





**Tabel 6.4.**  
**Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif**  
**Kabupaten Sidoarjo**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan Dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Kemudahan Berusaha																				
	Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital serta pelayanan publik berkualitas yang mendukung kemudahan berusaha																				
	Sasaran 1.1 : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital.																				
		1. Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	BB	A	53.521.57 7.807	A	53.068.64 6.451	A	62.970.56 5.863	A	65.323.94 0.198	A	67.817.33 2.543	AA	70.578.22 9.995	AA	373.280.2 92.858			
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	Persen	20	50	190.981.4 60	75	104.675.0 00	77	225.000.0 00	78	250.000.0 00	80	275.000.0 00	100	300.000.0 00	100	1.345.656. 460	Sekretariat Daerah
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan	Nilai	-	-	11.138.90 6.896	70	13.876.91 2.543	72	14.511.27 7.796	75	15.209.07 9.573	77	15.976.66 1.529	80	16.821.00 1.680	80	87.533.84 0.017	Sekretariat Daerah
				Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Nilai	-	84	1.124.786. 645	85	1.457.276. 740	86	4.400.000. 000	88	4.550.000. 000	89	4.700.000. 000	90	5.000.000. 000	90	21.232.06 3.385	Sekretariat Daerah
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan terhadap dokumen penganggaran daerah	Persen	100	100	2.732.673. 703	100	1.724.996. 898	100	1.742.246. 867	100	1.759.669. 336	100	1.777.266. 029	100	1.795.038. 689	100	11.531.89 1.522	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase kesesuaian RKPd terhadap dokumen RPJMD	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		100



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021	2022		2023		2024		2025		2026		2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparaturnya perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	80	81	13.069.20 2.084	82	12.409.05 2.963	84	14.311.72 2.995	86	14.454.84 0.225	88	14.599.38 8.627	90	14.745.38 2.513	90	83.589.58 9.406	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap dokumen Renstra, PD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	-	100		100		100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				2. Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap dokumen Renstra, PD bidang perekonomian dan SDA	Persen	-	100	4.314.737. 161	100	2.345.736. 494	100	2.369.193. 859	100	2.392.885. 798	100	2.416.814. 656	100	2.440.982. 802	100	16.280.35 0.770	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				3. Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap dokumen Renstra, PD bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Persen	-	100		100		100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal A	Persen	31	31	320.332.4 25	33	278.838.3 80	35	609.001.2 36	37	665.236.0 00	37	727.860.9 72	39	764.266.5 45	39	3.365.535. 558	Inspektorat
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Prosentase pemenuhan kebutuhan pegawai	Persen	50,6	50,3		50,1		49,5		49,2		49		48,7		48,7		Badan Kepegawaian Daerah
				Prosentase penempatan PNS sesuai kualifikasi	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		Badan Kepegawaian Daerah
				Prosentase penempatan ASN sesuai kompetensinya	Persen	77,35	80	4.298.221. 021	81	3.797.310. 387	81	6.796.383. 718	82	7.136.202. 904	82	7.493.013. 049	83	7.867.663. 701	83	37.388.79 4.780	Badan Kepegawaian Daerah
				Prosentase pegawai berkinerja minimal baik	Persen	90	75		80		80		85		85		90		90		Badan Kepegawaian Daerah
				Tingkat motivasi pegawai (sisi manajemen kepegawaian)	Persen	-	85		85		85		85		85		85		85		Badan Kepegawaian Daerah



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Prosentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 20JP per tahun	Persen	-	30	3.931.928.393	40	4.228.701.236	50	4.334.951.053	60	4.551.698.605	65	4.779.283.536	70	5.018.247.713	70	26.844.810.536	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	76	79	12.399.808.019	79	12.845.145.810	79,5	13.670.788.340	79,75	14.354.327.757	80	15.072.044.145	80	15.825.646.352	80	84.167.760.423	Badan Kepegawaian Daerah
			2. Opini Atas Laporan BPK	Kriteria	WTP	WT P	661.906.763.995	WT P	637.917.539.524	WT P	735.473.511.568	WT P	797.684.708.675	WT P	877.063.825.373	WT P	964.376.353.366	WT P	4.674.422.702.501		
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Rancangan KUA-PPAS /Perubahan KUA-PPAS	Status	Tepat Waktu	Tep at Waktu		Tep at Waktu		Tep at Waktu		Tep at Waktu		Tep at Waktu		Tep at Waktu		Tep at Waktu		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Raperda APBD/PAPBD	Status	Tepat Waktu	Tep at Waktu		Tep at Waktu		Tep at Waktu		Tep at Waktu		Tep at Waktu		Tep at Waktu		Tep at Waktu		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				ketepatan waktu penyampaian Dokumen Raperbup APBD/PAPBD	Status	Tepat Waktu	Tep at Waktu	645.099.475.742	Tep at Waktu	620.138.125.812	Tep at Waktu	715.924.195.198	Tep at Waktu	777.209.614.688	Tep at Waktu	854.874.576.007	Tep at Waktu	940.302.033.083	Tep at Waktu	4.553.548.020.530	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Prosentase SKPD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase realisasi penyaluran belanja transfer	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100	80	14.102.414.453	80	13.793.432.882	80	15.537.776.170	80	17.091.553.787	80	18.800.709.166	80	20.680.780.083	80	100.006.666.541	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase aset tetap tanah yang telah bersertifikat	Persen	18,22	32,81	2.704.873.800	49,45	3.985.980.830	66,13	4.011.540.200	82,81	3.383.540.200	99,49	3.388.540.200	100	3.393.540.200	100	20.868.015.430	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Prosentase pemindahtanganan BMD yang diproses melalui lelang umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
		Prosentase OPD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan BMD	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
		Prosentase pemanfaatan BMD yang diproses	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
		<b>3. Survey Eksternal Persepsi Korupsi</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,71</b>	<b>3,71</b>	<b>15.157.10 9.365</b>	<b>3,76</b>	<b>17.541.21 2.822</b>	<b>3,81</b>	<b>20.683.39 6.064</b>	<b>3,85</b>	<b>22.558.44 5.735</b>	<b>3,91</b>	<b>24.561.40 1.035</b>	<b>3,95</b>	<b>28.041.20 2.492</b>	<b>3,95</b>	<b>128.542.7 67.513</b>			
6	01	02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal yang sesuai rekomendasi	Persen	85	-	-	86	278.838.3 80	87	609.001.2 36	88	665.236.0 00	100	727.860.9 72	90	764.266.5 45	90	3.045.203. 133	Inspektorat
				Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan internal yang sesuai rekomendasi	Persen	90	-	-	91	278.838.3 80	92	609.001.2 36	93	665.236.0 00	94	727.860.9 72	95	764.266.5 45	95	3.045.203. 133	Inspektorat
				Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	-	100	278.838.3 80	100	609.001.2 36	100	665.236.0 00	100	727.860.9 72	100	764.266.5 45	100	3.045.203. 133	Inspektorat
X	XX	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	70,37	76,0 0	15.157.10 9.365	76,0 0	16.704.69 7.682	78	18.856.39 2.356	80	20.562.73 7.735	82	22.377.81 8.119	85	25.748.40 2.857	85	119.407.1 58.114	Inspektorat
				<b>4. Status Kinerja LPPD</b>	<b>Kategori</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>11.772.44 3.065</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>15.548.74 8.947</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>33.828.75 8.252</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>37.772.43 5.472</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>43.468.12 7.776</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>49.668.99 0.275</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>192.059.5 03.787</b>	
4	01	02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra	Nilai	-	-	10.860.86 4.916	70	13.769.92 4.054	72	23.771.84 0.638	75	27.565.51 7.858	77	33.111.21 0.162	80	39.162.07 2.661	80	148.241.4 30.289	Sekretariat Daerah
				Persentase Kinerja Urusan tercapai	Persen	100	100	911.578.1 49	100	1.778.824. 893	100	10.056.91 7.614	100	10.206.91 7.614	100	10.356.91 7.614	100	10.506.91 7.614	100	43.818.07 3.498	Sekretariat Daerah



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		<b>5. Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)</b>	Indeks	3,13	3,25	28.895.61 4.801	3,35	40.397.66 6.764	3,45	41.078.90 0.494	4,00	41.916.14 3.600	4,10	42.664.29 9.433	4,25	42.995.57 7.421	4,25	225.868.7 05.114		
2	16	02	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi	Poin	84	84		85		86		87		88		89		89	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	36.773.76 8.066	Dinas Komunikasi dan Informatika
						3.922.641. 104		6.231.645. 761		6.356.278. 676		6.627.056. 148		6.798.696. 902		6.837.449. 474				
2	16	03	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	25	50		60		70		80		90		100		100	Dinas Komunikasi dan Informatika
						12.079.49 7.400		19.388.59 8.288		19.776.37 0.254		20.171.89 7.659		20.575.33 5.612		20.692.61 5.025				
2	20	02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase data statistik yang digunakan sebagai bahan informasi	Persen	20	20		20		40		60		80		100		100	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Komunikasi dan Informatika
						543.222.2 12		729.902.1 59		744.500.2 02		759.390.2 06		774.578.0 10		790.069.5 71				
2	21	02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	INDEKS KAMI (Indeks Keamanan Informasi)	Kategori	Cukup Baik	Cukup Baik		Cukup Baik		Cukup Baik		Cukup Baik		Cukup Baik		Cukup Baik		Cukup Baik	Dinas Komunikasi dan Informatika
						419.771.2 50		1.375.560. 000		1.403.071. 200		1.431.132. 624		1.459.755. 276		1.488.950. 382				
X	XX	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Komunikasi dan Informatika
						11.930.48 2.835		12.671.96 0.556		12.798.68 0.162		12.926.66 6.963		13.055.93 3.633		13.186.49 2.969				



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		<b>6. Indeks Inovasi Daerah</b>	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	739.216.646	Sangat Inovatif	926.706.825	Sangat Inovatif	935.973.893	Sangat Inovatif	945.333.632	Sangat Inovatif	954.786.969	Sangat Inovatif	964.334.838	Sangat Inovatif	5.466.352.803			
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase PD yang memiliki kegiatan mendukung IID	Persen	-	42	70	72	74	76	78	78	78	78	78	78	78	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
				Persentase penelitian/kajian yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	Persen	-	80	90	92	94	96	98	98	98	98	98	98	98	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
				<b>7. Tingkat Maturitas SPIP</b>	Level	Terdefinisi	Terdefinisi	400.289.500	Terdefinisi	278.838.380	Terdefinisi	609.001.236	Terdefinisi	665.236.000	Terdefinisi	727.860.972	Terdefinisi	764.266.545	Terdefinisi	2.766.364.753	
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan	Persen	-	-	-	100	609.001.236	100	665.236.000	100	727.860.972	100	764.266.545	100	2.766.364.753	Inspektorat		
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, dan ASISTENSI	Persentase OPD yang melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan	Persen	-	-	400.289.500	100	278.838.380	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat		
				Sasaran 1.2: Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka mendukung kemudahan berusaha				434.783.378.072		412.383.368.960		511.420.472.653		543.764.598.244		581.345.774.379		625.579.908.235		3.092.967.555.169	
				<b>1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)</b>	Indeks	A-	A-	434.783.378.072	A-	412.383.368.960	A-	511.420.472.653	A-	543.764.598.244	A-	581.345.774.379	A-	625.579.908.235	A-	3.092.967.555.169	
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang urusan pemerintahan daerah	Nilai	-	-	59.447.871.793	70	56.966.673.573	72	92.214.804.992	75	97.942.300.492	77	106.534.395.540	80	116.141.085.095	80	529.247.131.484	
				Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan A- (Sangat Baik)	Nilai	66	66	286.768.100	66	397.550.000	66	700.000.000	100	800.000.000	100	900.000.000	100	1.000.000.000	100	4.084.318.100	Sekretariat Daerah



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab				
					2021		2022		2023		2024		2025		2026							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
2	2	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase pelaporan penduduk rentan yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	97		100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
				Persentase penduduk ber-KTP-EI	Persen	97	97	97		98		98,5		99		99,5		99,5				
				Persentase penduduk usia 0 s/d 17 tahun ber-KIA	Persen	5,6	6	30		50		70		80		90		90				
				Persentase layanan kepemilikan KK yang sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	640.917.358	100	100	591.696.334	100	100	650.865.967	100	100	715.952.564	100		787.547.820	3.924.885.801
				Persentase pelayanan pindah datang / keluar yang dapat diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100		100	100	100		100		100		100			100	
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	Persen	95	95	96		97		98		99		99,5		99,5		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
				Persentase penerbitan akta kematian	Persen	7	7	15	481.819.242	17	373.795.430	18	411.174.973	19	452.292.470	20	497.521.717	20	547.273.889		2.763.877.721	
				Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	Persen	58	58	60		61		63		65		66		66			66	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Persentase penduduk status cerai hidup ber-akta perceraian	Persen	3	3		4		5		6		7		8		8		
2	12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Prosentase pelayanan kebutuhan data kependudukan yang tepat waktu	Persen	100	100	1.504.584.903	100	1.716.050.098	100	1.887.655.108	100	2.076.420.619	100	2.284.062.680	100	2.512.468.948	100	11.981.242.356	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Prosentase Sarpras SIAK yang layak fungsi	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persen	-	-		100	80.140.000	100	88.154.000	100	96.969.400	100	106.666.340	100	117.332.974	100	489.262.714	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase rekomendasi pengelolaan profil kependudukan terhadap kebijakan daerah	Persen	-	-		100	80.140.000	100	88.154.000	100	96.969.400	100	106.666.340	100	117.332.974	100	489.262.714	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
X	XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	100	8.595.882.773	100	12.009.649.987	100	12.129.746.487	100	12.251.043.952	100	12.373.554.391	100	15.945.160.308	100	73.305.037.898	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100	100	8.595.882.773	100	12.009.649.987	100	12.129.746.487	100	12.251.043.952	100	12.373.554.391	100	15.945.160.308	100	73.305.037.898	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil





Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase penerimaan PBB-P2	Persen	108.92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pelayanan Pajak Daerah		
				Prosentase penerimaan BPHTB	Persen	128.42	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pelayanan Pajak Daerah		
				Prosentase Penerimaan PDL (pajak restoran, hotel, hiburan, parkir, reklame, Penerangan Jalan dan Air Tanah)	Persen	99.63	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pelayanan Pajak Daerah		
						9.376.462.611		5.982.838.828		6.162.323.993		6.347.193.713		6.537.609.524		6.733.737.810		41.140.166.478			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	90	90	29.320.801.584	90	33.582.443.975	90	34.589.917.294	90	35.627.614.813	90	36.969.443.257	90	37.797.336.555	90	207.887.557.478	Badan Pelayanan Pajak Daerah
4	02	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	Persen	100	100	73.572.358.528	100	37.189.132.009	100	75.043.805.699	100	76.544.681.813	100	78.075.575.449	100	79.637.086.958	100	420.062.640.455	Sekretariat DPRD



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Nilai	84	85	54.735.60 1.070	85	63.860.06 7.912	86	65.137.26 9.270	87	66.440.01 4.656	88	67.768.81 4.949	89	69.124.19 1.248	89	387.065.9 59.104	Sekretariat DPRD
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	a. Jumlah lembaga yang telah mengelola arsip dengan baik	Perangkat Daerah	3	3	165.961.6 00	5		7		9		11		13 OP D		13	5.172.270. 179	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				b. jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu baik	Berkas	500	500	704.440.0 00	1,25	852.697.6 74	150 0	918.591.7 21	1,75	993.708.5 73	2	1.075.787. 110	2,25	1.165.523. 501	2,25 0	704.440.0 00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				c. Jumlah pengguna layanan arsip	Orang	65	65	5.000.000	68		72		76		80		84		84	5.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang terselamatkan	laporan	-	-	-	1	81.000.000	1	81.000.000	1	91.000.000	1	98.000.000	1	103.000.000	1	454.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah (SKKAD) Sistem Klasifikasi Keamanan akses Arsip Dinamis yang diterbitkan	laporan	-	-	-	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	30.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100	100	27.154.371.040	100	29.869.808.144	100	32.856.788.958	100	36.142.467.854	100	39.756.714.640	100	43.732.386.104	100	209.512.536.740	Kecamatan Sidoarjo





Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	89.765.00 0	100	187.145.6 48	100	205.860.2 13	100	226.446.2 34	100	249.090.8 57	100	273.999.9 43	100	1.232.307. 896	Kecamatan Sidoarjo
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	90	90	6.016.349. 270	90	5.797.739. 607	90	6.377.513. 568	95	7.015.264. 924	95	7.716.791. 417	100	8.488.470. 559	100	41.412.12 9.345	Kecamatan Candi
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	Persen	a. 98,57 b. 81,81 c. 97,03	a. 100 b. 100 c. 100	457.866.5 16	a. 100 b. 100 c. 100	630.364.2 93	a. 100 b. 100 c. 100	693.400.7 22	a. 100 b. 100 c. 100	762.740.7 95	a. 100 b. 100 c. 100	839.014.8 74	a. 100 b. 100 c. 100	922.916.3 61	a. 100 b. 100 c. 100	3.848.437. 045	Kecamatan Candi



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	Persen	0	0	-	80	42.406.500	0	-	0	-	0	-	0	-	Kecamatan Candi		
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	64.802.667	100	38.912.000	100	42.803.200	100	47.083.520	100	51.791.872	100	56.971.059	100	302.364.318	Kecamatan Candi
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	183.441.000	100	71.735.700	100	78.909.270	100	86.800.197	100	95.480.217	100	105.028.238	100	437.953.622	Kecamatan Candi









Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	52.449.758	100	74.445.250	100	81.889.775	100	90.078.753	100	99.086.628	100	108.995.291	100	506.945.454	Kecamatan Wonoayu
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	95	95	99.925.000	96	883.529.000	97	971.881.900	98	1.069.070.090	99	962.952.786	100	1.059.248.065	100	5.046.606.841	Kecamatan Wonoayu
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100	98	11.238.574.603	98	11.238.574.603	98	12.362.432.063	98	13.598.675.270	98	14.958.542.797	98	16.454.397.076	98	79.851.196.412	Kecamatan Krian





Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	persen	100	98	247.045.559	98	247.045.559	98	271.750.115	98	298.925.126	98	328.817.639	98	361.699.403	98	1.755.283.401	Kecamatan Krian
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	persen	100	98	126.658.178	98	126.658.178	98	139.323.996	98	153.256.395	98	168.582.035	98	185.440.238	98	899.919.021	Kecamatan Krian
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100	89	9.946.846.444	90	9.861.019.272	91	10.847.121.199	92	11.931.833.319	93	13.125.016.651	94	14.437.518.316	94	70.149.355.201	Kecamatan Porong





Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	40.683.100	100	35.005.300	100	38.505.830	100	42.356.413	100	46.592.054	100	51.251.260	100	254.393.957	Kecamatan Porong
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	28.476.347	100	17.010.644	100	18.711.708	100	20.582.879	100	22.641.167	100	24.905.284	100	132.328.030	Kecamatan Porong
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	89,44	80	5.298.687.715	89,5	1.712.757.982	89,5	1.781.268.301	89,6	1.852.519.033	89,7	1.926.619.795	89,8	2.003.684.586	90	14.575.537.412	Kecamatan Krembung





Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Poin	100	100	4.557.301.476	82,6 1	6.064.733.406	86,9 6	6.671.206.747	91,3	7.338.327.421	95,6 5	8.072.160.163	95,6 5	8.879.376.180	95,6 5	41.583.105.393	Kecamatan Jabon
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	Persen	a. 100 b. 100 c. 100	a. 70 b. 94,4 c. 100	1.434.691.722	a. 73,3 3 b. 95,6 6 c. 100	3.618.528.400	a. 76,4 7 b. 96,1 0 c. 100	3.980.381.240	a. 78,9 5 b. 96,5 3 c. 100	4.378.419.364	a. 80,9 5 b. 92,6 1 c. 100	4.816.261.300	a. 82,6 1 b. 97,3 4 c. 100	5.297.887.430	a. 82,6 1 b. 97,3 4 c. 100	23.526.169.457	Kecamatan Jabon
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	12.769.465	100	223.804.246	100	246.184.671	100	270.803.138	100	297.883.451	100	327.671.797	100	1.379.116.767	Kecamatan Jabon







Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	-	100	37.824.164	100	168.947.492	100	185.842.241	100	204.426.465	100	224.869.112	100	821.909.474	Kecamatan Balongbendo
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	3.532.500	100	37.850.000	100	79.475.000	100	87.422.500	100	96.164.750	100	105.781.225	100	410.225.975	Kecamatan Balongbendo
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	90	90	5.349.695.117	89.54	5.683.199.504	89.55	6.251.519.454	89.56	6.876.671.400	89.57	7.564.338.540	89.58	8.320.772.394	89.58	40.046.196.409	Kecamatan Tarik







Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	2.949.039.367	100	4.001.670.849	100	4.401.837.934	100	4.842.021.727	100	5.326.223.900	100	5.858.846.290	100	27.379.640.067	Kecamatan Taman
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik	Pesen	100	100	202.450.109	100	24.139.700	100	292.572.614	100	321.829.876	100	354.012.863	100	389.414.150	100	1.584.419.313	Kecamatan Taman
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen : perencanaan penganggaran dan pelaporan	Persen	100	100	15.470.000	100	54.470.384	100	59.917.422	100	65.909.165	100	72.500.081	100	79.750.089	100	348.017.141	Kecamatan Taman





Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	53.762.217	100	52.257.540	100	130.643.850	100	143.708.235	100	158.079.059	100	173.886.964	100	712.337.865	Kecamatan Waru
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	85	87	39.402.491	100	42.830.375	100	70.982.553	100	85.179.063	100	93.696.969	100	103.066.666	100	435.158.118	Kecamatan Waru
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100	100	4.909.220.779	100	15.671.248.007	100	17.343.372.808	100	19.077.710.088	100	20.985.481.097	100	23.084.029.207	100	101.071.061.987	Kecamatan Gedangan





Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	90	90	5.501.885.659	90	6.220.341.526	90	6.842.375.678,60	90	7.526.613.246	90	8.279.274.571	90	9.107.202.028	90	43.477.692.709	Kecamatan Sedati
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	Persen	a. 75 b. 72,73 c. 100	a. 75 b. 72,73 c. 100	2.438.287.739	a. 75 b. 72,73 c. 100	838.878.534	a. 75 b. 72,73 c. 100	922.766.387	a. 75 b. 74,55 c. 100	1.015.043.026	a. 75 b. 76,36 c. 100	1.116.547.329	a. 75 b. 78,18 c. 100	1.228.202.062	a. 75 b. 78,18 c. 100	955.092.451	Kecamatan Sedati
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	57.597.505	100	87.561.155	100	96.317.271	100	105.948.998	100	116.543.897	100	128.198.287	100	164.114.471	Kecamatan Sedati







Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	persen	100	100	292.884.811	100	224.425.458	100	246.868.004	100	271.554.804	100	298.710.285	100	328.581.313	100	1.663.024.675	Kecamatan Tanggulangin
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	12.425.000	100	1.019.275.000	100	1.121.202.500	100	1.233.322.750	100	1.356.655.025	100	1.492.320.528	100	6.235.200.803	Kecamatan Tanggulangin
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	93,1	93	6.084.476.159	93,15	7.271.231.420	93,2	7.998.354.562	93,25	8.798.190.018	93,3	9.678.009.020	93,4	10.645.809.922	93,4	50.476.071.101	Kecamatan Tulangan











Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. 100 b. 85 c. 100	a. 100 b. 85 c. 100	1.768.058. 111	a. 100 b. 86 c. 100	1.058.152. 798	a. 100 b. 87 c. 100	1.163.968. 078	a. 100 b. 88 c. 100	1.280.364. 886	a. 100 b. 89 c. 100	1.408.401. 374	a. 100 b. 90 c. 100	1.549.241. 512	a. 100 b. 90 c. 100	8.228.186. 758	Kecamatan Sukodono
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	79	79	99.000.00 0	80	99.000.00 0	82	99.000.00 0	84	108.900.0 00	86	119.790.0 00	88	131.769.0 00	88	657.459.0 00	Kecamatan Sukodono
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	100	32.358.00 3	100	140.210.6 90	100	154.231.7 59	100	169.654.9 35	100	186.620.4 28	100	205.282.4 71	100	888.358.2 87	Kecamatan Sukodono



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa Dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Dan Mengurangi Kemiskinan																				
		Tujuan 1: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif melalui percepatan industri dan perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.				182.860.3 46.360		247.139.6 56.577		306.425.8 23.867		326.050.2 46.781		348.700.8 46.355		398.722.4 14.006		1.809.899. 333.946			
		Sasaran 1.1: Berkembangnya Sektor Perdagangan, industri, investas, pertanian dan perikanan.				153.342.7 58.776		188.887.8 29.870		242.948.8 80.572		259.513.7 44.740		278.584.8 57.932		324.922.3 46.910		1.448.200. 418.800			
		1. <i>Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi</i>	<i>Persen</i>	0,81	0,85	17.006.86 5.360	0,92	16.436.29 2.166	1,25	12.383.78 3.799	1,29	12.749.29 7.187	1,33	13.125.77 5.665	1,52	13.513.54 8.144	1,52	85.215.56 2.321			
2	18	06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100	100	15.445.84 9.360	100	14.922.76 6.887	100	9.413.125. 299,00	100	9.689.517. 948,00	100	9.974.202. 930	100	10.267.42 8.737	100	69.712.89 1.161	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase kebijakan penanaman modal yang disusun	Persen	100	100	-	100	335.838.699	100	549.015.300	100	565.485.800	100	582.450.400	100	599.923.900	100	2.632.714.099	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase realisasi kepeminatan investasi	Persen	422	100	-	100	264.989.000	100	886.490.500	100	913.085.200	100	940.477.800	100	968.692.100	100	3.973.734.600	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat waktu sesuai SOP	Persen	94,22	94,22	94,98	94,22	94,22	94,22	94,22	94,22	94,22	94,22	94,22	94,22	94,22	94,22	94,22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	Persen	97,11	97,11	97,82	97,11	97,11	97,11	97,11	97,11	97,11	97,11	97,11	97,11	97,11	97,11	97,11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						1.397.049.808				753.296.700		1.371.957.300		1.413.116.939		1.455.510.535		1.499.175.407		7.890.106.689	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Persentase kontribusi retribusi pelayanan perizinan tertentu terhadap total retribusi	Persen	44,61	25,23		20,34		20,58		20,53		20,26		20,68		20,68		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rupiah	1.391.921.280.000	1.391.921.280.000		1.405.840.492.000		1.419.898.897.000		1.434.097.886.000		1.448.438.865.000		1.462.923.250.000		1.462.923.250.000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Nilai realisasi investasi PMA	Rupiah			163.966.192		159.400.880		163.195.400		168.091.300		173.134.000		178.328.000		1.006.115.772		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Nilai realisasi investasi PMDN	Rupiah	5.645.831.413.895	5.645.831.413.895		5.702.289.720.000		5.759.312.624.000		5.816.900.000.000		5.875.074.800.000		5.933.825.550.000		5.933.825.550.000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		<b>2. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan</b>	<b>Persen</b>	<b>16,02</b>	<b>16,09</b>	<b>21.286.988.995</b>	<b>16,17</b>	<b>13.840.062.551</b>	<b>16,22</b>	<b>18.634.082.787</b>	<b>16,24</b>	<b>19.427.894.714</b>	<b>16,33</b>	<b>19.931.077.187</b>	<b>16,75</b>	<b>20.044.684.327</b>	<b>16,75</b>	<b>113.164.790.561</b>		
3	30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persen	15,78 (3 pasar)	15,78 (3 Pasar)	18.615.442.299	15,78 (3 pasar)	10.398.188.923	15,78 (3 pasar)	12.992.084.159	21 (4 pasar)	13.545.546.944	26,31 (5pasar)	13.896.376.610	31 (6pasar)	13.975.585.957	31 (6pasar)	83.423.224.892	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	a.Nilai Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	Nilai	-	-	<9	<9	<9	<9	<9	<9	<9	<9	<9	<9	<9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
				b. persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	-	-	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
						443.746.500		962.734.000		921.934.000		961.208.388		986.103.686		991.724.477		5.267.451.051			
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non migas	USD	1.200.000.000	1.200.000.000	2.087.322.866	1.300.000.000	1.845.109.122	1.350.000.000	4.086.034.122	1.400.000.000	4.260.099.176	1.450.000.000	4.370.435.744	1.500.000.000	4.395.347.228	1.500.000.000	21.044.348.258	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang terstandarisasi	Persen	85	95	140.477.330	95	634.030.506	95	634.030.506	95	661.040.206	95	678.161.147	95	682.026.665	95	3.429.766.360	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3. <i>Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri</i>	Persen	51,17	51,73	32.947.196.886	52,29	39.885.026.977	52,81	40.299.592.855	53,19	43.987.251.538	53,45	46.892.520.311	54,21	49.813.619.786	54,21	253.825.208.353	
X	XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	90	90	26.144.295.604	90	30.230.567.359	90	31.742.095.727	90	33.329.200.513	90	34.995.660.539	90	36.745.443.566	90	193.187.263.308	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persen	-	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		a. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK				4.452.908.298		6.064.125.179		3.273.530.690		3.412.983.097		3.501.379.360		3.521.337.222		24.226.263.846	
		b. Persentase IKM yang dibina / dikembangkan	Persen	-	-		3,2		3,22		3,24		3,26		3,28		3,28		Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	-	-	50.000.000	0,17	50.000.000	0,34	200.000.000	0,51	208.520.000	0,68	213.920.688	0,85	215.140.016	0,85	937.580.684	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data base IKM yang terupdate	Persen	-	1,17	50.000.000	0,46	150.000.000	0,92	623.909.814	1,38	650.488.372	1,84	667.336.021	2,3	671.139.836	2,3	2.812.874.043	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisata Kabupaten Sidoarjo	Orang	870.060	887.461	693.733.444	904.862	1.649.452.519	939.664	2.240.176.666	974.467	3.026.783.009	1,000,569	3.619.821.390	1,026,671	4.059.827.973	1,026,671	15.289.795.001	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-Rata Lama Tinggal	Hari	1	1	684.564.975	1	447.925.000	2	759.979.417	2	1.238.766.449	2	1.585.621.055	2	2.108.876.003	2	6.825.732.899	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase produk ekonomi kreatif yang memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	Persen	-	-	-	-	-	-	7	489.436.294	10	502.112.694	12	504.974.736	12	1.496.523.724	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Industri Usaha Kreatif Pendukung Pariwisata	Organisasi	25	25	871.694.565	25	1.292.956.920	28	1.459.900.541	31	1.631.073.804	34	1.806.668.584	37	1.986.880.434	37	9.049.174.848	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				<b>4. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam Arti Luas</b>	Persen	2,75	2,55	82.101.707.535	2,77	118.726.448.176	2,82	171.631.421.131	2,95	183.349.301.301	3,11	198.635.484.769	3,25	241.550.494.653	3,25	995.994.857.564	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparaturnya perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100	100	28.750.512.145	100	30.863.060.811	100	31.171.691.419	100	31.483.408.333	100	31.798.242.417	100	47.155.725.719	100	201.222.640.844	Dinas Pangan dan Pertanian



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab												
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kw/Ha	425,97	426,160	3.694.829,279	426,37	1.423.636,470	426,56	2.135.454,705	426,75	3.203.182,058	426,94	4.804.773,086	427,14	7.207.159,629	427,14	22.469,035,227	Dinas Pangan dan Pertanian										
				Produktivitas Tanaman Tebu	Kw/Ha	749	749,750														750,5	751,25	752	752,75	753,51	753,51	Dinas Pangan dan Pertanian				
				Produksi Peternakan : Daging	Kg	35.351,442	35.705,000														35,973,000	36,333,000	2.135,454,705	36,787,000	3.203,182,058	37,339,000	4.804,773,086	37,992,000	7.207,159,629	37,992,000	Dinas Pangan dan Pertanian
				Telur	Kg	2.729,155	2,756,000														2,777,000	2,805,000	2,840,000	2,840,000	2,883,000	2,883,000	2,933,000	2,933,000	2,933,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
				Susu	Liter	11,325,983	11,439,000														11,525,000	11,640,000	11,786,000	11,786,000	11,963,000	11,963,000	12,172,000	12,172,000	12,172,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
				Prosentase peningkatan populasi ternak	Persen	1	0,75														0,75	1,00	1,25	1,5	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	Dinas Pangan dan Pertanian	
				Prosentase Penyaluran pupuk bersubsidi	Persen	94	94,10														94,2	94,3	94,4	94,4	94,5	94,5	94,6	94,6	94,6	Dinas Pangan dan Pertanian	
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	Persen	80	81	4.721.128,458	82	2.875.192,066	83	4.312.788,099	84	6.469.182,149	85	9.703.773,223	86	14.555,659,834	86	42.637,723,828	Dinas Pangan dan Pertanian										



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021	2022		2023		2024		2025		2026		2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase hewan yang mendapatkan tindakan penjaminan kesehatan hewan	Persen	-	-	20	25	30	35	40	40	Dinas Pangan dan Pertanian							
				Prosentase unit usaha yang telah menghasilkan produk pangan dan non pangan asal hewan yang dinyatakan ASUH	Persen	-	-	938.237,364	5	3.121.545,959	7,5	2.642.197,743	10	2.592.197,743	12,5	4.417.197,743	15	4.902.197,743	15	18.613,574,295	Dinas Pangan dan Pertanian
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Angka	93,13*	85	85	85	86	87	88	88	Dinas Pangan dan Pertanian							
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase lahan yang dikendalikan dan ditanggulangi dari serangan OPT pada tanaman pangan dan hortikultura	Persen	17	10	11	12	13	14	15	15	Dinas Pangan dan Pertanian							
				Prosentase lahan yang dikendalikan dan ditanggulangi dari serangan OPT pada tanaman perkebunan	Persen	14	7	8	9	10	11	12	12	Dinas Pangan dan Pertanian							
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan	Jumlah	-	-	-	0	-	10	100.000,000	12	150.000,000	14	225.000,000	16	337.500,000	16	812.500,000	Dinas Pangan dan Pertanian





Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase peningkatan kenaikan kelas kelompok tani ke kelas madya	Persen	2.4	2.3	1.495.426.735	2.3	372.398.716	2.4	558.598.074	2.5	837.897.111	2.6	1.256.845.667	2.7	1.885.268.500	2.7	6.406.434.802	Dinas Pangan dan Pertanian
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Prosentase infrastruktur kemandirian pangan dalam kondisi baik	Persen	-	-	-	-	-	10	2.497.209.322	10	3.745.813.983	11,60	5.618.720.975	13,30	8.428.081.462	15	20.289.825.741	Dinas Pangan dan Pertanian
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat Konsumsi Beras perkapita perhari ≤ dari 275 gr	gr/kapita/hari	240	239	498.402.872	238	634.728.254	237	4.359.221.439	236	6.538.832.159	235	9.808.248.238	234	14.712.372.357	234	36.551.805.319	Dinas Pangan dan Pertanian
				Prosentase Peningkatan Cadangan Pangan (stok pangan yang dikordinasikan)	Persen	-	-	-	-	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase desa rawan pangan yang ditangani	Persen	-	-	-	-	-	5	504.018.615	10	756.027.923	15	1.134.041.884	20	1.701.062.826	20	4.095.151.248	Dinas Pangan dan Pertanian



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persen	83.7	84	210.000.000	84.2	90.000.000	84.4	135.000.000	84.6	202.500.000	84.8	303.750.000	85	455.625.000	85	1.396.875.000	Dinas Pangan dan Pertanian
X	XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	100	9.077.748.390	100	8.675.100.718	100	8.761.851.725	100	8.849.470.242	100	8.937.964.945	100	18.012.247.400	100	62.314.383.420	Dinas Perikanan
3	25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kg	15.540.300	15.800.000		15.850.000		15.875.000		15.880.000 kg		15.885.000		15.890.000		15.890.000		Dinas Perikanan
		Jumlah produksi perikanan tangkap perairan umum daratan	Kg	553.200	560.000	633.268.782	561.000	898.197.866	562.000	936.461.095	563.000 kg	960.715.437	564.000	966.191.515	565.000	981.360.772	565.000	5.376.195.467	Dinas Perikanan
3	25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	kg	78.750.800	77.038.755	29.081.060.601	77.039.755	16.756.530.794	77.040.755	58.152.400.510	77.041.755	60.629.692.772	77.042.755	62.200.001.815	77.043.755	62.554.541.825	77.043.755	289.374.228.316	Dinas Perikanan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar	kg	22.773.775	23.907.109		23.917.109		23.920.109		23.925.109		23.930.109		23.935.109		23.935.109		Dinas Perikanan		
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	jumlah pelanggaran yang ditemukan di wilayah perairan	pelanggaran	6	6	56.849.870	6	79.396.590	5	88.877.940	5	92.664.140	4	95.064.141	4	95.606.007	4	508.458.689	Dinas Perikanan
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	Kg	8.621.911	8.625.000	2.859.184.614	8.630.000	52.753.256.347	8.635.000	55.000.545.067	8.640.000	56.425.059.185	8.645.000	56.746.682.022	8.650.000	57.637.604.930	8.650.000	281.422.332.165	Dinas Perikanan
		Sasaran 1.2: Berkembangnya koperasi, usaha mikro, koperasi, dan kemandirian desa					29.517.587.584		58.251.826.707		63.476.943.295		66.536.502.041		70.115.988.423		73.800.067.096		361.698.915.146		
			1. Persentase Usaha Mikro Mandiri	Persen	1,83	1,84	2.816.758.608	1,93	25.617.733.775	1,98	26.386.265.789	2,04	27.177.853.762	2,10	27.993.189.375	2,15	28.832.985.056	2,15	138.824.786.365		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	Persen	4,62	4,75	1.552.670.150	4,84	21.915.779.225	6,06	22.573.252.602	9,09	23.250.450.180	12,12	23.947.963.685	15,16	24.666.402.596	15,16	117.906.518.438	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	Persen	-	-	1.264.088.458	1,93	3.701.954.550	1,98	3.813.013.187	2,04	3.927.403.582	2,1	4.045.225.690	2,15	4.166.582.460	2,5	20.918.267.927	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				<b>2. Persentase Koperasi Berkualitas</b>	Persen	20,7	21,84	8.455.257.896	23,20	10.066.321.852	24,69	10.370.523.996	26,39	10.681.629.417	28,30	11.002.078.300	30,34	11.319.789.217	30,34	61.895.600.678	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	75	80	7.156.472.646	87	8.765.393.468	87	9.030.567.761	87	9.301.474.494	87	9.580.518.729	87	9.867.934.291	87	53.702.361.389	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Prosentase Koperasi yang mendapat Fasilitas Pendampingan Ijin Usaha Simpan Pinjam	Persen	-	-	-	0,68	57.992.500	0,82	59.732.275	0,88	61.524.243	1,02	63.369.971	1,22	65.271.070	1,22	307.890.059	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Persen	82	82,5	74.417.500	83	171.759.980	83,5	176.912.779	84,1	182.220.163	84,6	187.686.768	85,2	193.317.371	85,2	986.314.561	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	Persen	40,22	41,62	138.825.146	43,02	465.156.744	44,42	479.111.446	45,82	493.484.790	47,22	508.289.333	48,62	511.186.582	48,62	2.596.054.041	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang di diklat	Persen	-	52,28	903.953.494	59,4	316.021.125	66,83	325.501.759	74,26	335.266.812	81,68	345.324.816	89,11	355.684.560	89,11	2.581.752.566	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang direvitalisasi	Persen	-	3,01	181.589.110	3,11	289.998.035	3,21	298.697.976	3,31	307.658.915	3,43	316.888.683	3,55	326.395.343	3,55	1.721.228.062	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				3. Persentase Desa Mandiri	Persen	0,62	10,25	18.245.571.080	12,42	22.567.771.080	13,98	26.720.153.510	15,53	28.677.018.862	17,08	31.120.720.748	18,63	33.647.292.823	18,63	160.978.528.103	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	80	80	7.778.306.611	90	8.393.239.093	91	9.779.263.002	92	10.757.189.303	93	11.832.908.233	94	13.016.199.056	94	61.557.105.298	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase penataan desa yang terfasilitasi	Persen	-	-		1,55	34.075.700	2,17	1.200.000.000	2,8	1.320.000.000	3,42	1.452.000.000	4,04	1.597.200.000	4,04	5.603.275.700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang melakukan kerjasama	Persen	-	-	21,1 2	97.186.28 0	21,7 4	296.912.1 67	22,3 6	326.603.3 84	22,9 8	359.263.7 22	23,6	395.190.0 95	23,6	1.475.155. 648	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	a. Persentase peningkatan status desa	Persen	10,25	10,2 5	27,9 5		31,0 6		34,1 6		37,2 7		40,3 7		40,3 7		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
				b. Persentase desa yang memiliki Bumdes	Persen	-	-	68,3 2		71,4 3		74,5 3		77,6 4		80,7 4		80,7 4		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
									8.474.587. 594		11.750.09 2.807		12.957.86 8.452		14.416.97 0.827		15.488.16 7.909		76.530.84 2.886	
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga desa yang diberdayakan	Persen	-	80,7 5	80,7 5	1.992.676. 875	82,3	2.486.109. 889	83,8 5	2.830.070. 878	85,4	3.059.577. 966	86,9 6	3.150.535. 763	86,9 6	15.812.14 8.571	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Tujuan 2: Terciptanya lapangan kerja yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan				53.139.49 5.757		53.141.75 9.188		109.943.1 53.630		116.029.9 88.192		124.593.1 15.359		133.828.0 84.452		590.675.5 96.579			
		Sasaran 2.1: Terserapnya tenaga kerja untuk mengatasi pengangguran				17.102.49 4.097		16.977.69 6.297		30.579.66 3.876		33.637.63 0.264		37.010.74 6.124		40.711.82 0.737		176.020.0 51.395			
		1. <i>Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor</i>	Persen	89,03	89,1 7	17.102.49 4.097	89,6 1	16.977.69 6.297	89,9 1	30.579.66 3.876	90,2 4	33.637.63 0.264	90,5 6	37.010.74 6.124	90,8 6	40.711.82 0.737	90,8 6	176.020.0 51.395			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	88	88	9.283.970. 246	88	8.917.588. 466	88	11.255.58 9.419	88,5	12.381.14 8.361	88,5	13.619.26 3.197	89	14.981.18 9.516	89	70.438.74 9.204	Dinas Tenaga Kerja





Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	a. Persen b. Persen	-	-	-	a. 50 b. 100	115.725.00	a. 53 b. 100	182.226.00	a. 55 b. 100	200.448.600	a. 57 b. 100	220.493.460	a. 59 b. 100	242.542.806	a. 59 b. 100	961.435.866	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	a. Persen b. Persen c. Persen d. Persen	a. 80,91 b. 18,57 c. 49 d. 42,85	a. 81,5 b. 19 c. 49 d. 42,9 5	5.286.032.693	a. 82 b. 20 c. 50 d. 43	4.103.614.662	a. 82,5 b. 21 c. 52 d. 44	15.334.115.807	a. 83 b. 21 c. 54 d. 45	16.867.527.388	a. 83,5 b. 21 c. 55 d. 46	18.554.280.126	a. 84 b. 21 c. 56 d. 47	20.409.708.139	a. 84 b. 21 c. 56 d. 47	80.555.278.815	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persen	51,61	60	1.263.712.642	53	2.416.740.964	57	2.158.803.383	60	2.374.683.721	63	2.612.152.093	65	2.873.367.303	65	13.699.460.107	Dinas Tenaga Kerja



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	a. Persen b. Persen c. Persen	a. 25 b. 26 c. 36,6	a. 10 b. 26 c. 37	1.201.498. 329	a. 22 b. 25 c. 37,5	1.385.096. 828	a. 23 b. 25 c. 38	1.571.633. 120	a. 24 b. 26 c. 39	1.728.796. 432	a. 25 b. 26 c. 40	1.901.676. 075	a. 26 b. 26 c. 40,5	2.091.843. 683	a. 26 b. 26 c. 40,5	9.880.544. 468	Dinas Tenaga Kerja
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persen	-	-	67.280.18 7	100	38.930.37 7	100	77.296.14 8	100	85.025.76 2	100	102.881.1 72	100	113.169.2 90	100	484.582.9 36	Dinas Tenaga Kerja
Sasaran 2.2: Menurunnya Penduduk Miskin						36.037.00 1.660	36.164.06 2.891	79.363.48 9.754	82.392.35 7.928	87.582.36 9.235	93.116.26 3.715	414.655.5 45.184								
			1. Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	Persen	94,41	93,7 8	36.037.00 1.660	94,0 0	36.164.06 2.891	94,6 0	79.363.48 9.754	94,7 0	82.392.35 7.928	94,8 0	87.582.36 9.235	95,0 0	93.116.26 3.715	95,0 0	414.655.5 45.184	





Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	Persen	100	100	329.082.678	100	597.630.590	100	4.009.673.329	100	4.407.970.663	100	4.851.704.729	100	5.336.875.202	100	19.532.937.191	Dinas Sosial
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase sarpras dalam kondisi yang baik	Persen	100	100	79.997.233	100	203.464.450	100	203.464.450	100	672.794.800	100	597.794.800	100	522.794.800	100	2.280.310.533	Dinas Sosial
Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Yang Modern Dan Berkeadilan Dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan																					
Tujuan : Meningkatkan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.							1.195.582.548.043		1.124.050.626.914		2.368.772.922.141		2.443.988.008.864		2.606.085.746.232		2.758.055.428.735		12.496.535.280.929		
Sasaran 1.1: Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata							1.057.801.838.644		948.394.530.600		2.113.084.254.050		2.161.302.827.960		2.287.881.830.736		2.403.104.792.570		10.971.570.074.560		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		<b>1. Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum</b>	<b>Indeks</b>	<b>0,742</b>	<b>0,748</b>	<b>905.301.016.368</b>	<b>0,754</b>	<b>824.536.024.291</b>	<b>0,760</b>	<b>1.989.136.364.140</b>	<b>0,766</b>	<b>2.034.062.149.059</b>	<b>0,772</b>	<b>2.158.497.083.945</b>	<b>0,777</b>	<b>2.271.161.571.100</b>	<b>0,777</b>	<b>10.182.694.208.903</b>			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100	100	26.209.609.620	100	24.593.102.782	100	30.000.000.000	100	31.278.000.000	100	32.088.100.200	100	32.271.002.371	100	176.439.814.973	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Sapas Pengelolaan SDA yang dikelola dan dipelihara	Persen	100	100	89.059.001.361	100	18.382.152.780	100	38.934.561.400	100	40.593.173.716	100	41.644.536.915	100	41.881.910.775	100	270.495.336.947	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
				Persentase Saluran Irigasi yang ditingkatkan dan dipelihara	Persen	87	87		88		89		90		91		92		92		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	Persen	-	-	-	26	60.714.126.970	27	104.759.397.770	28	111.200.175.027	29	116.705.732.130	30	120.887.067.292	30	514.266.499.189	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	Persen	90	90	329.501.022.817	90,5	442.089.017.468	91	994.044.259.888	91,5	1.036.390.545.359	92	1.063.233.060.484	92,5	1.069.293.488.929	92,5	4.934.551.394.945	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparaturnya perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100	100	13.702.04 9.379	100	14.946.04 7.635	100	17.309.74 5.484	100	19.040.72 0.032	100	20.944.79 2.035	100	23.039.27 1.239	100	108.982.6 25.804	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase prasarana air bersih yang disediakan sesuai target	Persen	35,54	35,8 3	8.730.685. 000	41,0 8	68.952.47 5.000	46,5 5	97.774.62 2.500	46,8 6	11.291.08 4.750	47,1 7	12.420.19 3.225	47,4 8	13.662.21 2.548	47,4 8	212.831.2 73.023	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase prasarana sanitasi yang disediakan sesuai target	Persen	95,5	96,7 6	29.556.83 3.345	97,4	27.363.44 4.382	98,0 5	28.731.61 6.601	98,6 9	30.168.19 7.431	99,3 4	31.676.60 7.303	100	33.988.43 7.668	100	181.485.1 36.730	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase prasarana perumahan yang disesuaikan sesuai target tahun berkenaan	Persen	-	90	25.201.38 4.870	91	20.717.26 9.958	92	151.862.5 33.458	93	167.048.7 86.804	94	183.753.6 65.484	95	202.129.0 32.032	95	750.712.6 72.606	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung wilayah yang sesuai ketentuan	Persen	42,14	65	315.939.100.303	65,5	11.454.045.805	66	382.286.311.367	66,5	420.514.942.503	67	462.566.436.754	67,5	508.823.080.429	67,5	2.101.583.917.161	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase implementasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Persen	20	20	2.568.764.138	30	2.338.619.580	50	3.895.204.607	70	4.342.225.068	90	4.842.572.574	100	5.402.873.582	100	23.390.259.549	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	a. Presentase terlaksananya sertifikasi pekerja konstruksi terampil sesuai target tahun berkenaan	Persen	100	100	561.020.062	100	630.375.000	100	678.834.275	100	746.717.703	100	821.389.473	100	903.528.420	100	4.341.864.932	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
				b. Presentase Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi sesuai target tahun berkenaan	Persen	-	-	-	80	450.000.000	85	495.000.000	90	544.500.000	95	598.950.000	100	658.845.000	100	2.747.295.000	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	Persen	65	66	513.253.260	67	2.460.945.134	68	621.036.445	69	683.140.089	70	751.454.098	71	826.599.508	71	5.856.428.534	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah korban pasca bencana dan Rumah susun yang tersedia	Persen	84	85	4.382.997.023	86	7.239.792.080	87	5.303.426.398	88	5.833.769.038	89	6.417.145.941	90	7.058.860.536	90	36.235.991.016	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penyelesaian luasan kawasan kumuh	Persen	-	9,73	1.688.220.000	27,73	1.875.800.000	45,73	566.280.000	63,73	622.908.000	81,73	685.198.800	100	753.718.680	100	6.192.125.480	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase kawasan yang dilakukan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persen	-	-	-	11	1.218.000.000	22	1.339.800.000	33	1.473.780.000	44	1.621.158.000	55	1.783.273.800	55	7.436.011.800	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang





Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	04	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase kawasan Permukiman yang ditingkatkan Prasarana Sarana dan Utilitas Umumnya sesuai target tahun berkenaan	Persen	-	-	-	91	577.500.000	92	606.375.000	93	636.693.750	94	668.528.437	95	701.954.859	95	3.191.052.046	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terfasilitasinya permasalahan pertanahan sesuai prosedur	Persen	100	100	140.697.575	100	190.335.300	100	170.244.066	100	187.268.472	100	205.995.320	100	226.594.852	100	1.121.135.584	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terfasilitasinya pengadaan tanah pemerintah non Perangkat Daerah sesuai prosedur	Persen	100	100	179.375.600	100	139.681.600	100	217.044.476	100	238.748.924	100	262.623.816	100	288.886.198	100	1.326.360.613	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	90	90	19.442.898.610	92	18.917.009.663	93	24.592.112.562	94	27.051.323.818	95	29.756.456.200	96	32.732.101.820	96	152.491.902.673	Dinas Perhubungan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	Persen	70	70	75	80	80	85	85	85	85	85	85	85	Dinas Perhubungan			
				Prosentase Pelayanan / pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persen	100	72	34.294.55 3.457	72,5	95.511.52 8.404	73	100.381.2 52.143	73,5	118.658.4 01.736	74	140.175.0 30.548	74,5	166.123.9 79.714	74,5	655.144.7 46.002	Dinas Perhubungan
				Prosentase kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	Persen	70	70	80	80	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	Dinas Perhubungan	
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase perlengkapan transportasi sungai yang tersedia	Persen	-	-	22.689.25 0	10	27.820.05 0	15	33.384.06 0	20	40.060.87 2	25	48.073.04 6	30	47.048.45 6	30	219.075.7 34	Dinas Perhubungan
2	15	05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase titik perlintasan kereta api wewenang kabupaten yang telah dibangun fasilitas pengamanan	Persen	45,3	45,3	3.606.860. 698	46	3.746.934. 700	47,5	4.533.321. 640	48,9	5.476.985. 968	49,6	6.609.383. 162	50,4	7.677.802. 393	50,4	31.651.28 8.561	Dinas Perhubungan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		<b>2. Indeks Infrastruktur Pendidikan</b>	Indeks	80,49	82,53	89.987.856.788	84,56	48.287.697.300	86,60	40.820.000.000	88,64	35.800.000.000	90,67	28.800.000.000	92,71	21.300.000.000	92,71	264.995.554.088		
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase bangunan ruang kelas SD katagori baik	Persen	95,10	95,10	95,30	95,45	95,55	95,65	95,85	95,85	95,85	95,85	95,85	95,85	264.995.554.088	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Persentase bangunan ruang kelas SMP katagori baik	Persen	95,30	95,30	95,50	95,65	95,70	95,75	95,80	95,80	95,80	95,80	95,80	95,80	264.995.554.088		
				<b>3. Indeks Infrastruktur Kesehatan</b>	Indeks	70,82	71,13	62.512.965.488	71,13	75.570.809.009	72,32	83.127.889.910	72,32	91.440.678.901	72,59	100.584.746.791	72,59	110.643.221.470	0,725	523.880.311.569
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	12. Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk	Penduduk	1: 85.000	1: 85.000	1: 77,384	1: 72,548	1: 66,329	1: 62,744	1: 58,038	1: 58,038	1: 58,038	1: 58,038	1: 58,038	1: 58,038	1: 58,038	523.880.311.569	Dinas Kesehatan
				Sasaran 1.2: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan terhadap bencana			137.780.709.399		175.656.096.314		255.688.668.091		282.685.180.904		318.203.915.496		354.950.636.165		1.524.965.206.369	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		1. Indeks Kualitas Air	Indeks	51,51	51,52	38.309.217.630	51,53	39.602.193.324	51,54	49.791.498.260	51,55	54.135.198.086	51,56	59.881.501.894	51,57	64.689.865.743	51,57	306.409.474.938			
XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparaturnya perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	84	86	35.409.041.635	85	36.412.636.786	86	44.479.500.000	87	48.243.500.000	88	53.370.500.000	89	57.522.500.000	89	275.437.678.421	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	a. Persentase pemantauan air badan air (ABA) yang mengalami peningkatan kualitas BOD	Persen	53,64	42	2.569.564.802	43	2.783.237.043	45	4.663.055.540	47	5.174.361.094	49	5.717.931.203	51	6.290.987.983	51	27.199.137.665	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Dampak Timbulan Limbah B3 yang dilakukan melalui Fasilitasi Standar Teknis Pengelolaan Limbah B3 dalam pemenuhan Persetujuan Lingkungan	Persen	-	100	124.075.200	100	202.735.200	100	233.942.720	100	257.336.992	100	283.070.691	100	311.377.760	100	1.412.538.564	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	206.535.993	100	203.584.295	100	415.000.000	100	460.000.000	100	510.000.000	100	565.000.000	100	2.360.120.288	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			2. Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,13	85,14	42.018.690.161	85,15	67.723.770.581	85,16	140.742.500.000	85,17	154.227.500.000	85,18	173.112.500.000	85,19	191.552.500.000	85,19	769.377.460.742		
	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	b. Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2 dan NO2	Persen	66,67	45		45		45		46		47		48		48	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a) Persentase penanganan sampah di TPA	Persen	43	43		47		50		53		56		59		59	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
				b) Persentase pengurangan sampah di TPST	Persen	28	28	41.108.062.661	28	66.395.543.081	29	139.157.500.000	29	152.522.500.000	30	171.287.500.000	30	189.602.500.000	30	760.073.605.742	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	a) Persentase desa / kelurahan peduli lingkungan hidup	Persen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,83		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
						550.627.500		647.027.500		1.110.000.000		1.205.000.000		1.300.000.000		1.400.000.000		6.212.655.000		
2			b) Persentase sekolah peduli lingkungan hidup	Persen	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelembagaan / pokmas yang menerima penghargaan lingkungan hidup	Persen	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	3.091.200.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
						360.000.000		681.200.000		475.000.000		500.000.000		525.000.000		550.000.000		3.091.200.000		
			<b>3. Indeks Tutupan Lahan</b>	<b>Indeks</b>	<b>27,09</b>	<b>27,10</b>	<b>13.527.593.112</b>	<b>27,11</b>	<b>27.076.380.896</b>	<b>27,12</b>	<b>16.535.000.000</b>	<b>27,13</b>	<b>17.300.000.000</b>	<b>27,14</b>	<b>18.065.000.000</b>	<b>27,15</b>	<b>19.293.137.330</b>	<b>27,15</b>	<b>111.797.111.338</b>	
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	Persen	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	463.137.330	100	779.466.358	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
						316.329.028		-		-		-		-						



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH yang terkelola	Persen	2,17	2,17	13.051.50 2.557	2,28	26.846.51 5.696	2,36	15.750.00 0.000	2,44	16.425.00 0.000	2,53	17.100.00 0.000	2,61	17.775.00 0.000	2,61	106.948.0 18.253	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan	Persen	2,98	3,00	159.761.5 27	3,30	229.865.2 00	3,60	785.000.0 00	4,00	875.000.0 00	4,4	965.000.0 00	4,8	1.055.000. 000	4,8	4.069.626. 727	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
				<b>4. Indeks Resiko Bencana</b>	<b>Indeks</b>	<b>112,82</b>	<b>99,1 2</b>	<b>43.925.20 8.496</b>	<b>98,4 4</b>	<b>41.253.75 1.513</b>	<b>92,5 3</b>	<b>48.619.66 9.831</b>	<b>86,9 8</b>	<b>57.022.48 2.818</b>	<b>81,7 6</b>	<b>67.144.91 3.602</b>	<b>76,8 6</b>	<b>79.415.13 3.092</b>	<b>76,8 6</b>	<b>337.381.1 59.351</b>	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparaturnya perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100	100	18.586.82 6.239	100	20.445.50 8.863	100	22.490.05 9.749	100	24.739.06 5.724	100	27.212.97 2.297	100	29.934.26 9.526	100	143.408.7 02.398	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab																		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026																				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																		
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase logistik kebencanaan yang tersalurkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
																				2. Persentase korban bencana yang terehabilitasi	Persen	100	100	1.635.520.961	100	1.817.245.512	100	1.998.970.063	100	2.198.867.070	100	2.418.753.776	100	2660629154	100	12.729.986.536	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1. Persentase satuan petugas PMK yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi	Persen	32	40	40	45	50	55	60	60	23.702.861.296	18.990.997.138	24.130.640.019	30.084.550.023	37.513.187.529	46.820.234.412	60	181.242.470.417	Badan Penanggulangan Bencana Daerah															
																							2. Persentase mobil PMK dengan kondisi layak fungsi	Persen	80	80	80	80	80	85	85	85	85	85	85	85	Badan Penanggulangan Bencana Daerah





Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Misi 4 : Membangun SDM Unggul Dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan Serta Kebutuhan Dasar Lainnya																				
		Tujuan : Terwujudnya pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata serta terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya				1.857.271.756.110		1.820.533.525.314		2.206.293.874.268		2.291.885.788.831		2.379.435.008.614		2.480.686.541.759		13.036.106.494.895			
		Sasaran 1.1: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat				1.450.729.682.749		1.163.977.629.950		1.479.164.364.600		1.494.090.739.996		1.504.516.974.177		1.520.935.084.952		8.613.414.476.424			
		1. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,93	15,01		15,22		15,41		15,89		16,12		16,44		16,44				
		2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,50	10,33	1.450.729.682.749	1.163.977.629.950	1.479.164.364.600	1.494.090.739.996	1.504.516.974.177	1.520.935.084.952	8.613.414.476.424									
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100	100	755.434.113.119	100	574.136.879.854	100	771.978.582.440	100	779.698.368.265	100	787.495.351.947	100	795.370.305.467	100	4.464.113.601.092	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	Persen	95,72	92,80	93,20	94,20	95,50	97,75	100,00	100,00							
				APK SD sederajat	Persen	109,96	105,50	104,75	103,50	102,50	101,50	100,00	100,00							
				APK SMP sederajat	Persen	99,46	99,01	99,15	99,25	99,45	99,70	100,00	100,00							
				Persentase PAUD yang telah terakreditasi A	Persen	36,00	36,00	37,00	39,00	40,00	43,00	45,00	45,00							
				Persentase SD yang telah terakreditasi A	Persen	73,64	73,64	73,75	74,00	74,20	74,50	74,75	74,75							
						685.523.079.028		573.392.700.831		687.811.160.457		692.574.144.506		696.921.982.852		701.770.135.576		4.037.993.203.250		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Persentase SMP yang telah terakreditasi A	Persen	66,67	66,67		66,95		67,25		67,50		67,75		68,00		68,00		
		Persentase Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang memenuhi standart	Persen	34,00	34,00		35,00		38,00		38,00		39,00		40,00		40,00		
		Rasio guru terhadap murid untuk jenjang SD	Rasio	01:28	01:28		01:28		01:28		01:28		01:28		01:28		01:28		
		Rasio guru terhadap murid untuk jenjang SMP	Rasio	01:32	01:32		01:32		01:32		01:32		01:32		01:32		01:32		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Rasio Jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa untuk jenjang SD	Rasio	01 : 28	01 : 28		01 : 28		01 : 28		01 : 28		01 : 28		01 : 28		01 : 28		
		Rasio Jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa untuk jenjang SMP	Rasio	01 : 32	01 : 32		01 : 32		01 : 32		01 : 32		01 : 32		01 : 32		01 : 32		
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	Persen	-	97,89		98,04		98,29		98,51		98,75		98,95		98,95		
		Persentase siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang memenuhi Kompetensi Minimum	Persen	-	60,20		60,25		61,50		62,75		63,75		65,00		65,00		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Persentase siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang memenuhi Kompetensi Minimum	Persen	-	28,60		29,00		30,00		35,00		40,50		45,00		45,00		
		Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	Persen	-	-		5,00		10,00		15,00		20,00		25,00		25,00		
		Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	Persen	-	-		5,00		10,00		15,00		20,00		25,00		25,00		
1	01	05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	Jumlah satuan PAUD yang mendapatkan ijin perpanjangan/pendirian	lembaga	40	40	57.555,572	40	15.269,300	40	63.136,273	40	63.136,273	40	63.136,273	40	325.369,964	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Jumlah Pendidikan Nonformal/lembaga pendidikan masyarakat yang mendapatkan ijin perpanjangan/pendirian	lembaga	10	10		15		20		25		30		35		35				
		Jumlah lembaga Pendidikan Sekolah Dasar SD yang dilayani perijinannya	lembaga	20	20		20		20		20		20		20		20				
		Jumlah lembaga Pendidikan Sekolah SMP yang dilayani perijinannya	lembaga	20	20		20		20		20		20		20		20				
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100	100	8.340.791.682	100	8.145.124.521	100	12.278.652.196	100	12.401.438.718	100	12.525.453.105	100	12.650.707.636	100	66.342.167.858	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	a. Jumlah koleksi perpustakaan	Eks	136.589	141.735	240.628.148	137.955	8.170.155.444	140.024	6.835.833.234	142.125	9.080.152.234	144.256	6.779.050.000	146.420	10.203.300.000	146.420	42.442.634.260	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		b. Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	160.000	160.000	1.064.515.200	170.000		175.000		180.000		185.000		190.000		190.000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		c. Indeks minat baca masyarakat Sidoarjo	Indeks	71,79	71,79	69.000,00	72,54		73		74,24		75,00		75,52		71,83		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan	Judul	-	-	-	2	117.500,00	3	197.000,00	4	273.500,00	5	732.000,00	6	877.500,00	5	2.197.500,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Sasaran 1.2: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat			404.346.111.861		653.809.811.213		722.937.675.348		793.491.072.781		870.504.319.402		955.246.603.819		4.400.335.594.424			
			1. Usia Harapan Hidup (UHH)	Indeks	74,04	73,69	404.346.111.861	74,77	653.809.811.213	75,19	722.937.675.348	75,98	793.491.072.781	76,31	870.504.319.402	76,81	955.246.603.819	76,81	4.400.335.594.424		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100	100	100	270.581.1 33.575	100	297.639.2 46.933	100	327.403.1 71.626	100	360.143.4 88.788	100	396.157.8 37.667	100	1.651.924. 878.589	Dinas Kesehatan	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. AKI (Angka Kematian Ibu)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	53,1	52,4 5	51,8	51,1 5	50,5	49,8 5	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	Dinas Kesehatan		
				2. AKB (Angka Kematian Bayi)	Per 1.000 Kelahiran Hidup	3,80	3,66	338.702.6 77.919	3,53	309.548.9 98.936	3,4	340.503.8 98.830	3,27	374.554.2 88.712	3,13	412.009.7 17.584	3	453.210.6 89.342	3	2.228.530. 271.322	Dinas Kesehatan
				3. Persentase Balita Stunting	Persen	7,84	7,74	7,64	7,54	7,44	7,34	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	Dinas Kesehatan	





Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4. Persentase Desa ODF (Open Defecation Free)	Persen	42	42		56		70		85		100		100		100		Dinas Kesehatan
		5. Persentase keluarga yang disurvei KS (Keluarga Sehat)	Persen	90	91		92		93		94		95		96		96		Dinas Kesehatan
		6. Persentase Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang terakreditasi	Persen	20	22		23		24		25		26		27		27		Dinas Kesehatan
		7. Persentase penduduk yang mempunyai Jaminan Kesehatan	Persen	81,83	95		95		95		95		95		95		95		Dinas Kesehatan
		8. Persentase penyehat tradisional yang memiliki STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional)	Persen	19	50		60		70		80		85		90		90		Dinas Kesehatan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		9. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	42	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
		10. Persentase KLB yang tertangani <24 jam	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
		11. Persentase upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan tidak langsung yang dilaksanakan sesuai standar	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
		13. Persentase pemenuhan kebutuhan sediaan kefarmasian sesuai perencanaan	Persen	90	90		90		90		90		90		90		90		Dinas Kesehatan	
1	02 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Rasio Dokter terhadap Jumlah Penduduk	per 100.00 penduduk	24	24	10.845.34 8.725	27	12.844.87 4.600	30	14.129.36 2.060	33	15.542.29 8.266	36	17.096.52 8.093	39	18.806.18 0.902	39	89.264.59 2.645	Dinas Kesehatan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian, toko alat kesehatan, optikal, dan sertifikat P-IRT yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	Persen	100	100	416.877.879	100	525.856.750	100	578.442.425	100	636.286.668	100	699.915.334	100	769.906.868	100	3.627.285.923	Dinas Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa siaga aktif pumama mandiri	Persen	54	54	2.454.837.710	56	5.392.164.193	58	5.931.380.612	60	6.524.518.674	62	7.176.970.541	64	7.894.667.595	64	35.374.539.325	Dinas Kesehatan
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	32,9	32,9		32,9		32,5		31,8		31,2		30,5		30,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
				Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti sebagai kebijakan	Persen	90	90		100		100		100		100		100		100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,02	2,08		1,95		1,95		1,93		1,90		1,87		1,87		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Angka Prevalensi modern (modern Contrasepsi Prevalance Rate/mCPR)	Angka	81,61	81,71	66,2		66,6		67,02		67,56		67,78		67,78	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		2. Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi(Droup out)/ DO	Persen	26	26	14.376.525.401	25	5.221.681.172	24	9.032.581.172	23	9.303.558.607	21	9.544.520.775	20	9.735.411.191	20	57.214.278.318	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		3. Prosentase UnMeetNeed	Persen	7,47	7,47		7,47		7,29		7,11		6,95		6,77		6,77		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pendewasaan Usia Perkawinan	Persen	0,35	0,35	479.350.000	0,85	585.613.480	0,83	997.573.300	0,81	1.040.069.923	0,79	1.067.007.734	0,76	1.073.089.678	0,76	5.242.704.115	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	90	90	11.336.881.729	90	12.413.638.187	90	13.004.769.296	90	13.686.860.278	90	14.531.004.207	90	15.129.011.561	90	80.102.165.258	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya jumlah pemuda yang berprestasi	Orang	19	20	3.172.237.783	20	13.019.909.648	25	15.624.508.929	30	17.580.741.763	35	19.201.508.664	40	21.536.819.313	40	90.135.726.100	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prestasi yang diraih tingkat Regional, Nasional dan Internasional	Orang	73	75	21.425.504.522	75	20.818.585.711	80	22.145.929.275	85	23.565.417.303	90	25.083.976.973	95	26.709.090.619	95	139.748.504.403	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	prosentase organisasi kepramukaan yang berkembang	Persen	-	-	10	1.656.140.600	12	1.874.037.196	15	2.115.040.370	17	2.371.004.664	20	2.636.224.585	20	10.652.447.415	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
			Sasaran 1.3: Meningkatnya Kesenjangan Gender dalam Masyarakat						2.195.961.500										22.356.424.047		
			1. Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,13	94,32	10.438.873.199	94,53	11.374.334.189	94,95	13.640.016.692	95,37	13.846.640.252	95,77	14.051.805.874	96,25	14.239.324.735	96,25	77.590.994.940		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	80	80	8.242.911.699	80	8.628.250.038	80	9.448.182.373	80	9.542.664.197	80	9.638.090.839	80	9.734.471.747	80	55.234.570.893	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Partisipasi perempuan dalam politik, ekonomi, sosial	Indek	67,2	67,2	276.344.318	67,2	Rp 1.418.156.189	67,2	5	Rp 2.515.064.219	67,3	Rp 2.622.205.955	67,3	5	Rp 2.690.121.089	67,4	Rp 2.705.454.779	67,4	12.227.346.549	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah lembaga perlindungan perempuan dan anak yang di advokasi dan dibina	Lembaga	190	190		210		215		220		225		230		230			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
				Jumlah rekomendasi tindak lanjut peningkatan perlindungan perempuan dan anak	Rekomendasi	35	35	1.595.306.724	24	Rp 250.222.112	25		Rp 255.000.000	26	Rp 260.000.000	27	Rp 265.000.000	28	Rp 270.000.000	28	2.895.528.836	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
				Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	0,58	0,58		0,58		0,57		0,56		0,55		0,54		0,54			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah kecamatan, desa/kelurahan menuju layak anak yang di advokasi dan dibina	Lembaga	84	238	371	371	371	371	371	371	371	371	Rp 1.529.398.209	371		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Jumlah lembaga pemenuhan hak anak yang di advokasi dan dibina	Lembaga	320	364	320	320	320	320	320	320	320	320	Rp 1.458.593.946	320	7.233.548.663	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius Yang Berpegang Teguh Pada Nilai-Nilai Keagamaan Serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga																
			Tujuan : Menguatnya karakter masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan untuk menciptakan ketertiban, kerukunan dan ketentraman dalam masyarakat.			59.093.88 1.720	79.398.66 2.849	75.130.07 0.513	83.074.23 2.686	78.888.64 2.086	86.779.10 2.956	449.353.1 18.127							
			Sasaran 1.1: Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat			23.023.78 3.449	43.681.33 0.014	37.065.86 2.017	42.795.06 1.500	38.028.67 0.664	42.791.60 9.638	212.031.6 90.547							





Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		<b>1. Indeks Toleransi</b>	<b>Indeks</b>	<b>77,62</b>	<b>77,64</b>	<b>20.680.631.396</b>	<b>78,68</b>	<b>42.677.259.174</b>	<b>80,22</b>	<b>35.543.499.785</b>	<b>81,76</b>	<b>41.257.475.645</b>	<b>83,30</b>	<b>36.475.708.951</b>	<b>84,84</b>	<b>39.152.543.478</b>	<b>84,84</b>	<b>200.432.491.694</b>		
X	XX 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	90	90	7.151.898.900	90	7.480.235.286	90	7.854.247.050	90	8.246.959.403	90	9.659.307.373	100	8.178.696.358	100	48.571.344.370	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01 02	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Jumlah kader wawasan kebangsaan	Orang	100	100		100		105		110		116		122		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah peserta pemantapan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Orang	100	100	2.199.813.787	100	1.665.779.600	105	1.749.068.580	110	1.836.552.009	116	1.928.348.109	122	2.024.765.514	100	11.404.327.599	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah peserta kader Bela Negara dan Karakter Kebangsaan	Orang	100	100		100		105		110		116		122		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya	Persen	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Persentase partisipasi peserta terhadap pendidikan politik dan etika budaya politik	Persen	80	80	81	82	83	84	84	85	85	85	85	85	85	
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Ormas yang didata	Ormas	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Jumlah pembinaan/pemberdayaan dan pengawasan Ormas	Kegiatan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Jumlah proposal Ormas yang diverifikasi	proposal	12	12		12		12		12		12		12		12		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	a. Jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan serta informasi yang berkaitan dengan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	a. Kegiatan	3	3		3		3		3		3		3		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
						145.596.201		1.414.028.530		1.484.729.956		1.559.181.646		1.637.140.728		1.718.997.764		7.959.674.825			
				b. Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	b. laporan	12	12		12		12		12		12		12		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik yang berhasil ditangani	Persen	100	100	1.542.378.675	100	655.322.040	100	688.088.142	100	722.492.549	100	758.617.176	100	2.988.200.830	100	6.632.606.863	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		<b>2. Indeks Pelestarian Budaya</b>	Indeks	60,23	60,32	2.343.152.053	60,55	1.004.070.840	63,58	1.522.362.232	66,76	1.537.585.855	70,09	1.552.961.713	73,60	3.639.066.160	73,60	11.599.198.853		
2	22 02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Cakupan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Persen	66,00	66,00		68,00	70,00		72,11		73,88		74,55		74,55			
		Jumlah Penutur Muda Bahasa Daerah	Jumlah	-	-	819.243.892	5	252.673.590	10	1.057.849.677	15	1.068.428.174	20	1.079.112.455	25	1.089.903.580	25	5.367.211.368	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Prosentase guru mengikuti Uji Kemahiran Bahasa Indonesia	Persen	-	-		5,00		10,00		15,00		20,00		25,00		25,00			
2	22 03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	Jumlah Kelompok seni yang melestarikan seni dan budaya daerah	Kelompok	4	4	1.523.908.161	5	751.397.250	6	464.512.555	7	469.157.681	8	473.849.258	10	2.549.162.580	10	6.231.987.485	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>Sasaran 1.2: Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram.</b>						<b>36.070.098.271</b>	<b>34.713.261.995</b>	<b>36.541.846.264</b>	<b>38.741.585.331</b>	<b>39.307.009.709</b>	<b>40.348.427.158</b>	<b>225.722.288.727</b>								



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		1. Indeks Rasa Aman	Indeks	76,03	76,48	36.070.098.271	77,92	34.713.261.995	78,97	36.541.846.264	80,02	38.741.585.331	81,07	39.307.009.709	82,12	40.348.427.158	82,12	225.722.228.727		
X	XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100	100	17.750.000.000	100	17.750.000.000	100	18.500.000.000	100	19.500.000.000	100	19.750.000.000	100	20.000.000.000	100	113.250.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ketertiban dan ketenteramanTingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan ketertiban dan ketenteraman	Status	Baik	Baik	15.000.000.000	Baik	15.000.000.000	Baik	15.500.000.000	Baik	16.000.000.000	Baik	16.500.000.000	Baik	17.000.000.000	Baik	95.000.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
7	01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	100	100	77.428.095	100	69.740.000	100	130.201.000	100	593.221.100	100	157.543.210	100	173.297.531	100	1.201.430.936	Kecamatan Sidoarjo



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	100	100	91.482.019	100	43.590.000	100	47.949.000	100	52.743.900	100	58.018.290	100	63.820.119	100	357.603.328	Kecamatan Candi
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	a. 100 b. 40 c. 100	70	81.378.955	70	81.378.955	70	89.516.851	75	98.468.536	75	108.315.389	80	119.146.928	80	578.205.613	Kecamatan Buduran
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	-	-	339.948.897	100	161.134.569	100	177.248.026	100	194.972.828	100	214.470.111	100	235.917.122	100	1.323.691.554	Kecamatan Gedangan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	a. 100 b. 100 c. 100	100	131.887.500	100	360.591.360	100	396.650.496	100	436.315.546	100	479.947.100	100	527.941.810	100	2.333.333.812	Kecamatan Wonoayu



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	97	98	165.288.074	98	165.288.074	98	181.816.881	98	199.998.570	98	219.998.426	98	241.998.269	98	1.174.388.295	Kecamatan Krian
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	100	100	190.821.770	100	52.439.748	100	57.683.723	100	63.452.095	100	69.797.305	100	76.777.035	100	510.971.676	Kecamatan Porong
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	70	70	211.665.472	73	211.633.312	76	220.098.644	79	228.902.590	82	238.058.694	85	247.581.042	85	1.357.939.754	Kecamatan Krembung
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase pelanggaran perda dan perkada yang ditangani	Persen	a. 100 b. 100 c. 100	100	141.738.452	81,25	189.850.675	85,71	208.835.742,50	88,24	229.719.317	86,67	252.691.248	90,91	277.960.373	90,91	1.300.795.808	Kecamatan Jabon



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	100	100	92.014.46 1	100	47.000.00 0	100	273.350.0 00	100	300.685.0 00	100	330.753.5 00	100	363.828.8 50	100	1.407.631. 811	Kecamatan Balongbendo
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pelanggaran perda dan perkada yang ditangani;	Persen	100	100	159.235.0 00	100	29.494.57 0	100	84.674.29 9	100	93.141.72 9	100	102.455.9 02	100	112.701.4 92	100	581.702.9 92	Kecamatan Tarik
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pelanggaran perda dan perkada yang ditangani;	Persen	a. 100 b. 100 c. 100	100	115.555.9 47	100	55.555.04 0	100	83.332.79 2	100	91.666.07 1	100	100.832.6 78	100	110.915.9 46	100	557.858.4 75	Kecamatan Taman
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pelanggaran perda dan perkada yang ditangani;	Persen	85	87	526.717.1 50	100	73.002.99 0	100	87.603.58 8	100	105.124.3 05	100	115.636.7 36	100	127.200.4 09	100	1.035.285. 178	Kecamatan Waru





Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pelanggaran perda dan perkada yang ditangani;	Persen	100	100	136.772.500	100	96.825.000	100	106.507.500	100	117.158.250	100	128.874.075	100	141.761.483	100	727.898.808	Kecamatan Sedati
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	100	100	139.201.442	100	139.201.442	100	153.121.586	100	168.433.745	100	185.277.119	100	203.804.831	100	989.040.166	Kecamatan Tanggulangin
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	100	100	158.297.500	100	74.277.500	100	81.705.250	100	89.875.775	100	98.863.353	100	108.749.688	100	611.769.065	Kecamatan Tulangan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	85	90	401.242.500	100	32.247.500	100	35.472.250	100	39.019.475	100	42.921.423	100	47.213.565	100	598.116.712	Kecamatan Prambon





## Bab

# Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

## VII

Bagian ini menyajikan tentang kerangka pendanaan pembangunan yang dilanjutkan dengan rumusan Program Perangkat Daerah (PD) selama 5 (lima) tahun periode RPJMD. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan ***Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah*** yang menjadi dasar penyusunan strategi, arah kebijakan dan target program. Mengingat bahwa proses perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang utuh, maka *review* terlebih dahulu terhadap Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah menjadi sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar setiap program yang dirumuskan memiliki daya dukung pendanaan yang cukup. Adapun gambaran mengenai kekuatan anggaran pemerintah kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana disampaikan dalam uraian di bawah ini.

### 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pembangunan akan dicerminkan oleh Kapasitas Fiskal Daerah. Kapasitas Fiskal daerah berdasarkan pada tabel 7.1 di bawah ini sebesar Rp. 2.694.082.991.577,- pada tahun 2021, selanjutnya mengalami kenaikan pada tahun 2026 hingga sebesar Rp 3.085.666.675.581,-. Besaran kapasitas fiskal daerah ditentukan oleh besarnya total penerimaan dikurangi oleh pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya dikurangi belanja tertentu di tahun yang sama. Dengan demikian kebijakan alokasi belanja terkait dengan berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan riil fiskal



menjadi isu penting untuk diperhatikan terkait dengan penguatan Kapasitas riil fiskal.



**Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026**

NO	URAIAN AKUN	PROYEKSI KAPASITAS FISKAL					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I</b>	<b>Penerimaan</b>	<b>5.333.818.676.819</b>	<b>5.165.295.504.468</b>	<b>5.362.037.023.591</b>	<b>5.566.123.437.754</b>	<b>5.772.742.825.850</b>	<b>5.977.099.492.043</b>
	Proyeksi Pendapatan Daerah	4.210.818.676.819	4.515.295.504.468	4.702.037.023.591	4.891.123.437.754	5.082.742.825.850	5.277.099.492.043
	Proyeksi Penerimaan Pembiayaan	1.123.000.000.000	650.000.000.000	660.000.000.000	675.000.000.000	690.000.000.000	700.000.000.000
<b>II</b>	<b>Pengurangan</b>						
	Pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya:	2.639.735.685.242	2.815.236.173.432	2.832.879.164.288	2.851.875.171.763	2.871.353.849.827	2.891.432.816.462
	a. Pendapatan BLUD	875.611.889.000	872.924.553.128	875.674.553.128	878.562.053.128	881.593.928.128	884.777.396.878
	b. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	15.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000
	c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	55.000.000.000	55.000.000.000	57.750.000.000	60.637.500.000	63.669.375.000	66.852.843.750
	d. Dana Desa	298.963.136.000	298.963.136.000	298.963.136.000	298.963.136.000	298.963.136.000	298.963.136.000
	c. Pendapatan Hibah BOS Reguler	150.480.300.000	173.085.000.000	173.085.000.000	173.085.000.000	173.085.000.000	173.085.000.000
	d. DAK	356.168.453.000	327.876.417.128	327.876.417.128	327.876.417.128	327.876.417.128	327.876.417.128
	<b>Belanja Tertentu</b>	<b>1.764.123.796.242</b>	<b>1.942.311.620.304</b>	<b>1.957.204.611.160</b>	<b>1.973.313.118.635</b>	<b>1.989.759.921.699</b>	<b>2.006.655.419.584</b>
	a. Belanja Pegawai (ASN dan Non ASN)	1.528.796.417.046	1.707.612.171.557	1.718.183.740.510	1.729.191.131.778	1.740.356.876.579	1.751.717.691.013
	b. Belanja Bagi Hasil	102.727.621.096	104.276.279.722	107.826.947.978	112.118.772.857	116.550.075.225	121.192.514.986
	c. Alokasi Dana Desa	132.599.758.100	130.423.169.025	131.193.922.672	132.003.214.000	132.852.969.895	133.745.213.585
<b>III</b>	<b>Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Sidoarjo</b>	<b>2.694.082.991.577</b>	<b>2.350.059.331.036</b>	<b>2.529.157.859.303</b>	<b>2.714.248.265.991</b>	<b>2.901.388.976.023</b>	<b>3.085.666.675.581</b>

Sumber: BPKAD Sidoarjo, diolah



## **7.2. Program Perangkat Daerah.**

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan arah kebijakan, maka disusun program-program pembangunan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, berdasarkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo periode 2021-2026.

Selain berpijak pada berbagai pertimbangan sebagaimana disampaikan di atas, maka penyusunan program pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) tahun ke depan juga memperhatikan kapasitas riil fiskal sebagaimana disajikan dalam tabel 7.1 di atas. Hal ini dimaksudkan agar penentuan target dan pagu anggaran indikatif selama lima tahun akan dapat didukung dengan kemampuan dan kapasitas fiskal daerah. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap perencanaan program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Melalui penyajian Program dan Anggaran indikatif yang disusun berdasarkan Aspek-aspek Pembangunan dan Urusan diharapkan dapat menjelaskan program apa saja yang direncanakan dalam RPJMD guna untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan tiap urusan yang diampu. Penyajian secara detil program-program RPJMD yang selaras dengan Program Perangkat Daerah sebagaimana disajikan dalam tabel 7.2 di bawah ini. Program yang dicantumkan masih terbatas pada Perangkat Daerah yang telah mengisi (*input*) dalam SIPD Kabupaten Sidoarjo.



**Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	URUSAN WAJIB					3.113.739.349.837		3.078.541.609.257		4.777.676.095.592		4.951.705.157.483		5.219.793.906.630		5.514.833.569.559		26.644.210.190.958				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.753.760.641.286		2.562.608.407.017		4.139.827.374.807		4.254.320.413.004		4.454.023.896.102		4.647.639.414.165		22.812.180.146.381				
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.441.014.747.719		1.147.544.849.985		1.459.852.879.170		1.472.335.649.044		1.484.480.471.072		1.497.203.577.316		8.502.432.174.306				
X	X X	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100	100	755.434.113.119	100	574.136.879.854	100	771.978.582.440	100	779.698.368.265	100	787.495.351.947	100	795.370.305.467	100	4.464.113.601.092	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	Persen	95,72	92,80	685.523.079.028	93,20	573.392.700.831	94,20	687.811.160.457	95,50	692.574.144.506	97,75	696.921.982.852	100,00	701.770.135.576	100,00	4.037.993.203.250	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		APK SD sederajat	Persen	109,96	105,50		104,75		103,50		102,50		101,50		100,00		100,00		
		APK SMP sederajat	Persen	99,46	99,01		99,15		99,25		99,45		99,70		100,00		100,00		
		Persentase bangunan ruang kelas SD katagori baik	Persen	95,10	95,10		95,30		95,45		95,55		95,65		95,85		95,85		
		Persentase bangunan ruang kelas SMP katagori baik	Persen	95,30	95,30		95,50		95,65		95,70		95,75		95,80		95,80		
		Persentase PAUD yang telah terakreditasi A	Persen	36,00	36,00		37,00		39,00		40,00		43,00		45,00		45,00		





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Persentase SD yang telah terakreditasi A	Persen	73,64	73,64		73,75		74,00		74,20		74,50		74,75		74,75		
		Persentase SMP yang telah terakreditasi A	Persen	66,67	66,67		66,95		67,25		67,50		67,75		68,00		68,00		
		Persentase Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang memenuhi standart	Persen	34,00	34,00		35,00		38,00		38,00		39,00		40,00		40,00		
		Rasio guru terhadap murid untuk jenjang SD	Rasio	01:28	01:28		01:28		01:28		01:28		01:28		01:28		01:28		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Rasio guru terhadap murid untuk jenjang SMP	Rasio	01 : 32	01 : 32		01 : 32		01 : 32		01 : 32		01 : 32		01 : 32		01 : 32		01 : 32	
		Rasio Jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa untuk jenjang SD	Rasio	01 : 28	01 : 28		01 : 28		01 : 28		01 : 28		01 : 28		01 : 28		01 : 28		01 : 28	
		Rasio Jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa untuk jenjang SMP	Rasio	01 : 32	01 : 32		01 : 32		01 : 32		01 : 32		01 : 32		01 : 32		01 : 32		01 : 32	
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	Persen	-	97,89		98,04		98,29		98,51		98,75		98,95		98,95		98,95	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Persentase siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang memenuhi Kompetensi Minimum	Persen	-	60,20		60,25		61,50		62,75		63,75		65,00		65,00			
		Persentase siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang memenuhi Kompetensi Minimum	Persen	-	28,60		29,00		30,00		35,00		40,50		45,00		45,00			
		Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	Persen	-	-		5,00		10,00		15,00		20,00		25,00		25,00			
		Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	Persen	-	-		5,00		10,00		15,00		20,00		25,00		25,00			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0105	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	lembaga	40	40		40		40		40		40		40		40		
		Jumlah satuan PAUD yang mendapatkan ijin perpanjangan/pendirian																	
		Jumlah Pendidikan Nonformal/lembaga pendidikan masyarakat yang mendapatkan ijin perpanjangan/pendirian	lembaga	10	10	57.555.572	15	15.269.300	20	63.136.273	25	63.136.273	30	63.136.273	35	63.136.273	35	325.369.964	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah lembaga Pendidikan Sekolah Dasar SD yang dilayani perijinannya	lembaga	20	20		20		20		20		20		20		20		
		Jumlah lembaga Pendidikan Sekolah SMP yang dilayani perijinannya	lembaga	20	20		20		20		20		20		20		20		
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				352.419.742.233		598.893.028.054		658.782.330.859		724.660.563.945		797.126.620.340		876.839.282.374		4.008.721.567.805	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
X	X	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100	100	100	270.581.133.575	100	297.639.246.933	100	327.403.171.626	100	360.143.488.788	100	396.157.837.667	100	1.651.924.878.589	Dinas Kesehatan	
1	0	0	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. AKI (Angka Kematian Ibu)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	53,1	52,45	51,8	51,15	50,5	49,85	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	Dinas Kesehatan		
					2. AKB (Angka Kematian Bayi)	Per 1.000 Kelahiran Hidup	3,80	3,66	338.702.677.919	3,53	309.548.998.936	3,4	340.503.898.830	3,27	374.554.288.712	3,13	412.009.717.584	3	453.210.689.342	3	2.228.530.271.322	Dinas Kesehatan
					3. Persentase Balita Stunting	Persen	7,84	7,74	7,64	7,54	7,44	7,34	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	Dinas Kesehatan	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4. Persentase Desa ODF (Open Defecation Free)	Persen	42	42		56		70		85		100		100		100		Dinas Kesehatan
		5. Persentase keluarga yang disurvei KS (Keluarga Sehat)	Persen	90	91		92		93		94		95		96		96		Dinas Kesehatan
		6. Persentase Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang terakreditasi	Persen	20	22		23		24		25		26		27		27		Dinas Kesehatan
		7. Persentase penduduk yang mempunyai Jaminan Kesehatan	Persen	81,83	95		95		95		95		95		95		95		Dinas Kesehatan
		8. Persentase penyehat tradisional yang memiliki STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional)	Persen	19	50		60		70		80		85		90		90		Dinas Kesehatan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		9. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	42	100		100		100		100		100		100		100		100	Dinas Kesehatan
		10. Persentase KLB yang tertangani <24 jam	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		100	Dinas Kesehatan
		11. Persentase upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan tidak langsung yang dilaksanakan sesuai standar	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		100	Dinas Kesehatan
		12. Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk	Penduduk	1: 85.000	1: 85.000		1: 77.384		1: 72.548		1: 66.329		1: 62.744		1: 58.038		1: 58.038		1: 58.038	Dinas Kesehatan
		13. Persentase pemenuhan kebutuhan sediaan kefarmasian sesuai perencanaan	Persen	90	90		90		90		90		90		90		90		90	Dinas Kesehatan







Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
X	X	0	1																		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	
																						Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
1	0	0	2																			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
																						Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
1	0	0	6																			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
1	0	1	0																			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase prasarana air bersih yang disediakan sesuai target	Persen	35,54	35,83	8.730.685.000	41,08	68.952.475.000	46,55	97.774.622.500	46,86	11.291.084.750	47,17	12.420.193.225	47,48	13.662.212.548	47,48	212.831.273.023	Dinas Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase prasarana sanitasi yang disediakan sesuai target	Persen	95,5	96,76	29.556.833.345	97,4	27.363.444.382	98,05	28.731.616.601	98,69	30.168.197.431	99,34	31.676.607.303	100	33.988.437.668	100	181.485.136.730	Dinas Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase prasarana perumahan yang disesuaikan sesuai target tahun berkenaan	Persen	-	90	25.201.384.870	91	20.717.269.958	92	151.862.533.458	93	167.048.786.804	94	183.753.665.484	95	202.129.032.032	95	750.712.672.606	Dinas Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10308	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung wilayah yang sesuai ketentuan	Persen	42,14	65	315.939.100.303	65,5	11.454.045.805	66	382.286.311.367	66,5	420.514.942.503	67	462.566.436.754	67,5	508.823.080.429	67,5	2.101.583.917.161	Dinas Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang
10309	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase implementasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Persen	20	20	2.568.764.138	30	2.338.619.580	50	3.895.204.607	70	4.342.225.068	90	4.842.572.574	100	5.402.873.582	100	23.390.259.549	Dinas Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang
10311	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	a. Presentase terlaksananya sertifikasi pekerja konstruksi terampil sesuai target tahun berkenaan	Persen	100	100	561.020.062	100	630.375.000	100	678.834.275	100	746.717.703	100	821.389.473	100	903.528.420	100	4.341.864.932	Dinas Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang
		b. Presentase Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi sesuai target tahun berkenaan	Persen	-	-	-	80	450.000.000	85	495.000.000	90	544.500.000	95	598.950.000	100	658.845.000	100	2.747.295.000	Dinas Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 0 3 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	Persen	65	66	513.253.260	67	2.460.945.134	68	621.036.445	69	683.140.089	70	751.454.098	71	826.599.508	71	5.856.428.534	Dinas Perumahan dan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1 0 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					19.773.266.402		25.857.139.715		25.125.626.882		27.607.870.820		30.336.823.213		33.337.079.114		162.037.806.146	
X X X 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi	Persen	100	100	13.702.049.379	100	14.946.047.635	100	17.309.745.484	100	19.040.720.032	100	20.944.792.035	100	23.039.271.239	100	108.982.625.804	Dinas Perumahan dan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1 0 4 0 2	PROGRAM PENGEMBAN PERUMAHAN	Persentase Rumah korban pasca bencana dan Rumah susun yang tersedia	Persen	84	85	4.382.997.023	86	7.239.792.080	87	5.303.426.398	88	5.833.769.038	89	6.417.145.941	90	7.058.860.536	90	36.235.991.016	Dinas Perumahan dan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10403	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penyelesaian luasan kawasan kumuh	Persen	-	9,73	1.688.220.000	27,73	1.875.800.000	45,73	566.280.000	63,73	622.908.000	81,73	685.198.800	100	753.718.680	100	6.192.125.480	Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
10404	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase kawasan yang dilakukan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persen	-	-	-	11	1.218.000.000	22	1.339.800.000	33	1.473.780.000	44	1.621.158.000	55	1.783.273.800	55	7.436.011.800	Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
10405	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase kawasan Permukiman yang ditingkatkan Prasarana Sarana dan Utilitas Umumnya sesuai target tahun berkenaan	Persen	-	-	-	91	577.500.000	92	606.375.000	93	636.693.750	94	668.528.437	95	701.954.859	95	3.191.052.046	Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
105	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					76.675.208.496		74.003.751.513		82.619.669.831		92.522.482.818		103.394.913.602		116.415.133.092		545.631.159.351	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2. Persentase korban bencana yang terhabilitasi	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		3. Persentase bantuan pasca bencana yang terealisasi berdasarkan laporan Jitupasna	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	054	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1. Persentase satuan petugas PMK yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi	Persen	32	40		40		45		50		55		60		60	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			2. Persentase mobil PMK dengan kondisi layak fungsi	Persen	80	80	23.702.861.296	80	18.990.997.138	80	24.130.640.019	80	30.084.550.023	85	37.513.187.529	85	46.820.234.412	85	181.242.470.417



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	06					36.037.001.660		36.164.062.891		79.363.489.754		82.392.357.928		87.582.369.235		93.116.263.715		414.655.545.184			
X	XX	01			Persen	85	90	8.303.014.638	90	8.519.579.494	90	10.610.668.486	90	10.716.775.170	90	10.823.942.922	90	10.932.182.351	90	59.906.163.062	Dinas Sosial
					Persen	60	50	2.521.447.685	60	2.837.427.195	60	5.609.182.254	60	6.126.900.478	60	6.804.390.524	60	7.430.829.575	60	31.330.177.711	Dinas Sosial
1	06	04			Persen	58,51	58,51	10.103.934.901	59,51	8.217.123.692	60,51	15.424.155.812	61,51	16.961.571.394	62,51	18.651.728.501	63,51	20.509.901.383	63,51	89.868.415.683	Dinas Sosial
1	06	05			Persen	70	94	14.699.524.525	97	15.788.837.470	97,5	43.506.345.423	98	43.506.345.423	98,5	45.852.807.759	99	48.383.680.404	99	211.737.541.004	Dinas Sosial





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10606	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	Persen	100	100	329.082.678	100	597.630.590	100	4.009.673.329	100	4.407.970.663	100	4.851.704.729	100	5.336.875.202	100	19.532.937.191	Dinas Sosial
10607	PROGEM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase sarpras dalam kondisi yang baik	Persen	100	100	79.997.233	100	203.464.450	100	203.464.450	100	672.794.800	100	597.794.800	100	522.794.800	100	2.280.310.533	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					359.978.708.551		515.933.202.240		637.848.720.784		697.384.744.479		765.770.010.527		867.194.155.394		3.832.030.044.577	
207	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					17.035.213.910		16.938.765.920		30.502.367.729		33.552.604.502		36.907.864.952		40.598.651.447		175.535.468.459	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
X X X 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	88	88	9.283.970.246	88	8.917.588.466	88	11.255.589.419	88,5	12.381.148.361	88,5	13.619.263.197	89	14.981.189.516	89	70.438.749.204	Dinas Tenaga Kerja
2 0 7 0 2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	a. Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun b. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	a. Persen b. Persen	-	-	-	a. 50 b. 100	115.725.000	a. 53 b. 100	182.226.000	a. 55 b. 100	200.448.600	a. 57 b. 100	220.493.460	a. 59 b. 100	242.542.806	a. 59 b. 100	961.435.866	Dinas Tenaga Kerja
2 0 7 0 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	a. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi b. Persentase lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi c. Persentase Instruktur Bersertifikat Kompetensi d. Persentase Lembaga Pelatihan kerja yang memiliki perizinan	a. Persen b. Persen c. Persen d. Persen	a. 80,91 b. 18,57 c. 49 d. 42,85	a. 81,5 b. 19 c. 49,5 d. 42,95	5.286.032.693	a. 82 b. 20 c. 50 d. 43	4.103.614.662	a. 82,5 b. 21 c. 52 d. 44	15.334.115.807	a. 83 b. 21 c. 54 d. 45	16.867.527.388	a. 83,5 b. 21 c. 55 d. 46	18.554.280.126	a. 84 b. 21 c. 56 d. 47	20.409.708.139	a. 84 b. 21 c. 56 d. 47	80.555.278.815	Dinas Tenaga Kerja



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2 0 7 0 4	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	a. Persentase pencari kerja yang difasilitasi penempatannya	Persen	51,,61	60	1.263.712.642	53	2.416.740.964	57	2.158.803.383	60	2.374.683.721	63	2.612.152.093	65	2.873.367.303	65	13.699.460.107	Dinas Tenaga Kerja
2 0 7 0 5	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	a. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial b. Persentase perusahaan yang memiliki LKS Bipartit c. Persentase perusahaan yang menerapkan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	a. Persen b. Persen c. Persen	a. 25 b. 26 c. 36,6	a. 10 b. 26 c. 37	1.201.498.329	a. 22 b. 25 c. 37,5	1.385.096.828	a. 23 b. 25 c. 38	1.571.633.120	a. 24 b. 26 c. 39	1.728.796.432	a. 25 b. 26 c. 40	1.901.676.075	a. 26 b. 26 c. 40,5	2.091.843.683	a. 26 b. 26 c. 40,5	9.880.544.468	Dinas Tenaga Kerja
2 0 8	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					2.195.961.500		2.746.084.151		4.191.834.319		4.303.976.055		4.413.715.035		4.504.852.988		22.356.424.047	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20802	PROGRAM PENGARUSU TAMBAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Partisipasi perempuan dalam politik, ekonomi, sosial	Indek	67,2	67,2	276.344.318	67,2	Rp 1.418.156.189	67,25	Rp 2.515.064.219	67,3	Rp 2.622.205.955	67,35	Rp 2.690.121.089	67,4	Rp 2.705.454.779	67,4	12.227.346.549	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
20803	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah lembaga perlindungan perempuan dan anak yang di advokasi dan dibina	Lembaga	190	190		210		215		220		225		230		230		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Jumlah rekomendasi tindak lanjut peningkatan perlindungan perempuan dan anak	Rekomendasi	35	35	1.595.306.724	24	Rp 250.222.112	25	Rp 255.000.000	26	Rp 260.000.000	27	Rp 265.000.000	28	Rp 270.000.000	28	2.895.528.836	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	0,58	0,58		0,58		0,57		0,56		0,55		0,54		0,54		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	0806	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Lembaga	84	238		371		371		371		371		371		Rp 1.529.398.209	371		Dinas Pemberdayaan Perempuan + Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
						324.310.458		Rp 1.077.705.850		Rp 1.421.770.100		Rp 1.421.770.100		Rp 1.458.593.946					7.233.548.663	Dinas Pemberdayaan Perempuan + Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				29.458.915.017		31.587.789.065		38.667.140.795		42.726.582.398		48.663.003.513		72.452.867.364		263.556.298.153		
X	XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persen	100	100	28.750.512.145	100	30.863.060.811	100	31.171.691.419	100	31.483.408.333	100	31.798.242.417	100	47.155.725.719	100	201.222.640.844	Dinas Pangan dan Pertanian	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20902	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Prosentase infrastruktur kemandirian pangan dalam kondisi baik	Persen	-	-	-	-	-	10	2.497.209.322	10	3.745.813.983	11,60	5.618.720.975	13,30	8.428.081.462	13,30	20.289.825.741	Dinas Pangan dan Pertanian
20903	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat Konsumsi Beras perkapita perhari ≤ dari 275 gr	gr/kapita/hari	240	239	498.402.872	238		237		236		235		234		234		Dinas Pangan dan Pertanian
		Prosentase Peningkatan Cadangan Pangan (stok pangan yang dikordinasikan)	Persen	-	-		-	634.728.254	0,01	4.359.221.439	0,02	6.538.832.159	0,03	9.808.248.238	0,04	14.712.372.357	0,04	36.551.805.319	Dinas Pangan dan Pertanian
20904	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase desa rawan pangan yang ditangani	Persen	-	-	-	-	-	5	504.018.615	10	756.027.923	15	1.134.041.884	20	1.701.062.826	20	4.095.151.248	Dinas Pangan dan Pertanian
20905	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase pangan segar yang aman dikonsumsi	Persen	83,7	84	210.000.000	84,2	90.000.000	84,4	135.000.000	84,6	202.500.000	84,8	303.750.000	85	455.625.000	85	1.396.875.000	Dinas Pangan dan Pertanian
210	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					320.073.175						426.017.396		468.619.136		515.481.049		2.447.496.197	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	104	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terfasilitasinya permasalahan pertanahan sesuai prosedur	Persen	100	100	140.697.575	100	190.335.300	100	170.244.066	100	187.268.472	100	205.995.320	100	226.594.852	100	1.121.135.584	Dinas Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang
2	105	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terfasilitasinya pengadaan tanah pemerintah non Perangkat Daerah sesuai prosedur	Persen	100	100	179.375.600	100	139.681.600	100	217.044.476	100	238.748.924	100	262.623.816	100	288.886.198	100	1.326.360.613	Dinas Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				93.855.500.903		134.402.344.801		207.068.998.260		225.662.698.086		251.059.001.894		275.535.503.073		1.187.584.047.018		
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat kepuasan aparaturnya perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	84	86	35.409.041.635	85	36.412.636.786	86	44.479.500.000	87	48.243.500.000	88	53.370.500.000	89	57.522.500.000	89	275.437.678.421	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	Persen	-	100	316.329.028	-	-	-	-	-	-	-	-	100	463.137.330	100	779.466.358	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.1.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	a. Persentase pemantauan air badan air (ABA) yang mengalami peningkatan kualitas BOD	Persen	53,64	42	2.569.564.802	43	2.783.237.043	45	4.663.055.540	47	5.174.361.094	49	5.717.931.203	51	6.290.987.983	51	27.199.137.665	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		b. Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2 dan NO2	Persen	66,67	45		45	45	46	47	48	48	48	48	48	48	48	48	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.1.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH yang dikelola	Persen	2,17	2,17	13.051.502.557	2,28	26.846.515.696	2,36	15.750.000.000	2,44	16.425.000.000	2,53	17.100.000.000	2,61	17.775.000.000	2,61	106.948.018.253	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2 1 1 0 5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAYA BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Dampak Timbulan Limbah B3 yang dilakukan melalui Fasilitasi Standar Teknis Pengelolaan Limbah B3 dalam pemenuhan Persetujuan Lingkungan	Persen	-	100	124.075.200	100	202.735.200	100	233.942.720	100	257.336.992	100	283.070.691	100	311.377.760	100	1.412.538.564	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 1 1 0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan	Persen	2,98	3	159.761.527	3,30	229.865.200	3,60	785.000.000	4	875.000.000	4,4	965.000.000	4,8	1.055.000.000	4,8	4.069.626.727	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 1 1 0 8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	a) Persentase desa / kelurahan peduli lingkungan hidup	Persen	-	1	550.627.500	1	647.027.500	1	1.110.000.000	1	1.205.000.000	1	1.300.000.000	1	1.400.000.000	1	6.212.655.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		b) Persentase sekolah peduli lingkungan hidup	Persen	-	0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	1 1 0 9	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Persen	-	0,7	360.000.000	0,7	681.200.000	0,7	475.000.000	0,7	500.000.000	0,7	525.000.000	0,7	550.000.000	0,7	3.091.200.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	1 1 0	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persen	100	100	206.535.993	100	203.584.295	100	415.000.000	100	460.000.000	100	510.000.000	100	565.000.000	100	2.360.120.288	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	1 1 1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Persen	43	43	41.108.062.661	47	66.395.543.081	50	139.157.500.000	53	152.522.500.000	56	171.287.500.000	59	189.602.500.000	59	760.073.605.742	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		b) Persentase pengurangan sampah di TPST	Persen	28	28		28		29		29		30		30		30		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2						11.223.204.276		14.717.541.273		15.108.426.902		15.527.592.408		15.977.757.692		19.909.783.939		92.464.306.490			
X	X	01			Persen	100	100	8.595.882.773	100	12.009.649.987	100	12.129.746.487	100	12.251.043.952	100	12.373.554.391	100	15.945.160.308	100	73.305.037.898	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2					Persen	100	100		97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
					Persen	97	97	640.917.358	97	537.905.758	98	591.696.334	98,5	650.865.967	99	715.952.564	99,5	787.547.820	99,5	3.924.885.801	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
					Persen	5,6	6		30	50	70	80	90	90	90	90	90	90	90	90	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1 2 0 4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
					1.504.584.903		1.716.050.098		1.887.655.108		2.076.420.619		2.284.062.680		2.512.468.948		11.981.242.356		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Prosentase pelayanan kebutuhan data kependudukan yang tepat waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Prosentase Sarpas SIAK yang layak fungsi	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	0 5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persen	-	-	-	100	80.140.000	100	88.154.000	100	96.969.400	100	106.666.340	100	117.332.974	100	489.262.714	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase rekomendasi pengelolaan profil kependudukan terhadap kebijakan daerah	Persen	-	-	-	100	80.140.000	100	88.154.000	100	96.969.400	100	106.666.340	100	117.332.974	100	489.262.714	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				18.245.571.080		22.567.771.080		26.720.153.510		28.677.018.862		31.120.720.748		33.647.292.823		160.978.528.103	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
X	X X	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	80	80	7.778.306.611	90	8.393.239.093	91	9.779.263.002	92	10.757.189.303	93	11.832.908.233	94	13.016.199.056	94	61.557.105.298	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	1 3	0 2		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase penataan desa yang terfasilitasi	Persen	-	-		1,55	34.075.700	2,17	1.200.000.000	2,8	1.320.000.000	3,42	1.452.000.000	4,04	1.597.200.000	4,04	5.603.275.700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	1 3	0 3		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang melakukan kerjasama	Persen	-	-		21,12	97.186.280	21,74	296.912.167	22,36	326.603.384	22,98	359.263.722	23,6	395.190.095	23,6	1.475.155.648	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	1 3	0 4		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	a. Persentase peningkatan status desa	Persen	10,25	10,25		27,95		31,06		34,16		37,27		40,37		40,37		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
					b. Persentase desa yang memiliki Bumdes	Persen	-	-	8.474.587.594	68,32	11.750.092.807	71,43	12.957.868.452	74,53	13.443.155.297	77,64	14.416.970.827	80,74	15.488.167.909	80,74	76.530.842.886	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	1305	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga desa yang diberdayakan	Persen	-	80,75	1.992.676.875	80,75	2.293.177.200	82,3	2.486.109.889	83,85	2.830.070.878	85,4	3.059.577.966	86,96	3.150.535.763	86,96	15.812.148.571	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				24.234.657.293	15.636.759.051	20.954.282.166	21.425.113.319	21.828.295.393	22.130.647.114	126.209.754.336									
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	80	80	8.242.911.699	80	8.628.250.038	80	9.448.182.373	80	9.542.664.197	80	9.638.090.839	80	9.734.471.747	80	55.234.570.893	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	1402	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	32,9	32,9	1.135.870.193	32,9	1.201.214.361	32,5	1.475.945.321	31,8	1.538.820.592	31,2	1.578.676.045	30,5	1.587.674.498	30,5	8.518.201.010	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Persentase hasil kajian yang diindikasikan sebagai kebijakan	Persen	90	90		100		100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,02	2,08		1,95		1,95		1,93		1,90		1,87		1,87		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	1403	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Angka	81,61	81,71		66,2		66,6		67,02		67,56		67,78		67,78		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		1. Angka Prevalensi modern (modern Contracepsi Prevalance Rate/mCPR)	Angka	81,61	81,71		66,2		66,6		67,02		67,56		67,78		67,78		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		2. Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi(D roup out/ DO	Persen	26	26	14.376.525.401	25	5.221.681.172	24	9.032.581.172	23	9.303.558.607	21	9.544.520.775	20	9.735.411.191	20	57.214.278.318	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		3. Prosentase UnMeetNeed	Persen	7,47	7,47		7,47		7,29		7,11		6,95		6,77		6,77		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	1404	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pendewasaan Usia Perkawinan	Persen	0,35	0,35	479.350.000	0,85	585.613.480	0,83	997.573.300	0,81	1.040.069.923	0,79	1.067.007.734	0,76	1.073.089.678	0,76	5.242.704.115	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				57.367.002.015		118.203.292.817		129.540.070.405		151.226.772.394		176.588.942.956		206.580.932.383		839.507.012.970		
X	XX01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	90	90	19.442.898.610	92	18.917.009.663	93	24.592.112.562	94	27.051.323.818	95	29.756.456.200	96	32.732.101.820	96	152.491.902.673	Dinas Perhubungan
2	1502	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	Persen	70	70	34.294.553.457	75	95.511.528.404	80	100.381.252.143	80	118.658.401.736	85	140.175.030.548	85	166.123.979.714	85	655.144.746.002	Dinas Perhubungan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Prosentase Pelayanan / pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persen	100	72		72,5		73		73,5		74		74,5		74,5		Dinas Perhubungan
		Prosentase kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	Persen	70	70		80		80		85		85		85		85		Dinas Perhubungan
2	1503	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persen	-	-	22.689.250	10	27.820.050	15	33.384.060	20	40.060.872	25	48.073.046	30	47.048.456	30	219.075.734	Dinas Perhubungan
2	1505	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETA APIAN	Persen	45,3	45	3.606.860.698	46	3.746.934.700	47,5	4.533.321.640	48,9	5.476.985.968	49,6	6.609.383.162	50,4	7.677.802.393	50,4	31.651.288.561	Dinas Perhubungan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	16					27.932.621.339		38.292.204.605		38.931.329.092		39.725.620.770		40.429.966.147		40.716.557.468		213.948.802.022		
X	X	01				11.930.482.835	100	12.671.960.556	100	12.798.680.162	100	12.926.666.963	100	13.055.933.633	100	13.186.492.969	100	76.570.217.118	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	02					84		85		86		87		88		89		89	Dinas Komunikasi dan Informatika
						3.922.641.104		6.231.645.761		6.356.278.676		6.627.056.148		6.798.696.902		6.837.449.474		36.773.768.066		Dinas Komunikasi dan Informatika
									100		100		100		100		100		100	Dinas Komunikasi dan Informatika



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1 6 3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				12.079.497.400		19.388.598.288		19.776.370.254		20.171.897.659		20.575.335.612		20.692.615.025		100.604.816.838	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	25	50		60		70		80		90		100		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				11.272.016.504		35.684.055.627		36.756.789.785		37.859.483.179		38.995.267.675		40.152.774.273		200.720.387.043	
X	X X 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persen	75	80	7.156.472.646	87	8.765.393.468	87	9.030.567.761	87	9.301.474.494	87	9.580.518.729	87	9.867.934.291	87	53.702.361.389	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Prosentase Koperasi yang mendapat Fasilitasi Pendampingan Ijin Usaha Simpan Pinjam	Persen	-	-	-	0,68	57.992.500	0,82	59.732.275	0,88	61.524.243	1,02	63.369.971	1,22	65.271.070	1,22	307.890.059	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Persen	82	82,5	74.417.500	83	171.759.980	83,5	176.912.779	84,1	182.220.163	84,6	187.686.768	85,2	193.317.371	85,2	986.314.561	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	Persen	40,22	41,62	138.825.146	43,02	465.156.744	44,42	479.111.446	45,82	493.484.790	47,22	508.289.333	48,62	511.186.582	48,62	2.596.054.041	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang di klat	Persen	-	52,28	903.953.494	59,4	316.021.125	66,83	325.501.759	74,26	335.266.812	81,68	345.324.816	89,11	355.684.560	89,11	2.581.752.566	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



Kode	Bidang Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2 1 7 0 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang direvitalisasi	Persen	-	3,01	181.589.110	3,11	289.998.035	3,21	298.697.976	3,31	307.658.915	3,43	316.888.683	3,55	326.395.343	3,55	1.721.228.062	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2 1 7 0 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	Persen	4,62	4,75	1.552.670.150	4,84	21.915.779.225	6,06	22.573.252.602	9,09	23.250.450.180	12,12	23.947.963.685	15,16	24.666.402.596	15,16	117.906.518.438	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2 1 7 0 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	Persen	-	-	1.264.088.458	1,93	3.701.954.550	1,98	3.813.013.187	2,04	3.927.403.582	2,1	4.045.225.690	2,15	4.166.582.460	2,15	20.918.267.927	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2 1 8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					17.006.865.360		16.436.292.166		12.383.783.799		12.749.297.187		13.125.775.665		13.513.548.144		85.215.562.321	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1806	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100	100	15.445.849.360	100	14.922.766.887	100	9.413.125.299,00	100	9.689.517.948,00	100	9.974.202.930	100	10.267.428.737	100	69.712.891.161	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.1802	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase kebijakan penanaman modal yang disusun	Persen	100	100	-	100	335.838.699	100	549.015.300	100	565.485.800	100	582.450.400	100	599.923.900	100	2.632.714.099	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.1803	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase realisasi kepedinan investasi	Persen	422	100	-	100	264.989.000	100	886.490.500	100	913.085.200	100	940.477.800	100	968.692.100	100	3.973.734.600	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.1804	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat waktu sesuai SOP	Persen	94,22	94,22	1.397.049.808	94,98	753.296.700	94,22	1.371.957.300	94,22	1.413.116.939	94,22	1.455.510.535	94,22	1.499.175.407	94,22	7.890.106.689	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	Persen	97,11	97,11		97,82		97,11		97,11		97,11		97,11		97,11		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Persentase kontribusi retribusi pelayanan perizinan tertentu terhadap total retribusi	Persen	44,61	25,23		20,34		20,58		20,53		20,26		20,68		20,68		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	106	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Rupiah	1.391.921.280.000	1.391.921.280.000		1.405.840.492.000		1.419.898.897.000		1.434.097.886.000		1.448.438.865.000		1.462.923.254.000		1.462.923.254.000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Nilai realisasi investasi PMA	Rupiah			163.966.192		159.400.880		163.195.400		168.091.300		173.134.000		178.328.000		1.006.115.772		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Nilai realisasi investasi PMDN	Rupiah	5.645.831.413.895	5.645.831.413.895		5.702.289.727.000		5.759.312.624.000		5.816.905.750.000		5.875.074.808.000		5.933.825.556.000		5.933.825.556.000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	19					35.934.624.034		47.908.274.146		52.649.244.696		56.948.059.714		61.187.494.508		66.011.146.078		320.638.843.176			
X	X	01			Persen	90	90	11.336.881.729	90	12.413.638.187	90	13.004.769.296	90	13.686.860.278	90	14.531.004.207	90	15.129.011.561	90	80.102.165.258	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	19	02			Orang	19	20	3.172.237.783	20	13.019.909.648	25	15.624.508.929	30	17.580.741.763	35	19.201.508.664	40	21.536.819.313	40	90.135.726.100	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAAN	Prestasi yang diraih tingkat Regional, Nasional dan Internasional	Orang	73	75	21.425.504.522	75	20.818.585.711	80	22.145.929.275	85	23.565.417.303	90	25.083.976.973	95	26.709.090.619	95	139.748.504.403	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	prosentase organisasi kepramukaan yang berkembang	Persen	-	-	-	10	1.656.140.600	12	1.874.037.196	15	2.115.040.370	17	2.371.004.664	20	2.636.224.585	20	10.652.447.415	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					543.222.212		729.902.159		744.500.202		759.390.206		774.578.010		790.069.571		4.341.662.360	-
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik yang digunakan sebagai bahan informasi	Persen	20	20	543.222.212	20	729.902.159	40	744.500.202	60	759.390.206	80	774.578.010	100	790.069.571	100	4.341.662.360	Dinas Komunikasi dan Informatika



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
2	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				419.771.250		1.375.560.000		1.403.071.200		1.431.132.624		1.459.755.276		1.488.950.382		7.578.240.732	
2	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMATAN INFORMASI	Kategori	Cukup Baik	Cukup Baik	419.771.250	Cukup Baik	1.375.560.000	Cukup Baik	1.403.071.200	Cukup Baik	1.431.132.624	Cukup Baik	1.459.755.276	Cukup Baik	1.488.950.382	Cukup Baik	7.578.240.732	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2.343.152.053		1.004.070.840		1.522.362.232		1.537.585.855		1.552.961.713		3.639.066.160		11.599.198.853	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	2	0																		
2	2	2																		
2	2	0																		
2	2	3																		
2	2	3																		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
X	X X	0 1																		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2 3	0 2																		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
																				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
																				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2 3	0 3																		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	2	4				875.401.600		939.697.674		1.005.591.721		1.090.708.573		1.179.787.110		1.274.523.501		6.365.710.179		
2	2	0				165.961.600														Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						704.440.000	1,25	852.697.674	1500	918.591.721	1,75	993.708.573	2	1.075.787.110	2,25	1.165.523.501	2,25	704.440.000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						5.000.000	68		72		76		80		84			84	5.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2	0				-														Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						-	1	81.000.000	1	81.000.000	1	91.000.000	1	98.000.000	1	103.000.000	1	454.000.000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2 2 4 4	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah (SKKAD) Sistem Klasifikasi Keamanan akses Arsip Dinamis yang diterbitkan	laporan	-	-	-	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	30.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				106.944.25 8.586	140.902.67 9.016	191.975.25 2.125	204.122.89 0.917	216.898.95 9.926	239.069.10 0.692	1.099.913.1 41.262								
3 2 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				41.708.112 .257	79.162.482 .315	122.940.13 6.337	126.957.60 1.776	128.945.90 4.438	139.281.36 0.934	638.995.59 8.057								
X X X 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100	100	9.077.748. 390	100	8.675.100. 718	100	8.761.851. 725	100	8.849.470. 242	100	8.937.964. 945	100	18.012.247. 400	100	62.314.383. 420	Dinas Perikanan









Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	264	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persen	-	-	-	-	-	-	7	489.436.294	10	502.112.694	12	504.974.736	12	1.496.523.724	Dinas Keperumahan, Olahraga dan Pariwisata	
3	265	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Organisasi	25	25	871.694.565	25	1.292.956.920	28	1.459.900.541	31	1.631.073.804	34	1.806.668.584	37	1.986.880.434	37	9.049.174.848	Dinas Keperumahan, Olahraga dan Pariwisata
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				10.934.680.261		7.976.176.796		10.024.143.999		13.665.117.126		21.026.576.818		29.816.266.355		93.442.961.355	
3	272	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kw/Ha	425,97	426,160	3.694.829.279	426,37	1.423.636.470	426,56	2.135.454.705	426,75	3.203.182.058	426,94	4.804.773.086	427,14	7.207.159.629	427,14	22.469.035.227	Dinas Pangan dan Pertanian
		Produktivitas Tanaman Tebu	Kw/Ha	749	749,750		750,5		751,25		752		752,75		753,51		753,51		Dinas Pangan dan Pertanian



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		Produksi Peternakan : Daging	Kg	35.351.442	35.705.000		35.973.000		36.333.000		36.787.000		37.339.000		37.992.000		37.992.000		Dinas Pangan dan Pertanian			
		Telur	Kg	2.729.155	2.756.000		2.777.000		2.805.000		2.840.000		2.883.000		2.933.000		2.933.000		Dinas Pangan dan Pertanian			
		Susu	Liter	11.325.983	11.439.000		11.525.000		11.640.000		11.786.000		11.963.000		12.172.000		12.172.000		Dinas Pangan dan Pertanian			
		Prosentase peningkatan populasi ternak	Persen	1	0,75		0,75		1,00		1,25		1,5		1,75		1,75		Dinas Pangan dan Pertanian			
		Prosentase Penyaluran pupuk bersubsidi	Persen	94	94,10		94,2		94,3		94,4		94,5		94,6		94,6		Dinas Pangan dan Pertanian			
3	2 7	0 3		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Prosentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	Persen	80	81	4.721.128.458	82	2.875.192.066	83	4.312.788.099	84	6.469.182.149	85	9.703.773.223	86	14.555.659.834	86	42.637.723.828	Dinas Pangan dan Pertanian
3	2 7	0 4		<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Prosentase hewan yang mendapatkan tindakan penjaminan kesehatan hewan	Persen	-	-	938.237.364	20	3.121.545.959	25	2.642.197.743	30	2.592.197.743	35	4.417.197.743	40	4.902.197.743	40	18.613.574.295	Dinas Pangan dan Pertanian



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Persen	-	-		5		7,5		10		12,5		15		15		Dinas Pangan dan Pertanian
			Angka	93,13*	85		85		85		86		87		88		88		Dinas Pangan dan Pertanian
3	2705	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persen	17	10		11		12		13		14		15		15		Dinas Pangan dan Pertanian
			Persen	14	7	85.058.425	8	183.403.585	9	275.105.378	10	412.658.066	11	618.987.099	12	928.480.649	13	2.503.693.202	Dinas Pangan dan Pertanian
3	2706	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah	-	-	-	0	-	10	100.000.000	12	150.000.000	14	225.000.000	16	337.500.000	16	812.500.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3	2707	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persen	2.4	2.3	1.495.426.735	2.3	372.398.716	2.4	558.598.074	2.5	837.897.111	2.6	1.256.845.667	2.7	1.885.268.500	2.7	6.406.434.802	Dinas Pangan dan Pertanian



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
3	30					47.431.284.599		44.070.629.910		50.376.178.514		52.757.095.227		54.926.737.726		56.790.127.893		306.352.053.869				
X	X	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	90	90	26.144.295.604	90	30.230.567.359	90	31.742.095.727	90	33.329.200.513	90	34.995.660.539	90	36.745.443.566	90	193.187.263.308	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar SNI	Persen	15,78 (3 pasar)	15,78 (3 Pasar)	18.615.442.299	15,78 (3 pasar)	10.398.188.923	15,78 (3 pasar)	12.992.084.159	21 (4 pasar)	13.545.546.944	26,31 (5pasar)	13.896.376.610	31 (6pasar)	13.975.585.957	31 (6pasar)	83.423.224.892	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	a.Nilai Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	Nilai	-	-		<9		<9		<9		<9		<9		<9		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					b. persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	-	-	443.746.500	80	962.734.000	80	921.934.000	80	961.208.388	80	986.103.686	80	991.724.477	80	5.267.451.051	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3 3 0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non migas	USD	1.200.000.000	1.200.000.000	2.087.322.866	1.300.000.000	1.845.109.122	1.350.000.000	4.086.034.122	1.400.000.000	4.260.099.176	1.450.000.000	4.370.435.744	1.500.000.000	4.395.347.228	1.500.000.000	21.044.348.258	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 3 0 6	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTP yang terstandarisasi	Persen	85	95	140.477.330	95	634.030.506	95	634.030.506	95	661.040.206	95	678.161.147	95	682.026.665	95	3.429.766.360	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 3 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					4.552.908.298		6.264.125.179		4.097.440.504		4.271.991.469		4.382.636.049		4.407.617.074		27.976.718.573	
3 3 1 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	a. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	-	100	4.452.908.298	100	6.064.125.179	100	3.273.530.690	100	3.412.983.097	100	3.501.379.360	100	3.521.337.222	100	24.226.263.846	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		b. Persentase IKM yang dibina / dikembangkan	Persen	-	-		3,2		3,22		3,24		3,26		3,28		3,28			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	3103	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA</b> Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (UI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	-	-	50.000.000	0,17	50.000.000	0,34	200.000.000	0,51	208.520.000	0,68	213.920.668	0,85	215.140.016	0,85	937.580.684		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	3104	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b> Persentase data base IKM yang terupdate	Persen	-	1,17	50.000.000	0,46	150.000.000	0,92	623.909.814	1,38	650.488.372	1,84	667.336.021	2,3	671.139.836	2,3	2.812.874.043		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	32	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>				67.280.187		38.930.377		77.296.148		85.025.762		102.881.172		113.169.290		484.582.936		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
3	3 2 3	0 3		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang diberangkatkan	Persen	-	-	67.280.187	100	38.930.377	100	77.296.148	100	85.025.762	100	102.881.172	100	113.169.290	100	484.582.936	Dinas Tenaga Kerja
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				212.269.717.557		189.401.036.724		286.060.916.009		299.508.512.005		317.698.575.242		337.692.355.256		1.642.631.112.793		
4	0 1			SEKRETARIAT DAERAH				83.961.757.959		88.351.836.803		145.879.841.040		156.523.815.537		171.854.184.845		188.931.077.050		835.502.513.234		
4	0 1	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang urusan pemerintahan daerah	Nilai	-	-	59.447.871.793	70	56.966.673.573	72	92.214.804.992	75	97.942.300.492	77	106.534.395.540	80	116.141.085.095	80	529.247.131.484	Sekretariat Daerah
					Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan A- (Sangat Baik)	Nilai	66	66	286.768.100	66	397.550.000	66	700.000.000	100	800.000.000	100	900.000.000	100	1.000.000.000	100	4.084.318.100	Sekretariat Daerah





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	Persen	20	50	190.981.460	75	104.675.000	77	225.000.000	78	250.000.000	80	275.000.000	100	300.000.000	100	1.345.656.460	Sekretariat Daerah
40102	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra	Nilai	-	-	10.860.864.916	70	13.769.924.054	72	23.771.840.638	75	27.565.517.858	77	33.111.210.162	80	39.162.072.661	80	148.241.430.289	Sekretariat Daerah
		Persentase Kinerja Urusan tercapai	Persen	100	100	911.578.149	100	1.778.824.893	100	10.056.917.614	100	10.206.917.614	100	10.356.917.614	100	10.506.917.614	100	43.818.073.498	Sekretariat Daerah
40103	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan	Nilai	-	-	11.138.906.896	70	13.876.912.543	72	14.511.277.796	75	15.209.079.573	77	15.976.661.529	80	16.821.001.680	80	87.533.840.017	Sekretariat Daerah
		Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Nilai	-	84	1.124.786.645	85	1.457.276.740	86	4.400.000.000	88	4.550.000.000	89	4.700.000.000	90	5.000.000.000	90	21.232.063.385	Sekretariat Daerah
402	SEKRETARIAT DPRD					128.307.959.598		101.049.199.921		140.181.074.969		142.984.696.468		145.844.390.398		148.761.278.205		807.128.599.559	







Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2. Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap dokumen Renstra, PD bidang perekonomian dan SDA	Persen	-	100		100		100		100		100		100		100		100		
		3. Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap dokumen Renstra, PD bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Persen	-	100		100		100		100		100		100		100		100		
5	02					700.604.028.190		677.482.822.327		776.225.752.855		839.659.517.201		920.570.878.154		1.008.907.427.731		4.923.450.426.457			
X	X	01																			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100	80	14.102.414.453	80	13.793.432.882	80	15.537.776.170	80	17.091.553.787	80	18.800.709.166	80	20.680.780.083	80	100.006.666.541	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02																			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Rancangan KUA-PPAS /Perubahan KUA-PPAS	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		
				Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Raperda APBD/PAPBD	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	645.099.475.742	Tepat Waktu	620.138.125.812	Tepat Waktu	715.924.195.198	Tepat Waktu	777.209.614.688	Tepat Waktu	854.874.576.007	Tepat Waktu	940.302.033.083	Tepat Waktu	4.553.548.020.530	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		ketepatan waktu penyampaian Dokumen Raperbup APBD/PAPBD	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Badan Pengelola n Keuangan dan Aset Daerah	
		Prosentase SKPD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		Badan Pengelola n Keuangan dan Aset Daerah	
		Persentase realisasi penyaluran belanja transfer	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		Badan Pengelola n Keuangan dan Aset Daerah	
5	0203	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Persen	18,22	32,81		49,5		66,13		82,81		99,49		100		100		Badan Pengelola n Keuangan dan Aset Daerah	
		Prosentase pemindahtanganan BMD yang diproses melalui lelang umum	Persen	100	100	2.704.873.800	100	3.985.980.830	100	4.011.540.200	100	3.383.540.200	100	3.388.540.200	100	3.393.540.200	100	20.868.015.430		Badan Pengelola n Keuangan dan Aset Daerah
		Prosentase OPD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan BMD	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		Badan Pengelola n Keuangan dan Aset Daerah	
		Prosentase pemanfaatan BMD yang diproses	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		Badan Pengelola n Keuangan dan Aset Daerah	







Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Tingkat motivasi pegawai (sisi manajemen kepegawaian)	Persen	-	85		85		85		85		85		85		85		85	Badan Kepegawaian Daerah
5	04					3.931.928.393		4.228.701.236		4.334.951.053		4.551.698.605		4.779.283.536		5.018.247.713		26.844.810.536		
5	04	02				3.931.928.393	40	4.228.701.236	50	4.334.951.053	60	4.551.698.605	65	4.779.283.536	70	5.018.247.713	70	26.844.810.536	Badan Kepegawaian Daerah	
5	05					739.216.646		926.706.825		935.973.893		945.333.632		954.786.969		964.334.838		5.466.352.803		
5	05	02				739.216.646	70	926.706.825	72	935.973.893	74	945.333.632	76	954.786.969	78	964.334.838	78	5.466.352.803	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		Persentase penelitian/kajian yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	Persen	-	80		90		92		94		96		98		98		98	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				15.877.731.290		18.098.889.582		21.901.398.536		23.888.917.735		26.017.122.979		29.569.735.582		135.353.795.704				
6	01	INSPEKTORAT DAERAH				15.877.731.290		18.098.889.582		21.901.398.536		23.888.917.735		26.017.122.979		29.569.735.582		134.674.667.824				
X	X X	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	70,37	76,00	15.157.109.365	76,00	16.704.697.682	78	18.856.392.356	80	20.562.737.735	82	22.377.818.119	85	25.748.402.857	85	119.407.158.114	Inspektorat
6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal A	Persen	31	31	320.332.425	33	278.838.380	35	609.001.236	37	665.236.000	37	727.860.972	39	764.266.545	39	3.365.535.558	Inspektorat



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Persentase OPD yang melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan	Persen	-	-	-	-	-	100	609.001.236	100	665.236.000	100	727.860.972	100	764.266.545	100	2.766.364.753	Inspektorat
		Persentase tindakan lanjut hasil pemeriksaan eksternal yang sesuai rekomendasi	Persen	85	-	-	86	278.838.380	87	609.001.236	88	665.236.000	100	727.860.972	90	764.266.545	90	3.045.203.133	Inspektorat
		Persentase tindakan lanjut hasil pemeriksaan internal yang sesuai rekomendasi	Persen	90	-	-	91	278.838.380	92	609.001.236	93	665.236.000	94	727.860.972	95	764.266.545	95	3.045.203.133	Inspektorat
		Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	-	100	278.838.380	100	609.001.236	100	665.236.000	100	727.860.972	100	764.266.545	100	3.045.203.133	Inspektorat
603	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, dan ASISTENSI	Persentase OPD yang melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan	Persen	-	-	400.289.500	100	278.838.380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7						199.265.00 6.781		200.710.77 6.711		224.173.37 3.468		247.056.56 9.428		271.054.20 2.057		298.159.62 2.263		1.440.419.5 50.708	
7	01					199.265.00 6.781		200.710.77 6.711		224.173.37 3.468		247.056.56 9.428		271.054.20 2.057		298.159.62 2.263		1.440.419.5 50.708	
X	X	01				27.154.371 .040	100	29.869.808 .144	100	32.856.788 .958	100	36.142.467 .854	100	39.756.714 .640	100	43.732.386 .104	100	209.512.53 6.740	Kecamatan Sidoarjo



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7 0 1 0 2																				
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	Persen	a. 100 b. 100 c. 100	a. 100 b. 100 c. 100	4.266.715. 039	a. 100 b. 100 c. 100	1.175.666. 877	a. 100 b. 100 c. 100	1.293.233. 565	a. 100 b. 100 c. 100	1.422.556. 921	a. 100 b. 100 c. 100	1.564.812. 613	a. 100 b. 100 c. 100	1.721.293. 875	a. 100 b. 100 c. 100	11.444.278. 890	Kecamatan Sidoarjo	
7 0 1 0 3																				
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	8.429.738. 974	100	8.169.734. 350	100	10.359.752. .765	100	11.395.728. .042	100	12.535.300. .846	100	13.788.830. .930	100	56.249.346. 932	Kecamatan Sidoarjo	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	100	100	77.428.095	100	69.740.000	100	130.201.000	100	593.221.100	100	157.543.210	100	173.297.531	100	1.201.430.936	Kecamatan Sidoarjo
70105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	107.790.604	100	99.895.753	100	109.885.328	100	120.873.861	100	132.961.247	100	146.257.372	100	717.664.166	Kecamatan Sidoarjo
70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	89.765.000	100	187.145.648	100	205.860.213	100	226.446.234	100	249.090.857	100	273.999.943	100	1.232.307.896	Kecamatan Sidoarjo



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
X X X 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	90	90	6.016.349.270	90	5.797.739.607	90	6.377.513.568	95	7.015.264.924	95	7.716.791.417	100	8.488.470.559	100	41.412.129.345	Kecamatan Candi
7 0 1 0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	Persen	a. 98,57b. 81,81c. 97,03	a. 100b. 100c. 100	457.866.516	a. 100b. 100c. 100	630.364.293	a. 100b. 100c. 100	693.400.722	a. 100b. 100c. 100	762.740.795	a. 100b. 100c. 100	839.014.874	a. 100b. 100c. 100	922.916.361	a. 100b. 100c. 100	3.848.437.045	Kecamatan Candi



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 0 1 0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	Persen	0	0	-	80	42.406.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kecamatan Candi
7 0 1 0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	100	100	91.482.019	100	43.590.000	100	47.949.000	100	52.743.900	100	58.018.290	100	63.820.119	100	357.603.328	Kecamatan Candi



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 0 1 0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	64.802.667	100	38.912.000	100	42.803.200	100	47.083.520	100	51.791.872	100	56.971.059	100	302.364.318	Kecamatan Candi
7 0 1 0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	183.441.000	100	71.735.700	100	78.909.270	100	86.800.197	100	95.480.217	100	105.028.238	100	437.953.622	Kecamatan Candi
X X X 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	87	88	5.386.783.689	88	5.386.783.689	88	5.925.462.058	88.5	6.518.008.264	88.5	7.169.809.090	89	7.886.789.999	89	38.273.636.789	Kecamatan Buduran





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7 0 1 0 2																				
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	Persen	a. 100 b. 100 c. 100	a. 85 b. 85 c. 85	1.491.327. 758	a. 85 b. 85 c. 85	1.491.327. 758	a. 85 b. 85 c. 85	1.640.460. 534	a. 90 b. 90 c. 90	1.804.506. 587	a. 90 b. 90 c. 90	1.984.957. 246	a. 95 b. 95 c. 95	2.183.452. 970	a. 95 b. 95 c. 95	10.596.032. 853	Kecamatan Buduran	
7 0 1 0 4																				
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	a. 100 b. 40 c. 100	70	81.378.955	70	81.378.955	70	89.516.851	75	98.468.536	75	108.315.389	80	119.146.928	80	578.205.613	Kecamatan Buduran	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 0 1 0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	85	64.204.479	85	64.204.479	85	70.624.927	90	77.687.420	90	85.456.162	95	94.001.778	95	456.179.244	Kecamatan Buduran
7 0 1 0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	103.963.545	100	103.963.545	100	114.359.900	100	125.795.889	100	138.375.478	100	152.213.026	100	738.671.384	Kecamatan Buduran
X X X 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat kepuasan aparaturnya perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	95	95	5.346.483.939	96	6.075.551.788	97	6.683.106.967	98	7.351.417.663	99	8.086.559.430	100	8.895.215.373	100	42.438.335.160	Kecamatan Wonorejo



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7 0 1 0 2																				
	<b>PROGRAM PENVELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	Persen	a. 95b. 95c. 95	a. 95b. 95c. 95	3.201.296.236	a. 96b. 96c. 96	448.459.607	a. 97b. 97c. 97	493.305.568	a. 98b. 98c. 98	542.636.124	a. 99b. 99c. 99	596.899.737	a. 100b. 100c. 100	656.589.711	a. 100b. 100c. 100	5.939.186.983	Kecamatan Wonoayu	
7 0 1 0 4																				
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	a. 100 b. 100 c. 100	100	131.887.500	100	360.591.360	100	396.650.496	100	436.315.546	100	479.947.100	100	527.941.810	100	2.333.333.812	Kecamatan Wonoayu	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 0 1 0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	52.449.758	100	74.445.250	100	81.889.775	100	90.078.753	100	99.086.628	100	108.995.291	100	506.945.454	Kecamatan Wonorejo
7 0 1 0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	95	95	99.925.000	96	883.529.000	97	971.881.900	98	1.069.070.090	99	962.952.786	100	1.059.248.065	100	5.046.606.841	Kecamatan Wonorejo
X X X 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100	98	11.238.574.603	98	11.238.574.603	98	12.362.432.063	98	13.598.675.270	98	14.958.542.797	98	16.454.397.076	98	79.851.196.412	Kecamatan Krian





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 0 1 0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	97	98	165.288.074	98	165.288.074	98	181.816.881	98	199.998.570	98	219.998.426	98	241.998.269	98	1.174.388.295	Kecamatan Krian
7 0 1 0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	persen	100	98	247.045.559	98	247.045.559	98	271.750.115	98	298.925.126	98	328.817.639	98	361.699.403	98	1.755.283.401	Kecamatan Krian



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 0 1 0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	persen	100	98	126.658.178	98	126.658.178	98	139.323.996	98	153.256.395	98	168.582.035	98	185.440.238	98	899.919.021	Kecamatan Krian
X X X 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100	89	9.946.846.444	90	9.861.019.272	91	10.847.121.199	92	11.931.833.319	93	13.125.016.651	94	14.437.518.316	94	70.149.355.201	Kecamatan Porong



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7 0 1 0 2																				
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	Persen	a.100 b.100 c.100	a.100 b.100 c.100	2.766.715. 431	a.100 b.100 c.100	1.938.728. 486	a.100 b.100 c.100	2.132.601. 335	a.100 b.100 c.100	2.345.861. 468	a.100 b.100 c.100	2.580.447. 615	a.100 b.100 c.100	2.838.492. 376	a.100 b.100 c.100	14.602.846. 711		Kecamatan Porong
7 0 1 0 3																				
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	Persen	50	50	2.240.507. 646	50	1.410.974. 790	50	1.552.072. 269	50	1.707.279. 496	50	1.878.007. 445	50	2.065.808. 190	50	10.854.649. 836		Kecamatan Porong





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 0 1 0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	100	100	190.821.770	100	52.439.748	100	57.683.723	100	63.452.095	100	69.797.305	100	76.777.035	100	510.971.676	Kecamatan Porong
7 0 1 0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	40.683.100	100	35.005.300	100	38.505.830	100	42.356.413	100	46.592.054	100	51.251.260	100	254.393.957	Kecamatan Porong
7 0 1 0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	28.476.347	100	17.010.644	100	18.711.708	100	20.582.879	100	22.641.167	100	24.905.284	100	132.328.030	Kecamatan Porong



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
X X X 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	89,44	80	5.298.687.715	89,5	1.712.757.982	89,55	1.884.033.780	89,6	2.072.437.158	89,7	2.279.680.874	89,8	2.507.648.961	90	15.755.246.471	Kecamatan Krebung
7 0 1 0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	Persen	a. 100 b. 85 c. 100	a. 100 b. 85 c. 100	2.291.566.525	a. 100 b. 86 c. 100	920.367.500	a. 100 b. 87 c. 100	1.012.404.250	a. 100 b. 88 c. 100	1.113.644.675	a. 100 b. 89 c. 100	1.225.009.143	a. 100 b. 90 c. 100	1.347.510.057	a. 100 b. 90 c. 100	7.910.502.149	Kecamatan Krebung



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 0 1 0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	70	70	211.665.472	73	211.633.312	76	232.796.643	79	256.076.308	82	281.683.938	85	309.852.332	85	1.503.708.005	Kecamatan Krembung
7 0 1 0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik	Persen	79	79	97.390.351	80	24.096.212	82	26.505.833	84	29.156.417	86	32.072.058	88	35.279.264	88	244.500.135	Kecamatan Krembung
7 0 1 0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	8.375.000	100	16.675.000	100	18.342.500	100	20.176.750	100	22.194.425	100	24.413.868	100	110.177.543	Kecamatan Krembung



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
X X X 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Poin	100	100	4.557.301.476	82,61	6.064.733.406	86,96	6.671.206.747	91,3	7.338.327.421	95,65	8.072.160.163	95,65	8.879.376.180	95,65	41.583.105.393	Kecamatan Jabon
7 0 1 0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	Persen	a. 100 b. 100 c. 100	a. 70 b. 94,48 c. 100	1.434.691.722	a. 73,33 b. 95,66 c. 100	3.618.528.400	a. 76,47 b. 96,10 c. 100	3.980.381.240	a. 78,95 b. 96,53 c. 100	4.378.419.364	a. 80,95 b. 92,61 c. 100	4.816.261.300	a. 82,61 b. 97,34 c. 100	5.297.887.430	a. 82,61 b. 97,34 c. 100	23.526.169.457	Kecamatan Jabon



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 0 1 0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase pelanggaran perda dan perkara yang ditangani	Persen	a. 100b. 100c. 100	100	141.738.452	81,25	189.850.675	85,71	208.835.742,50	88,24	229.719.317	86,67	252.691.248	90,91	277.960.373	90,91	1.300.795.808	Kecamatan Jabon
7 0 1 0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	12.769.465	100	223.804.246	100	246.184.671	100	270.803.138	100	297.883.451	100	327.671.797	100	1.379.116.667	Kecamatan Jabon
7 0 1 0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	10.631.164	100	246.637.540	100	271.301.294	100	298.431.423	100	328.274.566	100	361.102.022	100	1.516.378.009	Kecamatan Jabon



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
X X X 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	83	83	5.141.559.091	90,5	5.066.521.716	91	5.573.173.888	91,5	6.130.491.276	92	6.743.540.404	92,5	7.417.894.444	92,5	36.073.180.819	Kecamatan Balongbendo
7 0 1 0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	Persen	a. 100 b. 100 c. 100	a. 100 b. 100 c. 100	954.765.008	a. 100 b. 100 c. 100	1.489.850.000	a. 100 b. 100 c. 100	1.638.835.000	a. 100 b. 100 c. 100	1.802.718.500	a. 100 b. 100 c. 100	1.982.990.350	a. 100 b. 100 c. 100	2.181.289.385	a. 100 b. 100 c. 100	10.050.448.243	Kecamatan Balongbendo



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 0 1 0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	100	100	92.014.461	100	47.000.000	100	273.350.000	100	300.685.000	100	330.753.500	100	363.828.850	100	1.407.631.811	Kecamatan Balongbendo
7 0 1 0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	-	100	37.824.164	100	168.947.492	100	185.842.241	100	204.426.465	100	224.869.112	100	821.909.474	Kecamatan Balongbendo



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 0 1 0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	3.532.500	100	37.850.000	100	79.475.000	100	87.422.500	100	96.164.750	100	105.781.225	100	410.225.975	Kecamatan Balongbendo
X X X 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat kepuasan aparaturnya perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	90	90	5.349.695.117	89.54	5.683.199.504	89.55	6.251.519.454	89.56	6.876.671.400	89.57	7.564.338.540	89.58	8.320.772.394	89.58	40.046.196.409	Kecamatan Tarik





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Prosentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan; b. Prosentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar; c. Prosentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL;	a. persen b. persen c. persen	a. 100 b. 100 c. 100	a. 100 b. 100 c. 100	1.090.704.066	a. 100 b. 100 c. 100	877.220.060	a. 100 b. 100 c. 100	964.942.066	a. 100 b. 100 c. 100	1.061.436.273	a. 100 b. 100 c. 100	1.167.579.900	a. 100 b. 100 c. 100	1.284.337.890	a. 100 b. 100 c. 100	6.446.220.254	Kecamatan Tarik
70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran perda dan perkara yang ditangani;	Persen	100	100	159.235.000	100	29.494.570	100	84.674.299	100	93.141.729	100	102.455.902	100	112.701.492	100	581.702.992	Kecamatan Tarik



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 0 1 0 5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	persen	100	100	80.992.342	100	100.440.082	100	110.484.090	100	121.532.499	100	133.685.749	100	147.054.324	100	694.189.087	Kecamatan Tarik
7 0 1 0 6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	76.075.000	100	33.316.960	100	36.648.656	100	40.313.522	100	44.344.874	100	48.779.361	100	279.478.372	Kecamatan Tarik



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
X X X 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	88	88	15.919.644.341	89	15.899.095.497	90	17.489.005.047	91	19.237.905.551	92	21.161.696.107	93	23.277.865.717	93	112.985.212.260	Kecamatan Taman
7 0 1 0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Prosentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan; b. Prosentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar; c. Prosentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL;	Persen	a. 100 b. 100 c. 100	a. 100 b. 100 c. 100	3.285.350.945	a. 100 b. 100 c. 100	2.113.272.480	a. 100 b. 100 c. 100	2.324.599.728	a. 100 b. 100 c. 100	2.557.059.701	a. 100 b. 100 c. 100	2.812.765.671	a. 100 b. 100 c. 100	3.094.042.238	a. 100 b. 100 c. 100	16.187.090.763	Kecamatan Taman



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 0 1 0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	2.949.039.367	100	4.001.670.849	100	4.401.837.934	100	4.842.021.727	100	5.326.223.900	100	5.858.846.290	100	27.379.640.067	Kecamatan Taman
7 0 1 0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pelanggaran perda dan perkara yang ditangani;	Persen	a. 100 b. 100 c. 100	100	115.555.947	100	55.555.040	100	83.332.792	100	91.666.071	100	100.832.678	100	110.915.946	100	557.858.475	Kecamatan Taman
7 0 1 0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik	Pesen	100	100	202.450.109	100	24.139.700	100	292.572.614	100	321.829.876	100	354.012.863	100	389.414.150	100	1.584.419.313	Kecamatan Taman



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 0 1 0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen : perencanaan penganggaran dan pelaporan	Persen	100	100	15.470.000	100	54.470.384	100	59.917.422	100	65.909.165	100	72.500.081	100	79.750.089	100	348.017.141	Kecamatan Taman
X X X 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Poin	82,35	87,78	5.804.585.293	87,88	6.685.994.796	87,98	7.354.594.276	88,08	8.090.053.703	88,18	8.899.059.073	88,28	9.788.964.981	88,28	46.623.252.122	Kecamatan Waru



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 0 1 0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Prosentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan; b. Prosentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar; c. Prosentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL;	Persen	a. 100 b. 100 c. 85	a. 85 b. 90 c. 90 3.041.863.688	a. 100 b. 80 c. 100 1.896.826.420	a. 100 b. 80 c. 100 2.276.191.704	a. 100 b. 80 c. 100 2.503.810.874	a. 100 b. 80 c. 100 2.754.191.962	a. 100 b. 80 c. 100 3.029.611.158	a. 100 b. 80 c. 100 15.502.495.806	Kecamatan Waru							
7 0 1 0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pelanggaran perda dan perkara yang ditangani;	Persen	85	87 526.717.150	100 73.002.990	100 87.603.588	100 105.124.305	100 115.636.736	100 127.200.409	100 1.035.285.178	Kecamatan Waru							



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 0 1 0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	53.762.217	100	52.257.540	100	130.643.850	100	143.708.235	100	158.079.059	100	173.886.964	100	712.337.865	Kecamatan Waru
7 0 1 0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	85	87	39.402.491	100	42.830.375	100	70.982.553	100	85.179.063	100	93.696.969	100	103.066.666	100	435.158.118	Kecamatan Waru
X X X 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	100	100	4.909.220.779	100	15.671.248.007	100	17.343.372.808	100	19.077.710.088	100	20.985.481.097	100	23.084.029.207	100	101.071.061.987	Kecamatan Gedangan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 0 1 0 2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PK	Persen	-	-	1.951.043.903	a.100 b.80 c.100	1.553.003.419	a.100 b.85 c.100	1.708.303.761	a.100 b.90 c.100	1.879.134.137	a.100 b.90 c.100	2.067.047.551	a.100 b.95 c.100	2.273.752.306	a.100 b.100 c.100	11.432.285.076	Kecamatan Gedangan
7 0 1 0 4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	-	-	339.948.897	100	161.134.569	100	177.248.026	100	194.972.828	100	214.470.111	100	235.917.122	100	1.323.691.554	Kecamatan Gedangan





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 0 1 0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	Persen	-	-	100.325.368	100	122.568.203	100	299.825.023	100	329.807.526	100	362.788.278	100	399.067.106	100	1.614.381.504	Kecamatan Gedangan
7 0 1 0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	26.613.300	100	26.613.300	100	28.026.900	100	30.829.590	100	33.912.549	100	37.303.804	100	183.299.443	Kecamatan Gedangan
X X X 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparaturnya terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	90	90	5.501.885.659	90	6.220.341.526	90	6.842.375.678,60	90	7.526.613.246	90	8.279.274.571	90	9.107.202.028	90	43.477.692.709	Kecamatan Sedati



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 0 1 0 2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	Persen	a. 75 b. 72,73 c. 100	a. 75 b. 72,73 c. 100	2.438.287,739	a. 75 b. 72,73 c. 100	838.878.534	a. 75 b. 72,73 c. 100	922.766.387	a. 75 b. 74,55 c. 100	1.015.043,026	a. 75 b. 76,36 c. 100	1.116.547,329	a. 75 b. 78,18 c. 100	1.228.202,062	a. 75 b. 78,18 c. 100	955.092,451	Kecamatan Sedati
7 0 1 0 4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang ditangani;	Persen	100	100	136.772.500	100	96.825.000	100	106.507.500	100	117.158.250	100	128.874,075	100	141.761,483	100	727.898,808	Kecamatan Sedati



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 0 1 0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	57.597.505	100	87.561.155	100	96.317.271	100	105.948.998	100	116.543.897	100	128.198.287	100	164.114.471	Kecamatan Sedati
7 0 1 0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen : perencanaan penganggaran dan pelaporan	Persen	100	100	14.202.500	100	31.691.380	100	34.860.518	100	38.346.570	100	42.181.227	100	46.399.349	100	207.681.544	Kecamatan Sedati
X X X 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	98,24	98	5.753.767.424	98,24	5.753.767.424	98,24	6.329.144.166	98,24	6.962.058.583	98,24	7.658.264.441	98,24	8.424.090.885	98,24	40.881.092.924	Kecamatan Tangulangin



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 0 1 0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	Persen	a. 100 b. 100 c. 100	a. 100 b. 100 c. 100	2.005.327.450	a. 100 b. 100 c. 100	769.797.500	a. 100 b. 100 c. 100	846.777.250	a. 100 b. 100 c. 100	931.454.975	a. 100 b. 100 c. 100	1.024.600.473	a. 100 b. 100 c. 100	1.127.060.520	a. 100 b. 100 c. 100	6.705.018.167	Kecamatan Tanggulangin
7 0 1 0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	100	100	139.201.442	100	139.201.442	100	153.121.586	100	168.433.745	100	185.277.119	100	203.804.831	100	989.040.166	Kecamatan Tanggulangin



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 0 1 0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	persen	100	100	292.884.811	100	224.425.458	100	246.868.004	100	271.554.804	100	298.710.285	100	328.581.313	100	1.663.024.675	Kecamatan Tanggulangin
7 0 1 0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	12.425.000	100	1.019.275.000	100	1.121.202.500	100	1.233.322.750	100	1.356.655.025	100	1.492.320.528	100	6.235.200.803	Kecamatan Tanggulangin
X X X 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	93,1	93	6.084.476.159	93,15	7.271.231.420	93,2	7.998.354.562	93,25	8.798.190.018	93,3	9.678.009.020	93,4	10.645.809.922	93,4	50.476.071.101	Kecamatan Tulangan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 0 1 0 2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	Persen	a. 100 b. 100 c. 100	a. 100 b. 100 c. 100	1.707.332.500	a. 100 b. 100 c. 100	888.290.000	a. 100 b. 100 c. 100	977.119.000	a. 100 b. 100 c. 100	1.074.830.900	a. 100 b. 100 c. 100	1.182.313.990	a. 100 b. 100 c. 100	1.300.545.389	a. 100 b. 100 c. 100	7.130.431.779	Kecamatan Tulangan
7 0 1 0 4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	100	100	158.297.500	100	74.277.500	100	81.705.250	100	89.875.775	100	98.863.353	100	108.749.688	100	611.769.065	Kecamatan Tulangan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 0 1 0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	Persen	100	100	105.957.589	100	47.901.328	100	52.691.461	100	57.960.607	100	63.756.668	100	70.132.334	100	398.399.987	Kecamatan Tulangan
7 0 1 0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	7.997.500	100	73.570.000	100	80.927.000	100	89.019.700	100	97.921.670	100	107.713.837	100	457.149.707	Kecamatan Tulangan
X X X 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	98	98	5.790.869.777	95	5.882.211.534	95	6.470.432.687	95	7.117.475.956	95	7.829.223.552	95	8.612.145.907	95	41.702.359.413	Kecamatan Prambon



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7 0 1 0 2																					
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	Persen	a. 100 b. 100 c. 100	a. 100 b. 100 c. 100	1.496.903. 233	a. 100 b. 100 c. 100	855.158.75 0	a. 100 b. 100 c. 100	940.674.62 5	a. 100 b. 100 c. 100	1.034.742. 088	a. 100 b. 100 c. 100	1.138.216. 296	a. 100 b. 100 c. 100	1.252.037. 926	a. 100 b. 100 c. 100	5.465.694.9 92		Kecamatan Prambon	
7 0 1 0 4																					
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	85	90	401.242.50 0	100	32.247.500	100	35.472.250	100	39.019.475	100	42.921.423	100	47.213.565	100	598.116.71 2		Kecamatan Prambon	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 0 1 0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	1.160.000	100	38.730.082	100	42.603.090	100	46.863.399	100	51.549.739	100	56.704.713	100	237.611.024	Kecamatan Prambon
7 0 1 0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	85	90	27.412.500	100	54.237.500	100	59.661.250	100	65.627.375	95	72.190.113	100	79.409.124	100	358.537.861	Kecamatan Prambon
X X X 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	89,22	85	6.884.572.983	a. 85	5.778.933.900	a. 85,5	6.356.827.290	a. 86	6.992.510.019	a. 86,5	7.691.761.021	a. 87	8.460.937.123	a. 87	42.165.542.336	Kecamatan Sukodono





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 0 1 0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik	Persen	79	79	99.000.000	80	99.000.000	82	99.000.000	84	108.900.000	86	119.790.000	88	131.769.000	88	657.459.000	Kecamatan Sukodono
7 0 1 0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	persen	100	100	32.358.003	100	140.210.690	100	154.231.759	100	169.654.935	100	186.620.428	100	205.282.471	100	888.358.287	Kecamatan Sukodono
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					20.680.631.396		42.677.259.174		43.397.746.835		49.504.435.048		46.135.016.324		47.331.239.836		249.726.328.613	
8 0 1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					20.680.631.396		42.677.259.174		43.397.746.835		49.504.435.048		46.135.016.324		47.331.239.836		249.003.836.064	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
8	013	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya	Persen	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Persentase partisipasi peserta terhadap pendidikan politik dan etika budaya politik	Persen	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
8	014	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Ormas yang didata	Ormas	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah pembinaan/pekerjaan pemberdayaan dan pengawasan Ormas	Kegiatan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Jumlah proposal Ormas yang diverifikasi	proposals	12	12		12		12		12		12		12		12		12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0105	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	a. Kegiatan	3	3	145.596.201	3	1.414.028.530	3	1.484.729.956	3	1.559.181.646	3	1.637.140.728	3	1.718.997.764	3	7.959.674.825	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		b. Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	b. laporan	12	12		12		12		12		12		12		12		12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80106	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik yang berhasil ditangani	Persen	100	100	1.542.378.675	100	655.322.040	100	688.088.142	100	722.492.549	100	758.617.176	100	2.988.200.830	100	6.632.606.863	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Keterangan:**

- : Indikator baru dan tidak dilakukan perhitungan pada tahun berkenaan

■ : Prioritas I

■ : Prioritas II

■ : Prioritas III

## Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan melalui penetapan indikator kinerja daerah, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi-misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimanifestasikan dalam dokumen RPJMD. Berdasarkan hirarki lembaga yang dipisahkan dengan tugas pokok dan fungsi, maka indikator di bab ini dibagi menjadi dua, yaitu **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **Indikator Kinerja Daerah (IKD)**. IKU adalah indikator makro yang menggambarkan tanggungjawab dan komitmen kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) menggambarkan ukuran keberhasilan terhadap program perangkat daerah (PD). Adapun rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 sebagai berikut:

**Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama  
Kabupaten Sidoarjo**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Tahun ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	BB	BB	BB	BB	BB	A
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-3,69	1,00	1,36	2,89	4,23	5,01	5,53
3	Indeks Gini	Indeks	0,340	0,365	0,359	0,347	0,345	0,343	0,340
4	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	Persen	10,97	10,54	10,39	10,09	9,76	9,44	9,14
5	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,59	5,71	6,00	5,40	5,30	5,20	5,00




No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Tahun ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	Indeks Infrastruktur	Indeks	0,747	0,755	0,762	0,772	0,780	0,788	0,796
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	59,78	59,79	59,80	59,81	59,82	59,83	59,84
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80,29	80,41	80,77	80,92	81,17	81,40	81,62
9	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	*	82,01	82,77	85,00	87,30	89,66	92,08

Keterangan : \* merupakan indikator baru, Data dilakukan penghitungan tahun 2021 sebagai baseline untuk merumuskan target tahun 2022-2026.

Sedangkan Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (*outcome*) atau komposisinya (*benefit*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. **Aspek Kesejahteraan Masyarakat**, merupakan suatu kondisi yang menggambarkan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya, dan olah raga; yang diukur melalui indikator makro sebagai indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan bidang ekonomi sosial.
2. **Aspek Pelayanan Umum**, merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangan urusan, baik wajib maupun pilihan, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. **Aspek Daya Saing Daerah**, merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.



Secara detail indikator kinerja daerah (IKD) yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam Tabel 8.2. di bawah ini.



**Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan  
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo**

NO	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target						Kondisi Akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>A</b>	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>									
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Kategori	B	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
2	Pertumbuhan Ekonomi (PE)	Persen	-3,69	1,00	1,36	2,89	4,23	5,01	5,53	5,53
3	Indeks Gini	Indeks	0,340	0,365	0,359	0,347	0,345	0,343	0,340	0,340
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	10,97	10,54	10,39	10,09	9,76	9,44	9,14	9,14
5	Prosentase Penduduk Miskin	Persen	5,59	5,71	6,00	5,40	5,30	5,20	5,00	5,00
6	Indeks Infrastruktur	Indeks	0,747	0,755	0,762	0,772	0,780	0,788	0,796	0,796
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	59,78	59,79	59,80	59,81	59,82	59,83	59,84	59,84
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80,29	80,41	80,77	80,92	81,17	81,40	81,62	81,62



NO	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target						Kondisi Akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
9	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	*	82,01	82,77	85,00	87,30	89,66	92,08	92,08
<b>B</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>									
<b>B,1</b>	<b>Layanan Urusan Wajib Dasar</b>									
<b>B.1.1</b>	<b>Urusan Pendidikan</b>									
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,93	15,01	15,22	15,41	15,89	16,12	16,44	16,44
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,50	10,33	10,79	11,23	11,56	12,09	13,11	13,11
<b>B.1.2</b>	<b>Urusan Kesehatan</b>									
3	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,04	73,69	74,77	75,19	75,98	76,31	76,81	76,81
<b>B.1.3</b>	<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>									
5	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	0,742	0,748	0,754	0,760	0,766	0,772	0,777	0,777
<b>B.1.4</b>	<b>Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>									
6	Indeks Infrastruktur Pendidikan	Indeks	80,49	82,53	84,56	86,60	88,64	90,67	92,71	92,71



NO	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target						Kondisi Akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
7	Indeks Infrastruktur Kesehatan	Indeks	70,82	71,13	71,13	72,32	72,32	72,59	72,59	72,59
<b>B.1.5</b>	<b>Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat</b>									
8	Indeks Rasa Aman	Indeks	76,03	76,48	77,92	78,97	80,02	81,07	82,12	82,12
9	Indeks Resiko Bencana	Indeks	112,82	99,12	98,44	92,53	86,98	81,76	76,86	76,86
10	Indeks Toleransi	Indeks	77,62	77,64	78,68	80,22	81,76	83,30	84,84	84,84
<b>B.1.6</b>	<b>Urusan Sosial</b>									
11	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	Persen	94,41	93,78	94,00	94,60	94,70	94,80	95,00	95,00
<b>B.2</b>	<b>Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>									
<b>B.2.1</b>	<b>Urusan Tenaga Kerja</b>									
12	Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	Persen	89,03	89,17	89,61	89,91	90,24	90,56	90,86	90,86



NO	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target						Kondisi Akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>B.2.2</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>									
13	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,13	94,32	94,53	94,95	95,37	95,77	96,25	96,25
<b>B.2.3</b>	<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>									
14	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,51	51,52	51,53	51,54	51,55	51,56	51,57	51,57
15	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,13	85,14	85,15	85,16	85,17	85,18	85,19	85,19
15	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	27,09	27,10	27,11	27,12	27,13	27,14	27,15	27,15
<b>B.2.4</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>									
17	Persentase Desa Mandiri	Persen	0,62	10,25	12,42	13,98	15,53	17,08	18,63	18,63
<b>B.2.5</b>	<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>									
18	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	3,13	3,25	3,35	3,45	4,00	4,10	4,25	4,25



NO	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target						Kondisi Akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>B.2.6</b>	<b>Usuran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.</b>									
19	Persentase Koperasi Berkualitas	Persen	20,7	21,84	23,20	24,69	26,39	28,30	30,34	30,34
20	Persentase Usaha Mikro Mandiri	Persen	1,83	1,87	1,93	1,98	2,04	2,10	2,15	2,15
<b>B.2.7</b>	<b>Usuran Penanaman Modal</b>									
21	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	Persen	0,81	0,85	0,92	1,25	1,29	1,33	1,52	1,52
<b>B.2.8</b>	<b>Usuran Kebudayaan</b>									
22	Indeks Pelestarian Budaya	Indeks	60,23	60,32	60,55	63,58	66,76	70,09	73,60	73,60
<b>B.2.9</b>	<b>Usuran Pemerintahan</b>									
23	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	A- (SANGAT BAIK)	A- (SANGAT BAIK)	A- (SANGAT BAIK)	A- (SANGAT BAIK)	A- (SANGAT BAIK)	A- (SANGAT BAIK)	A- (SANGAT BAIK)	A- (SANGAT BAIK)
24	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	BB	A	A	A	A	A	AA	AA
25	Opini Atas Laporan BPK	Kriteria	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Indeks	3,71	3,73	3,76	3,81	3,85	3,91	3,95	3,95



NO	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target						Kondisi Akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	Status Kinerja LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
28	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi
<b>B,3</b>	<b>Layanan Urusan Pilihan</b>									
<b>B.3.1</b>	<b>Urusan Pertanian</b>									
29	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	Persen	2,75	2,55	2,77	2,82	2,95	3,11	3,25	3,25
<b>B.3.2</b>	<b>Urusan Perdagangan</b>									
30	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Persen	16,02	16,09	16,17	16,22	16,24	16,33	16,75	16,75
<b>B.3.3</b>	<b>Urusan Industri</b>									
31	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	Persen	51,17	51,73	52,29	52,81	53,19	53,45	54,21	54,21
<b>C</b>	<b>Aspek Daya Saing Daerah</b>									
32	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif





NO	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target						Kondisi Akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
33	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	Persen	0,81	0,85	0,92	1,25	1,29	1,33	1,52	1,52
34	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	0,742	0,748	0,754	0,760	0,766	0,772	0,777	0,777
35	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	A- (Sangat Baik)	A- (Sangat Baik)	A- (Sangat Baik)	A- (Sangat Baik)	A- (Sangat Baik)	A- (Sangat Baik)	A- (Sangat Baik)	A- (Sangat Baik)

Keterangan :

- Beberapa Indikator ditampilkan dua kali untuk mendukung Aspek Daya Saing Daerah



# Bab IX

## Penutup

### 9.1. Pedoman Transisi

Sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD ini berakhir, maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1. Permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD ini, maka permasalahan pembangunan tersebut juga menjadi bagian dari RPJMD periode selanjutnya, agar dapat ditanggulangi dengan program-program pada periode selanjutnya.
2. Penyusunan RKPD masa transisi yang merupakan tahun pertama RPJMD periode selanjutnya berfungsi untuk menjembatani agar arah kebijakan pembangunan berjalan berkelanjutan.

### 9.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah (PD) atau unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya. Setiap PD



- berkewajiban untuk menyusun Renstra-PD yang menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman pada RPJMD ini.
2. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya, disusun melalui RKPD Kabupaten Sidoarjo yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam hal pelaksanaan RPJMD ini terjadi perubahan capaian sasaran tahunan, yang disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran pada akhir periode pembangunan jangka menengah, perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
  3. Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dimaksud, seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
  4. Apabila terjadi perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, maka penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah beserta peraturan peraturannya.
  5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, Bappeda Kabupaten Sidoarjo berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2021-2026, ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD), di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
  6. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Kabupaten Sidoarjo merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan tetap mengacu pada target dan arah kebijakan tahunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD;



7. Indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah, akan menjadi acuan bagi PD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dalam menjabarkannya menjadi indikator kinerja eselon dan jabatan fungsional, secara berjenjang.

Demikian Aturan Peralihan dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 sebagai acuan pelaksanaan. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sidoarjo, Agustus 2021  
BUPATI SIDOARJO

ttd

**AHMAD MUHDLOR**



**SAYANG**

Sidoarjo Yang Gemilang

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2021**

Alamat : Jl. Sultan Agung No.13 Sidoarjo

No. Telp : +6231 8941202

Fax : +6231 8956819

Website : [www.bappeda.sidoarjokab.go.id](http://www.bappeda.sidoarjokab.go.id)

Email : [bappeda@sidoarjokab.go.id](mailto:bappeda@sidoarjokab.go.id)